REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

NAMA : ENJU JUANDA

NIM : 10301900025

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang



PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG
TAHUN 2022

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PROMOTOR,

CO.PROMOTOR,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
NIDN. 2014075901

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., C.N., M.H.
NIDN. 0617026801

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasin orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan

Enju Juanda, Sh.,MH
NIM. 10301900025

MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
(QS. 5 : 8)

Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah" Maka jadilah sesuatu itu.
(QS. 36 : 82)

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.
(QS. 65 : 2)

dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
(QS. 65 : 3)

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
(QS. 94 : 5)

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
(QS. 94 : 6)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan untuk sebagai berikut :

1. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Almarhum Bapak H. Adma dan Almarhumah Ibu Hj. Onah serta Almarhum Bapak H. Engkos Kosasih dan Almarhumah Ibu Hj. Isah.
3. Isteri tercinta Hj. Taty -Adhe‖ Susilawaty, S.H., dan anak-anaku Widiana Nur Annisa dan Iqbal Alfiansyah.
4. Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis.
5. Universitas Galuh.
6. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Galuh.
7. Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNNISULA) Semarang.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum penah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing / Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah / Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang

Yang membuat pernyataan,

ENJU JUANDA
NIM. 10301900025

ABSTRAK

Bahwasannya gugatan Penggugat harus jelas, lengkap dan sempurna baik subjek, objek, posita maupun petitumnya, karena gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur dan gugatan kabur dapat dieksepsi oleh tergugat, apabila eksepsi gugatan kabur diterima dan dibenarkan oleh hakim, maka gugatan tersebut akan diputuskan oleh hakim gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ((*niet onvankelijk verklaard*). Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya adalah untuk menemukan dan menganalisa putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berbasis nilai keadilan, untuk menemukan dan menganalisa kelemahan-kelemahan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata yang berlaku sekarang ini dan untuk merekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata dengan berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, metode pendekatannya adalah yuridis sosiologis (*sosiological reasearch*), spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teori Keadilan Bermartabat, Teori Sistem Hukum, dan Teori Hukum Progresif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berbasis nilai keadilan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR menentukan bahwa eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena ketentuannya demikian, maka pada praktek peradilan perdata putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim setelah diselesaikan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan amar putusannya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan demikian putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini tidak berlandaskan atas asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada gilirannya peradilan perdata belum berbasis keadilan. Kelemahannya meliputi kelemahan substansi hukum (*legal substance*) adalah kelemahan ketentuan Pasal 136 HIR. Kelemahan Kultur Hukum (*Legal Culture*) adalah positivisme masih menjadi *mainstream* hakim, Majelis Hakim tidak sejak awal membaca dan mempelajari perkara secara bersama-sama, Ketua Majelis Hakim sebagai hakim senior masih menentukan dalam mengambil keputusan, Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*) meliputi tahap penerimaan, setelah jadi, dan berkarir menjadi hakim, pengawasan hakim dan struktur di luar pengadilan. Rekonstruksi Nilainya adalah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Rekonstruksi Normanya adalah eksepsi atas gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Temuan barunya adalah berupa gagasan baru peradilan perdata berkeadilan dan bermartabat.

Kata Kunci : Gugatan, Ekseps Gugatan Kabur, Putusan Hakim, Keadilan Bermartabat.

ABSTRACT

Whereas the Plaintiff's lawsuit must be clear, complete and perfect in terms of subject, object, posita and petitum, because a claim that is unclear, incomplete and imperfect can qualify as a vague lawsuit and a blurred lawsuit can be dismissed by the defendant, if the exception of a vague lawsuit is accepted and justified by judge, then the lawsuit will be decided by the judge, the lawsuit is declared unacceptable ((niet onvankelijk verklaard). As for the research objective, it is to find and analyze the judge's decision on the exception of escape lawsuits in civil courts that are not based on the value of justice, to find and analyze weaknesses -weaknesses in the judge's decision on the exception of vague appeals in the civil court that is currently in effect and to reconstruct the judge's decision on the exception of vague appeals in a civil court based on the value of justice.

This study uses the constructivism paradigm, the approach method is sociological juridical (sociological research), the research specifications are descriptive analytical, the data used are primary data and secondary data, primary data obtained by interview while secondary data obtained by means of library research, data analyzed qualitatively by using the Dignified Justice Theory, Legal System Theory, and Progressive Legal Theory.

The results of the study show that the judge's decision on the exception of an escape lawsuit in civil court is not based on the value of justice, because based on the provisions of Article 136 HIR it stipulates that the exception (objection) that the person being sued wants to put forward, except for the matter of the judge not having power, may not be put forward and weighed individually, but must be discussed and decided together with the examination of the main case. Because of this provision, in civil justice practice the judge's decision on the exception of the escape lawsuit is considered and decided by the judge after completing the examination of the main case with the ruling that the lawsuit is declared unacceptable (niet onvankelijk verklaard). now it is not based on the principle of simple, fast and low cost which in turn civil justice is not based on justice. Weaknesses include weaknesses in legal substance, namely weaknesses in the provisions of Article 136 HIR. Weaknesses in the Legal Culture are that positivism is still the mainstream of judges, the Panel of Judges does not read and study cases together from the start, the Chairperson of the Panel of Judges as a senior judge is still decisive in making decisions, Weaknesses in the Legal Structure include the acceptance stage , after becoming, and career as a judge, supervision of judges and structures outside the court. The Value Reconstruction is based on Pancasila values, the Normal Reconstruction is the judge's decision on the exception of the fuzzy lawsuit being considered and decided before examining the main case. His new finding is in the form of a new idea of a just and dignified civil court.

Keywords : Lawsuit, Exception of Escape Lawsuit, Judge's Decision, Dignified Justice.

RINGKASAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, manusia ditakdirkan oleh Allah SWT ke muka bumi ini, selain diamanati sebagai khalifah (khalifah fi al-ardl), karena didasari sebagai mahluk soial. Ia tidak bisa hidup sendiri, sejak ia lahir, tumbuh, dan berkembang dewasa, dan sampai saatnya matipun, membutuhkan bantuan orang lain, tidak ada manusia normal yang bisa dan mampu hidup menyendiri secara terus menerus. Oleh karena itu agar hubungan sosial berjalan dengan baik, maka perlu diatur. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama, kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia.

Manusia itu selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup (*man is a social being*) dan selalu berorganisasi (*is a political being*). Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat, di dalam suatu pola hidup tertentu, manusia mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, hidup manusia itu dipengaruhi dan terikat oleh keadaan lingkungan yang biasanya disebut hidup bermasyarakat, sepanjang yang kita pelajari sampai saat ini dapat diketahui bahwa manusia untuk mempertahankan hidupnya memerlukan pergaulan satu sama lainnya. Di dalam masyarakat orang saling mengadakan hubungan yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya, hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak, hubungan hukum antara pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling ditukarkan oleh para pihak. Untuk memenuhi kebutuhan para pihak adakalanya terjadi berhadap-hadapan dan dalam kedudukan berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perjalanan aktifitas kehidupan sehari-hari dapat terjadi dalam memenuhi kebutuhannya menimbulkan suatu sengketa adalah sesuatu hal yang sudah menjadi bagian kehidupan manusia sejak dahulu kala.

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai baik itu berupa uang maupun benda. Agar terjadi ketertiban dalam masyarakat, maka terhadap sengketa yang terjadi khususnya sengketa keperdataan yang terjadi antara para pihak perlu untuk diselesaikan atau ada penyelesaian. Yang dimaksud dengan penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau menuntaskan, mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.

Sudikno Mertokusumo mengatakan pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lainnya tidak dapat melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari

pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian, oleh karena itu tindakan menghakimi ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita, sehingga pelaksanaan hak yang dipersengketakan tersebut harus setelah mendapatkan putusan badan peradilan merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan. Oleh karena penyelesaian perselisihan sengketa keperdataan melalui badan peradilan merupakan upaya terakhir apabila melalui musyawarah perdamaian tidak berhasil, maka putusan hakim yang memutuskan penyelesaian persengketaan di bidang hukum keperdataan dapat disebut sebagai hasil dari pada upaya kuratif. Dikatakan demikian, dalam hal setiap masalah yang dibawa ke Pengadilan untuk diselesaikan diibaratkan sebagai ‑keadaan sakit‖, berarti upaya penyelesaian masalah di Pengadilan itu dapat dianggap sebagai proses penyembuhan (kuratif). Oleh sebab itu putusan hakim/pengadilan dapat dikatakan sebagai hasil dari upaya kuratif tersebut tadi. Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan.

Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Suatu gugatan yang diajukan untuk diperiksa dan diadili dihadapan sidang pengadilan harus disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya. Misalnya alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan tergugat, serta objeknya (surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616K/Sip/1973.
2. Gugatan harus lengkap, baik mengenai objek, posita, dan petitumnya. Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitum. Tidak ada yang kececeran, misalnya kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956 Nomor : 195K/Sip/1955).
3. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan. Misalnya, untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk perkara ingkar janji harus ada petitum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan tergugat adalah sah, serta petitum yang menyatakan, bahwa tergugat telah

ingkar janji. Untuk perkara waris, harus ada petitum yang menyatakan bahwa barang sengketa adalah merupakan barang peninggalan pewaris yang belum dibagi (*boedel*). Konsekuensi yuridis terhadap gugatan yang tidak sempurna adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, Nomor : 565K/Sip/1973).

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktur (*contradictoir*), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat untuk membantah dalil-dalil Penggugat, dan sebaliknya Penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah atau jawab menjawab, baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*). Pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoir* dapat dilakukan melalui verstek atau tanpa bantahan, yaitu apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Pada dasarnya tergugat tidak wajib menjawab gugatan Penggugat, tetapi jika tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis dan secara lisan hendaknya disusun dengan baik supaya dapat menahan serangan Penggugat dapat berhasil. Bila perlu Tergugat dapat membalikan jawabannya dengan gugat balik. Dalam perkara perdata kalah menangnya pihak yang digugat tergantung juga pada kelihaian membela diri, bagaimana cara menjawab gugatan dengan baik.

Jawaban Tergugat dapat berupa jawaban yang langsung mengenai pokok perkara, baik dalam bentuk pengakuan atau bantahan terhadap pokok perkara atau jawaban dalam bentuk tangkisan atau eksepsi. Jawaban yang berupa eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosesuil gugatan tidak benar, atau eksepsi berdasarkan ketentuan materil (eksepsi dilatoir dan eksepsi peremtoir), misalnya Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*). Putusan hakim atas suatu gugatan dapat berupa gugatan dikabulkan artinya gugatan Penggugat dikabulkan oleh hakim karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga karenanya putusan gugatan dikabulkan adalah merupakan putusan terhadap pokok perkara dan putusan gugatan ditolak artinya gugatan Penggugat ditolak oleh hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga karenanya putusan gugatan ditolak merupakan putusan terhadap pokok perkara serta putusan gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima artinya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, sehingga karenanya putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima merupakan putusan diluar pokok perkara.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) : n.o. jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima bermaksud menolak gugatan di luar pokok

perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari Penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, tetapi di dalam praktek sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedang dalam hal penolakan tidak lagi terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk keduakalinya kepada hakim yang sama (*ne bis in idem*). Oleh karena putusan ‐tidak diterima‖ (n.o) itu dimaksudkan menolak gugatan di luar pokok perkara, yang berarti bahwa hakim belum memeriksa pokok perkara, sedangkan dalam putusan ‐menolak‖ hakim sudah memeriksa pokok perkara, maka logikanya dalam satu putusan tidak dimungkinkan berisi diktum ‐tidak diterima‖ dan sekaligus juga ‐menolak‖. Riduan Syahrani mengatakan bahwa putusan yang menyatakan gugatan, tidak dapat diterima dimaksudkan sebagai penolakan gugatan di luar pokok perkara, sedangkan putusan yang menyatakan gugatan ditolak merupakan putusan setelah mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Jadi, antara kedua macam putusan itu mempunyai perbedaan besar sekali dan konsekuensi yang berlainan. Terhadap putusan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), Penggugat masih dapat mengajukan gugatannya kembali ke Pengadilan Negeri, sedangkan terhadap putusan yang menyatakan gugatan ditolak (*onzegd*), Penggugat tidak dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri (*ne bis in idem*), tetapi hanya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Zainal Asikin memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Gugatan tidak dapat diterima atau NO (*niet onvankelijk verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak dapat diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini Penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Gugatan ini cenderung karena tidak memenui syarat formal.
- Gugatan ditolak adalah gugatan adalah gugatan tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini, Penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali gugatannya, gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat materil (pembuktian).

Menurut Setiawan menyatakan apabila kepada kita ditanyakan,apakah asas-asas Hukum Nasional di bidang Hukum Acara Perdata, maka - hemat saya- kita akan sepakat bahwa asas pertama dan terutama adalah asas kesederhanaan, dengan kata ‐sederhana‖ dimaksudkan suatu proses beracara yang tidak ‐*complicated*‖ tidak rumit. Salah satu contoh ketentuan beracara yang merupakan pencerminan dari asas kesederhanaan itu ialah ketentuan Pasal 9 dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan akhir dapat dimintakan banding hanya bersama-sama dengan putusan akhir. R. Subekti menyatakan bahwa hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa roda pengadilan dapat berjalan lancar, dengan perkataan lain agar penetapan oleh

pengadilan tentang bagaimanakah hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya itu dapat diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahwa penetapan tentang apakah yang hukum itu berjalan dengan adil, tidak berat sebelah, dan bahwa biaya yang diperlukan untuk memperoleh keputusan pengadilan itu beserta realisasinya, tidak terlampau memberatkan para pencari keadilan. Jalannya peradilan dalam menyelesaikan sengketa keperdataan tersebut terkenal dengan semboyan yang dalam hubungan itu seringkali dikemukakan yaitu supaya peradilan itu dilaksanakan dengan cepat, tepat dan murah atau menurut Sudikno Mertokusumo disebut sebagai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut Bambang Waluyo pada hakikatnya pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, sehingga tujuan peradilan dapat tercapai, hal itu juga sesuai dengan asas peradilan yaitu harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Asas atau prinsip peradilan yang cepat, tepat dan murah atau sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hukum positif Indonesia ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan ‐sederhana‖ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif, sedangkan ‐biaya ringan‖ adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pelaksanaan proses pemeriksaan persengketaan keperdataan harus dilaksanakan secara efisien dan efektif serta biaya ringan adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh Pengadilan hal itu sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Sudikno Mertokesumo yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayah arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Selanjutnya kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di

persidangan, sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan, sedangkan biaya ringan yaitu biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul rakyat, tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan, menurut Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri dan Linda Rahmainy bahwa sederhana mengacu pada ‖*complicated*‖ penyelesaian suatu perkara, perkataan cepat atau ‖dalam tenggang waktu yang pantas‖ mengacu pada ‖tempo‖, cepat atau lambatnya, penyelesaian suatu perkara; sedangkan perkataan ‖biaya ringan‖ mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan peradilan.

Putusan hakim atas eksepsi dijatuhkan oleh hakim dengan tidak mempertimbangkan dan memutuskan pokok perkara, putusan hakim di luar pokok perkara diktum putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam proses penyelesaian persengketaan perdata salah satu eksepsi yang dapat dilakukan oleh tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah eksepsi gugatan Penggugat telah disusun dengan tidak cermat dan tidak teliti, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, apabila eksepsi tergugat atas gugatan Penggugat kabur diterima dan dibenarkan oleh hakim, maka putusan hakim atas perkara perdata tersebut akan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur waktu penjatuhannya ditentukan Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, maka penjatuhan putusan hakim atas eksepsi selain eksepsi terhadap kompetensi atau kewenangan pengadilan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, oleh karena eksepsi gugatan kabur bukan merupakan eksepsi terhadap kompetensi pengadilan, maka putusannya harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, hal itu berarti putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan setelah melalui tahapan jawaban, repliek, dupliek, pembuktian baik pembuktian dari Penggugat maupun pembuktian dari tergugat, pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa, kesimpulan baik dari Penggugat maupun dari tergugat, hal tersebut berarti pemeriksaan terhadap pokok perkara telah selesai dilakukan, akan tetapi hasil dari pemeriksaan terhadap pokok perkara tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak diputuskan oleh hakim karena yang dipertimbangkan dan diputuskan adalah eksepsi atas gugatan kabur.

Oleh karena ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dalam penyelesaian proses peradilan perkara perdata sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam praktek banyak terjadi penyelesaian sengketa keperdataan dalam peradilan perdata yang didalamnya terdapat eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Suatu gugatan kabur atau tidak jelas dipandang cukup telah diketahui oleh hakim dengan hanya melakukan pemeriksaan terhadap redaksional yang termuat dalam gugatan yang bersangkutan, sehingga seharusnya hakim telah dapat menjatuhkan putusan terhadap eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan tidak harus dipertimbangkan dan dijatuhkan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dalam suatu perkara perdata terdapat eksepsi gugatan kabur menjadi tidak ada manfaatnya dalam proses peradilan perdata dan bahkan mengakibatkan peradilan tidak dapat berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada gilirannya tidak dapat mewujudkan proses peradilan perdata dengan berbasis nilai keadilan.

Agar penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dapat mewujudkan peradilan perdata berbasis nilai keadilan, maka kiranya diperlukan pembaharuan atau rekonstruksi terhadap ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur tidak dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam proses peradilan perdata.

Sebagai ikhtiar agar ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dalam peradilan perdata berlandaskan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada gilirannya untuk mewujudkan peradilan perdata dapat mencerminkan keadilan, maka dipandang penting untuk melakukan penelitian dengan judul Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Eksepsi Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata Berbasis Nilai Keadilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perumusan permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apakah kelemahan-kelemahan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata yang berlaku sekarang ini ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata dengan berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menemukan dan menganalisa putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berbasis nilai keadilan, 2. Untuk menemukan dan menganalisa kelemahan-kelemahan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini dan 3. Untuk merekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata dengan berbasis nilai keadilan.

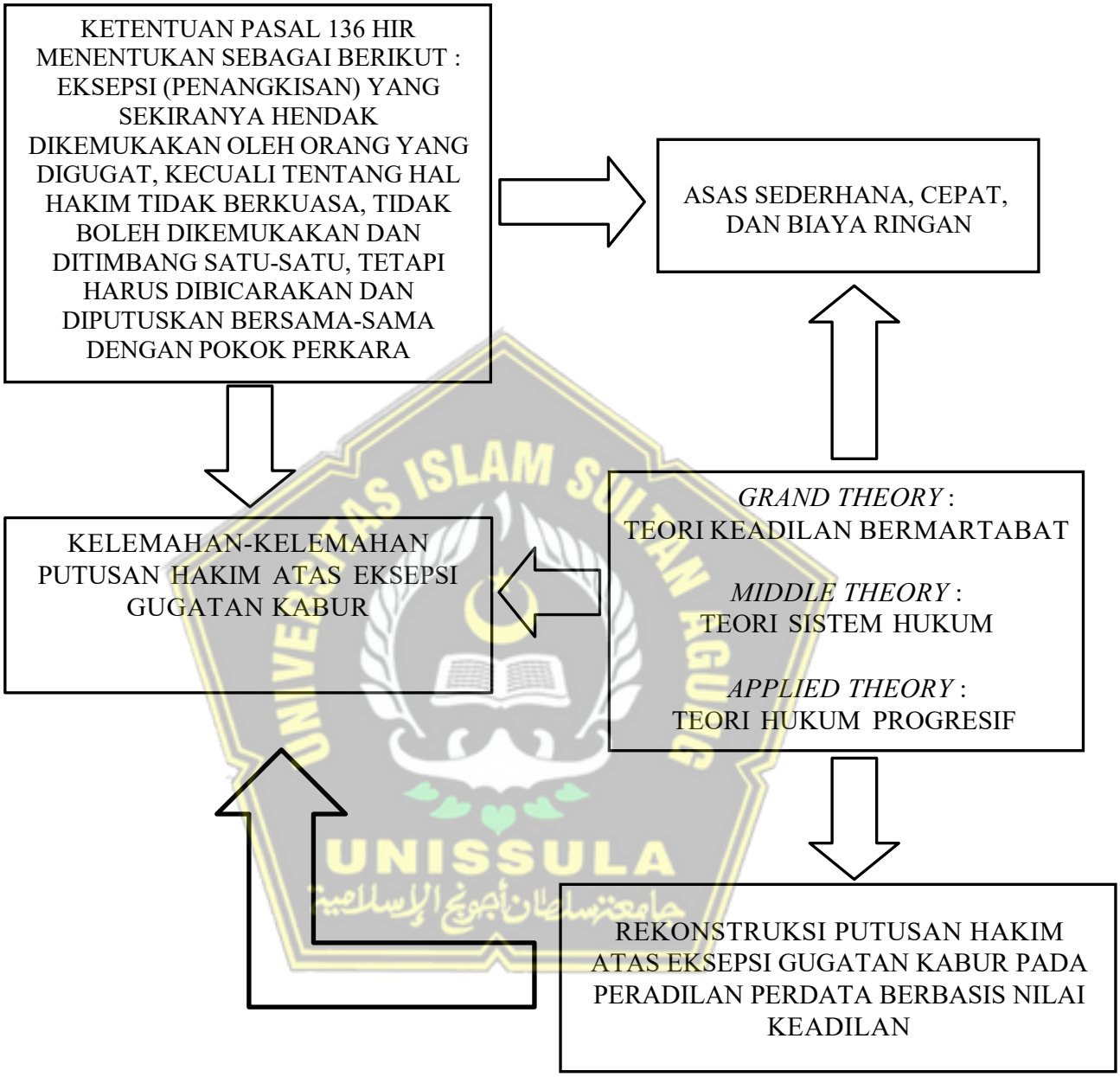
D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis adalah sebagai berikut : a. Diharapkan dapat berkontribusi dan berdampak positip untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan khususnya pada perkembangan Hukum Acara Perdata terutama untuk dapat memperkaya khasanah kajian terhadap pemikiran mengenai rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada proses peradilan perdata berbasis nilai keadilan, b. Diharapkan dapat menemukan atau membangun teori baru atau setidaknya melaksanakan teori yang telah diimplementasikan dalam Hukum Acara Perdata khususnya untuk ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur harus dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara. 2. Secara Praktis. Sedangkan yang menjadi kegunaan praktis adalah sebagai berikut : a. Diharapkan memberikan gagasan berupa teori baru mengenai ketentuan waktu penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan, b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang agar dalam melakukan pembaharuan Undang-undang Hukum Acara Perdata peninggalan kolonial Belanda menjadi Hukum Acara Perdata produk nasional harus mencerminkan nilai keadilan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

E. Kerangka Disertasi

Kerangka disertasi ini meliputi kerangka konseptual yaitu konsepsi-konsepsi atas susunan dari definisi-definisi 1. rekonstruksi, 2. putusan hakim, 3. pengertian eksepsi, 4. gugatan kabur, 5. peradilan perdata, 6. nilai keadilan dilanjutkan dengan Kerangka Teori yaitu kerangka untuk mencapai tujuan dari teori itu sendiri yaitu memecahkan masalah dan membentuk sistem oleh karenanya dalam penelitian ini digunakan teori Teori Keadilan Bermartabat Sebagai *Grand Theory* (Teori Utama), Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Range Theory* (Teori Menengah), Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory* (Teori Terapan). Berangkat dari kedua kerangka tersebut dirumuskan ke dalam kerangka pemikiran yaitu nalar berpikir peneliti atas ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berbasis nilai keadilan kemudian dilakukan rekonstruksi, sehingga menghadirkan konstruksi ideal terhadap ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan. Proses itu kemudian melahirkan temuan teori baru yaitu Teori Keadilan Bermartabat, sebagaimana terurai sebagai berikut :

RAGAAN KERANGKA PEMIKIRAN DISERTASI



F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian menurut R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto yang mengutip pendapat Erlyn Indarti memberikan penjelasan bahwa *Paradigma,* dalam bahasa Inggris *"paradigm",* dari bahasa Yunani *"para deigma",* dari *"para"* (di samping, di sebelah) dan *"dekynai"* (memperlihatkan; yang berarti; model contoh, arketipe, ideal). Menurut ***Oxfor English Dictionary***, "paradigm" atau paradigma adalah *"contoh atau pola".* Akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami

sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. *"Ordering belief frame work",* begitu dikatakan oleh Liek Wilardjo, ketika berbicara tentang paradigma, yaitu suatu kerangka keyakinan dan komitmen para Intelektual. Menurut Dedi Mulyadi perkembangan nomenklatur paradigma menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam bidang pendidikan. Menurut Suteki dan Galang Taufani menyebutkan terdapat empat paradigma utama yang secara umum diterima oleh kalangan akademisi mancanegara, keempat paradigma tersebut adalah *positivisme, post-positivisme, critical theory* dan *construtivism*, berdasarkan empat macam paradigma tersebut, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menurut M. Chairul Basrun Umanailo adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka. Menurut paradigma konstruktivisme, realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam karena manusia bertindak sebagai agen yang mengonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku di kalangan mereka sendiri. Kajian paradigma konstruktivisme ini menempatkan posisipeneliti setara dan sebisa mungkin masuk dengan subjeknya, dan berusaha memahami dan mengonstruksikan sesuatu yang menjadi pemahaman si subjek yang akan diteliti. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya. Lebih jauh, paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma

konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradigm konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L.Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta social dan defenisi social. Paradigma Konstruktivisme merupakan paradigma yang melakukan koreksi yang sejalan dengan pemikiran alternatif yang muncul sebagai reaksi atas pandangan positivisme yang memandang hukum bekerja secara mekanik, determinastik dan terpisah dari unsur-unsur di luar hukum sebagaimana diintrodusir oleh C. Langdell yang mengatakan hukum itu sama dengan ilmu eksakta sehingga para juris cukup bekerja di perpustakaan atau di jaman modern ini cukup dihadapan desk-top. Paradigma konstruktivisme memandang hukum termasuk dalam pengertian hukum dalam hal ini yaitu mediasi penal yang hendak mengoreksi hukum dalam paradigma HIR/RBg yaitu bersifat perdamaian, bersifat plural dan plastis. Dikatakan plural karena hukum diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sifat plastis hukum diartikan sebagai sifat dari ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, atau dalam istilah yang digunakan oleh peneliti yaitu sesuai dengan kemanfaatan manusia dalam masyarakat. Berdasarkan teori hukum empiris dengan memakai cara pandang paradigma konstruktivisme ini hukum dalam penelitian ini dipandang sebagai bagian dari fenomena sosial. Ada hubungan fungsional antara hukum dengan masyarakat. Hasil akhir dan penerapan hukum dalam mempengaruhi masyarakat menjadi perhatian. Oleh karena itu perlu pertimbangan pada aspek sosial lain, baik ekonomi, sosial maupun filosofis dalam hukum.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada perumusan masalah dan paradigma penelitian yang digunakan, maka jenis penelitian dalam disertasi ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yang menurut Sumadi Suryabrata adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Sedangkan langkah deskriptif mengandung maksud bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Deskriptif analisis dalam penelitian ini dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, karena penelitian ini bertujuan menggambarkan dan mengkritisi terhadap ketentuan waktu penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas belum mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada peradilan perdata dan belum berbasis nilai keadilan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*sosiolegal reasearch*) yang artinya dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dihubungkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosiological reasearch*) ini penulis akan mengkaji rekonstruksi penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dan atau tidak jelas untuk mewujdkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada peradilan perdata dengan berbasis keadilan.

4. Jenis dan Sumber Data

Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto data yang diperoleh dari masyarakat disebut data primer atau data dasar (primary data atau basic data). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat, sedangkan menurut **S. Nasution** data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan kata-kata dan tindakan merupakan sumber utama data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancara.

Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah yaitu sebagai berikut :

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang meliputi :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Het Herziene Indonesiche Reglemen (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui) Staatblaad Tahun 1949 Nomor : 44)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Pengadilan Negeri Ciamis dengan register perkara Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Cms

- Putusan Pengadilan Agama Ciamis dengan register perkara Nomor : 796/Pdt.G/2018/PA.Cms.

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga bahan hukum sekundernya adalah yang meliputi buku-buku literatur dari berbagai ahli yang relevan dengan objek yang diteliti dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Bahan Hukum Tersier meliputi Kamus, Ensiklopedia, Jurnal-jurnal Ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan-bahan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan : Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*) untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk mendapatkan data primer, metode wawancara ini digunakan karena menurut Bambang Waluyo dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.

6. Metode Analisa Data

Penelitian kualitatif menurut Jane Richi adalah upaya untuk menjadikan dunia sosial dan prefektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti atau penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Zainudin Ali menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

7. Hasil Penelitian

1. Bahwasannya putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berbasis nilai keadilan, hal itu disebabkan karena seharusnya proses peradilan perdata dilaksanakan secara cepat, tepat dan murah atau peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Proses peradilan perdata seharusnya bersifat sederhana, tidak rumit, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif, acaranya yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik, sebaliknya terlalu banyak formalitas yang diwajibkan merupakan hambatan bagi jalannya peradilan cepat dan tepat sehingga putusan pengadilan dapat diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Murah atau biaya

ringan adalah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul rakyat tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini ditentukan dalam ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Oleh karena ketentuan putusan hakim atas eksepsi selain eksepsi kompetensi pengadilan ketentuannya sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, maka karena eksepsi gugatan kabur tidak termasuk kualifikasi eksepsi kompetensi pengadilan, maka putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim setelah dilakukan jawaban, repliek, dupliek, pembuktian baik pembuktian dari Penggugat, maupun pembuktian dari tergugat, kesimpulan baik dari Penggugat maupun dari tergugat. Oleh karena penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka putusannya harus mengikuti formalitas-formalitas dalam proses jawab menjawab, para pihak harus mengajukan pembuktian untuk pokok perkara, akan tetapi peristiwa hukum yang disampaikan dalam jawab menjawab tidak dikonstatir, alat bukti yang diajukan para pihak tidak dipertimbangkan untuk memutuskan pokok perkara, karena yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim adalah eksepsi terhadap gugatan kabur dengan putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pembuktian dari para pihak menjadi tidak ada manfaatnya, para pihak harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk pemeriksaan terhadap pokok perkara, waktunya menjadi lambat, berlarut-larut, dan berbelit-belit sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada gilirannya belum mewujudkan nilai keadilan dalam proses peradilan perdata.

2. Bahwasannya kelemahan-kelemahan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini berdasarkan sistem hukum yaitu sebagai berikut :
   a. Kelemahan Substansi Hukum (*legal substance*)

      Ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini adalah karena ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama

dengan pokok perkara. Berdasarkan ketentuan tersebut putusan hakim atas eksepsi selain eksepsi terhadap kompetensi pengadilan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Substansi Pasal 136 HIR tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perasaan hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada prinsipnya hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata dalam menjatuhkan putusannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dan penentuan hukum oleh hakim atas suatu peristiwa hukum yang dihadapinya dengan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan hal yang baik untuk menjamin kepastian hukum, akan tetapi selain kepastian hukum yang diperhatikan oleh hakim, unsur keadilan dan kemanfaatan juga merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara perdata yang dihadapinya.

b. Kelemahan Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kelemahan kultur hukum putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini adalah sebagai berikut :

1. bahwa legal positivisme masih menjadi faham mainstream di kalangan hakim dalam menangani perkara. Paradigma ini melahirkan cara berpikir yang bercorak positivistik di kalangan hakim dalam menangani perkara. Pada umumnya hakim masih mengikuti cara berpikir legal positivisme dan jarang sekali ditemukan hakim yang berani menerobos (*rule breaking*) mengikuti cara berpikir non positivistik yaitu menjadikan undang-undang sebagai acuan dan sumber satu-satunya yang dianggap absah dalam menangani perkara. Hakim kurang untuk melakukan penemuan hukum dan cenderung memposisikan sebagai corong undang-undang yang menyuarakan undang-undang. Aturan hukum ditempatkan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan kurang memperhatikan dimensi-dimensi lain di luar aturan.
2. Senioritas dan kedudukan Ketua Majelis Hakim bersifat menentukan dalam mengambil putusan.
3. Majelis Hakim tidak sejak awal membaca dan mempelajari perkara secara bersama-sama, karena ketua Majelis hanya memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota untuk mempelajari berkas perkara.

4. Perasaan ewuh pakewuh terhadap atasan menjadikan hakim tidak berani mengambil sikap sendiri dalam mengambil putusan, semuanya diserahkan kepada atasan, sikap ini merupakan bagian dari budaya paternalistik yang ternyata masih menjadi bagian kehidupan beberapa hakim.
5. Beban perkara yang harus diperiksa dan diadili banyak, maka yang meneliti terhadap berkas perkara hanya ketua majelis hakim perkara yang bersangkutan sehingga anggota yang lain hanya menyetujuinya.

c. Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*),

Kelemahan struktur hukum (*legal structure*) putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata yang berlaku sekarang ini adalah sebagai berikut :

1) Kelemahan hakim sebagai penegak hukum dalam Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung, yang meliputi kelemahan tahap penerimaan calon hakim, kekuasaan tahap setelah menjadi hakim, kelemahan tahap selama berkarier menjadi hakim.
2) Kelemahan pengawasan hakim.
3) Kelemahan struktur di luar pengadilan.

3. Rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada proses peradilan perdata berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur tidak dijatuhkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara melainkan putusannya dijatuhkan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan putusan sela yang putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Rekonstruksi nilai dalam ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Pada pasal tersebut mewajibkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang dalam perkara yang bersangkutan terdapat eksepsi selain eksepsi kompetensi pengadilan termasuk dalam hal ini eksepsi gugatan kabur atau penjatuhan putusannya setelah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya. Penjatuhan putusan hakim pada prinsipnya harus memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur waktu yang pantasnya adalah dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Tabel
Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Eksepsi Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata Berbasis Nilai Keadilan

No	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
1	Ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan sebagai berikut : eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara	- Kelemahan Substansi Hukum (*legal substance*) Ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini adalah karena ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Berdasarkan ketentuan tersebut putusan hakim atas eksepsi selain eksepsi terhadap kompetensi pengadilan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Substansi Pasal 136 HIR tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan	Semua eksepsi yang diajukan Tergugat harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara kecuali eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan dan eksepsi gugatan kabur.

		perasaan hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada prinsipnya hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata dalam menjatuhkan putusannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dan penentuan hukum oleh hakim atas suatu peristiwa hukum yang dihadapinya dengan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan hal yang baik untuk menjamin kepastian hukum, akan tetapi selain kepastian hukum yang diperhatikan oleh hakim, unsur keadilan dan kemanfaatan juga merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara perdata yang dihadapinya. - Kelemahan Kultur	

		Hukum (*Legal Culture*) Kelemahan kultur hukum putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini adalah bahwa legal positivisme masih menjadi faham mainstream di kalangan hakim dalam menangani perkara. Paradigma ini melahirkan cara berpikir yang bercorak positivistik di kalangan hakim dalam menangani perkara. Pada umumnya hakim masih mengikuti cara berpikir legal positivisme dan jarang sekali ditemukan hakim yang berani menerobos (*rule breaking*) mengikuti cara berpikir non positivistik yaitu menjadikan undang-undang sebagai acuan dan sumber satu-satunya yang dianggap absah dalam menangani perkara. Hakim kurang untuk melakukan penemuan hukum dan cenderung memposisikan sebagai corong undang-undang yang menyuarakan	

		undang-undang. Aturan hukum ditempatkan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan kurang memperhatikan dimensi-dimensi lain di luar aturan, Senioritas dan kedudukan Ketua Majelis Hakim bersifat menentukan dalam mengambil putusan, Majelis Hakim tidak sejak awal membaca dan mempelajari perkara secara bersama-sama, karena ketua Majelis hanya memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota untuk mempelajari berkas perkara, Perasaan ewuh pakewuh terhadap atasan menjadikan hakim tidak berani mengambil sikap sendiri dalam mengambil putusan, semuanya diserahkan kepada atasan, sikap ini merupakan bagian dari budaya paternalistik yang ternyata masih menjadi bagian kehidupan beberapa hakim, Beban perkara yang harus diperiksa dan diadili banyak, maka yang meneliti terhadap berkas perkara hanya ketua	

		majelis hakim perkara yang bersangkutan sehingga anggota yang lain hanya menyetujuinya. - Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*), Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*) putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata yang berlaku sekarang ini adalah Kelemahan hakim sebagai penegak hukum dalam Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung, yang meliputi kelemahan tahap penerimaan calon hakim, kekuasaan tahap setelah menjadi hakim, kelemahan tahap selama berkarier menjadi hakim, Kelemahan pengawasan hakim, Kelemahan struktur di luar pengadilan.	

Saran-saran

1. Diharapkan kepada pembentuk Undang-undang dalam hal ini Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat melakukan pembaharuan terhadap ketentuan penjatuhan putusan atas eksepsi gugatan kabur tidak dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, melainkan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara melalui putusan sela.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain dan akan mengajukan gugatan agar dalam menyusun gugatannya dilakukan secara cermat dan teliti sehingga gugatannya tidak kabur, karena apabila gugatan kabur dapat dieksepsi oleh pihak tergugat.

Implikasi Kajian Disertasi

1. Impilikasi Teoritis
   a. Bahwasannya secara teoritis hasil dari penelitian ini yang merupakan penemuan baru mengenai rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan dapat menjadi bahan referensi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang berupa perkuliahan, diskusi dan seminar yang dilaksanakan pada forum-forum akademik.
   b. Bahwasannya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai putusan hakim pada umumnya, khususnya putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan.
2. Implikasi Praktis
   a. Bahwasannya diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran bagi para pemangku kepentingan terutama pembentuk undang-undang agar dalam melakukan pembaharuan terhadap hukum acara perdata peninggalan kolonial Belanda dalam hal ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan sebagai hukum acara perdata produk hukum nasional.
   b. Bahwasannya hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber dalam melakukan penemuan hukum dalam melaksanakan tugas kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perdata dapat menjatuhkan putusan eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan.
   c. Bahwasannya hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pemikiran agar dalam meneirma, memeriksa dan mengadili perkara perdata dapat menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
   d. Bahwasannya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara perdata dalam hal ini Penggugat, Tergugat merekam akan mendapatkan putusan hakim yang tepat sesuai dengan seharusnya putusan hakim tersebut dijatuhkan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahirrobbil'alamin segala puji hanya milik – Mu Ya Allah Ya Rabb, semua kekuatan tiada ada yang memilikinya melainkan hanya milik – Mu dan atas kekuatan yang dilimpahkan kepada penulis dari – Mu ya Allah, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan mengetengahkan judul sebagai berikut :

REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PENGADILAN PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN.

Penulisan disertasi ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) S-3 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulisan disertasi ini tidak mungkin dapat diselesaikan apabila tidak ada kesempatan, sarana dan prasarana yang disediakan oleh berbagai pihak baik secara struktural maupun secara kultural, baik secara informal maupun secara formal, baik dalam bentuk materil maupun imateril, oleh sebab itu sudah selayaknya penulis menyampaikan penghargaan yang paling tinggi dengan menghaturkan ucapan terimakasih yang tidak terhingga antara lain kepada pihak – pihak sebagai berikut :

1. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta seluruh jajarannya yang telah mengelola Universitas tersebut, sehingga situasi dan kondisi Unversitas dalam keadaan yang sangat baik yang pada gilirannya membuka kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dengan suasana yang sangat baik dan nyaman.
2. Yang terhormat dan amat terpelajar Dr. H. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat baik kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) S- 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan paling baik kepada penulis selalu memperhatikan perkembangan penyelesaian penulisan disertasi, sehingga penulis dapat menjalankan kegiatan menuntut ilmu dengan baik dan lancar;
4. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Dokter Ilmu (PDIH) S-3 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan paling baik berupa informasi, motivasi dan arahan kepada penulis dalam menempuh penididkan tersebut, sehingga penulis dapat mengikuti studi ini dengan baik dan lancar;

5. Yang amat terpelajar dan yang terhormat Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., sebagai Dosen Penyusunan Proposal Disertasi pada waktu penulis mengikuti pendidikan Program Doktor ini dan tidak disangka takdir Allah SWT menetapkan beliau yang terpelajar dan terhormat kemudian menjadi Promotor penulis dalam penulisan disertasi ini. Peran beliau sangat luar biasa dalam membimbing penulis dengan motivasi, arahan dan perhatiannya untuk mengingatkan penulis segera dan tidak menunda-nunda penyelesaian disertasi ini, untuk itu Pak. Prof. terimakasih atas semuanya Insya Allah akan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih dari yang telah Pak Prof. berikan kepada penulis;
6. Yang amat terpelajar dan yang terhormat Assosiate Profesor Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., C.N., M.H., selaku Co. Promotor yang selalu sigap dan responsip dalam melakukan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan pelayanan paling baik dari beliau yang akhirnya disertasi ini dapat terselesaikan. Peran beliau sangat penting dan tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apapun, kecuali dengan balasan dari Allah SWT, terimakasih Pak Kyai atas segalanya;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) S-3 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah mentransfer ilmu hukum yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis mendapat pencerahan yang baik, juga tenaga kependidikan/administrasi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang mereka memberikan pelayanan paling

baik, sehingga informasi dan segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran penulis dalam mengikuti pendidikan ini penulis dapatkan, terimakasih untuk semuanya, penulis yakin semuanya akan mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT Amin Ya Rabal‘alamin.

Penulis dapat mengikuti pendidikan dan menyelesaikan disertasi ini tentu saja merupakan jasa kedua orang tua penulis yaitu Bapak H. Adma (almarhum) dan Ibu Hj. Onah (almarhumah) yang telah ikhlas dalam mengurus dan membimbing penulis, sehingga penulis berada pada posisi sekarang ini, penulis yakin semua kebaikan keduanya akan mendapatkan balasan yang paling baik dari Allah SWT. Amin Ya Robbal‘alamin, demikian juga Bapak H. Engkos Kosasih (almarhum) dan Ibu Hj. Isah (almarhumah) mereka adalah orang tua mertua penulis yang telah mengikhlaskan dan mengijinkan penulis untuk menikahi anaknya untuk menjadi isteri Penulis semoga keduanya mendapat balasan yang paling baik dari Allah SWT.

Penulisan disertasi ini juga dapat terselesaikan atas do‘a dan motivasi dari seorang istri penulis yang telah merelakan diri untuk hidup bersama dengan penulis untuk itu untuk isteriku tercinta Hj. Taty -Adhel Susilawaty, S.H, terimakasih atas segalanya semoga mendapat ridho dari Allah SWT, demikian juga untuk kedua anaku Widiana Nur Annisa dan Iqbal Alfiansyah, mudah-mudahan karya disertasi ini menjadi inspirasi dan motivasi dalam menjalankan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan didunia dan akherat nanti.

Penyelesaian pendidikan ini, tidak lepas dari peran serta dan bantuan semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, tetapi Allah SWT pasti

mengetahuinya, terima kasih untuk semuanya semoga kebaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin ya robbal‘alamin. Penulis menyadari sepenuhnya disertasi ini masih sangat banyak kekurangannya sehingga karenanya jauh dari perkataan sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif akan penulis sambut dengan tangan terbuka dan kelapangan dada.

Akhirnya semoga disertasi ini membawa manfaat bagi penulis khususnya dan khalayak pembaca pada umumnya Amin Ya Rabal Alamin.

Semarang, Oktober 2022
Penulis,

Enju Juanda
NIM 10301900025

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan i

Halaman Motto ii

Halaman Persembahan iii

Halaman Pernyataan iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

RINGKASAN DISERTASI vii

KATA PENGANTAR xxix

DAFTAR ISI xxxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 13

D. Kegunaan Penelitian 13

E. Kerangka Konseptual 14

F. Kerangka Teori 42

1. Teori Keadilan Bermartabat Sebagai *Grand Theory* (Teori Utama) 45

2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Range Theory* (Teori Menengah) 55

3. Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory* (Teori Terapan)..... 59

G. Kerangka Pemikiran 70

H. Metode Penelitian 71

I. Orisinalitas/Keaslian Penelitian 81

J. Sistematika Penulisan 89

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Acara Perdata 93

B. Tinjauan Tuntutan Hak 126

C. Tinjauan Gugatan 133

D. Jawaban Tergugat Atas Gugatan Penggugat 146

E. Konsepsi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa 160

BAB III PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN 189

A. Putusan Hakim dan Tujuannya 189

B. Macam-macam Putusan Hakim 194

C. Praktek Putusan Hakim Atas Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata 250

D. Putusan Hakim Atas Eksepsi Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata Belum Berbasis Nilai Keadilan 301

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA 306

A. Kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substance*) 306

B. Kelemahan Kultur Hukum (*Legal Culture*) 323

C. Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*) 334

BAB V REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN .....
355

A. Sistem Hukum Pancasila Sebagai Prinsip Putusan Hakim Atas Eksepsi Gugatan Kabur 355

B. Perbandingan Putusan Hakim Atas Eksepsi Kompetensi Pengadilan 363

C. Perbandingan Putusan Hakim Atas Eksepsi Pada Peradilan Pidana 378

D. Perbandingan Putusan Hakim Atas Ekspesi Gugatan Kabur Dengan Negara Lain..... 394

E. Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata Berbasis Nilai Keadilan 396

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 416

B. Saran-saran..... 421

C. Implikasi Kajian Disertasi..... 421

DAFTAR PUSTAKA 423

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, manusia ditakdirkan oleh Allah SWT ke muka bumi ini, selain diamanati sebagai khalifah (khalifah fi al-ardl), karena didasari sebagai mahluk soial. Ia tidak bisa hidup sendiri, sejak ia lahir, tumbuh, dan berkembang dewasa, dan sampai saatnya matipun, membutuhkan bantuan orang lain, tidak ada manusia normal yang bisa dan mampu hidup menyendiri secara terus menerus. Oleh karena itu agar hubungan sosial berjalan dengan baik, maka perlu diatur[1]. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama,[2] kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia.[3] Manusia itu selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup (*man is a social being*) dan selalu berorganisasi (*is a political being*)[4]. Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 7.

[2] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 12.

[3] Eman Suparman, *Kerjasama Bidang Peradilan Antar Negara Dalam Rangka Upaya Penyeragaman Pranata Hukum Antar Bangsa*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012, hlm. 172.

[4] Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Bandung, 1993, hlm. 11.

bermasyarakat[5], di dalam suatu pola hidup tertentu, manusia mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi [6], hidup manusia itu dipengaruhi dan terikat oleh keadaan lingkungan yang biasanya disebut hidup bermasyarakat, sepanjang yang kita pelajari sampai saat ini dapat diketahui bahwa manusia untuk mempertahankan hidupnya memerlukan pergaulan satu sama lainnya[7]. Di dalam masyarakat orang saling mengadakan hubungan yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya [8] , hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak [9] , hubungan hukum antara pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling ditukarkan oleh para pihak[10]. Untuk memenuhi kebutuhan para pihak adakalanya terjadi berhadap-hadapan dan dalam kedudukan berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perjalanan aktifitas kehidupan sehari-hari dapat terjadi dalam memenuhi kebutuhannya menimbulkan suatu sengketa adalah sesuatu hal yang sudah menjadi bagian kehidupan manusia sejak dahulu kala [11] . Sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan

---

5 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hlm. 9

6 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 5.

7 Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 1

8 J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap*, *Diterjemahkan oleh Moch. O. Masduki menjadi Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 1.

9 Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 9

10 Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Divisi Penerbitan Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 20.

11 Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Kedua, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 3.

atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai baik itu berupa uang maupun benda [12] . Agar terjadi ketertiban dalam masyarakat, maka terhadap sengketa yang terjadi khususnya sengketa keperdataan yang terjadi antara para pihak perlu untuk diselesaikan atau ada penyelesaian. Yang dimaksud dengan penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau menuntaskan, mengatur sesuatu sehingga menjadi baik[13]. Sudikno Mertokusumo mengatakan pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lainnya tidak dapat melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian, oleh karena itu tindakan menghakimi ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita, sehingga pelaksanaan hak yang dipersengketakan tersebut harus setelah mendapatkan putusan badan peradilan merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan [14] . Oleh karena penyelesaian perselisihan sengketa keperdataan melalui badan peradilan merupakan upaya terakhir apabila melalui musyawarah perdamaian tidak berhasil, maka putusan hakim yang memutuskan penyelesaian persengketaan di bidang hukum keperdataan dapat disebut sebagai hasil dari pada upaya kuratif. Dikatakan demikian, dalam hal setiap masalah yang dibawa ke Pengadilan untuk diselesaikan diibaratkan

[12] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 137.
[13] *Ibid*, hlm. 135.
[14] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

sebagai ‐keadaan sakit‖, berarti upaya penyelesaian masalah di Pengadilan itu dapat dianggap sebagai proses penyembuhan (kuratif). Oleh sebab itu putusan hakim/pengadilan dapat dikatakan sebagai hasil dari upaya kuratif tersebut tadi [15] . Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan[16]. Suatu gugatan yang diajukan untuk diperiksa dan diadili dihadapan sidang pengadilan harus disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya. Misalnya alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan tergugat, serta objeknya (surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616K/Sip/1973.
2. Gugatan harus lengkap, baik mengenai objek, posita, dan petitumnya. Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitum. Tidak ada yang

[15] Eman Suparman, *Hukum Perselisihan (Conflictenrecht) Pertautan Sistem Hukum dan Konflik Kompetensi Dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi*, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, hlm. 87.

[16] Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 31.

kececeran, misalnya kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956 Nomor : 195K/Sip/1955).

3. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan. Misalnya, untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk perkara ingkar janji harus ada petitum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan tergugat adalah sah, serta petitum yang menyatakan, bahwa tergugat telah ingkar janji. Untuk perkara waris, harus ada petitum yang menyatakan bahwa barang sengketa adalah merupakan barang peninggalan pewaris yang belum dibagi (*boedel*). Konsekuensi yuridis terhadap gugatan yang tidak sempurna adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, Nomor : 565K/Sip/1973)[17].

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktur (*contradictoir*), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat untuk membantah dalil-dalil Penggugat, dan sebaliknya Penggugat

[17] Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, C.V. Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm. 71-72.

juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah atau jawab menjawab, baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*). Pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoir* dapat dilakukan melalui verstek atau tanpa bantahan, yaitu apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita[18].

Pada dasarnya tergugat tidak wajib menjawab gugatan Penggugat, tetapi jika tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis dan secara lisan hendaknya disusun dengan baik supaya dapat menahan serangan Penggugat dapat berhasil. Bila perlu Tergugat dapat membalikan jawabannya dengan gugat balik. Dalam perkara perdata kalah menangnya pihak yang digugat tergantung juga pada kelihaian membela diri, bagaimana cara menjawab gugatan dengan baik [19] . Jawaban Tergugat dapat berupa jawaban yang langsung mengenai pokok perkara, baik dalam bentuk pengakuan atau bantahan terhadap pokok perkara atau jawaban dalam bentuk tangkisan atau eksepsi[20]. Jawaban yang berupa eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosesuil gugatan tidak benar, atau eksepsi berdasarkan ketentuan materil (eksepsi dilatoir dan eksepsi peremtoir) [21] , misalnya Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)[22].

[18] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Pranadamedia Group, Divisi Kencana, Jakarta, 2018, hlm 20-21.
[19] Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Pranada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 50.
[20] *Ibid*.
[21] R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2018, hlm. 81.
[22] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 419.

Putusan hakim atas suatu gugatan dapat berupa gugatan dikabulkan artinya gugatan Penggugat dikabulkan oleh hakim karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan putusan gugatan ditolak artinya gugatan Penggugat ditolak oleh hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dengan demikian putusan gugatan dikabulkan dan gugatan ditolak merupakan putusan terhadap pokok perkara serta putusan gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima artinya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, sehingga dengan demikian putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) merupakan putusan diluar pokok perkara, dalam hal tersebut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) : n.o. jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari Penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, tetapi di dalam praktek sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedang dalam hal penolakan tidak lagi terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk keduakalinya kepada hakim yang sama (*ne bis in*

idem)[23]. Oleh karena putusan ‐tidak diterima‖ (n.o) itu dimaksudkan menolak gugatan di luar pokok perkara, yang berarti bahwa hakim belum memeriksa pokok perkara, sedangkan dalam putusan ‐menolak‖ hakim sudah memeriksa pokok perkara, maka logikanya dalam satu putusan tidak dimungkinkan berisi diktum ‐tidak diterima‖ dan sekaligus juga ‐menolak‖[24].

Riduan Syahrani menjelaskan bahwa putusan yang menyatakan gugatan, tidak dapat diterima dimaksudkan sebagai penolakan gugatan di luar pokok perkara, sedangkan putusan yang menyatakan gugatan ditolak merupakan putusan setelah mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Jadi, antara kedua macam putusan itu mempunyai perbedaan besar sekali dan konsekuensi yang berlainan. Terhadap putusan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), Penggugat masih dapat mengajukan gugatannya kembali ke Pengadilan Negeri, sedangkan terhadap putusan yang menyatakan gugatan ditolak (*onzegd*), Penggugat tidak dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri (*ne bis in idem*), tetapi hanya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi[25].

Terhadap putusan hakim yang menolak gugatan dan tidak menerima gugatan Zainal Asikin memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Gugatan tidak dapat diterima atau NO (*niet onvankelijk verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak dapat diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal

[23] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 115.
[24] Zainal Asikin, *Op.Cit*., hlm. 22.
[25] Riduan Syahrani, *Op.Cit*., hlm. 67.

ini Penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Gugatan ini cenderung karena tidak memenui syarat formal.

- Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini, Penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali gugatannya, gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat materil (pembuktian)[26].

Untuk mendapatkan putusan hakim dalam proses peradilan perdata yang baik menurut R. Subekti adalah yang menjamin bahwa roda pengadilan dapat berjalan lancar, dengan perkataan lain agar penetapan oleh pengadilan tentang bagaimanakah hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya itu dapat diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahwa penetapan tentang apakah yang hukum itu berjalan dengan adil, tidak berat sebelah dan bahwa biaya yang diperlukan untuk memperoleh keputusan pengadilan beserta realisasinya, tidak terlampaui memberatkan para pencari keadilan[27] .

Dalam proses penyelesaian persengketaan perdata salah satu eksepsi yang dapat dilakukan oleh tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah eksepsi gugatan telah disusun dengan tidak cermat dan tidak teliti, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, apabila eksepsi tergugat atas gugatan kabur diterima dan dibenarkan oleh hakim, maka putusan hakim atas perkara perdata tersebut akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau gugatan

[26] Zainal Asikin, *Op.Cit*., hlm. 22.
[27] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm. 8.

dinyatakan tidak dapat diterima, ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur waktu penjatuhannya ditentukan Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara[28].

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, maka penjatuhan putusan hakim atas eksepsi selain eksepsi terhadap kompetensi atau kewenangan pengadilan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, oleh karena eksepsi gugatan kabur bukan merupakan eksepsi terhadap kompetensi atau kewenangan pengadilan, maka harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, hal itu berarti putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan setelah melalui tahapan jawaban, repliek, dupliek, pembuktian baik pembuktian dari penggugat maupun pembuktian dari tergugat, pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa, kesimpulan baik dari penggugat maupun dari tergugat, hal tersebut berarti pemeriksaan terhadap pokok perkara telah selesai dilakukan, akan tetapi hasil dari pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan dan tidak diputuskan oleh hakim, karena yang dipertimbangkan dan diputuskan adalah eksepsi atas gugatan kabur.

Oleh karena ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dalam penyelesaian proses peradilan perkara perdata sebagaimana

[28] R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 129.

diuraikan di atas, maka dalam praktek banyak terjadi penyelesaian sengketa keperdataan dalam peradilan perdata yang didalamnya terdapat eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga karenanya pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dalam suatu perkara perdata terdapat eksepsi gugatan kabur menjadi tidak ada manfaatnya dalam proses peradilan perdata dan bahkan mengakibatkan peradilan tidak dapat berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada gilirannya tidak dapat mewujudkan proses peradilan perdata dengan berbasis nilai keadilan.

Suatu gugatan kabur atau tidak jelas dipandang cukup telah diketahui oleh hakim dengan hanya melakukan pemeriksaan terhadap redaksional yang termuat dalam gugatan yang bersangkutan, sehingga seharusnya hakim telah dapat menjatuhkan putusan terhadap eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan tidak harus dipertimbangkan dan dijatuhkan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Agar penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dapat mewujudkan peradilan perdata berbasis nilai keadilan, maka kiranya diperlukan pembaharuan atau rekonstruksi terhadap ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur ketentuannya harus dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada gilirannya putusan hakim

atas eksepsi gugatan kabur dapat mewujudkan proses peradilan perdata yang berkeadilan dan bermartabat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka kiranya penulis tertarik untuk mengetahui, memahami dan menganalisa ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dalam proses penyelesaian persengketaan dalam peradilan perdata yang berlaku sekarang ini, yang hasil penelitiannya dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk disertasi dengan mengetengahkan judul sebagai berikut :

REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan ke dalam perumusan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apakah kelemahan-kelemahan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata yang berlaku sekarang ini ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata dengan berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dilakukannya penelitian tersebut, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan dan menganalisa putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menemukan dan menganalisa kelemahan-kelemahan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini.
3. Untuk merekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata dengan berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kosntribusi terhadap perkembangan hukum, baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum (secara teoritis) maupun dalam pelaksanaan penerapan hukum terhadap persoalan yang dihadapi (secara praktis) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Adapun yang menjadi kegunaan secara teoritis adalah sebagai berikut :

   a. Diharapkan dapat berkontribusi dan berdampak positip untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan khususnya pada perkembangan Hukum Acara Perdata terutama untuk dapat memperkaya khasanah kajian terhadap pemikiran mengenai

rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada proses peradilan perdata berbasis nilai keadilan.

b. Diharapkan dapat menemukan atau membangun teori baru atau setidaknya dapat menemukan gagasan baru untuk ketentuan Hukum Acara Perdata pada masa yang akan datang khususnya untuk ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur harus dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara.

2. Secara Praktis

Sedangkan yang menjadi kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Diharapkan memberikan berupa teori baru atau setidaknya gagasan baru mengenai ketentuan pertimbangan dan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan.

b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang agar dalam melakukan pembaharuan Undang-undang Hukum Acara Perdata peninggalan kolonial Belanda menjadi Hukum Acara Perdata produk nasional harus mencerminkan nilai keadilan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sesuatu yang bersifat umum dan agar konsep yang bersifat umum tersebut dapat dipahami dan diterapkan dalam

pelaksanaannya, maka kerangka konsep tersebut harus diartikan dengan pengertian-pengertian operasional sebagai landasan kongkrit agar suatu penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, sehubungan dengan hal tersebut, maka pengertian-pengertian operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rekonstruksi

Istilah rekonstruksi yang dikenal dalam bahasa Indonesia adalah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu dari istilah *recontruct* yang berarti memulihkan sebagaimana semula dan *reconstruction* yang berarti pembangunan kembali [29] . Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula : akan dilaksanakan – dan pembangunan jalan baru di Jakarta, Bogor, Ciawi 2. Penyusunan (Penggambaran) kembali : dalam pemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan mengenai peristiwa terjadinya pembunuhan itu yang bersangkutan dengan rekonstruksi[30]. Menurut B.N. Marbun mengatakan dalam beberapa kamus politik, psikologi dan filsafat bahwa rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula. Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula [31] , James P. Chaplin mengatakan *Reconstruction* adalah merupakan penafsiran dan psikomalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah

[29] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, An English-Indonesian Dictionary, Gramedia, Cetakan ke-XXVI, Jakarta, 2005, hlm. 471.
[30] Perum Penertbitan dan Percetakan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta, 1995, hlm 829.
[31] B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 696.

terjadi beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan [32] , Ali Mudhofir menjelaskan rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal menurut aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru[33].

Rekonstruksi yang berarti mengembangkan atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula dan dalam melakukan rekonstruksi tersebut harus memperhatikan faktor-faktor utama yang harus dipertahankan dalam melaksanakan pembangunan kembali sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi semula. Dalam hal melakukan pembangunan kembali sesuatu, maka peristiwa, kejadian atau fenomena-fenomena masa lalu atau konsepsi-konsepsi pemikiran para pemikir yang terdahulu harus diperhatikan oleh yang melakukan rekonstruksi, sehingga dengan memperhatikan dari berbagai segi tersebut, maka sesuatu yang dibangun kembali akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga terhindar dari keinginan yang subjektif dari yang melakukan pembangunan kembali tersebut dan pada akhirnya hasil pembanguann kembali yang dilakukan tidak terlalu menyimpang dari keadaan semula. Menurut AnthonyGiddens menyatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens

[32] James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 421.
[33] Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 213.

bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analisis terpenting[34].

Hukum dapat difungsikan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan suatu masyarakat agar tetap dapat terjaga eksistensinya, selain itu hukum untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum dapat dijadikan instrumen untuk mengatur suatu masyarakat. Oleh karena itu supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sistem hukum nasional. Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan politik, lembaga-lembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum. Prinsip ini bemakna bahwa hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi unsur landasan tata tertib kehidupan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya oleh hukum dan tidak oleh manusia (*a government of law and not of man*). Prinsip supremasi hukum dapat diwujudkan salah satunya melalui adanya pilar penting berupa kekuasaan kehakiman dalam hal ini lembaga peradilan yang independen (mandiri dan berwibawa). Kehakiman

[34] Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial; Observasi Kritis Terhadap Para Filsuf Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 192-193.

(*judicial power*) sebagai kekuasaan negara yang mandiri dan berwibawa diidealkan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya[35].

Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya telah dikumandangkan oleh banyak sarjana, terutama oleh sarjana hukum yang berhaluan sosiologis, misalnya Roscoe Pound dengan istilah populernya ‑hukum sebagai alat rekayasa masyarakat‖ (*law as a tool of social engineering*). Atau istilah-istilah lain yang kadangkala dipakai, seperti hukum sebagai *agent of change* atau *social planning*. Bahkan dengan dipelopori Mochtar Kusumaatmadja, dimasa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia pernah populer istilah hukum sebagai alat pembangunan (*a tool of devepolment*), karena memang kala itu sektor hukum sangat didaya upayakan untuk mensukseskan pembangunan, yang sayangnya karena rendahnya kesadaran hukum dari para pembuat dan penegak hukum kala itu, menyebabkan hukum sebagai alat untuk mengamankan pembangunan, yang mempunyai konsekuensi munculnya banyak hukum sangat refresif dan melanggar hak-hak masyarakat, yang mengantarkan banyak aktivis ke rumah penjara atau ke liang kubur[36].

Menurut Zainal Arifin Hoesein fungsi hukum meliputi : Pertama sebagai katup penekan (*pressure value*). Makna sebagai katup penekan adalah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang melalui badan-badan peradilan untuk menekan setiap tindakan yang

[35] Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Persfektif Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 2

[36] Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 258-259.

bertentangan dengan hukum dengan cara memberikan hukuman kepada siapapun dan pihak manapun yang melakukan pelanggaran yang bersifat inkonstitusional, yaitu pelanggaran yang bertentangan dengan ketertiban umum (*contrary to the public order*), dan yang melanggar kepatutan (*violation white the reasonableness*). Kedua, sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Dalam presfektif ini, konstitusi dan Undang-undang menempatkan kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan sebagai senjata pamungkas, disamping sebagai tempat terakhir (*the last resort*) untuk mencari dan menegakan kebenaran dan keadilan. Ketiga, sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (*the guardian of citizen's constitutional and humand rights*). Dalam kedudukan ini, lembaga peradilan harus mampu mengedapankan hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (*to respect, to protect and to fullfil of human rights*). Keempat, sebagai wali masyarakat (*judiciary are regarded as costudian of society*). Kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan adalah tempat perlindungan (*protection*) dan pemulihan keadaan semula (*restitio in integrum*) bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingannya atau diperkosa hak-haknya baik oleh perorangan, kelompok bahkan oleh penguasa. Hal ini berarti lembaga peradilan berwenang memutus dan menentukan apakah tindakan itu boleh dilakukan atau tidak, apakah tindakan/perbuatan yang boleh dilakukan telah melampaui batas atau tidak, dan menentukan apakah suatu perjanjian yang dibuat berdasar asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contract*

principle) bertentangan (*immunity rights*). Dalam menjalankan fungsi peradilan, maka lembaga peradilan oleh hukum diberikan hak immunitas (lihat Pasal 1365 BW dan SEMA No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976. Kelima, putusan pengadilan seperti putusan Tuhan (*Judicium Die*). Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari prinsip bebas dan mandiri yang diberikan konstitusi dan Undang-undang kepada lembaga peradilan dan hakim. Dalam persfektif ini kekuasaan merupakan elemen penting dalam prinsip negara hukum sehingga pembahasan kekuasaan kehakiman masih tetap relevan dan penting dan aktual[37].

Suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkhis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan Perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan[38]. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk ‐memaksakan‖ kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi

[37] *Ibid*, hlm. 2-3.
[38] *Ibid*, hlm. 44.

sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu menurut Moempoeni Martojo, perundang-undangan suatu negara melukiskan kepada kita tentang adanya pengaturan pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.[39]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan rekonstruksi guna melakukan penataan ulang terhadap ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur agar sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan guna mewujudkan peradian perdata berbasis nilai keadilan yang bermartabat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan putusan hakim atas eksepsi selain eksepsi terhadap kewenangan pengadilan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara direkonstruksi menjadi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur harus dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara.

2. Putusan Hakim

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara. Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut Verdict. Verdict dalam

[39] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 153.

ensiklopedia internasional semakna dengan civil procedure, criminal procedure dan dalam common law putusan-putusan pengadilan disebut dengan case law.[40] Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi putusan pengadilan sangat diperlukan untuk penyelesaian perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat (*eiser/plaintif*) maupun tergugat (*gedaagde/dependant*) dapat menerima putusan sehingga orang yang ‑merasa‖ dan ‑dirasa‖ hak yang telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang ‑merasa‖ dan ‑dirasa‖ telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut [41] . Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan ‑mahkota‖ sekaligus ‑puncak‖ dan ‑akta penutup‖ pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim bersangkutan[42].

Tujuan dari kedua belah pihak dalam acara perkara perdata ialah untuk mendapat putusan dari Pengadilan. Penggugat menginginkan suatu putusan, dalam mana permohonannya dikabulkan tergugat suatu putusan, dalam mana permohonan gugat ditolak atau tidak diterima. Permohonan gugat bermaksud memohon perantaraan pengadilan agar suatu hak yang berdasarkan hukum perdata, dilaksanakan. Permohonan pelaksanaan suatu

[40] Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, Divisi Kencana, Depok, 2018, hlm. 80.

[41] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 125.

[42] *Ibid*.

hak ini mengandung arti bahwa ada pihak lain yang menghalang-halangi pelaksanaan itu. Kalau penghalang ini tidak ada, maka bagi Penggugat tidak ada kepentingan untuk memohon perantaraan hakim, misalnya seorang pemilik suatu rumah bernama A menggugat seorang lain bernama B yang sama sekali tidak mengganggu si A, tentang milik rumah itu, melulu dengan maksud supaya hakim menentukan dalam suatu putusan bahwa A adalah pemilik rumah itu. Putusan hakim seperti ini tidak dapat diberikan sebab Penggugat tidak punya kepentingan atas putusan ini. Tugas hakim ialah untuk menyelesaikan perselisihan, tidak untuk melulu menegaskan bahwa seseorang adalah mempunyai suatu hak (*zuiver declaratoir*)[43].

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi mengajukan gugatan Penggugat, jawaban tergugat, repliek Penggugat, dupliek tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut [44]. Untuk memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat

[43] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1982, hlm. 126.
[44] Moh Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, 2009, hlm. 124.

menentukan adalah peristiwanya. Maka di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Disamping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi[45].

Suatu putusan mempunyai tiga macam kekuatan pertama adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan kekuatan eksekutorial, kedua harus diperhatikan bahwaputusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian Undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan ‑ke luar‖, artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula disitu dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan tersebut. Kekuatan ketiga yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah kekuatan untuk ‑menangkis‖ suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas ‑*ne bis in idem*‖ yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama[46].

[45] R. Soeroso, *Op.Cit*., hlm. 134.
[46] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 128.

3. Pengertian Eksepsi

Oleh karena perkara perdata menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara, maka dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat, namun apabila tergugat tidak memberikan jawaban apapun terhadap gugatan Penggugat, maka tergugat harus menyadari bahwa ia harus memikul segala akibat dari pada sikapnya yang demikian itu, dimana mungkin sekali akan dikalahkan [47]. Jawaban tergugat menurut Krisna Harahap terdiri dari : 1) Eksepsi, jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, 2) Jawaban mengenai pokok (*Verweerten Principle*), [48] sedangkan menurut Moh. Taufik Makarao jawaban tergugat terdiri dari tiga macam yaitu : 1) Eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, 2) Jawaban tergugat mengenai pokok perkara, 3) Rekonvensi yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan tergugat kepada Penggugat.[49]

Pada sidang pertama setelah Penggugat/para Penggugat atau kuasanya membacakan gugatan, biasanya hakim bertanya kepada tergugat/para tergugat atau kuasanya, apakah mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis. Pertamakali sebagai tanggapan atau jawaban yang diajukan tergugat/para tergugat atau kuasanya adalah eksepsi. Jadi, tergugat pada jawaban pertama mengemukakan eksepsi sekaligus sebagai

[47] Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 75
[48] Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, P.T. Grafiti Budi Utami, Bandung, 1996, hlm. 45.
[49] Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*., hlm. 63.

jawabannya yang pertama. Eksepsi diajukan bersamaan dengan jawaban gugatan secara bersama-sama [50] , menurut R. Supomo eksepsi adalah bantahan yang menangkis tuntutan Penggugat sedang pokok perkara tidak disinggung[51]. Sudikno Mertokusumo eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan [52] . Zainal Asikin mengatakan bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*)[53]. Sophar Maru Hutagalung eksepsi adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan isi gugatan yang dibuat Penggugat dengan cara mencari kelemahan-kelemahan atau pun hal lain di luar gugatan yang dapat menjadi alasan sehingga dapat menolak atau menerima gugatan[54]. Menurut R. Seoroso menyatakan bahwa dasar-dasar dari eksepsi antara lain adalah sebagai berikut :

[50] Djamarat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 180.
[51] R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 48.
[52] Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit*., hlm. 129.
[53] Zainal Asikin, *Op.Cit*., hlm. 22.
[54] Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit*., hlm. 67.

a. Gugatan ditujukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang, misalnya Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Selatan tetapi gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
b. Gugatan salah alamat (Tergugat tidak ada hubungan hukum), misalnya A (Penggugat) mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah dengan B. Yang menghuni rumah tersebut adalah C bapak B. Karena pembayaran sewa rumah tidak dipenuhi, maka A menggugat C (salah alamat) seharusnya yang digugat adalah B.
c. Penggugat tidak berkualitas (Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum), misalnya Dalam kasus sewa menyewa rumah tersebut yang mengajukan gugatan A tetapi D (anakA). Meskipun gugatannya sudah benar, artinya gugatan ditujukan kepada B, tetapi karena tanpa surat kuasa khusus dari A (pemilik rumah) maka D tidak berhak untuk menggugat B.
d. Tergugat tidak lengkap, misalnya dalam jual beli tanah, A membeli tanah dari B, C menggugat A karena C merasa memiliki tanah tersebut. C menggugat A karena telah membeli tanah secara tidak sah, maka karena A membeli tanah tersebut dari B, maka menganggap tidak lengkap apabila B tidak digugat juga.
e. Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (eksepsi dilatoir), misalnya A digugat B, karena utangnya tidak dibayar, A

menangkisnya dengan mengatakan bahwa B telah memberikan penundaan waktu pembayaran[55].

M. Yahya Harahap memberikan penjelasan bahwa *Exceptie* (Belanda) *exeption* (Inggris) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks Hukum Acara Perdata eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga diartikan pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat[56], selanjutnya M. Yahya Harahap menyatakan bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi sebagai berikut :

1. Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).
2. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi agar pengadilan :
   - Menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*).

[55] R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara, Proses Persidangan*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 81-82.
[56] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*., hlm. 418.

- Berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara[57].

4. Gugatan Kabur

Jika suatu perkara perdata tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), maka seseorang tidak boleh menyelesaikannya dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan[58].

Menurut Sarwono yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada tergugat melalui pengadilan[59], sedangkan Zainal Asikin menyatakan bahwa gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut [60] . Menurut Djamarat Samosir gugatan pada dasarnya berisi tuntutan yang diajukan oleh seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang (Penggugat) kepada tergugat. Gugatan tersebut ditujukan kepada pihak lain (Tergugat), melalui

[57] *Ibid*, hlm. 418-419
[58] Zainal Asikin, *Op.Cit.*, 2018, hlm. 15.
[59] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktis*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 31.
[60] Zainal Asikin, *Op.Cit*., hlm. 19.

pengadilan berhubung adanya perselisihan, konflik, atau permasalahan hukum. Pihak lain (tergugat) tersebut dapat berupa seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang yang terikat dalam suatu badan maupun bukan badan hukum[61].

Riduan Syahrani menjelaskan bahwa suatu gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan melalui pengadilan yang mempunyai kewenangan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Penggugat dalam menyusun dan merumuskan surat gugatannya harus cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, sehingga surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan telah disusun dan dirumuskan sedemikian rupa secara sistematis memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 9 ayat (3) RV itu [62] suatu gugatan harus sejelas mungkin, tidak boleh kabur atau samar-samar, baik subjek hukumnya, objek sengketanya, maupun tentang apa yang dituntut oleh Penggugat[63], Djamarat Samosir mengatakan bahwa suatu gugatan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan dan agama (*identity of the parties*).
b. Dasar gugatan (fundamentum petendi) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum,

[61] Djamarat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 52.
[62] Riduan Syahrani, *Op.Cit*., hlm. 34.
[63] Djamanat Samosir, *Op.Cit*., hlm. 54.

yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*).

c. Tuntutan yang dimohonkan Penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (petitum). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam yaitu tuntutan primer (*primary claim*) yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsidair (*subsidary claim*) yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh pengadilan. Tuntutan primer, misalnya ‑supaya tergugat membayar harga barang yang dibelinya, yang sampai dilakukan gugatan ini belum dilunasinya‖. Tuntutan subsidair, misalnya dirumuskan dengan ‑mohon kepada pengadilan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya‖[64].

Suatu gugatan harus disusun secara cermat dan teliti, sehingga gugatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), menurut H. A. Mukti Arto suatu gugatan dapat disebut *obscuur libel* apabila di dalamnya terdapat keadaan sebagai berikut :

a. Identitas pihak-pihak (khususnya tergugat) tidak jelas atau kabur karena tidak mengarah kepada orang/badan tertentu sehingga dapat ditafsirkan kepada yang lain.
b. Antara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan hukum.
c. Posita tidak mendukung petitum atau petitium tidak didukung posita.
d. Posita tidak menggambarkan fakta yang jelas/pasti baik dari segi waktu, tempat, maupun proses sehingga tidak dapat (sulit) dibuktikan.

[64] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm. 37.

e. Antara pihak-pihak, posita, dan petitum tidak ada benang merahnya/tidak ada kaitannya sehingga terputus satu sama lain.

f. Petitum tidak bisa (tidak mungkin) dilaksanakan karena di luar kewajaran hukum, sosial maupun natural.

g. Apabila gugatan tersebut diteruskan pemeriksaannya, maka akan mengalami jalan buntu akibat gugatan yang kabur.

h. Obscuur bisa seluruhnya dan bisa hanya sebagian. Hakim harus mempertimbangkan apakah kekurangan/kesalahan tersebut dapat diperbaiki sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan. Hakim harus membantu memperbaiki kekurangan/kesalahan tersebut tanpa merugikan pihak lawan. Apabila tidak mungkin diperbaiki lagi maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.[65]

5. Peradilan Perdata

Peradilan dalam bahasa Inggris disebut *Judiciary* dan *Rechtproak* dalam bahasa Belanda, maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan[66]. Menurut Satjipto Raharjo peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah lembaga dalam proses tersebut[67]. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk

[65] H. A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Prenamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 195-196.

[66] Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, *Hukum Acara Perdata, Pengertian Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jaminan, dan Pembaharuan Acara Perdata*, P.T. Refika Aditama, Jakarta, 2020, hlm. 43.

[67] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 182.

menegakan hukum dan keadilan [68] . Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri mengatakan penggunaan istilah peradilan (*rechtsproak/ judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan [69] . Pengertian pengadilan menurut Sjachran Basah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal[70].

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga[71]. Achmad Ali mengatakan bahwa peradilan adalah fungsi mengadili atau proses yang ditempuh dalam mencari dan menemukan keadilan, sedangkan istilah pengadilan konotasinya adalah instansi resmi yang merupakan salah satu pelaksana fungsi mengadili tadi, yang dilengkapi oleh aparat resmi yang berprofesi hakim. Jadi, yang menghakimi di pengadilan adalah orang yang benar-benar profesinya sebagai hakim. Brebeda pada peradilan non-pengadilan, yang dihakimi disitu tidak mutlak seorang hakim, tetapi bisa seorang pakar di bidang lain selaku arbitrator[72].

---

[68] Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, *Op.Cit*., hlm. 43.
[69] *Ibid*.
[70] *Ibid*.
[71] *Ibid*, hlm. 44.
[72] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Divisi Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 332.

Herowati Poesoko menjelaskan bahwa kata peradilan yang terdiri dari kata dasar ‐adil‖ dan mendapat awalan ‐per‖ serta akhiran ‐an‖ berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu ‐hal memberikan keadilan‖ artinya peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara,baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil. Dalam mengartikan peradilan menunjuk kepada sekurang-kurangnya dua dari tiga ciri, yaitu : a) Adanya peristiwa individual yang ditangani; b) Adanya norma yang berlaku yang diterapkan; dan c) Adanya konflik yang disalurkan[73], sehingga peradilan adalah suatu proses di Pengadilan dalam menerima, memeriksa, serta memutuskan dan menyelesaikan perkara oleh hakim untuk mempertahankan dan ditaatinya hukum materil demi kepentingan pencari keadilan[74].

Menurut Afandi Pengadilan dan Peradilan merupakan dua kata yang berbeda. Pengadilan adalah tempat atau lembaga atau badannya, sedangkan yang dimaksud peradilan adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan, yang dimaksud adalah acara pemeriksaan perkara oleh hakim di lingkungan Pengadilan[75], Erfaniah Zuhriah menjelaskan bahwa dalam kajian hukum acara perdata Peradilan Agama ada beberapa hal istilah yang

[73] Herowati Poesoko, *Dinamika Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2019, hlm. 95.
[74] Ibiid.
[75] Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktek*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 1.

perlu dipahami yaitu Peradilan yang berasal dari bahasa Arab Adil yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum. Dalam Bahasa Arab disebut Al-Qadha, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan, dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak,* sedangkan pengadilan merupakan pengertian pengertian yang khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolute dan relativ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya/ membentuknya. Dalam Bahasa Arab disebut Al-Mahkamah, dalam Bahasa Belanda disebut raad[76].

Menurut Margono mengatakan bahwa peradilan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses beracara dalam diartikan sebagai proses beracara dalam pengadilan. Peradilan dapat juga berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas hakim dalam memutus suatu perkara[77] sehingga Margono mengatakan peradilan perdata merupakan proses beracara dalam mempertahankan hukum materil, sehingga masyarakat memberi kepercayaan kepada peradilan perdata sebagai tempat proses dalam menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata yang terjadi dalam

[76] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep dan Praktik di Peradilan Agama*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 4.
[77] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaaan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 124.

masyarakat. Peradilan perdata diharapkan dapat memberikan keadilan dan ketertiban umum dalam masyarakat[78].

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka kiranya peradilan perdata adalah proses untuk memberi keadilan dalam menyelesaikan sengketa hukum keperdataan atau peradilan untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata, adapun yang dimaksud dengan hukum perdata menurut Ahmad Sanusi adalah hukum yang paling tua usianya, dan paling umum sifat berlakunya dalam lingkungan kuasa orang-orang[79], menurut R. Subekti ―Hukum Perdata‖ dalam arti yang luas meliputi semua hukum -privaat materil‖, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan -perdata‖ juga lazim dipakai sebagai lawan dari -pidana‖. Ada juga orang memakai perkataan -hukum sipil‖ untuk hukum privat materil itu, tetapi karena perkataan -sipil‖ itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari -militer‖, maka lebih baik kita memakai istilah -hukum perdata‖ untuk segenap peraturan hukum privat materil. Perkataan -Hukum Perdata‖, adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan -hukum dagang‖[80].

Menurut Ahmad Rofiq mengatakan apabila Hukum Perdata diperhadapkan dengan hukum pidana, maka hukum perdata berarti hukum privat (*privat materil*) yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan dan hukum pidana berarti hukum publik. Hukum perdata

[78] *Ibid*.
[79] Ahmad Sanusi, *Rangkaian Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi IV, Tarsito, Bandung, 19991, hlm. 155-156.
[80] R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, P.T. Intermasa, Cetakan XXIV, Jakarta, 2001, hlm. 9.

mengatur tentang hubungan-hubungan kekeluargaan, meliputi perkawinan dengan segala akibat hukumnya, tentang diri seseorang, kekayaan antara suami isteri, kewajiban dan hak orang tua terhadap anak, perwalian, perpindahan harta, apakah pada saat pemilik masih hidup atau sudah mati, wakaf, hibah, shadaqah dan lain-lain[81].

Menurut Munir Fuady bahwa istilah ―hukum perdata‖ (*privat rechts*) dipakai sebagai lawan dari istilah ―hukum publik‖ (*publiekrecht*) yang dimaksud dengan hukum perdata adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik/umum/ masyarakat yang lebih luas. Karena itu, hukum perdata tidak tergolong ke dalam hukum publik dimana hukum publik lebih menyangkut dengan kepentingan umum[82]. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan maupun pergaulan keluarga [83] . H.F.A. Vollmar sebagaimana dikutip Tutik Triwulan Tutik menyatakan hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentigan-kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu

[81] Ahmad Rofiq, *Op.Cit*., hlm 7.
[82] Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.
[83] J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, P.T. Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm. 103.

masyarakat tertentu terutama mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas[84].

Menurut Sudikno Mertokusumo Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak[85]. Salim H. S berpendapat bahwa hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/ tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan[86]. Menurut Titik Triwulan Tutik unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya kaidah hukum, yaitu : (1) tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi, dan (1) tidak tertulis yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan);
2. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, dan
3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, dan sebagainya[87].

[84] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 10.
[85] Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit*., hlm. 10-11.
[86] Salim H.S., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis*, P.T. Rajawali Press, 2016, hlm. 11.
[87] Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*., hlm. 11.

6. Nilai Keadilan

Bahwasannya Dworkin mengutamakan keadilan dalam teori hukumnya, *Justice as value* (keadilan itu nilai). Ia membedakan antara *justice* dan *law*. *Justice* itu nilai sementara hukum itu norma[88]. Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutif M. Syamsudin menyatakan secara umum nilai dapat diartikan sebagai kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, baik ditinjau dari sudut lahir maupun bathin[89], Max Scheler menyatakan nilai merupakan suatu kualitas yang tidak tergantung pada pembawanya, merupakan kualitas apriori yaitu telah dapat dirasakan oleh manusia tanpa melalui pengalaman indrawi terlebih dahulu[90].

Djonaedi Efendi dengan mengutif pendapat Rokeach menyatakan nilai adalah keyakinan yang kekal, yaitu bentuk khusus dari tingkah laku atau tujuan akhir kehidupan yang secara individu atau kelompok lebih disukai dibandingkan dengan kebalikannya[91], Feather mendefinisikan nilai sebagai keyakinan umum tentang cara bertingkah laku yang diinginkan atau tidak diinginkan dan mengenai tujuan dan titik akhir yang ingin dicapai[92].

Nilai dapat dibedakan menjadi nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif adalah sesuatu yang oleh seseorang dianggap dapat

[88] Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 42.
[89] M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Divisi Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 38.
[90] *Ibid*, hlm. 40.
[91] Jonaedi Efendi, *Op.Cit*., hlm. 55.
[92] *Ibid*, hlm. 56.

memenuhi kebutuhannya pada suatu waktu dan oleh karena itu seseorang tersebut berkepentingan atasnya. Nilai objektif adalah sesuatu yang mengandung nilai bagi setiap orang. Nilai objektif dapat dikonstrusi berdasarkan kategori-kategori nilai tertentu, yaitu : (i) hal yang baik, pilihan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan; (ii) hal yang baik, pilihan berdasarkan pertimbangan moral atau kesadaran etik; (iii) hal yang benar, pilihan berdasarkan pertimbangan logika, sistem nilai objektif ini dijadikan dasar bagi penyusunan sistem nilai normatif[93].

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksananaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual [94]. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral, mengenai sesuatu hal, baik yang menyangkut benda maupun orang. Menurut sebagian besar keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran yang menurut teori mayoritas keadilan sulit untuk dicapai. Nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan berdirinya Negara Republik

[93] *Ibid*.
[94] Margono, *Op.Cit*., hlm. 105.

Indonesia sebagaimana yang termuat dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara, mengharuskan negara untuk menetapkan suatu Peraturan Perundang-undangan sebagai ciri dari suatu negara hukum yang berkeadilan sosial dan mengakui hak-hak asasi manusia. Keadilan sosial yang diharapkan tercapai adalah sebagaimana ditetapkan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia[95].

Nilai-nilai yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa sebagai berikut :

(1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

(4) Menghormati hak orang lain.

[95] *Ibid*.

(5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

(6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

(7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

(8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

(9) Suka bekerja keras.

(10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

(11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.[96]

F. Kerangka Teori

Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum terminologi teori berasal dari kata ‐*Theoria*‖ dalam bahasa latin yang berarti ‐perenungan‖ yang pada gilirannya berasal dari kata ‐*Thea*‖ dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dari kata dasar thea ini pula datang kata modern ‐teater‖ yang berarti ‐pertunjukan‖ atau ‐tontonan‖. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukan bangunan yang berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional),

[96] https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html

empiris (kenyataannya) juga simbolis bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Teori yang berarti perenungan[97] dapat pula diartikan pandangan atau wawasan[98]. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi menyebutkan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum[99] suatu teori merupakan sesuatu yang paling tinggi yang dapat dijelaskan oleh suatu disiplin ilmu, ini berarti bahwa suatu teori hukum merupakan pemikiran (tentunya pemikiran yang bersifat abstrak) yang dapat dicapai oleh ilmu hukum[100]. Merupakan temuan-temuan yang bersifat teoritikal dibidang hukum hasil kerja para pakar hukum melalui kajian dan penelitiannya. [101] Hasil kerja para pakar hukum melalui pengalamannya sehari-hari dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, temuan yang bersifat teoritikal itu bersifat membumi artinya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum terutama yang sama dikemudian hari[102].

Menurut J. J. H. Bruggink Teori Hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif[103]. Menurut Juhaya

[97] R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 21.
[98] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Utama Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 4.
[99] Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 11.
[100] *Ibid*, hlm. 11-12.
[101] *Ibid*, hlm. 12.
[102] *Ibid*.
[103] J.J. H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta Menjadi Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 4.

S. Praja teori hukum adalah teori teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis[104].

Bahwa dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana untuk bisa merangkum terus memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. [105] Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukan kaitannya satu sama lain secara bermakna teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan[106]. Teori bisa juga mengandung subjektifitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan sudut pandang yang dipakai oleh orang-orang yang tergabung dalam aliran-aliran tersebut.[107]

Menurut Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi mengemukakan bahwa filsafat hukum tingkat abstraksinya sangat tinggi merupakan suatu teori payung (*grand-theory*) tidak dapat secara langsung digunakan sebagai suatu landasan teoritikal pemecahan masalah-masalah hukum yang aktual, akan tetapi perlu diturunkan dahulu derajatnya menjadi suatu teori biasa yang membumi[108]. Dalam kaitan ini, teori hukum yang dijadikan landasan teori untuk pemecahan masalah hukum konkret atau langsung diterapkan pada

---

[104] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 53.
[105] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 253.
[106] *Ibid*.
[107] *Ibid*.
[108] Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Op.Cit*, hlm. 12..

praktik hukum yang telah diakui kebenarannya dari masa ke masa secara universal[109]. Menyangkut teori-teori ini dikenal dalam dunia keilmuan adanya teori payung (*grand-theory*), teori tengah (*middle-range theory*) lalu yang lebih rendah adalah teori biasa yang dihasilkan oleh disiplin ilmu itu[110].

Berdasarkan pandangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penelitian inipun digunakan *Grand Theory* (Teori Utama), *Middle Range Theory* (Teori Tengah) dan *Applied Theory* (Teori Terapan) yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keadilan Bermartabat Sebagai *Grand Theory* (Teori Utama)

Mengenai apakah yang menjadi tujuan hukum para ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lainnya, hal itu sebagaimana dikemukakan oleh E. Utrecht yang menjelaskan bahwa anggapan yang satu ialah suatu pendapat yang semata-mata berdasarkan etika (*ethics*). Menurut pendapat ini hukum bertugas hanya membuat keadilan, anggapan yang kedua ialah suatu pendapat yang menuju ke arah barang apa yang berguna, menurut pendapat ini hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berpaedah bagi orang[111]. Kedua teori ini juga merupakan landasan teori atau pendapat lainnya itu merupakan varian atau kontribusi dari teori etis

[109] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 129.
[110] *Ibid*.
[111] E. Utrecht/Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, P.T. Ihtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm. 11-12.

dan/atau teori utilitis[112]. Adapun teori etis diperkenalkan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Rhetorica dan Ethica Nicomachea.[113] Teori ini berpendapat bahwa hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan, sedangkan teori utilitas diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul *Introduction to The Principles of Morals and Legislation* yang menyatakan hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna efektif dengan adegiumnya yang terkenal The Greattest number yang artinya kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak[114].

Keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya -*Nichomacheanethies*‖ artinya berbuat kebajikan atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles, -*Justice Consist in treating equals equally and unequally, in proportion to their inequality*‖, Prinsip ini beranjak dari asumsi -untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional[115]. Menurut Satjipto Rahardjo Aristoteles membedakan keadilan distributif dan keadilan korelatif. Keadilan yang pertama (keadilan distributif = dari penulis) menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat. Ia menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan sama, memperoleh perlakuan yang sama pula

[112] Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 23.
[113] *Ibid*.
[114] *Ibid*.
[115] Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*., hlm. 48.

dihadapan hukum. Keadilan yang kedua (keadilan korelatif=dari penulis) memberikan ukuran bagi menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari harus mempunyai suatu standar yang umum guna memperbaiki (memulihkan) konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain [116] . Suteki dan Galang Taufani mengatakan konsepsi tentang keadilan menurut Aristoteles, yaitu sebagai berikut :

a. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan setiap orang berdasarkan profesinya atau jasanya. Pembagian barang dan kehormatan disesuaikan dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan distributif menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan sama diperlakukan sama di hadapan hukum.
b. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia.
c. Keadilan remedial adalah menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu harus ada standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. [117]

Darji Darmodiharjo dan Shidarta menjelaskan bahwa tujuanhukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan

[116] Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*., hlm. 258.
[117] R. Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Pratek),* P.T. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 11.

resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contoh terakhir ini ditunjukkan antara lain oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan mengatakan, -Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana"?[118]

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat [119] . Menurut Achmad Ali keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak, karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut oleh seseorang [120] . Eman Suparman menjelaskan arti dan makna keadilan adalah bahwa keadilan berasal dari kata -adil‖ yang diambil dari bahasa Arab Adl[121].

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak pada kebenaran, berbuat sepatutnya

[118] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bangunan Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 155-159.
[119] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, *Op.Cit*., hlm. 12.
[120] Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 88.
[121] Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 107.

(tidak sewenang-wenang)[122]. Membicarakan persoalan hukum positif dan kajian filsafat, lebih dari itu, masalah keadilan juga sebagai prinsip teologis artinya hakikat pembicaraan mengenai keadilan tidak dapat dilepaskan dari sifat-sifat dan dasar-dasar kepercayaan kepada Allah Yang Maha Kuasa[123].

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut[124].

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah legal justice atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam negara hukum. Ada pula istilah *social justice* atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi

[122] *Ibid*, hlm. 108.
[123] *Ibid*.
[124] H. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 85-86.

umum mengenai *social fairness* atau keadilan sosial yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsepsi keadilan individu atau keadilan secara umum[125].

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyatakan bahwa suatu sistem hukum positif yang berarti tidak bisa tidak harusberdasarkan keadilan. Walaupun arti atau makna keadilan itu bisa berbeda- beda dari suatu sistem nilai ke sistem nilai yang lain, namun suatu sistem hukum tak dapat bertahan lama apabila tidak dirasakan adil oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu [126] . Dengan perkataan lain, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tujuan tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin. Jadi suatu tatanan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Atau dengan perkataan lain memandang hukum atau sistem hukum secara formal bukan cara memandang hukum yang realistik dan hanya memberikan kepuasan proses berpikir logis belaka [127] , Hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan[128].

---

[125] *Ibid*.
[126] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, *Op.Cit*., hlm. 12.
[127] *Ibid*.
[128] *Ibid*.

Menurut Abdul Manan baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis mempunyai fungsi antara lain, pertama : sebagai *standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain, kedua : sebagai *as a tool of social engeneering*, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat, ketiga : sebagai *as tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila, keempat : sebagai *as a facility on of human interaction*, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat[129].

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu

[129] Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 3.

diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*)[130].

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yusitisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat [131] . Sebaiknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat[132].

Untuk yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum,

[130] *Ibid*.
[131] *Ibid*.
[132] *Ibid*.

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan, adil bagi si Suto belum tentu dirasakan adil bagi Si Noyo[133].

Kalau dalam menegakan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut[134].

Teguh Prasetyo mengatakan bahwa dalam perspektif dimana teori dibangun dalam rangka memenuhi banyak fungsi sebagaimana dikemukakan di atas, satu di balik fungsi di balik bangunan. Bahwasannya sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka keadilan yang diharapkan harus tercapai adalah keadilan yang bermartabat, menurut Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa Teori Keadilan bermartabat adalah menjelaskan fungsi hukum untuk menciptakan masyarakat bermartabat. Suatu sistem hukum yang bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia atau nguwongke uwong artinya bahwa hukum

[133] *Ibid*.
[134] *Ibid*.

yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian menurut hakikat dan tujuan hidupnya, hal itu dikarenakan manusia adalah mahluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (TYME) sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila, misalnya; yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila itu mengandung nilai atau value berupa pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan[135].

Teori Keadilan Bermartabat sebagai ilmu hukum memiliki suatu skopa atau cakupan antara lain; meliputi filsafat hukum atau *philosophy of law* di tempat pertama. Pada lapisan kedua, terdapat teori hukum (*legal theory*). Sementara itu dogmatik hukum atau ilmu hukum positif berada di tempat yang ketiga. Hukum dan praktik hukum berada pada susunan atau lapisan ilmu hukum yang keempat. Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam Teori Keadilan Bermartabat adalah lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistematik, mengendap, hidup dalam satu sistem, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, bahu membahu (*sholder to sholder*), gotong royong sebagai suatu sistem. Teori Keadilan Bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai

[135] Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm. 22-23.

tujuan yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia atau keadilan yang nguwongke uwong[136].

2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Range Theory* (Teori Menengah)

Sebagaimana telah dikemukakan para ahli hukum terkemuka pada karya-karyanya yang antara lain seorang filsuf yang bernama Cicero mengemukakan *Ubi Ius Ubi Societes* yang diartikan bahwa dimana ada masyarakat maka disana ada hukum. Jika ungkapan klasik *ubi societas ibi ius* diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Dengan demikian, pertanyaannya dapat digeser menjadi sejak kapan adanya masyarakat. Terhadap pertanyaan inipun juga tidak akan ada jawaban yang pasti. Namun, dilihat dari segi historis tidak pernah dijumpai adanya kehidupan manusia secara soliter di luar bentuk hidup bermasyarakat[137].

Hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan sistem hukum. Hukum adalah suatu sistem yaitu sistem norma-norma Hukum Perdata merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma sebagai sebuah sistem hukum perdata memiliki sifat umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relactions*), dan kemudian membentuk struktur[138], sistem hukum haruslah tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum yaitu secara bersama-sama mewujudkan

[136] *Ibid*, hlm. 23-24.
[137] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 40.
[138] Lilik Mulyadi, *Op.Cit.,* hlm. 233.

kesatuan yang utuh[139]. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi diantara subsistem di dalamnya[140].

Lili Rasyidi dan I. B. Wiyasa Putra menjelaskan bahwa sistem hukum yaitu suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integrasi sebagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses yakni proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum[141].

Sudikno Mertokusumo menyatakan sistem hukum itu merupakan tatanan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain [142] , Marwan Mas menjelaskan bahwa sistem hukum adalah susunan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian yang dinamakan subsistem hukum yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh[143]. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kesatuan sinergi antara unsur atau komponen yang terkandung di dalam sistem hukum seperti masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, pendidikan (ilmu hukum), konsep hukum,pembentukan hukum, penerapan hukum dan evaluasi hukum[144].

---

139 Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 221.
140 *Ibid*.
141 *Ibid*.
142 *Ibid*.
143 *Ibid*.
144 Eman Suparman, *Op.Cit*.. hlm. 109.

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen sebagai berikut : (1) struktur, (2) substansi, dan (3) kultur dan budaya. Pertama, sistem hukum mempunyai struktur, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas : jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Kedua, substansi, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk ke dalam pengertian substansi ini juga ‑produk‖ yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Ketiga, adalah kultur atau budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan[145].

Muhammad Syakri Albani Nasution, Zul Fahmi Lubis, Iwan dan Ahmad Faury menyebutkan bahwa komponen sistem hukum sebagai berikut :

- Komponen hukum yang pertama adalah substansi atau isi hukum yang bersangkutan. Suatu hukum agar benar-benar mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka isi dari hukum itu sendiri harus benar-

[145] *Ibid*.

benar berfungsi sebagai manifestasi nilai-nilai dan rasa keadilan serta nilai-nilai normatif yang diidealkan masyarakat. Di samping itu, agar hukum tersebut dapat berjalan, substansi hukum tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan substansi hukum lain yang telah ada. Sehingga suatu hukum agar dapat bekerja, maka ia harus bersifat koheren dengan keseluruhan sistem norma sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

- Komponen yang kedua adalah struktur, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Suatu hukum, sebaik apa pun substansi yang dikandungnya tidak akan mampu berjalan jika tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut. Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan hukum ini terdiri dari setiap subjek yang memiliki kewenangan untuk itu, mulai dari instansi penyidik seperti aparat kepolisian, instansi penuntut umum seperti kejaksaan, dan pengadilan, beserta seluruh person subjek fungsional dalam masing-masing instansi tersebut, dan juga para pengacara dan konsultan hukum.
- Komponen yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah komponen kultur atau budaya dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Suatu hukum yang ideal adalah hukum yang merupakan produk langsung dari budaya masyarakat yang bersangkutan, sehingga sistem nilai yang diusung oleh produk hukum tersebut akan sesuai (karena merupakan manifestasi) dengan kesadaran nilai *(value consciousness)* yang

dimiliki masvarakat. Suatu produk hukum, walaupun secara substantif telah bersifat koheren dengan sistem aturan yang lain, dan walaupun telah didukung oleh penegakan dan pelaksanaan yang maksimal oleh struktur hukum yang ada, tidak akan mampu berjalan maksimal atau bahkan akan terjadi suatu resistensi jika ternyata ideologi yang diusung oleh produk hukum tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan budaya masyarakat sebagai subjek di mana hukum tersebut akan diterapkan[146].

Sistem hukum bergerak seakan melingkar, berdialektika dengan dan tanpa legitimasi yang harus didapatkan daripada yang hidup. tetapi diakui. Hukum berjalan otomatis serentak dengan apa pun yang ada dalam hidup. Perbandingan jumlah ataupun persentase jumlah yang ada di dalamnya berada pada porsi yang utuh dan penuh seperti kepenuhan hukum yang ada dalam setiap gerak kehidupan. Sistem yang utuh dan menguniversal yang terbagi dalam sistem-sistem yang terbagi dalam sistem-sistem parsial. Sistem satu adanya, namun terbagi[147].

3. Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory* (Teori Terapan)

Kata *Progresif* berasal dari *progress* yang berarti adalah kemajuan. Jadi disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak

[146] Muhammad Syukri, Albani Nasution, Zul Fahmi Idris, Iwan dan Ahmad Faury, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Prenadamedia Group, Divisi Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 47-48.
[147] *Ibid*.

hukum itu sendiri[148]. Konsep hukum progresif tidak terlepas dari konsep progresivisme yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai pemodal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat[149].

Menurut Satjipto Rahardjo reformasi hukum di Indonesia belum berhasil, antara lain disebabkan masih maraknya korupsi, komersialisasi dan commodification, untuk mengatasi hal tersebut penulis (Satjipto Rahardjo) menawarkan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan hukum progresif. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya[150]. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum progresif menolak tradisi analytical jurisprudence di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal[151]. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan

[148] Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Ciputat, 2014, hlm. 29.
[149] *Ibid*.
[150] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sketsa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.
[151] *Ibid*, hlm. 1-2.

menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademis dan agenda aksi[152].

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung faham mengenai hukum baik konsep, fungsi serta tujuannya, hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan, sebagai konsekuensinya hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun dirinya menuju ideal hukum tersebut. Inilah esensi hukum progresif [153] . Secara lebih spesifik hukum progresif antara lain disebut sebagai ‐Hukum yang pro rakyat‖ dan ‐Hukum yang pro-keadilan‖. Pernyataan dan pemastian tersebut berlanjut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana hukum akan bekerja dan dijalankan[154].

Menurut A. Mukthie Fadjar mengatakan bahwa gagasan atau pemikiran hukum yang progresif yang di Indonesia dipelopori oleh Prof. Satjipto Rahardjo dimaksudkan sebagai gagasan atau tesis hukum yang antroposentris yang pro-manusia/rakyat dan pro-keadilan yang mungkin

[152] *Ibid*, hlm. 2.
[153] *Ibid.*
[154] *Ibid.*

akan menerabas berbagai prosedural teknis justisial yang justeru akan menghambat ideal-ideal hukum bagi kesejahteraan umat manusia sendiri. Dengan kata lain, hukum justru harus memihak demi kepentingan manusia, bukan sebaliknya malah manusia dikorbankan untuk hukum[155].

Menurut Marwan Efendi teori hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo teori hukum ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sedangkan teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Menurutnya hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence*, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical jurisprudence* sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran *critical legal studies* yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap *anti-foundationalism*[156].

Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang memungkinkan masyarakat mempertahankan

[155] A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 126.
[156] Marwan Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 29.

ketertiban dan kebebasannya. Hukum haruslah netral dan dapat diterapkan pada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras, gender ataupun hartanya. Hukum harus dipisahkan dari politik, penerapan hukum di pengadilan pun harus dilakukan secara adil. Akan tetapi sebenarnya hal tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara konsekuen dalam penerapannya, karena menurut para teoritisi post modern, hukum tidak mempunyai dasar objektif dan tidak ada kebenaran sebagai tempat berbijak hukum, yang ada hanyalah kekuasaan semata yang menjadi alat kekuasaan bagi penguasa[157].

Yang menjadi ukuran bagi hukum bukanlah benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa. Hukum harus ditafsirkan nyatanya akan ditafsirkan menurut keinginan yang menafsirkannya, dan penafsir akan menafsirkan sesuai dengan perasaan dan kepentingannya sendiri, sehingga yang namanya keadilan hanya merupakan semboyan retorika yang digunakan oleh kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan, dan keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi hasil penafsiran hukum dan akan selalu menjadi bulan-bulanan hukum.[158]

Menurut Ahmad Ali jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka harus membebaskan diri dari belenggu formalisme-positivisme, karena jika hanya mengandalkan pada teori dan pemahaman

[157] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 35.
[158] *Ibid*.

hukum secara legalistik-positivistis yang hanya berbasis pada peraturan tertulis belaka, maka tidak akan pernah mampu untuk menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Usaha pembebasan dan pencerahan tersebut dapat dilakukan dengan mengubah cara kerja yang konvensional yang selama ini diwariskan oleh mazhab hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya yang serba formal prosedural tersebut, dan melakukan pembebasan dan pencerahan itulah dibutuhkan kerja keras untuk keluar dari kondisi hukum yang serba formal prosedural itu [159] . Sebagai ikhtiar untuk meninggalkan konsepsi-konsepsi di atas adalah ide atau gagasan untuk memilih cara yang progresif dengan tujuan untuk mencari cara mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna (*significant*) dengan mengadakan perubahan secara lebih cepat, melakukan pembalikan yang mendasar, melakukan pembebasan, terobosan dan lainnya[160].

Lahirnya hukum progresif dalam khasanah pemikiran hukum, bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum[161].

Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum itu adalah untuk manusia, bukan untuk sebaliknya manusia untuk hukum.

[159] *Ibid*, hlm. 37.
[160] *Ibid*, hlm. 38-39.
[161] M. Syamsudin, *Op.Cit.,* hlm. 108.

Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu dalam proses untuk terus menerus menjadi (*law as process, law in the making*)[162].

Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan selalu dalam proses untuk menjadi serta dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu terlibat dengan teori lain. Pelibatan teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain tersebut[163].

Secara umum, karakter hukum progresif dapat diidentifikasikan sebagai berikut : (i) kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku; (ii) hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat meminjam istilah Nonet dan Selznick bertipe rensposif; (iii) hukum progresif berbagi faham dengan *Legal Realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum; (iv) hukum progresif memiliki kedekatan dengan sosiological jurisprudence dari *Roscoe Pound* yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi

[162] *Ibid*.
[163] *Ibid*.

tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum; (v) hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan); (vi) hukum progresif memiliki kedekatan *Critical Legal Studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas[164].

Karakteristik Hukum Progresif menurut Kristiana dapat digambarkan sebagai berikut :

Asumsi Dasar : Hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum, Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (*law as profess, law in the making*).

Tujuan Hukum : Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Spirit : Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (legalistik dan positivistik), Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif.

Arti Progresivitas : Hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*), Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global, menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga

[164] *Ibid*, hlm. 108-109.

menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Karakter : Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku[165].

Konsep hukum progresif lahir dan berkembang tidak lepas dari adanya rasa ketidakpastian dari kalangan hukum terhadap teori dan praktek hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam (*law in books*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*) serta adanya kegagalan dari hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat [166] . Hukum yang progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi atau berkembang. Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law*

[165] *Ibid*, hlm. 109-110.

[166] Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 40, Lihat pula Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Ciputat, 2014, hlm. 29.

as a process, *law in the making*), Hukum itu tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdi kepada manusia[167].

Penegakan hukum melalui perspektif teori hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari suatu undang-undang atau hukum. Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran lebih penting[168].

Esensi yang tidak kalah signifikan dari hukum progresif adalah membiarkan entitas empirik yang bernama hukum itu seperti apa adanya. Adapun karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan berikut :

a. Hukum ada untuk mengabdi pada manusia.
b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final, sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
c. dalam hubungan progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada

[167] *Ibid*.
[168] Ahmad Rifai, *Op.Cit*., hlm. 29.

umumnya[169] atau hal-hal yang mendasari hukum progresif adalah : a. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri, b. Hukum selalu berada pada *status law in the making* dan tidak bersifat final dan c. hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani[170],

Suteki mengatakan bahwa hukum progresif mempunyai cirisebagai berikut : 1) Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*), 2) Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik local, nasional maupun global, 3) Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Menurut Shidarta mengatakan bahwa Satjipto Raharjo dalam sejumlah tulisan-tulisannya senantiasa menyematkan pemikiran hukum progresifnya pada tujuan proposisi tentang hukum yaitu sebagai berikut : 1) Hukum itu untuk manusia (sekadar alat), (2) hukum itu pro-rakyat dan pro-keadilan (deep ecology), (3) hukum itu mengatur kepada kesejahteraan, kebahagiaan (teleologis), (4) hidup baik adalah dasar hukum yang baik, (5) hukum itu mendorong peran publik, (6) hukum itu responsif dan (7) hukum selalu dalam proses menjadi[171].

---

[169] *Ibid*

[170] *Ibid*, hlm. 40.

[171] Shidarta, *Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Pengadilan Progresif Pada Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 232.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN

ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Ketentuan Pasal 136 HIR menentukan sebagai berikut :
Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara

- Grand Theory : Teori Keadilan Bermartabat
- Middle Theory : Teori Sistem Hukum
- Applied Theori : Teori Hukum Progresif.

1. Mengapa putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apakah kelemahan-kelemahan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata yang berlaku sekarang ini ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata dengan berbasis nilai keadilan ?

METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian	:	Konstruktivisme
Jenis Penelitian	:	Deskriptif Kualitatif
Pendekatan	:	Yuridis Sosiologis (*Sosiological Reasearch*)
Sumber Data	:	Data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan studi pustaka
Analisa Data	:	Analisa Kualitatif dengan Teori Keadilan Bermartabat, Teori Sistem Hukum dan Hukum Pogresif Penelitian

HASIL PENELITIAN

1. Putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara.
2. Kelemahan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur adalah kelemahan substansi, kultur dan struktural.
3. Rekonstruksi.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian memerlukan metode dalam pelaksanannya, hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Suteki dan Galang Taufani yang menyatakan bahwa tidak diragukan lagi betapa penting penelitian untuk berbagai tujuan berkaitan dengan penemuan kebenaran, pengembangan ilmu (teori), menguji keterandalan teori dan membangun teori baru berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses pencarian (*inguiry*). Untuk memperoleh pengetahuan dan menggenapinya, setiap orang dapat melakukan penelitian, baik dengan penelitian ilmiah maupun penelitian non ilmiah, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian harus dilakukan secara ilmiah dengan karakter penggunaan metode ilmiah tertentu[172], sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan cara-cara penelitian sebagai berikut :

a. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian menurut R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto yang mengutip pendapat Erlyn Indarti memberikan penjelasan bahwa *Paradigma,* dalam bahasa Inggris *"paradigm",* dari bahasa Yunani *"para deigma",* dari *"para"* (di samping, di sebelah) dan *"dekynai"* (memperlihatkan; yang berarti; model contoh, arketipe, ideal). Menurut *Oxfor English Dictionary,* "paradigm" atau paradigma adalah *"contohatau pola"*. Akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. *"Ordering belief frame work",*

[172] Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 47.

begitu dikatakan oleh Liek Wilardjo, ketika berbicara tentang paradigma, yaitu suatu kerangka keyakinan dan komitmen para Intelektual[173].

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa perkembangan nomenklatur paradigma menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam bidang pendidikan[174]. Menurut Suteki dan Galang Taufani menyebutkan terdapat empat paradigma utama yang secara umum diterima oleh kalangan akademisi mancanegara, keempat paradigma tersebut adalah *positivisme, post-positivisme, critical theory* dan *construtivism* [175], berdasarkan empat macam paradigma tersebut, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.

Paradigma konstruktivisme menurut M. Chairul Basrun Umanailo adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan[176]. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melaluipengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial

[173] R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Op.Cit*., hlm. 67.
[174] Dedi Mulyadi, *Internalisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 8.
[175] Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit*., hlm. 61.
[176] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5_oapg-X1AhURSWwGHS6-CqgQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fosf. io%2F9ja2t%2Fdownload&usg=AOvVaw3h9SUpOozMbCFIc8oZFuyn. Diakses pada tanggal 02-02-2022 Pukul 11.58

mereka[177]. Menurut paradigma konstruktivisme, realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam karena manusia bertindak sebagai agen yang mengonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku di kalangan mereka sendiri[178].

Kajian paradigma konstruktivisme ini menempatkan posisi peneliti setara dan sebisa mungkin masuk dengan subjeknya, dan berusaha memahami dan mengonstruksikan sesuatu yang menjadi pemahaman si subjek yang akan diteliti. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut[179]. Menurut Hono Sejati *Constructivism* atau *Legal Constructivism* yaitu teori menyatakan bahwa individu menginterpensikan dan beraksi menurut kategori konseptual dan pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada

[177] *Ibid*, hlm. 3.
[178] *Ibid*.
[179] *Ibid*.

sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal contruct*) oleh George Kelly[180].

Menurut Gunarto mengatakan bahwa dalam konteks ini model penyelesaian masalah merupakan hasil dari perspektif manusia itu sendiri. Dalam membuat kontruksi harus didasarkan pada aspek filosofis dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut : Pertama ontologis, yaitu realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Kedua epistemologis, yaitu transaksional/subjektif : pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara yang meneliti dan yang diteliti. Ketiga metodologis, yaitu reflectif/dialectical : menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan responden untuk mengkonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif dengan *participant observation*. Dan kriteria kualitas penelitian: Authenticity dan reflectivity, yaitu sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial. Keempat *axiologis*, yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian. Peneliti, sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subyektifitas pelaku sosial. Dan tujuan penelitiannya adalah merekonstruksi realitas sosial secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial yang diteliti, meliputi : Pertama, untuk memperhatikan,

[180] Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industri Berbasis Nilai Cepat, Adil Dan Murah*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 1 (2016), http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1345, diakses Tanggal 10 Nopember 2022 Pukul 13:45 WIB.

merenungkan, memikirkan dan mamaknai serta menafsirkan konsep [181] untuk merekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan; Kedua, melakukan dan memahami tentang realitas konsep [182] rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan, yang merupakan temuan dari produks interaksi antara peneliti dengan responden yang diteliti [183] ; Ketiga, untuk mendapatkan hasil tersebut di atas, diperlukan dialog antara peneliti dengan yang diteliti, dialog harus bersifat dialektik dan interaksi untuk merekonstruksi konsep[184] yang merupakan temuan realitas outentik yang benar-benar dihayatinya untuk merekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan[185]; Keempat, untuk melakukan pilihan nilai, dan etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan peneliti sebagai fasilitator menjembatani keragaman subyektifitas pelaku pelaksana [186] untuk merekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan.

Paradigma konstruktivisme memandang hukum termasuk dalam pengertian hukum dalam hal ini yaitu mediasi penal yang hendak mengoreksi hukum dalam paradigma HIR/RBg yaitu bersifat perdamaian, bersifat plural dan plastis. Dikatakan plural karena hukum diekspresikan

[181] Gunarto, *Rekonstruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat Bagi SerikatPekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, (2010), http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1345, diakses Tanggal 10 Nopember 2022 Pukul 14:10 WIB.
[182] *Ibid.*
[183] *Ibid*
[184] *Ibid*
[185] *Ibid*
[186] *Ibid*

ke dalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sifat plastis hukum diartikan sebagai sifat dari ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, atau dalam istilah yang digunakan oleh peneliti yaitu sesuai dengan kemanfaatan manusia dalam masyarakat [187] . Berdasarkan teori hukum empiris dengan memakai cara pandang paradigma konstruktivisme ini hukum dalam penelitian ini dipandang sebagai bagian dari fenomena sosial. Ada hubungan fungsional antara hukum dengan masyarakat. Hasil akhir dan penerapan hukum dalam mempengaruhi masyarakat menjadi perhatian. Oleh karena itu perlu pertimbangan pada aspek sosial lain, baik ekonomi, sosial maupun filosofis dalam hukum[188].

b. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada perumusan masalah dan paradigma penelitian yang digunakan, maka jenis penelitian dalam disertasi ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yang menurut Sumadi Suryabrata adalah penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian[189], sedangkan langkah deskriptif mengandung maksud bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu [190] . Deskriptif analisis dalam penelitian ini dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu

[187] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Pembaharuan Hukum*, Intrans Publishing, Malang, 2017.
[188] *Ibid*.
[189] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 76.
[190] Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 12.

peristiwa hukum atau kondisi hukum[191], karena penelitian ini bertujuan menggambarkan dan mengkritisi terhadap putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga peradilan perdata dan belum mewujudkan basis nilai keadilan.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*sosiolegal reasearch*) yang artinya dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dihubungkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosiological reasearch*) ini penulis akan mengkaji rekonstruksi penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata dengan mendasarkan kepada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan peradilan perdata dengan berbasis nilai keadilan.

d. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto data yang diperoleh dari masyarakat disebut data primer atau data dasar (primary data atau basic data). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni

[191] I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*., hlm. 152.

perilaku warga masyarakat[192], sedangkan menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian[193]. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan kata-kata dan tindakan merupakan sumber utama data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian[194]. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah yaitu sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim[195] yang meliputi :
   - Al-Qur'an Nurkarim.
   - Al-Hadits.
   - Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
   - Het Herziene Indonesiche Reglemen (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui) Staatblaad Tahun 1949 Nomor : 44)

[192] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 11-12.
[193] S. Nasution, *Metode Reasearch*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 20.
[194] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*., hlm. 12.
[195] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenana Media Group, Divisi Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 281.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB dengan Register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Cms
- Putusan Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA dengan Register Perkara Nomor : 796/Pdt.G/2018/PA.Cms.

2) Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga bahan hukum sekundernya adalah yang meliputi buku-buku literatur dari berbagai ahli yang relevan dengan objek yang diteliti dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.
3) Bahan Hukum Tersier meliputi Kamus, Ensiklopedia, Jurnal-jurnal Ilmiah.

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara yang menurut Bambang Waluyo dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan[196].

Adapun pihak-pihak yang diwawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

[196] Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktek*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 57.

1. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB yaitu Vivi Purnamawati, S.H., M.H.
2. Ketua Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA yaitu Drs. Asep Mujtahid, M.H.
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB yaitu Dede Halim, S.H., M.H.
4. Ketua Dewan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Ciamis, Banjar dan Pangandaran yaitu Maman Sutarman, S.H.
5. Sekretaris Dewan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Ciamis, Banjar dan Pangandaran yaitu Doni Cakra Gumilar, S.H., M.H.
6. Kuasa Hukum Penggugat Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB dengan Register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Cms yaitu Yadi Supriadi, S.H., M.H.
7. Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB Register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Cms yaitu Yuliana Surya Galih, S.H., M.H.
8. H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., Advokat senior yang sering menangani Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB.
9. Kuasa Hukum Penggugat Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA dengan Register Perkara Nomor : 796/Pdt.G/2018/PA.Cms yaitu Jenal, S.H., M.H.

10. Edi Kurniadi, S.H., M.H., Advokat senior yang sering menangani perkara perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA.

f. Metode Analisa Data

Penelitian kualitatif menurut **J**ane Richi adalah upaya untuk menjadikan dunia sosial dan presfektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti[197] atau penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya[198], sedangkan menurut Zainudin Ali menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan sertanorma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat[199].

I. Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan didapatkan informasi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan yang diteliti dalam penelitian ini, karena untuk sementara berdasarkan penelusuran yang

[197] Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 6.
[198] Lexy J. Melong, *Ibid*, hlm. 4.
[199] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 20.

dilakukan, penulis hanya mendapatkan informasi terdapat beberapa penelitian yang membahas dan menganalisa agar dalam penyelesaian perselisihan perkara keperdataan dapat dilaksanakan dengan sedapat mungkin menerapkan asas sederhana cepat, dan biaya ringan, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Hasil Temuan	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1	Mosgan Situmorang, S.H.,M.H.[200]	Laporan Penelitian Hukum Tentang Penyederhanaan Proses Peradilan	1. Bahwa proses peradilan masih rumit dan lamadi Indonesia dikarenakan peraturan yang mengatur tentang hukum acara perdata sudah tidak memadai lagi. 2. Faktor yang mempengaruhi proses peradilan mencakup Hukum Acara,Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia yang secara keseluruhan memerlukan	Berbeda dengan disertasi penulis karena penelitian penulis memfokuskan pada bahwa Putusan Hakim atas eksepsi gugatan kabur belum berbasis nilai keadilan karena putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbang-kan dan

[200] Mosgan Situmorang, *Laporan Penelitian Hukum Tentang Penyederhanaan Proses Peradilan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum*, Badan penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM, Indonesia, https://adoc.pub, diakses Tanggal 04 April 2022 Pukul 10:30 WIB.

			perubahan yang sangat signifikan. 3. Upaya yang dilakukan untuk menyederhana-kan proses peradilan bila melihat dari prosesnya yang dimulai dari pendaftaran sampai pada eksekusi menggambarkan suatu proses yang cukup lama dan berbelit-belit.	diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang seharusnya dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan pokok Perkara.
2	Siti Muflichah, Trusto Subekti danHaedah Faradz[201]	Eksepsi Plurium Litis Consortium (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT. Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 41/Pdt.G/2000/ PN.Pwt)	Hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 401/Pdt/2002/P.T. Smg. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokertotanggal 17 April 2001 No. 41/Pdt.G/2000/PN. Pwt adalah tidak	

[201] Siti Muflichah, Trusto Subekti dan Haedah Faradz, *Eksepsi Plurium Litis Consotium (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt./2002/PT.Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 41/Pdt.G/2000/PN.Pwt)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2 (2008), http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id), diakses Tanggal 07 April 2022 Pukul 13:00 WIB.

			cermat, karena seharusnya hakim memeriksa terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil atau belum, dengan memperhatikan kedudukan para pihak dalam berperkara, karena kedudukan para pihak ini menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang berbeda. Ketidakcermatan hakim dalam menjatuhkan putusan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum, karena bertentangan dengan sumber-sumber hukum acara perdata, sekalipun apabila eksepsi dalam perkara tersebut diabaikan, memang terdapat fakta bahwa Penggugat tidak membuktikandalil-dalilnya, sehingga kemanfaatan dan keadilan relatif tercapai.	

3	Hono Sejati[202]	Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Hubungan Industri Berbasis Nilai Cepat, Adil dan Murah	Rekonstruksi nilai ideal pemeriksaan perkara di PHI yang adil, cepat dan murah bertujuan untuk mengembalikan harmonisasi hubungan buruh dengan pengusaha melalui musyawarah mufakat di sidang perdamaian PHI. Adapun rekonstruksi terhadap pemeriksaan perkara di PHI yang cepat, adil, dan murah adalah : Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 yang isinya dalam waktu selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan majelis hakim, maka ketua majelis hakim haruslah sudah melakukan sidang	Berbeda dengan disertasi penulis karena rekonstruksi yang dilakukan penulis adalah rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 136 menjadi sebagai berikut : putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbang-kan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara.

[202] Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industri Berbasis Nilai Cepat, Adil Dan Murah*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 1 (2016), Https://jurnal.unissula.ac.id), diakses Tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13:30 WIB.

			pertama melalui panggilan satu dengan media SMS, whatssapp, atau email dan tidak harus menggunakan relaas panggilan. Rekonstruksi Pasal 103 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI isinya majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian PHI dalam waktu selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak sidang pertama dengan ditambahkan mempersingkat menjadi 4 (empat) persidangan : Perdamaian penggugat dan tergugat oleh hakim; Pembacaan gugatan dan jawab jinawab; Pembuktian	

			Penggugat dan Tergugat; Putusan.	
4	Ni Putu Riyani Kartika Sari[203]	Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia	Eksistensi e-court untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hal ini digunakan sebagai instrument yang memfasilitasi administrasi perkara pada saat : sebelum persidangan dimulai melalui Sistem e-Filing (pendaftaran perkara secara online), e-SKUM (pembayaran perkara secara online) dan e-Summons (pemanggilan secara online); pada saat pemeriksaan persidangan melalui mekanisme pengiriman dokumen persidangan secara online; dan setelah persidangan melalui	Berbeda dengan disertasi penulis karena disertasi penulis putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum dilaksanakan secara cepat, tepat dan murah atau peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

[203] Ni Putu Riyanti, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jurnal Yustitia Vol. 13 No. 1 (2019), https://www.ojs.unr.ac.id), diakses Tanggal 20 Juli 2022 Pukul 14:00 WIB.

			pengiriman salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang berperkara.	
5	Anita Afriana[204]	Penerapan Acara Singkat Dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan : Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata	Dari sisi politik hukum ada kaitannya dengan Pembaharuan materi hukum agar sesuai dengan tujuan negara dan Kebutuhan masyarakat, maka salah satu tujuan Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah untuk terwujudnya kepastian hukum (tertulis) dalam masyarakat, oleh karenya dirasakan perlu pengaturan tentang Acara Cepat dan Singkat dalam RUU Acara Perdata Indonesia. Prosedur yang sederhana dalam	Berbeda dengan disertasi penulis karena rekonstruksi yang diperlukan adalah rekonstruksi terhadap substansi ketentuan agar direkonstruksi menjadi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbang-kan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara

[204] Anita Afriana, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan : Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 1 No. 1 (2015), https://jhaper.org), diakses Tanggal 20 Juli 2022 Pukul 15:00 WIB.

			pemeriksaan perkara dengan Acara Singkat dan Acara Cepat akan menguntungkan masyarakat yang awam hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya sehari-hari, di mana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai sarana untuk mencari keadilan dapat diperoleh.	Pasal 136 HIR.

J. Sistematika Penulisan

Bahwasannya karena disertasi ini merupakan karya ilmiah, maka dalam penyajian pembahasannya harus dilakukan yang menunjukan suatu sistem yang merupakan susunan kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem-subsistem ini saling berkaitan yang tidak boleh bertentangan dan apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya[205], sehubungan dengan hal tersebut dalam disertasi ini antara bagian yang satu (bab dan sub bab) dengan bagian (bab dan sub bab) yang lainnya berkorelasi atau berhubungan satu dengan yang lainnya,

[205] Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 221.

sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan dalam disertasi ini adalah sebagaimana terurai dibawah ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinalitas/keaslian disertasi dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini akan dikemukakan berbagai landasan teori yang bersumberkan dari berbagai pendapat para pakar hukum yang terkemuka yang uraiannya dimulai dengan Tinjauan Hukum Acara Perdata yang meliputi Pengertian Hukum Acara Perdata, Tujuan Hukum Acara Perdata, Sifat Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata, Tinjauan Tuntutan Hak, yang meliputi Pengertian Tuntutan Hak, Macam-macam Tuntutan Hak, Tinjauan Gugatan, yang meliputi Pengertian Gugatan, Sistematika Gugatan, Jawaban Tergugat Atas Gugatan Penggugat, yang meliputi Jawaban Luar Pokok Perkara, Jawaban Dalam Pokok Perkara, dan diakhiri dengan Konsepsi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa.

BAB III SEBAB PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan analisa terhadap rumusan masalah yang pertama dengan uraian meliputi Putusan Hakim dan Tujuannya, Macam-macam Putusan Hakim, Praktek Putusan Hakim Atas Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata, Putusan Hakim Atas Eksepsi Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata Belum Berbasis Nilai Keadilan.

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan analisa terhadap permasalahan yang kedua dengan uraian meliputi Kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substance*), Kelemahan Kultur Hukum (*Legal Culture*) dan Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*).

BAB V REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan analisa terhadap rumusan masalah yang ketiga dengan uraian meliputi Sistem Hukum Pancasila Sebagai Prinsip Putusan Hakim Atas Eksepsi Gugatan

Kabur, Perbandingan Putusan Hakim Atas Eksepsi Kompetensi Pengadilan, Perbandingan Putusan Hakim Atas Eksepsi Pada Peradilan Pidana, Perbandingan Putusan Hakim Atas Eksepsi Gugatan Kabur Dengan Negara Lain, Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata Berbasis Nilai Keadilan, Rekonstruksi Nilai, Rekonstruksi Norma Hukum, Temuan Gagasan Baru Putusan Hakim Atas Eksepsi Gugatan Kabur Peradilan Perdata Yang Berkeadilan dan Bermartabat.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini disampaikan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang telah disampaikan dan saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan hukum yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum adalah ikatan hak dan kewajiban hukum yang diberi akibat oleh hukum. Karena terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain, hubungan itu disebut hubungan hukum perdata (perikatan perdata) [206] . Semua peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan atau badan hukum dalam suatu hubungan hukum disebut hukum perdata (*civil law*). Karena hukum perdata mengatur substansi hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain, disebut juga hukum perdata materil (*substantive civil law*)[207].

Hukum materil, sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat

[206] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm. 9.
[207] *Ibid*.

tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti : ‖siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum.... dan sebagainya‖, ‖siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut‖, semua itu merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang. [208] Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan hukum ? Dapatkah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum, bahkan sering kali tanpa kita sadari. Kita melaksanakan hukum. Jadi, pelaksanaan hukum bukanlah monopoli dari orang-orang tertentu saja seperti sarjana hukum, pejabat, atau penegak hukum[209].

Apabila dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma/kaidah Hukum Perdata tersebut, penjual tidak menyerahkan barang yang dijualnya misalnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan ini, maka Hukum Perdata Materil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakan, yaitu dengan cara mempergunakan Hukum Acara Perdata. Jadi, pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata

[208] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara …*, *Op.Cit*., hlm. 1.
[209] *Ibid*.

tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus menurut ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata.[210] Pelaksanaan hukum materil, khususnya hukum materil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi, sering terjadi bahwa materil hukum perdata dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum materil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan[211].

Hukum formil disebut juga sebagai hukum acara. Dalam pengertian hukum formil, perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan atau melaksanakan isi peraturan. Hukum formil ini pada intinya mempertahankan dan menjalankan segala sesuatu yang sudah diatur di dalam hukum materil[212]. Untuk melaksanakan hukum materil perdata, terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materil perdata dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata. Menurut Hukum Perdata Formil mengatur cara mempertahankan hukum perdata materil. Itu dijalankan dengan jalan acara, karena itu maka hukum perdata formil

[210] Riduan Syahrani, *Op.Cit*., hlm. 12-13.
[211] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*., hlm. 1-2.
[212] Mahfud Fahrazi dan A. Hasyim Nawawie, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 166.

disebut orang hukum acara perdata. Nama hukum formil selanjutnya dipakai juga dalam arti yang sangat berlainan, yakni untuk menunjukan peraturan-peraturan mengenai bentuk bagaimana mempertahankan hukum subyektif. Dalam arti itu istilah hukum formil dipakai, jika orang membagi hukum acara perdata dalam hukum acara materil dan formil. Dengan hukum acara materil dimaksud ‑*actienrecht*‖ yaitu peraturan mengenai hubungan-hubungan hukum yang timbul pada mengadakan acara : dengan hukum acara formil dimaksud peraturan mengenai cara yang harus diperhatikan pada waktu mengadakan acara[213].

Menurut Soepomo bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (—*burgerlijk rechtsorde*‖), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara [214] . Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata[215],

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang

[213] L.J. , *Inleiding tot de Studis Van Het Nederlandse Recht, Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino Menjadi Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 261.
[214] R. Supomo, *Op.Cit.*, hlm. 13.
[215] Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.,* hlm. 13.

menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya[216].

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengatakan bahwa Hukum Acara Perdata disebut juga hukum formil adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil [217] . Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa peraturan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya[218]

Menurut Herowati Poesoko Hukum acara perdata meliputi 3 (tiga) tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan tahap persiapan menuju kepada penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan

[216] Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*., hlm. 2.
[217] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*., hlm. 1.
[218] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm. 10.

diadakan pelaksanaan putusan, sedangkan Efa Laela Fakhriah menyebutkan secara umum penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dapat dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu pertama tahap persiapan yang dimulai dari rencana mengajukan gugatan boleh dilakukan sendiri atau menggunakan kuasa hukum, membuat gugatan, dan mendaftarkan/ mengajukan gugatan ke Pengadilan; Tahapan kedua adalah tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan (persidangan) yang dimulai dari pemeriksaan identitas para pihak berperkara, penyampaian jawaban oleh tergugat, kemudian repliek dari Penggugat dan duplik dari tergugat, pembuktian dari para pihak, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pembuktian oleh para pihak atas dalil-dalil yang diajukannya, kemudian kesimpulan disampaikan kepada hakim sebagai bahan bagi hakim untuk memberikan pertimbangan berdasarkan hukum maupun faktanya dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Tahapan ketiga adalah upaya hukum dan pelaksanaan putusan[219].

Abdulkadir Muhammad menjelaskan konsep ‑beracara‖ dalam hukum acara perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan Hukum Acara Perdata. Tindakan hukum tersebut meliputi kegiatan persiapan, tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan dan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan.

[219] Efa Laela Fakhriah, *Kapitia Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 48.

Sedangkan dalam arti sempit beracara meliputi tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir pengadilan menjatuhkan putusannya.[220]

Tindakan persiapan adalah tindakan untuk mempersiapkan segala sesuatu guna keperluan sidang pemeriksaan perkara. Tindakan ini meliputi cara mengajukan perkara ke pengadilan, memanggil pihak-pihak yang berperkara, melakukan sita jaminan (*conservatoire beslag*), penggabungan beberapa perkara menjadi satu perkara, atau sebaliknya memisahkan menjadi beberapa perkara guna memudahkan atau menyederhanakan pemeriksaan perkara, atau untuk menghemat biaya, tenaga dan waktu. Melakukan sita jaminan artinya meletakan sita jaminan atas benda sengketa dengan tujuan untuk melindungi atau mengamankan agar benda sengketa jangan hilang, rusak, atau dipindahtangankan sebelum perkara selesai[221].

Tindakan beracara sesungguhnya adalah tindakan mengenai jalannya pemeriksaan dalam sidang pengadilan dari sidang pertama sampai dengan sidang penjatuhan putusan. Tindakan melaksanakan putusan pengadilan adalah tindakan menjalankan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperkara dipenuhi atau dipulihkan sebagaimana mestinya.

[220] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm. 13.
[221] *Ibid*, hlm. 14.

Tindakan pelaksanaan putusan apabila diperlukan dapat minta bantuan aparat keamanan[222].

Menurut Soepomo bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (—*burgerlijk rechtsorde*‖), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara [223] . Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata[224],

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya[225].

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengatakan bahwa Hukum Acara Perdata disebut juga hukum formil adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara

---

[222] *Ibid*.
[223] R. Supomo, *Op.Cit.*, hlm. 13.
[224] Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.,* hlm. 13.
[225] Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*., hlm. 2.

bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil[226]. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa peraturan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya[227].

Djamarat Samosir menyatakan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara orang mengajukan perkara kepada pengadilan, bagaimana cara pihak yang dirugikan itu mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa perkara secara adil dan bagaimana cara melaksanakan keputusan sehingga hak dan kewajiban yang sesuai dengan hukum materi berjalan semestinya [228] . Krisna Harahap menyatakan Hukum Acara Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka Pengadilan atau dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, yaitu

[226] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*., hlm. 1.
[227] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm. 10.
[228] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 6.

mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan menuntut perkara serta pelaksanaan putusan tersebut[229].

Lilik Mulyadi mengatakan secara teoritis dan praktik tentang batasan hukum acara perdata dapat dideskripsikan secara singkat adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materil [230] . Zainal Asikin mengatakan hukum acara perdata tidak saja mengatur bagaimana sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur litigasi (di pengadilan) dan di luar pengadilan (non litigasi). Namun hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh hak dan kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa atau mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, sehingga seseorang mengajukan ‑permohonan‖ hak ke pengadilan. Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakan hukum materil. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim[231].

Riduan Syahrani mengatakan bahwa pelanggaran terhadap Hukum Perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara

[229] Krisna Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.
[230] Lilik Mulyadi, *Op.Cit*., hlm. 7.
[231] Zainal Asikin, *Op.Cit*., hlm. 1.

dalam ruang lingkup Hukum Perdata. Bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata ini di dalam negara yang berdasarkan hukum ? tidak boleh dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, juga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Seluk beluk bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan, semuanya diatur dalam Hukum Acara Perdata. Dengan adanya Hukum Acara Perdata masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan Hukum Acara Perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum (perdata) dalam masyarakat[232].

Efa Laela Fakhriah mendefinisikan Hukum Acara Perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap negara atau badan hukum, demikian juga sebaliknya, seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan yang disebut pengadilan, sehingga tercapai tertib hukum[233]. Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyimpulkan bahwa Hukum Acara Perdata adalah

[232] Riduan Syahrani, *Op.Cit*., hlm. 13.
[233] Efa Laela Fakhriah, *Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia*, Cetakan ke-2, C.V. Keni Media, Bandung, 2016, hlm. 7.

serangkaian aturan-aturan hukum bagi warga masyarakat yang ingin mempertahankan keperdataannya dengan perantaraan hakim di muka persidangan pengadilan, dalam rangka melaksanakan aturan-aturan hukum materil. Digunakan istilah ‐aturan‖ dari pada ‐peraturan‖, karena istilah ‐peraturan‖ lebih memberi makna hukum yang tertulis belaka, sedangkan istilah ‐aturan‖ selain hukum tertulis juga hukum tidak tertulis (di Indonesia adalah hukum adat) selanjutnya perkataan ‐dimuka persidangan pengadilan‖ karena hukum formal tidak hanya memprosesnya di muka sidang pengadilan. Kitapun mengenal bagian dari pada hukum acara yang tidak berlangsung di muka sidang pengadilan, seperti arbitrase dan notaris, demikian pula istilah ‐dimuka pengadilan‖ masih bisa menimbulkan pengertian yang ambivalensi, karena bisa diartikan hanya di muka ‐gedung pengadilan‖ padahal maksudnya tidak demikian[234].

2. Tujuan Hukum Acara Perdata

Bahwasannya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya apabila dalam pergaulan masyarakat terdapat pihak yang melakukan pelanggaran terhadap norma atau kaidah hukum perdata sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Hukum Perdata materil yang telah dilanggar tersebut harus ditegakan, penegakan hukum menurut Yosi Budi Santoso dan Umar Ma'rup adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan. Penegakan hukum dalam

[234] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 7-8.

arti sempit dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan (pidana) dan (perdata dari penulis) yang bersifat preventif, represif dan edukatif. Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum[235].

Menurut J.B. Daliyo menyatakan bahwa hukum acara bertujuan untuk melindungi hak seseorang. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Dalam peradilan perdata hakim akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai dan mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak yang salah, oleh karenanya dia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai itu kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata materil dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Kecuali tujuan melindungi hak seseorang, ada tujuan yang dapat dikatakan sebagai tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu mempertahankan hukum materil. Dalam rangka mempertahankan hukum materil tersebut, hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya

[235] Yosi Budi Santoso dan Umar Ma'rup, *Kebijakan Pembuktian dan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1868

memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata adalah sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang [236] . Hukum acara perdata hanya diperuntukan menjamin ditaatinya hukum materil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah hukum materil perdata yang ada atau melindungi hak perorangan[237].

Hukum acara perdata baik dalam teori maupun praktiknya mengatur tentang bagaimana caranya seseorang, organisasi, badan hukum maupun badan usaha serta negara mengajukan suatu tuntutan hak dan atau gugatan terhadap para pelanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan melalui perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hubungan keperdataan tersebut antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila ada salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah melakukan pelanggaran dan merugikan salah satu pihak atau beberapa pihak, akan dikenakan sangsi ‐berupa hukuman‖ [238] . Hukuman dalam hukum acara perdata umumnya memberikan ganti rugi kepada salah satu pihak atau beberapa pihak yang telah dirugikan atas

[236] J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*, P.T. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 239-240.
[237] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara …*, *Op.Cit*, hlm. 2.
[238] Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 8.

adanya pelanggaran yang terjadi. Terlepas apakah pelanggaran tersebut ada unsur kesengajaan apa tidak, yang pasti apabila adanya pelanggaran tersebut telah merugikan salah satu pihak atau beberapa pihak, maka pihak yang telah melakukan pelanggaran tersebut dapat di kenakan sangsi hukuman keperdataan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum materiil[239].

Karena hukum acara perdata baik teori maupun praktiknya merupakan peraturan atau kaidah yang mengatur tentang pelaksanaan hukuman atas pelanggaran hak yang terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum materiil, maka sifat dari hukum acara perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materiil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata tersebut dibuat oleh penguasa dimaksudkan agar dalam hubungan antara pihak yang satu terhadap pihak yang lain yang ada dalam masyarakat dan atau suatu ‑negara‖ dapat berjalan dengan tertib dan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban [240] . Di samping itu juga dimaksudkan untuk mencegah adanya *eigenrichting* atau main hakim sendiri antara pihak yang satu dengan pihak lainnya setelah adanya pelanggaran hak dan merugikan salah satu pihak atau lebih. Jadi, apabila dalam suatu masyarakat terdapat adanya pelanggaran sesuatu hak, maka

[239] *Ibid.*
[240] *Ibid.*

pihak yang telah melakukan pelanggaran dapat dikenakan sangsi hukuman setelah adanya keputusan dari pengadilan negeri yang sifatnya dapat dilaksanakan dengan cara paksa tanpa pandang bulu[241].

Hukum Acara Perdata bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sehingga akan tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Peradilan memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum untuk mempertahankan hak-haknya sehingga mencegah perbuatan main hakim sendiri dan perbuatan sewenang-wenang[242]. Menurut Djamarat Samosir tujuan mempertahankan atau menegakan hukum acara perdata atau tujuan hukum acara perdata adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dan menciptakan ketertiban hukum, kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat.
2. Mempertahankan atau menegakan hukum materil.
3. Mencegah atau menghindari main hakim sendiri (*eigenrichting*)[243].

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya

[241] *Ibid*, hlm. 8-9.
[242] Zahir Rusyad, *Materi PKPA Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 57.
[243] Djamanat Samosir, *Op.Cit*., hlm. 6.

dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (—dengan kekuatan umum‖)[244].

Dengan putusan hakim itu misalnya ditetapkan bahwa hubungan antara pihak Penggugat dan pihak tergugat adalah demikian bahwa tergugat (menurut hukum) berutang sejumlah uang dari Penggugat, sehingga hubungan mereka adalah hubungan antara seorang debitur dengan seorang kreditur dan berdasarkan hubungan hukum tersebut, tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Penggugat. Atau bahwa hubungan itu adalah demikian bahwa tergugat secara tanpa hak menguasai barang miliknya Penggugat dan berdasarkan hubungan hukum tersebut, tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada Penggugat[245].

Diaturnya hak seseorang yang dirugikan oleh pihak lain bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah -*eigenrichting*‖ atau tindakan main hakim sendiri. Dengan demikian adanya hukum acara perdata yang mengatur tata cara mempertahankan hak dan kepentingan antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, orang dengan negara melalui lembaga peradilan untuk mendapatkan perlindungan hukum, tujuan akhirnya adalah memberikan keadilan dan terciptanya tertib hukum serta terciptanya kepastian hukum[246].

---

[244] R. Subekti, *Hukum ...*, *Op.Cit*, hlm. 124.
[245] *Ibid*, hlm. 124.
[246] Efa Laela Fakhriah, *Perbandingan ...*, *Op.Cit*., hlm. 223.

3. Sifat Hukum Acara Perdata

Secara umum mekanisme penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan melalui dua cara, pertama diselesaikan damai di luar pengadilan atau yang dikenal dengan non litigasi yaitu dengan menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrasi; serta cara penyelesaian sengketa secara konvensional melalui pengadilan atau yang disebut dengan litigasi[247].

Dalam hukum acara perdata orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut Penggugat, sedang bagi orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut tergugat. Apabila ada banyak Penggugat atau banyak tergugat, maka mereka disebut Penggugat I, Penggugat II, dan seterusnya, demikian pula apabila ada banyak tergugat maka mereka disebut Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya[248].

Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan[249]. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim[250]. Namun meskipun inisiatif ada pada Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, akan tetapi apabila gugatan sudah diajukan ke pengadilan ia

---

[247] Efa Laela Fakhriah, *Kapitia ..., Op.Cit.*, hlm. 1.
[248] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*., hlm. 2.
[249] *Ibid*, hlm. 4.
[250] Riduan Syahrani, *Op.Cit*., hlm. 36.

terikat oleh ‖peraturan permainan‖ yang sudah baku, yang sifatnya memaksa. Perubahan atau pencabutan kembali gugatan oleh Penggugat atau para Penggugat tidak bisa dilakukan seenaknya. Apabila tergugat sudah mengajukan jawaban, kedua hal tersebut di atas hanya dapat dilakukan dengan seizin dari tergugat. Demikian pula halnya dengan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, banding, kasasi dan peninjauan kembali ditentukan dalam hukum acara perdata secara cermat dan tenggang waktu itu tidak bisa dilanggar[251].

Apabila dilanggar permohonan yang bersangkutan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Bukan hanya para pihak termasuk kuasanya saja yang terikat pada peraturan, tata cara atau peraturan permainan hukum acara perdata, namun juga hakim yang memeriksa perkara tersebut. Untuk menjatuhkan putusan gugur dan perstek harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak bisa dilanggar. Hukum Acara Perdata memang mula-mula sifatnya mengatur, namun apabila sudah digunakan, maka sifatnya menjadi memaksa[252].

Menurut Riduan Syahrani pada umumnya peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata itu bersifat memaksa (*dwingend recht*) karena dianggap menyelenggarakan kepentingan umum, sehingga peraturan Hukum Acara Perdata yang bersifat memaksa ini tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak yang berkepentingan mau tidak mau harus tunduk dan menaatinya.

[251] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*., hlm. 4.
[252] *Ibid*, hlm. 5.

Meskipun demikian, ada juga bagian hukum acara perdata yang bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), karena dianggap mengatur penyelenggaraan kepentingan khusus dari yang bersangkutan, sehingga peraturan hukum acara perdata yang bersifat pelengkap ini dapat dikesampingkan atau disimpangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya alat-alat bukti yang dipakai dalam pembuktian sesuatu perkara, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengadakan perjanjian yang menetapkan bagi mereka hanya dapat mempergunakan satu macam alat bukti, umpamanya tulisan, sedangkan pembuktian dengan alat bukti lain tidak diperkenankan. Perjanjian yang mengatur tentang pembuktian yang berlaku bagi orang-orang yang mengadakan perjanjian tersebut dinamakan perjanjian pembuktian yang menurut hukum memang dibolehkan dalam batas-batas tertentu[253].

Hukum acara perdata bersifat mengatur dan memaksa, dikatakan mengatur karena termasuk ke dalam kelompok hukum privat yang sifatnya mengatur, sedangkan dikatakan bersifat memaksa karena prosedur atau tata cara beracara ke pengadilan harus diikuti oleh para pihak yang berperkara ke pengadilan, sebagai contoh dalam hukum acara perdata berdasarkan Pasal 118 (1) HIR ditentukan bahwa pada asasnya gugatan harus dimasukan atau diajukan ke pengadilan dalam wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal. Apabila tidak diajukan ke pengadilan sesuai

[253] Riduan Syahrani, *Op.Cit*., hlm. 13-14.

dengan kompetensinya, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim[254].

Sifat dari hukum acara perdata yang merupakan hukum formil yaitu hukum mengenai aturan main dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan mengikat bagi semua pihak serta tidak dapat disimpangi, sehingga hukum acara perdata mempunyai sifat publik. Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum, hukum acara haruslah berbentuk kodifikasi yang sifatnya unifikasi, dengan demikian dapat berlaku umum dan mengikat bagi semua pihak[255].

Sifat mengikat dan memaksa (formalisme) dari hukum acara perdata ini perlu untuk menjamin adanya ketertiban dalam pemeriksaan perkara, sehingga kedua belah pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk membela kepentingan masing-masing. Peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa itu juga perlu untuk menjamin agar hakim tetap bersifat tidak berat sebelah dalam melakukan pemeriksaan perkara, sehingga pada akhirnya akan tercapai ketertiban dan kepastian hukum[256]. Hukum Acara Perdata bersifat memaksa sehingga apabila suatu perkara yang sudah diproses di pengadilan perdata, maka keputusan hakim tidak bisa dilanggar dan harus ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa, jika tidak ditepati, maka salah satu pihak akan mengalami kerugian karena tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya[257].

---

[254] Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, *Op.Cit.*, hlm. 12.
[255] *Ibid*.
[256] *Ibid*, hlm. 13.
[257] Zahir Rusyad, *Op.Cit*., hlm. 57.

Menurut Lilik Mulyadi sifat hukum acara perdata dapat ditinjau dari tiga hal yaitu sebagai berikut :

Pertama apabila ditinjau dari sifat dan asal mula terjadinya perkara perdata, terhadap inisiatif timbulnya perkara perdata terjadi oleh karena adanya gugatan dari orang (Penggugat atau *eiser/plaintiff*) yang "merasa" dan "dirasa" bahwa haknya telah dilanggar orang lain (tergugat atau *gedaagde/defendent*). Oleh karena timbulnya inisiatif perkara perdata terdapat dari pihak Penggugat, berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan kelangsungan perkara perdata yang bersangkutan bergantung kepada pihak Penggugat apakah akan meneruskan gugatannya, melakukan perdamaian, mencabut gugatan, dan atau dalam batas-batas tertentu akan melakukan perubahan atau menambah gugatannya[258],

Kedua apabila ditinjau dari aspek pembagian hukum berdasarkan kekuatan sanksinya, sifat hukum acara perdata pada umumnya memaksa (*dwingend recht*). Apabila dijabarkan lebih detail, sifat memaksa dari hukum acara perdata ini disebabkan fungsinya dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil. Di samping bersifat memaksa (*dwingend recht*), ada pula bagian tertentu dari hukum acara perdata yang bersifat mengatur (*regelend recht*) atau hukum menambah (*aanvullend recht*) di mana hukum acara perdata dianggap mengatur kepentingan khusus sehingga dapat pula disimpangi oleh para pihak.

[258] Lilik Mulyadi, *Op.Cit*., hlm. 7-8.

Ketiga, sifat hukum acara perdata berikutnya adalah sifat kesederhanaan dalam beracara di depan sidang pengadilan, sifat kesederhanaan tersebut lebih mendetail, mendalam, dan terperinci adalah sebagai berikut : Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya orang mohon peradilan begitu saja oleh karena merasa terlanggar atau tersinggung haknya dalam pergaulan hidup dengan orang lain. Kehendak rakyat yang sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya dan sepenuhnya apabila ada peraturan-peraturan acara yang sangat mengikat kedua belah pihak sehingga mungkin merupakan rintangan belaka bagi para pihak yang berperkara untuk betul-betul mendapat peradilan.

Cara yang sangat mengikat ini dalam bahasa asing dinamakan formalisme dan pada zaman Belanda dianut oleh Raad van Justitie dulu. Bagi orang-orang yang bersangkutan, yaitu orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka peraturan-peraturan yang sangat mengikat itu (—formalistis‖), lambat laun sudah tidak memuaskan. Di negeri Belanda pun makin keras adanya aliran yang berkehendak menyederhanakan hukum acara perdata di sana". Dalam praktik sifat sederhana dari hukum acara perdata eksistensinya penting dan mempunyai nuansa yuridis. Dengan demikian, dapat disebutkan lebih lanjut bahwasanya sifat sederhana mengarah pada dimensi hukum acara perdata dengan prosedural yang jelas, transparan, serta dapat dipahami oleh segala lapisan masyarakat

tanpa meninggalkan aspek formalitas, kepastian hukum (*recht zekerheids*), serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara.[259]

4. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Menurut terminologi bahasa yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, pondamen. Adapun menurut asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang yang mendasari peraturan hukum konkret yang terdapat di dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut[260]. Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkret dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan[261]. Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus menjadi pedoman. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-

[259] *Ibid*, hlm. 9-10.
[260] Sri Warjiyanti, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 32.
[261] *Ibid*, hlm. 32-33.

hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas hukum dan tidak boleh bertentangan[262].

Kedudukan asas hukum dalam semua sistem yang didalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum[263]. Perlu dipahami bahwa setiap peraturan hukum berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Karena kebenaran materil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formil suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi pondasi bangunan keseluruhan aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara mana yang diberlakukan[264].

Asas hukum mempunyai dua fungsi yaitu : 1. Asas hukum dalam, asas ini mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentukan undang-undang dan hakim yang bersifat mengesahkan dan mengikat para pihak. 2. Asas dalam ilmu hukum, asas ini hanya bersifat mengatur dan menjelaskan. Adapun asas hukum sendiri menjadi dua yaitu :

- Asas hukum umum, ialah asas yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas bahwa apa yang lahir tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputuskan yang lain oleh pengadilan.

---

[262] *Ibid*, hlm. 33-34.
[263] Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*. hlm. 21.
[264] I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-persoalan Pokok*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 51.

- Asas hukum khusus asas ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya. Yang mana merupakan penjabaran dari asas hukum umum[265].

Menurut Setiawan menyatakan apabila kepada kita ditanyakan, apakah asas-asas Hukum Nasional di bidang Hukum Acara Perdata, maka -hemat saya- kita akan sepakat bahwa asas pertama dan terutama adalah asas kesederhanaan, dengan kata ‑sederhana‖ dimaksudkan suatu proses beracara yang tidak ‑*complicated*‖ tidak rumit. Salah satu contoh ketentuan beracara yang merupakan pencerminan dari asas kesederhanaan itu ialah ketentuan Pasal 9 dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan akhir dapat dimintakan banding hanya bersama-sama dengan putusan akhir[266].

R. Subekti menyatakan bahwa hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa roda pengadilan dapat berjalan lancar, dengan perkataan lain agar penetapan oleh pengadilan tentang bagaimanakah hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya itu dapat diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahwa penetapan tentang apakah yang hukum itu berjalan dengan adil, tidak berat sebelah, dan bahwa biaya yang diperlukan untuk memperoleh keputusan pengadilan itu beserta realisasinya, tidak terlampau memberatkan para pencari keadilan [267] .

---

[265] *Ibid*, hlm. 33-34.
[266] Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 359.
[267] R. Subekti, *Loc.Cit.*, hlm. 8.

Jalannya peradilan dalam menyelesaikan sengketa keperdataan tersebut terkenal dengan semboyan yang dalam hubungan itu seringkali dikemukakan yaitu supaya peradilan itu dilaksanakan dengan cepat, tepat dan murah[268] atau menurut Sudikno Mertokusumo disebut sebagai asas sederhana, cepat dan biaya ringan[269]. Menurut Bambang Waluyo pada hakikatnya pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, sehingga tujuan peradilan dapat tercapai, hal itu juga sesuai dengan asas peradilan yaitu harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan[270].

Asas atau prinsip peradilan yang cepat, tepat dan murah atau sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hukum positif Indonesia ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan ‐sederhana‖ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif, sedangkan ‐biaya ringan‖ adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat dan

[268] *Ibid*.
[269] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*., hlm. 37.
[270] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 23.

biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pelaksanaan proses pemeriksaan persengketaan keperdataan harus dilaksanakan secara efisien dan efektif serta biaya ringan adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh Pengadilan hal itu sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Sudikno Mertokesumo yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit- belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik.[271] Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayah arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan[272]. Selanjutnya kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan, sampai pada

[271] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*., hlm. 37.
[272] *Ibid*.

penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan [273] , sedangkan biaya ringan yaitu biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul rakyat, tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan [274] , menurut Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri dan Linda Rahmainy bahwa sederhana mengacu pada ‖*complicated*‖ penyelesaian suatu perkara, perkataan cepat atau ‖dalam tenggang waktu yang pantas‖ mengacu pada ‖tempo‖, cepat atau lambatnya, penyelesaian suatu perkara; sedangkan perkataan ‖biaya ringan‖ mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan peradilan[275].

Selain asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diuraikan di atas, asas-asas hukum acara perdata adalah sebagai berikut :

1. Hakim bersifat Menunggu

   Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya,

[273] *Ibid*
[274] *Ibid*
[275] Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri dan Linda Rahmainy, *Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata, ADHAPER, Vol. 4 No. 2, Juli – Desember 2018, hlm. 152.

kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu berlaku adagium ‑*judex ne procedat ex officio*‖, apabila tidak ada gugatan, maka di situ tidak ada hakim. Jadi yang mengajukan tuntutan hak ialah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang beperkara dan bukan oleh hakim, hakim tidak dapat memperluas ataupun mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang beperkara. Di samping itu, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan di muka pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat menghalang-halanginya. Pengakhiran sengketa ini

dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan. Lebih lanjut atas perkara yang diajukan di hadapannya, hakim wajib mengadili (memeriksa dan memberikan pertimbangan) seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Kemudian atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim, apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak itu pun bukan kepentingan daripada hakim. Jadi pengertian pasif di sini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas daripada pokok sengketa.

3. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Jadi apabila pemeriksaan dilakukan secara tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk umum, maka akan berakibat putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk ‑*social control*‖. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang berdasarkan alasan yang patut yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim,

maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, misalnya dalam perkara perceraian atau perkara perzinaan.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi et alteram partem*)

   Kedua belah pihak yang beperkara di dalam hukum acara perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Demikian pula kedua belah pihak Penggugat dan tergugat masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua belah pihak harus didengar, hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja. Asas ini mengandung pula arti bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak untuk mengajukan alat bukti di muka sidang.

5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

   Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya pernah menyatakan : Bahwa Putusan yang Tidak Lengkap atau Kurang Cukup Dipertimbangkan Merupakan Alasan untuk Kasasi dan Harus Dibatalkan. Kadang-kadang untuk mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

6. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara perdata pada asasnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi : Biaya kepaniteraan, Biaya panggilan, Biaya materai. Bahkan kalau para pihak minta bantuan seorang advokat, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat, yang membawahkan daerah tempat yang berkepentingan bertempat tinggal. Permohonan perkara secara *prodeo* akan ditolak oleh pengadilan apabila Penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

7. Tidak ada Keharusan Mewakilkan

HIR tidak harus mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian, hakim wajib tetap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Seorang kuasa itu harus seorang advokat, yang mempunyai surat izin praktik dan bergelar Sarjana Hukum, terkecuali pada perkara yang dikuasakan kepada seseorang yang mempunyai

hubungan keluarga (sedarah atau karena perkawinan) atau mempunyai hubungan kerja.[276]

B. Tinjauan Tuntutan Hak

1. Pengertian Tuntutan Hak

Di dalam kehidupan masyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materil, sebagai lawan hukum perdata materil adalah hukum perdata formil[277].

Dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini sering kali dalam hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidaklah sama, karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik dalam menjalin hubungan hukum umumnya kemungkinannya kecil sekali timbulnya masalah karena dalam hubungan hukum yang

[276] Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op.Cit.*, hlm. 4-7.
[277] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*., hlm. 1.

didasari dengan etika yang baik, kalau terjadi permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau perdamaian di luar persidangan. Akan tetapi jika dalam hubungan hukum ada salah satu pihak yang beretika tidak baik sudah barang tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut[278].

Suatu proses penyelesaian sengketa hukum keperdataan adalah merupakan proses pelaksanaan tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah -*eigenrichting*‖ atau tindakan main hakim sendiri[279].

2. Macam-macam Tuntutan Hak

Tuntutan hak ada dua macam yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut gugatan dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, dimana hanya terdapat satu pihak saja. Lazimnya peradilan dibagi menjadi peradilan volunter (*voluntaire jurisdictie*) yang sering juga disebut -peradilan sukarela‖ atau peradilan -yang tidak sesungguhnya‖ dan peradilan contentieuseu (*contentieuseu jurisdictie*) atau -peradilan sesungguhnya‖ tuntutan hak yang merupakan permohonan yang tidak mengandung sengketa termasuk di dalam peradilan volunter, sedangkan gugatan termasuk peradilan *contentieuseu*[280].

[278] Sarwono, *Op.Cit*. hlm. 1.
[279] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.,* hlm. 2.
[280] *Ibid*, hlm. 4

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkatawinata menjelaskan bahwa di samping perkara gugatan, dimana terdapat pihak Penggugat dan pihak tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secarabersama-sama. Perbedaan antara gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang ‐merasa‖ bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang ‐dirasa‖ melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak yang tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar.

Dalam perkara yang disebutkan permohonan tidak ada sengketa, misalnya apabila segenap ahli waris almarhum secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dan warisan almarhum. Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan declaratoir, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan

saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan sesuatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan[281].

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa konsep perkara meliputi dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipersengketakan, atau ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya adalah sengketa warisan, jual beli, dan pemakaian merek dagang. Tugas pengadilan adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas pengadilan yang demikian ini termasuk dalam *jurisdictio contentiosa*, artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Pengadilan dalam menjalankan tugas berdasarkan jurisdictio contentiosa harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun (*independent justice*).

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan pengadilan tetapi minta ketetapan dari pengadilan tentang status suatu hal sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati

[281] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*., hlm. 10.

dan diakui oleh semua orang, contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah atau permohonan tentang pengangkatan anak. Tugas pengadilan semacam ini termasuk dalam *jurisdictio voluntaria* artinya kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, tetapi bersifat administrasi saja. Dalam hal ini pengadilan bertugas sebagai pejabat administrasi negara untuk mengatur suatu hal[282].

Moh. Taufik Makarao menjelaskan perbedaan antara permohonan dan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan, misalnya segenap ahli waris secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum. atau permohonan untuk mengganti nama dari Liem Sio Liong menjadi Sudono Salim, atau permohonan pengangkatan seorang anak, wali, pengapu, perbaikan akta catatan sipil.
2. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak Penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.

[282] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm. 12.

3. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan *contentiosa* atau pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan *voluntair* atau pengadilan pura-pura.
4. Hasil suatu gugatan adalah putusan (*vonis*) sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan (*beschikking*)[283].

Zainal Asikin mengatakan perbedaan antara permohonan dengan gugatan dengan pedoman yaitu sebagai berikut :

1. Perkara *Contentiosa* (gugatan), yaitu perkara yang didalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atau sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Gugatan atas konflik tersebut harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan apakah berakhir dengan kalah, menang, atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa milik, warisan, dan lain-lain.
2. Perkara Voluntaria yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*exparte*). Perkara ini disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, persoalan wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan lain-lain[284].

Menurut Zainal Asikin perbedaan antara contentiosa dengan voluntaria adalah sebagai berikut :

[283] Moh. Taofik Makarao, *Op.Cit*., hlm. 16-17.
[284] Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 15.

1. Pihak yang berperkara, Dalam *contentiosa*, pihak yang berperkara adalah Penggugat dan tergugat. Namun terdapat juga istilah turut tergugat (Tergugat II, III, IV dan seterusnya). Pihak Turut Tergugat ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu. Namun hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tanggal 6-8-1973 Nomor 663K/Sip/1971, tanggal 1-8-1973 Nomor 1038K/Sip/1972), sedangkan turut penggugat tidak dikenal dalam HIR maupun praktik sementara dalam voluntaria pihak yang berperkara adalah permohonan. Istilah pihak pemohon dalam perkara voluntaria di atas sebenarnya tidak relevan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebab dalam undang-undang tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada isterinya, sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon dalam hal ini berarti ada sengketa atau konflik. Istilah pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria.
2. Aktivitas hakim dalam memeriksa perkara, Dalam contentiosa, apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak bersifat tertentu dan terbatas, dan hakim harus memutus sebatas yang diminta dan digugat.

3. Kebebasan hakim, Dalam contentiosa, hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang. Sementara dalam voluntaria hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya
4. Kekuatan mengikat putusan hakim, Dalam *contentiosa* putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang lain yang telah didengar sebagai saksi. Sementara voluntaria putusan hakim mengikat terhadap semua pihak.
5. Hasil akhir perkara, Hasil suatu gugatan (*contentiosa*) berupa putusan (vonis), sedangkan hasil suatu permohonan (*voluntaria*) adalah penetapan (*beschiking*).[285]

C. Tinjauan Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Menurut Djamarat Samosir gugatan perdata adalah suatu gugatan atau tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang atau sekelompok orang, baik yang terikat dalam suatu badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditujukan kepada pihak lain melalui pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikannya, yang mengandung sengketa[286], sedangkan menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku Penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau

[285] *Ibid*, hlm. 17-18.
[286] *Ibid*, hlm. 53.

lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai Penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat atau gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut[287].

Pengajuan suatu gugatan ke pengadilan berkaitan dengan suatu perselisihan (konflik), yaitu ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perkataan ‑merasa‖ dan ‑dirasa‖ mempunyai arti bahwa belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar hak Penggugat. Oleh karena itu, masih perlu dibuktikan hak perdatanya melanggar atau tidak. Akan tetapi, ada orang yang bertindak sebagai Penggugat ataupun tergugat tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak atas namanya sendiri untuk kepentingan orang lain, maka yang mempunyai kepentingan adalah pihak yang diwakilinya. Mereka ini yang memihak atas namanya termasuk pihak formil. Advokat atau pengacara bukan pihak materil meskipun bertindak atas nama dan kepentingan kliennya[288].

Dalam gugatan perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak yang dinamakan Penggugat (*eiser, plaintiff*) dan tergugat (*gedaagde, defendant*). Penggugat adalah seseorang atau beberapa orang,

[287] Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 19.
[288] Djamarat Samosir, *Op.Cit*., hlm. 56.

sekelompok orang, baik yang terikat dalam suatu badan hukum maupun bukan badan hukum, yang merasa atau dirasa haknya dilanggar atau mereka yang merasa atau dirasa haknya dirugikan. Adapun tergugat adalah pihak yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap melanggar hak orang lain atau mengakibatkan rugi orang lain, perkataan ‑merasa dan dirasa‖ mempunyai arti bahwa pihak Penggugat maupun pihak tergugat yang diajukan ke muka persidangan belum tentu benar dan salah oleh karena itu, harus dibuktikan di persidangan[289].

Kemungkinan terjadi banyak Penggugat dan juga banyak tergugat, maka dapat disusun dengan urutan Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Demikian juga tergugat dapat disusun dengan urutan Tergugat I, II, III dan seterusnya. Turut Tergugat adalah pihak yang ditarik ke dalam perkara. Di dalam HIR/RIB tidak ada dijumpai istilah ‑turut tergugat‖, tetapi dalam praktik sudah sering digunakan. Turut Tergugat digunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Keikutsertaan turut tergugat itu ditujukan untuk demi lengkapnya suatu gugatan. Mereka ini dalam petitum hanya dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim (Putusan MA tanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan Sip/1972). Turut Penggugat tidak dikenal dalam hukum acara. Dalam praktik, walaupun dicantumkan dalam gugatan, Pengadilan menganggapnya sebagai Penggugat (Putusan MA, tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974). Selain itu dalam praktek di pengadilan pernah digunakan turut Penggugat, yaitu dalam Yurisprudensi

[289] *Ibid*, hlm. 57-58.

No. 2001 K/Sip/1974 tanggal 26 Januari 1976, ditentukan bahwa turut Penggugat dianggap sebagai Penggugat. Oleh karena itu sebaiknya tidak perlu dibuat Turut Penggugat[290]. Pihak Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Penggugat orang pribadi (*naturlijk person*).
2. Penggugat yang belum dewasa, misalnya karena kedudukannya sebagai ahli waris harus diwakili oleh orang tua atau walinya.
3. Penggugat yang berada di bawah pengampunan (*curatele*) seperti karena gila, pemboros atau sakit ingatan terhadap mereka itu perlu ada penetapan pengadilan.
4. Penggugat badan hukum (*rechtsperson*), misalnya PT, Yayasan, Koperasi, BHMN, BHP, dan partai polik.
5. Penggugat yang mewakili badan usaha atau persekutuan yang bukan badan hukum, misalnya CV. Firma (Fa), Usaha Dagang, dan Kongsi[291].

Adapun pihak tergugat dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Tergugat orang pribadi (*naturlijk person*).
2. Tergugat yang belum dewasa, misalnya karena kedudukannya sebagai ahli waris diwakili oleh orang tua atau wali.
3. Tergugat yang berada di bawah pengampunan (*curatele*), karena gila, pemboros, atau sakit ingatan, terhadap mereka ini perlu ada penetapan pengadilan.

[290] *Ibid*, hlm. 59-60.
[291] *Ibid*, hlm. 58.

4. Tergugat badan hukum (rechtsperson), misalnya PT, Yayasan, Koperasi, BHMN, BHP dan Partai Politik.
5. Tergugat yang mewakili badan usaha atau persekutuan yang bukan badan hukum, misalnya CV. Firma (Fa), Usaha dagang dan kongsi.[292]

Keberadaan gugatan adalah karena ada pihak tergugat yang disangka dan cukup beralasan dirasa telah merugikan pihak Penggugat. Maka sangatlah penting bagaimana menentukan tergugat, karena salah menentukan tergugat dalam gugatan akan ditolak, tidak dapat diterima. Hal ini pun di dalam praktik sering terjadi kesulitan untuk menentukan tergugat dapat berpedoman sebagai berikut :

1. Ikatan hukum, baik karena perjanjian maupun karena Undang-undang.
2. Ikatan hukum karena kronologi peristiwa hukum, misalnya orang yang bertindak sebagai otak/provokator (*intelektual dader*) terjadinya peristiwa hukum, tetapi sulit dibuktikan formalitasnya.
3. Namanya disebut-sebut dalam keterangan calon saksi.
4. Namanya tertera dalam dokumen tertulis baik dalam notulen sertifikat, petok atau dokumen lainnya (yurisprudensi MARI No. 480/K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974).
5. Menggunakan prinsip lebih baik pihaknya banyak daripada kurang, yang dapat menjadikan gugatan kurang baik (*plurium consortium*).
6. Penggugat maupun tergugat disebut sebagai pihak materil dan formil.[293]

[292] *Ibid*.

Menurut Zainal Asikin suatu gugatan mempunyai ciri khas yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*).
2. Terjadi sengketa diantara para pihak, minimal diantara dua pihak.
3. Bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
4. Tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*), hanya pihak yang gugat atau tergugat saja.
5. Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktur dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak.
6. Diajukan oleh orang yang berkepentingan.
7. Diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi).[294]

2. Sistematika Gugatan

Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk menentukan siapa yang benar atau berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim[295]. Suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan

[293] *Ibid*, hlm. 58-59.
[294] Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 20.
[295] Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op.Cit.*, hlm. 18.

haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan Penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya[296].

Gugatan pada dasarnya berisi tuntutan yang diajukan oleh seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang (Penggugat) kepada tergugat. Gugatan tersebut ditujukan kepada pihak lain (Tergugat), melalui pengadilan berhubung adanya perselisihan, konflik, atau permasalahan hukum. Pihak lain (tergugat) tersebut dapat berupa seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang yang terikat dalam suatu badan maupun bukan badan hukum[297]. Suatu gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan melalui pengadilan yang mempunyai kewenangan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif/nisbi untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Penggugat dalam menyusun dan merumuskan surat gugatannya harus cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, sehingga surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan telah disusun dan dirumuskan sedemikian rupa secara sistematis memenuhi syarat-syarat[298] suatu gugatan harus sejelas mungkin, tidak boleh kabur atau samar-samar, baik

[296] Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 31.
[297] Djamarat Samosir, *Op.Cit*., hlm. 52.
[298] Riduan Syahrani, *Op.Cit*., hlm. 34.

subjek hukumnya, objek sengketanya, maupun tentang apa yang dituntut oleh Penggugat[299].

Agar suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya, maka suatu gugatan yang diajukan kepada suatu pengadilan harus memperhatikan hal-hal yang harus termuat dalam gugatan yaitu sebagai berikut :

1. Identitas dari pada para pihak. Bagian ini berisi mengenai identitas yang terang dari pihak-pihak yang berperkara meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
2. Posita

   Merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middellen van den eis*) atau dikenal juga dengan sebutan fundamentum petendi. Pundamentum petendi atau dasar dari tuntutan terdiri dari bagian, yaitu bagian menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan hukum.

   Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara, sedang uraian tentang hukum ialah suatu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan.

[299] Djamanat Samosir, *Op.Cit*., hlm. 54.

3. Petitum

Petitum atau tuntutan ialah apa yang diminta oleh Penggugat atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum ini akan mendapatkan jawabannya di dalam dictum atau amar putusan. Maka Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, sebab tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan ini (*niet onvankelijk verklaard*). Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, akan dieksepsi -obscur libel‖ berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.[300]

Menurut Sudikno Mertokusumo pada pokoknya suatu gugatan harus memuat terdiri dari : 1. Identitas; 2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan- alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan pundamentum petendi; dan 3. Tuntutan / *onder werp van den eis meet een duidelijke en kepaalde conclusie*) atau petitum [301] . Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari Penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, umur serta status kawin atau tidak, perlu juga dicantumkan[302]. Pundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian

[300] Bambang Sugeng AS dan Sujayadi, *Op.Cit*., hlm. 21-22.
[301] Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.*, hlm. 56
[302] *Ibid*.

merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Uraian ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan[303]. Menurut Krisna Harahap mengharuskan gugatan memuat sebagai berikut :

1. Identitas dari pihak-pihak yang berperkara.
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan gugatan (*middelen van den eis*) atau dikenal dengan istilah Fundamentum Petendi atau Posita.

Yang dimaksud dengan identitas meliputi ciri-ciri dari Penggugat maupun Tergugat meliputi Nama, Alamatnya, pekerjaannya dan sebagainya, sedangkan Fundamentum Petendi merupakan :

1. Uraian tentang peristiwanya.
2. Uraian tentang hukumnya.

Mengenai peristiwa dijelaskan mengenai duduk perkara sedangkan tentang hukum diuraikan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan. Sedangkan petitum adalah apa yang diminta oleh Penggugat atau yang diharapkannya diputus oleh hakim harus terdapat dalam petitum. Karena itu petitum harus jelas serta tegas. Petitum tidak boleh berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan (*obscuur libel*). Gugatan yang *obscuur libel*

[303] *Ibid*.

kemungkinan besar akan ditolak oleh hakim. Petitum terdiri dari Petitum Primer dan Petitum Subsider. Petitum Subsider biasanya diajukan bersama-sama petitum primer sebagai gugatan cadangan seandainya gugat pokok (primer) itu ditolak oleh hakim. Di dalam praktek petitum subsider itu biasanya terdiri dari kalimat sebagai berikut : -Agar Hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya[304].

Sampai berapa jauhkah harus diberikan perincian tentang yang menjadi dasar tuntutan ? Ada yang berpendapat bahwa dalam gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, akan tetapi harus pula disebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi Penggugat yang menuntut miliknya, misalnya saja tidak cukup disebutkan dalam gugatannya bahwa ia adalah pemiliknya, harus disebutkan juga bahwa ia menjadi pemiliknya karena barang itu telah dibelinya. Sejarah terjadinya hak atau hubungan hukum menurut teori ini, harus disebutkan (*substantierings theorie*). Oleh karena Penggugat masih ada kesempatan untuk membuktikan tentang asal mula diperolehnya hak itu di persidangan, maka dirasakan kurang perlunya

[304] Krisna Harahap, *Op.Cit*., hlm. 13-14.

memuat sejarah diperolehnya hak sehingga teori ini sekarang boleh dikatakan telah ditinggalkan[305].

Teori lain, yang disebut teori individualisasi (*individualisering theorie*) menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan harus cukup menunjukan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa disebutkan dasar terjadinya atau sejarah terjadinya, karena hal itu dapat dikemukakan di dalam persidangan pengadilan dengan disertai pembuktian. Menurut Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547K/Sip/1971, perumusan kejadian materil secara singkat sudah memenuhi syarat.[306] Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya di dalam diktum atau amar putusan. Oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas[307].

Menurut Sophar Maru Hutagalung menyatakan bahwa agar gugatan tidak ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima gugatna haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
2. Identitas seperti nama, pekerjaan, alamat dan sebagainya dan penggugat dan tergugat harus jelas.
3. Objek gugatan harus jelas.

[305] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 56-57.
[306] *Ibid*, hlm. 57.
[307] *Ibid*.

4. Pihak pengguat maupun tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan.
5. Pihak Penggugat maupun tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*handeling sbekwaamheid*).
6. Dalil-dalil atau posita harus mempunyai *handelings*/dasar peristiwa dan dasar hukum (pundamentum petendi) cukup kuat.
7. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu.
8. Peristiwa hukum pernah diajukan dan diputuskan oleh pengadilan.
9. Ada atau tidak adanya penundaan masalah.
10. Jumlah tergugat supaya lengkap.
11. Pengajuan tuntutan atau petitum yang jelas dan tugas yang dapat terdiri dari petim primair, petitum tambahan dan petitum subsidair[308].

Bahwa apa yang harus termuat dalam suatu gugatan sebagaimana diuraikan di atas, secara singkat dapat dikatakan terdiri dari identitas para pihak, posita atau pundamentum petendi dan petitum atau tuntutan yang ketiga hal tersebut adalah merupakan sistem dalam arti merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya terjalin hubungan yang erat atau saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga dengan demikian antara bagian posita atau pundamentum pentendi dengan bagian petitum harus berhubungan, misalnya apabila pada

[308] Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan… Teknis*, *Op.Cit*., hlm. 29-30.

bagian posita atau pundamentum petendi didalilkan bahwa tergugat telah menguasai dan memiliki harta warisan bagian Penggugat, maka dalam petitumnya harus dituntut agar tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bagian warisan tergugat kepada Penggugat atau apabila pada bagian posita atau pundamentum petendi didalilkan bahwa tergugat telah menguasai harta warisan bagian Penggugat, akan tetapi dalam petitumnya tergugat dituntut untuk menyerahkan harta bersama bagian Penggugat, maka dalam hal ini terjadi pertentangan antara posita dengan petitum, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas.

D. Jawaban Tergugat Atas Gugatan Penggugat

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktur (*contradictoir*) yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat untuk membantah dalil-dalil Penggugat, dan sebaliknya Penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah atau jawab menjawab, baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*)[309]. Pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoir* dapat dilakukan melalui verstek atau tanpa bantahan yaitu apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Setelah pemeriksaan sengketa antara dua pihak atau lebih diselesaikan dari awal

[309] Zainal Asikin, *Loc.Cit*, hlm. 20.

sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut[310].

Pada dasarnya tergugat tidak wajib menjawab gugatan Penggugat, tetapi jika tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis dan secara lisan hendaknya disusun dengan baik supaya dapat menahan serangan Penggugat dapat berhasil. Bila perlu Tergugat dapat membalikan jawabannya dengan gugat balik. Dalam perkara perdata kalah menangnya pihak yang digugat tergantung juga pada kelihaian membela diri, bagaimana cara menjawab gugatan dengan baik[311]. Jawaban Tergugat diajukan setelah usaha pedamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil [312] atau dengan kata lain apabila upaya perdamaian tidak berhasil jawaban dari pihak Tergugat akan diajukan[313].

Jawaban tergugat terjadi setelah tidak tercapai perdamaian dan setelah pembacaan gugatan dari pihak Penggugat/para Penggugat atau kuasanya. Secara umum jawaban tergugat adalah pembelaan tergugat atas gugatan Penggugat dan secara sempit adalah tanggapan terhadap pokok perkara. Jawaban Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya sering disebut dengan istilah ‖jawaban dalam konvensi‖ (*Verweerten Principle*). Yang dimaksud jawaban tergugat adalah suatu perlawanan atau penyangkalan atau tanggapan tergugat/para tergugat/kuasanya terhadap dalil-dalil tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/para Penggugat atau kuasanya [314] . Dalam perkara perdata terdapat adagium bahwa dalam kalah atau menang pihak yang digugat sangat

[310] *Ibid*, hlm. 20
[311] Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op.Cit*., hlm. 50.
[312] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 37-38.
[313] Krisna Harahap. *Op.Cit.*, hlm. 45.
[314] Djamarat Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 178.

tergantung pada kelihaian membela diri, yaitu bagaimana membela diri yaitu bagaimana cara menjawab gugatan dengan baik. Namun demikian, sebaiknya tergugat/para tergugat atau kuasanya dalam membuat jawaban hendaknya jelas, berisi, dan langsung menjawab persoalan terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat/para Penggugat atau kuasanya dengan mengemukakan alasan-alasannya yang mendasar [315] . Menurut R. Subekti jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam yakni sebagai berikut :

1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi.
2. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara (*verweer tan principale*)[316].

1. Jawaban Luar Pokok Perkara

Jawaban Tergugat dapat berupa jawaban yang langsung mengenai pokok perkara, baik dalam bentuk pengakuan atau bantahan terhadap pokok perkara atau jawaban dalam bentuk tangkisan atau eksepsi [317] . Jawaban yang berupa eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosesuil gugatan tidak benar, atau eksepsi berdasarkan ketentuan materil (eksepsi dilatoir dan eksepsi peremtoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O = Niet Onvarkelijk Verklaard*)[318] misalnya Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)[319].

---

[315] *Ibid*.
[316] R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 59, lihat juga Bambang Sugeng dan Sujayadi, Op.Cit, hlm. 50.
[317] Ibid.
[318] R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta 2018, hlm. 81.
[319] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*., 2013, hlm. 419.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat selain dapat memberikan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga dapat memberikan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut dengan eksepsi yaitu suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan [320] atau bantahan yang menangkis tuntutan Penggugat sedang pokok perkara tidak disinggung[321].

Dalam konteks hukum acara eksepsi mempunyai arti tangkisan atau bantahan (*objection*), meskipun istilah tangkisan atau bantahan mempunyai bentuk yang sama, istilah ini mempunyai makna yamg berbeda. Eksepsi itu ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, misalnya gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, ketidakwenangan mengadili perkara, kebatalan gugatan, tenggang waktu (*termen van beraad*), penghukuman untuk melelang suatu benda (*uitwinning*), pemecahan utang (*schulsplitsing*) atau penutupan kemungkinan suatu banding[322].

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengatakan bahwa tentang tangkisan atau eksepsi HIR hanya mengenal satu macam eksepsi ialah eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim [323] . Eksepsi ini terdiri dari dua macam ialah eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut dan eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif. Kedua

[320] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*., hlm. 129.
[321] R. Supomo, *Op.Cit*., hlm. 48.
[322] Djamanat Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 178.
[323] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 39-39.

macam eksepsi ini termasuk eksepsi yang menyangkut acara, dalam hukum acara perdata disebut eksepsi prosesuil (*procesusueel*)[324]. Lain-lain eksepsi prosesuil adalah eksepsi bahwa persoalan yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, eksepsi bahwa persoalan yang sama sedang pula diperiksa oleh pengadilan negeri yang lain atau masih dalam taraf banding atau kasasi dan eksepsi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak [325] . Eksepsi yang berdasar hukum materil ada 2 macam yakni sebagai berikut : (1) Eksepsi dilatoir dan (2) Eksepsi peremptoir. Kedua eksepsi tersebut juga disebut eksepsi materil[326]. Eksepsi dilatoir adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya oleh karena Penggugat telah memberikan penundaan pembayaran. Eksepsi Peremptoir adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu, dengan lain perkataan telah kedaluarsa atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan[327].

Selain eksepsi terhadap kewenangan atau kompetensi Pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat dapat juga mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam bentuk eksepsi yang berupa eksepsi prosesuil dan eksepsi materil sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa : *Eksepsi prosesuil* adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tdak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak

[324] *Ibid*, hlm. 39.
[325] *Ibid*.
[326] *Ibid*.
[327] *Ibid*.

diterima berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Hanya dalam hal ketidakwenangan hakim atau batalnya gugatan, hakim bukannya menyatakan tidak diterimanya gugatan, melainkan menyatakan dirinya tidak berwenang atau menyatakan gugatan batal. Termasuk *eksepsi prosesuil* ialah tangkisan yang bersifat mengelakkan (*eksepsi declinatoir*) seperti eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, dan eksepsi bahwa perkara telah putus, serta eksepsi bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*eksepsi disqualificatoir*). Sedangkan *eksepsi materiil* merupakan bantahan yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil. Termasuk eksepsi materiil ialah eksepsi yang bersifat menunda (*eksepsi dilatoir*) seperti eksepsi bahwa tuntutan Penggugat belum dapat dikabulkan berhubung Penggugat memberi penundaan pembayaran, dan eksepsi peremptoir yang sudah mengenai pokok perkara, seperti eksepsi karena lampaunya waktu (kedaluwarsa) atau karena tergugat dibebaskan dari membayar[328].

Djamanat Samosir menyebutkan eksepsi prosesuil diluar kompetensi antara lain sebagai berikut :

a) Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Hal ini karena surat kuasa bersifat umum (Pasal 123 HIR) dan tidak memenuhi syarat formil (Pasal 123 ayat [1] HIR), surat kuasa yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang, surat kuasa yang tidak menyebut kompetensi relatif,

[328] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*., hlm. 129.

surat kuasa substitusi yang tidak sah, atau surat kuasa yang dibuat di luar negeri yang tidak dilegalisasi konsulat jenderal atau perwakilan RI yang ada di negara tersebut.

b) Eksepsi *error in persona* meliputi eksepsi diskualifikasi (*disqualificatoir exception*), eksepsi yang mengatakan orang yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak atau karena keliru pihak yang ditarik sebagai Penggugat, atau *exception pluris litis consorsium*, yaitu eksepsi yang menyatakan surat gugatan Penggugat mengandung cacat formal/kurang lengkap.

c) *Exceptio van gewijsde zaak* atau *exception res judicata* atau *ne bis in idem*, eksepsi dari Tergugat yang menyatakan persoalan yang sama telah diputusan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 1917 KUHPdt).

d) *Exceptio obscuur libel* yakni eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kabur. Kekaburan suatu gugatan dalam praktik masing-masing disebabkan oleh faktor tertentu, antara lain tidak jelas dasar hukum dalil gugatan atau tidak jelas objek sengketa, misalnya batas-batas tanah tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

e) Eksepsi koneksitas yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat ada hubungannya atau koneksitas dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum diputus.

f) *Exceptio van beraad* yaitu eksepsi gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (*premature*)[329].

Selanjutnya Djamanat Samosir menguraikan eksepsi hukum materiil (*materiele exceptie*) adalah eksepsi yang didasarkan pada perkara materiil. Dalam eksepsi hukum materiil, tergugat/para tergugat atau kuasanya dapat mengajukan jawaban berupa tangkisan terhadap dalil-dalil Penggugat/para Penggugat atau kuasanya. Eksepsi hukum materiil antara lain adalah sebagai berikut :

a) *Exceptio dilatoir* yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya karena gugatan telah diajukan lampau waktu atau utangnya menjadi dasar gugatan telah dihapuskan. Dalam hal ini gugatan masih tertunda pengajuannya.
b) *Exceptio peremptoria* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan atau menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Tujuannya adalah menyingkirkan gugatan karena apa yang digugat telah tersingkir. Eksepsi ini dikenal beberapa bentuk antara lain sebagai berikut :
   (1) Eksepsi *temporis* (eksepsi kedaluwarsa) yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa dasar hukum memperoleh sesuatu atau landasan untuk membebaskan sesuatu dari suatu perikatan itu sudah lewat waktu/ kedaluwarsa.

[329] Djamanat Samosir, *Op.Cit*., hlm. 185-186.

(2) Eksepsi *non pecuniae numeratae* yaitu eksepsi yang berisi sangkalan tergugat (tertagih) bahwa uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali tidak pernah diterima.

(3) Eksepsi *doli mali* yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan penipuan dalam pembuatan perjanjian.

(4) Eksepsi *metus* yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung paksaan (*dwang* atau *compulsion*).

(5) Eksepsi *non adimpliti contractus* eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan tidak berdasar karena Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya.

(6) *Eksepsidominii* yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa objek barang yang digugat bukan milik Penggugat tapi milik orang lain atau milik Tergugat.

(7) Eksepsi *litis petendi* yaitu eksepsi Tergugat atau kuasanya yang menyangkut persoalan yang sama-sama sedang diperiksa oleh PN yang lain atau masih dalam taraf banding atau kasasi. Disebut juga eksepsi sub-*judice*, yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*)[330].

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa ilmu hukum acara perdata mengembangkan jawaban eksepsi dengan menggolongkannya menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

[330] *Ibid*, hlm. 186-187.

a. Eksepsi Tolak (*declinatoir exeptie, declinatory exception*) yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan termasuk jenis ini adalah eksepsi tidak berwenang memeriksa gugatan, batalnya gugatan, perkara sudah pernah diputus, dan Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, tidak mungkin naik banding.
b. Eksepsi tunda (*dilatoir exceptie dilatory exception*) yaitu eksepsi yang bersifat menunda diteruskannya perkara. Termasuk jenis ini adalah eksepsi mengenai ada penundaan pembayaran dari Penggugat, sehingga tuntutan belum dapat dikabulkan.
c. Eksepsi halang (*peremptoir exceptie, peremptory exceptie, peremptory exception*) yaitu eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat, tetapi telah mendekati pokok perkara termasuk jenis ini adalah jenis eksepsi tentang lampau waktu dan tentang penghapusan utang[331].

Eksepsi tolak disebut juga eksepsi formal (*processuele*) karena didasarkan pada ketentuan dalam hukum acara perdata. Tergugat memberikan jawaban yang berupa eksepsi formal untuk menangkis agar pokok perkara tidak diperiksa karena bukan wewenang majelsi hakim atau karena tidak diperkenankan menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Eksepsi tunda dan eksepsi halang disebut juga eksepsi materil (*materiele*) karena didasarkan pada ketentuan hukum materi (hukum

[331] Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 110.

perdata). Tergugat memberikan jawaban yang berupa eksepsi materil untuk menangkis agar pokok perkara tidak diperiksa atau diteruskan karena bertentangan dengan ketentuan hukum perdata[332].

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pada proses peradilan perkara perdata jawaban tergugat terhadap gugatan Penggugat dapat berupa eksepsi terhadap kewenangan atau kompetensi pengadilan yang meliputi eksepsi terhadap kewenangan atau kompetensi relatif/kompetensi nisbi dan eksepsi terhadap kompetensi atau kewenangan absolut/kompetensi mutlak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku maupun eksepsi menurut ilmu pengetahuan yang berupa eksepsi prosesuil, yang antara lain berupa eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*exceptio obscur libel*).

2. Jawaban Dalam Pokok Perkara

Secara umum jawaban tergugat adalah pembelaan tergugat atas gugatan Penggugat dan secara sempit adalah tanggapan terhadap pokok perkara. Jawaban tergugat/para tergugat atau kuasanya sering disebut dengan istilah -Jawaban Dalam Konvensi‖ (*Verweerien Principle*), yang dimaksud dengan jawaban tergugat adalah suatu perlawanan atau penyangkalan atau tanggapan tergugat/para tergugat/kuasanya terhadap dalil-dalil tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/para Penggugat[333].

[332] Ibid, hlm. 110-111.
[333] Djamanat Samosir, *Op.Cit*., hlm. 178.

Jawaban dalam pokok perkara (konvensi) ini merupakan bantahan terhadap dalil atau fundamentum petendi yang diajukan Penggugat, misalnya A (Penggugat) menuntut B (tergugat) agar meninggalkan tanah yang dikerjakan B dengan dalil bahwa tanah tersebut adalah milik A sebagai tanah waris bapaknya C pemilik tanah asal yang sudah meninggal dunia, adanya patok D dan letter C yang masih atas nama C, tidak pernah melihat atau mengetahui adanya transaksi antara B dan C atas tanah tersebut. Dalam contoh tersebut, B dapat membantah dalil A dengan alasan sebagai berikut A diragukan sebagai ahli waris, Patok D dan letter C bukan bukti pemilikan, B mempunyai akta jual beli, sehingga berdasarkan bantahan atau tangkisan tersebut B dapat meminta kepada hakim agar gugatan ditolak[334].

Jawaban tergugat yang mengenai pokok perkara hendaknya dibuat dengan jelas, pendek dan berisi, langsung menjawab pokok persoalan dengan mengemukakan alasan-alasan yang berdasar. Membuat jawaban yang panjang lebar dan tidak berisi berarti membuang waktu dan tenaga dengan percuma[335]. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara, baik dalam bentuk pengakuan atau bantahan terhadap pokok perkara. Pengakuan ialah jawaban yang membenarkan isi gugatan artinya apa yang digugatkan terhadap tergugat diakui kebenarannya. Dalam jawaban

[334] Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan ...Op.Cit.,* hlm. 77.
[335] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

tergugat sampai ke tingkat banding, tergugat tetap terikat dengan pengakuannya itu, artinya pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali[336].

Bantahan ialah pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugatkan terhadap tergugat. Jika tergugat mengajukan bantahan, maka kenyataannya itu harus disertai dengan alasan-alasannya. Bantahan secara umum dengan mengatakan bahwa keterangan dan tuntutan itu adalah tidak benar sama sekali tanpa menyebutkan alasan-alasannya, tidak akan ada artinya dan dianggap hakim sebagai tidak membantah. Dalam prakteknya menyusun jawaban berupa bantahan itu memerlukan uraian tentang kejadian secara terperinci sebelum ditutup dengan kesimpulan dan mohon ditolaknya gugatan[337].

Jawaban tergugat mengenai pokok perkara tidak harus diajukan bersama-sama dengan eksepsi pada permulaan sidang. Akan tetapi selalu dapat dikemukakan selama pemeriksaan berjalan, bahkan dapat diajukan pada tingkat banding, asal tidak bertentangan dengan jawaban pada waktu pemeriksaan tingkat pertama[338]. Bantahan terhadap pokok perkara disebut juga *ver weer ten prinsipale* atau material *verweer* yaitu tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara dapat juga berarti jawaban tergugat mengenai pokok perkara atau bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara esensi bantahan terhadap pokok perkara, berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud

[336] Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op.Cit.*, hlm. 50.
[337] *Ibid*.
[338] Riduan Syahrani, *Op.Cit*., hlm. 77.

untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawaban[339].

Bantahan berarti sebagai perlawanan atau penyangkalan terhadap dalil-dalil pokok yang diajukan Penggugat atau wakilnya, kuasanya. Jadi, bantahan terhadap pokok perkara merupakan suatu penyangkalan atau tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat/para tergugat/kuasanya yang berarti jawaban tergugat/para tergugat atau kuasanya mengenai pokok perkara. Bantahan terhadap pokok perkara sering juga disebut dengan istilah jawaban dalam konvensi (*ver weer ten principle*). Bantahan yang dikemukakan sebagai jawaban dari tergugat/para tergugat atau kuasanya merupakan jawaban sebenarnya dari tergugat terhadap pokok perkara atau terhadap dalil-dalil Penggugat. Artinya jawaban dari tergugat/ para tergugat atau kuasanya untuk penyangkalan dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat/para Penggugat atau kuasanya. Selain itu, jawaban yang tergugat menyangkut pokok perkara disebut juga sanggahan. Tujuan bantahan pada hakikatnya adalah untuk menolak gugatan Penggugat/para Penggugat atau kuasanya. Oleh karena itu, bantahan harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat menyangkal dalil Penggugat[340].

Pengakuan adalah jawaban yang membenarkan isi gugatan artinya apa yang digugatkan terhadap tergugat diakui kebenarannya. Apabila tergugat pada jawaban pertama mengakui, begitu pula pada jawaban berikutnya sampai ke tingkat banding. Tergugat tetap terikat dengan

[339] Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 462.
[340] Djamarat Samosir, *Op.Cit*., hlm. 189.

pengakuannya. Pengakuan tidak dapat ditarik kembali. Pada perkara perdata, pengakuan mempunyai kekuatan bukti sempurna, misalnya, apabila hakim anggota majelis menanyakan kepada tergugat -Apa benar tergugat sudah melunasi utang pada Penggugat ?‖ Dijawab oleh tergugat -Benar Pak hakim, ini kuitansi tanda lunas utang saya‖. Pengakuan semacam ini mempunyai kekuatan bukti sempurna, tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan karena diucapkan di muka sidang pengadilan[341].

Kebalikan dari pengakuan adalah bantahan. Bantahan adalah pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugatkan terhadap tergugat. Jika tergugat mengajukan bantahan, bantahan tersebut harus disertai dengan alasan—alasannya. Bantahan secara umum dengan mengatakan bahwa keterangan dan tuntutan Penggugat itu tidak benar sama sekali tanpa mengemukakan alasan-alasannya, tidak ada artinya dan dianggap majelis hakim sebagai tidak membantah Dalam praktik hukum, menyusun jawaban berupa bantahan memerlukan uraian tentang peristiwa-peristiwa secara rinci sebelum ditutup dengan kesimpulan dan mohon ditolaknya gugatan[342].

E. Konsepsi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa

Jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur

[341] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm. 106.
[342] *Ibid*.

tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat. Hukum Barat melalui asas konkordasi sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat[343].

Disamping itu, ada konsepsi hukum lain diantaranya adalah konsepsi Hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam bahasa Arab disebut hukm jamaknya ahkm[344].

[343] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 43.
[344] *Ibid*.

Hukum suci Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian yang sempit) [345] . Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri. Istilah fiqh yang berarti pengetahuan menunjukan bahwa sejak awal, Islam menganggap pengetahuan tentang ‑hukum suci‖ sebagai pengetahuan *par excellence*, sementara kalam (teologi) belum pernah mencapai posisi yang sama dalam Islam dan hanya tasawuf (*mysticism*) yang mampu mengimbangi pengaruh hukum dalam pemikiran umat Islam, yang seringkali terbukti menang[346].

Akan tetapi, dan bahkan pada saat ini, hukum termasuk pokok bahasannya (dalam pengertian sempit) tetapi merupakan suatu elemen yang penting, jika bukan yang paling penting, dalam perjuangan yang dipertarungkan dalam Islam antara tradisionalisme dan modernisme di bawah pengaruh ide-ide barat. Di samping itu, semua kehidupan umat Islam, literatur bahasa Arab dan disiplin arab serta keislaman tentang belajar sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan, maka mustahil memahami Islam tanpa memahami Hukum Islam. Hukum Islam adalah sebuah contoh yang mengandung pelajaran tentang sebuah ‑hukum suci‖[347].

[345] Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law, Diterjemahkan oleh Joko Supomo Menjadi Pengantar Hukum Islam*, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 21.
[346] *Ibid*.
[347] Joseph Schacht, *Ibid*, hlm. 21.

Menurut Sofyan Hasan ciri-ciri utama Hukum Islam, yakni (1) merupakan bagian bersumber dari agama Islam, (2) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam : (3) Mempunyai dua istilah kunci yakni (a) Syariat Muhammad dan Fiqih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia; (4) terdiri dari dua bidang utama yakni (a) ibadat dan (b) dalam arti yang luas. Ibadat bersifat tertutup karena telah sempurna untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi dari masa ke masa; (5) strukturnya berlapis, terdiri dari (a) nas atau teks Alquran, (b) Sunnah nabi Muhammad (untuk Syari'at), (c) hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang Alquran dan As Sunnah, (d) pelaksanaan dalam praktik, baik (i) berupa keputusan hakim, maupun (ii) berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqih); (6) mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala; (7) dapat dibagi menjadi (a) hukum taklifi atau hukum taklif yakni Al-ahkam al-alkamsah yaitu lima kaidah, lima jenis sunat, makruh, wajib dan haram dan (b) hukum wadhi yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum, (8) berwatak Universal, pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja; (9) Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan; (10) Pelaksanaannya dalam praktik digerakan oleh iman dan akhlak umat Islam[348].

[348] K.N. Sofyan Hasan, *Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum Islam*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 25.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Adapun prinsip hukum Islam adalah prinsip Tauhid; bahwa pelaksanaan hukum Islam merupakan bagian dari ibadah yang menghendaki dan mengharuskan manusia menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah SWT, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah nabi-Nya karena sejatinya Allah adalah pembuat hukum. Jika Abdul Manan menyebutkan dengan istilah prinsip Rabbaniyah karena nilai-nilai pada hukumIslam adalah nilai ketuhanan dimana hukum itu diciptakan oleh sang Khalik untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat[349].

Adapun prinsip khusus adalah derivasi dari prinsip umum tadi yaitu sebagai berikut :

a. Keadilan (al-_adlalah); hukum Islam merupakan tujuan tertinggi dari penerapan hukum, sebab sistem hukum yang tidak berakhir pada keadilan dan akhlak akan tidak memberikan manfaat kepada manusia. Hukum Islam memandang semua orang sama kedudukannya dihadapan Allah SWT, tidak ada kelebihan seseorang dari yang lainnya di hadapan hukum.
b. Persamaan (al-musawwah) yaitu, hukum memberikan kesetaraan tanpa memandang ras, suku, agama, atau derajat dan kedudukannya di hadapan hukum yang dalam istilah hukum dikenal dengan *adagium equality before the law*, hukum Islam tidak menghendaki diskriminatif tetapi bergantung pada tindak perilakunya atau amal perbuatannya.

[349] Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Divisi Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 219.

c. Kebebasan (al-hurriyah), yaitu hukum Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Tidak ada pemaksaan melainkan berdasarkan kehendak pihak-pihak secara bebas sehingga atas pilihannya itu ia harus bertanggungjawab atau dimintakan pertanggungjawabannya.

d. Kemanusiaan (al-insaniyyah); hukum Islam memandang nilai-nilai kemanusiaan sebagai mahluk yang terbaik (al-Insan al-Kamilah) dan memuliakan manusia sehingga segala sesuatu yang diterapkan memperhatikan kemanfaatan dan menghilangkan kesulitan (madharat) bagi manusia.

e. Kemudahan (al-yusra), artinya tidak memberatkan (_adam al-haraji) artinya hukum Islam senantiasa memberi kemudahan dan menjauhi kesulitan dan semua hukum dapat dilaksanakan umat manusia, sehingga dalam hukum Islam dikenal rukhshah (keringanan) atau dharurah (keadaan memaksa) sehingga beban hukum tidak pernah bersifat memberatkan tetapi menghendaki kemudahan bukan kesukaran[350], selain prinsip terdapat lima kaidah induk yaitu : a. Kemudaratan itu harus dihilangkan, b. Segala sesuatu tergantung niatnya, c. Adat istiadat menjadi sumber hukum, d. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan dan e. kesukaran dihilangkan dengan kemudahan[351].

Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun dalam pengertian fiqih dapat dibagi dua yaitu (1) mengenai (bidang) ibadah dan (2) mengenai

[350] *Ibid*, hlm. 219-220.
[351] *Ibid*, hlm. 220.

(bidang) muamalah. Tata cara berhubungan dengan Tuhan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam mendirikan (melakukan) salat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadah. Mengenai (1) ‑ibadah‖ yakni cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Tata hubungan itu tetap tidak mungkin dan tidak boleh diubah-ubah. Ketentuannya telah pasti diatur oleh Allah sendiri dan dijelaskan secara rinci oleh Rasul-Nya. Karena sifatnya yang tertutup itu dalam soal ibadah ini berlaku asas umum yakni semua perbuatan-perbuatan yang dengan tegas disuruh untuk dilakukan. Petunjuk-petunjuk yang menyatakan bahwa itu adalah perbuatan suruhan terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang memuat Sunnah Rasulullo[352].

Dengan demikian, tidak mungkin ada apa yang disebut modernisasi mengenai ibadah atau proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tata cara ibadah itu sendiri seperti telah diatur, yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat moderen dalam pelaksanaannya. Mengenai (2) muamalah dalam pengertian yang luas, yakni : ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan nabi, kalaupun adalah tidak pula terinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Karena itu ‑terbuka‖ sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu.

[352] Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*., hlm. 54-55.

Karena sifatnya yang demikian, dalam soal muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali kalau mengenai perbuatan itu ada larangan di dalam Al Quran dan Al Hadis yang memuat sunnah Nabi Muhammad, untuk menyebut sekedar contoh, misalnya larangan membunuh, mencuri, berzina, menuduh orang lain melakukan perzinahan, meminum minuman yang memabukan (mibuk), mamakan riba[353].

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu, yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja, seperti misalnya (1) munākahāt, (2) wirāsah, (3) mu'āmalāt dalam arti khusus, (4) Jināyat atau _ukubat, (5) al-ahkām as-sulthāniyah (khilāfah), (6) siyār, dan (7) Mukhasamat[354].

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut : Hukum perdata (Islam) adalah (1) Munākahāt mengatur segala sesuatu yang

[353] *Ibid*, hlm. 56.
[354] *Ibid*.

berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) Wirāsah mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum Kewarisan Islam ini disebut juga hukum farā'id; (3) Muamalāt dalam yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya[355]. Hukum publik (Islam) adalah (4) Jināyat yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum baik dalam jārimah hudūd maupun dalam jārimah ta'zīr. Yang dimaksud dengan jārimah adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad (hudūd jamak dan dari hadd = batas). Jarīmah ta'zīr adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zīr = ajaran atau pengajaran); (5) ah-ahkām as-sulthāniyah membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya, (6) siyār mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; (7) mukhasamat mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara[356].

Ahmad Rofiq mengatakan dari perspektif ruang lingkupnya hukum islam meliputi : hukum perdata (al-ahwāl al-syakhshiyah) yang terdiri dari : hukum perkawinan (fiqh munākahat), hukum waris (mawarits),wakaf, hibah

[355] *Ibid*, hlm. 57.
[356] *Ibid*, hlm. 58.

dan shadaqah, hukum pidana (jināyah), hukum acara (murāfa'āt), hukum politik (siyāsah), hukum ekonomi atau dagang (muāmalah) dan hukum internasional[357]. Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas di atas dibandingkan dengan susunan hukum Barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, maka butir (1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan yakni tata negara dan administrasi negara, butir (6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara[358].

Istilah peradilan dalam Islam disebut dengan Qadla' yang memiliki arti beragam diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Al-Qadla' bermakna al-faraagh, artinya putus atau selesai, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al Ahzab ayat 37 dan Q.S. Al Inshirah ayat 7.
2. Al Qadla bermakna al-adaa', artinya menunaikan atau membayar.
3. Al-Qadla bermakna Al-Hukma, artinya mencegah, menghalang-halangi. Dari arti inilah qadli-qadli disebut hakim karena mencegah terjadinya kezaliman orang-orang yang mau berbuat zalim. Adapun qadla artinya orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya[359].

Adapun pengertian qadla' atau peradilan adalah ‑memutuskan hukum antar manusia dengan benar dan memutuskan hukum dengan apa yang

[357] Ahmad Rofiq, *Op.Cit*., hlm 6.
[358] *Ibid*.
[359] Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2018, hlm. 2.

diturunkan Allah‖. Memutuskan dengan benar dan berdasarkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah. Memutuskan dengan benar dan berdasarkan hukum Allah didasarkan pada firman Allah SWT dan hadis nabi antara lain sebagai berikut : Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan (Q.S. Shad (38) : 26). Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka berikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya (Q.S. Yunus (10) : 47). Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya (Q.S. Yunus (10):109). Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah (Q.S. Yusuf (12):40)[360].

Selain itu, aktivitas memutuskan perkara antar manusia sudah terjadi seusia dengan umur manusia itu sendiri. Al-Quran mencatat bagaimana para nabi dan rasul sebagai pembawa risalah menjadi pemutus perkara di antara mereka. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Shad ayat 26, Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi Daud untuk bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara. Nabi Saw. juga dalam hadisnya menceritakan bagaimana Nabi Daud dan Sulaiman memutuskan perkara: Dari Abu Hurairah radliallahu'anhu yang mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

[360] Aden Rosadi, *Ibid*, hlm 2.

bersabda : -Perumpamaanku di hadapan manusia bagaikan seseorang yang menyalakan api lalu kupu-kupu dan hewan-hewan ini masuk ke api tersebut‖. Dan Beliau juga bersabda : -Ada dua orang wanita dengan bayinya masing-masing lalu datang serigala membawa kabur salah satu dari bayi itu. Maka salah seorang dari wanita itu berkata, -Yang dibawa kabur serigala itu adalah anakmu‖. Dan wanita lainnya berkata, -Justru anakmu yang dibawa kabur serigala itu‖. Akhirnya keduanya meminta keputusan kepada Nabi Daud _Alaihissalam lalu Nabi Daud memutuskan bahwa bayi yang ada itu milik wanita yang lebih tua. Namun, keduanya pergi menemui Nabi Sulaiman bin Daud 'alahimassalam dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi kepadanya. Maka Sulaiman berkata : -Berikan pisau agar aku potong bayi ini menjadi dua‖. Wanita yang lebih muda berkata, -Jangan kamu lakukan. Semoga Allah merahmatimu, anak itu miliknya. -Maka akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih muda‖. Abu Hurairah radliallahu _anhu berkata, -Demi Allah, aku belum pernah mendengar tentang _sikkin' (pisau) dalam kisah ini kecuali hari ini dan kami tidak pernah mengatakannya kecuali almudyah (golok)‖ (HR. Bukhari)[361].

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhaniy ra. bahwa keduanya berkata, Ada seorang warga Arab datang kepada Rasulullah shallallahu _alaihi wasallam lalu berkata : -Wahai Rasulullah, aku bersumpah atas nama Allah kepadamu bahwa engkau tidak memutuskan perkara di antara kami melainkan dengan Kitab Allah. Lalu lawan yang tutur

[361] *Ibid*, hlm. 3.

katanya lebih baik dari padanya berkata: -Dia benar, putuskan perkara di antara kami dengan Kitab Allah dan perkenankanlah untukku. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: -Katakan‖. Seorang warga Arab berkata: -Sesunguhnya anakku adalah buruh yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan istrinya maka aku diberi tahu bahwa anakku harus dirajam. Kemudian aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu lalu mereka memberitahu aku bahwa atas anakku cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan untuk istri orang ini dirajam'. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda : ―Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun seorang budak dan kambing seharusnya dikembalikan dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, besok pagi datangilah istri orang ini. Jika dia mengaku maka rajamlah'. Kemudian Unais mendatangi wanita itu dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah shallallahu -alaihi wasallam memerintahkan agar wanita itu dirajam‖ (HR. Bukhari)[362].

Pada masa Khulafaur Rasyidin, peradilan berlangsung relatif sederhana. Hakim pada saat itu tidak memiliki juru tulis (panitera) dan putusan pengadilan tidak dapat dibukukan (kodifikasi). Setiap putusan yang dikeluarkan, secara langsung dilaksanakan oleh hakim. Aturan-aturan terperinci, cara menyampaikan pengaduan, pembagian kerja yang

[362] *Ibid*, hlm. 4.

dilaksanakan kemudian hari, belum dibutuhkan pada masa itu. Wewenang (kompetensi) peradilan para hakim pada masa Khulafaur Rasyidin umumnya terbatas pada perkara perdata. Sedangkan yang berhubungan dengan perkara pidana (hudud dan ta'zir) dilaksanakan oleh khalifah atau sultan (wali). Pada masa Bani Umayyah, putusan pengadilan mulai dicatat agar mudah menjadi rujukan bila terjadi kekeliruan. Syarat-syarat menjadi hakim dan tempat pengadilan ditentukan serta peradilan ketidakadilan (*qadla la-mazhalim*) mulai diperkenalkan. Pada masa Abbasiyah, bentuk dan proses peradilan, atau hukum acara peradilan (hukum formal), mulai dikembangkan: begitu juga jenis-jenis peradilan. Pada masa ini juga dikenal sebutan Hakim Agung (Oadli al-Gudla) atau Hakim Kelompok (Oadli al-Jama'ah) yang relatif mirip dengan kekuasaan kehakiman pada masa sekarang. Ciri lain pada masa ini adalah bahwa para hakim tidak banyak melakukan ijtihad' dan cenderung mengikuti mazhab fiqh yang sudah ada. Dalam konteks ini, pengadilan di Irak memutus perkara berdasarkan mazhab Abu Hanifah, Suria dan Maghribi berdasarkan mazhab Maliki, serta Mesir berdasarkan mazhab Syafi'i[363].

Pada masa berikutnya, bentuk peradilan semakin berkembang dan bervariasi. Ibnu Hasan al-Nabahi menggambarkan bentuk peradilan di Andalusia pada abad kedelapan Hijriah. Ia menyatakan bahwa para hakim (al-hukkam) yang memutus perkara terdiri atas al-gudlat (para gadli, hakim), al-syurthah al-wustha (polisi mayor), al-syurthah al-sughra (polisi minor), shahib al-mazhalim (pejabat masalah ketidakadilan), shahib al-radd (pejabat

[363] *Ibid*, hlm. 4-5.

bantahan, banding), shahib al-madinah (pejabat kota), dan shahib al-suq (pejabat pasar, masalah perdagangan)[364]. Sementara itu, Ibn Oayyim al-Jauziyyah menyebutkan tentang peradilan di negara Maghrib pada abad kedelapan Hijriah. Menurutnya, penetapan dan putusan hakim juga berasal dari lembaga al-Hisbah (perhitungan kekayaan, terutama pejabat negara) yang menjadi wewenang wali al-hisbah. Salah satu tradisi yang diikuti adalah bahwa para personel yang bekerja pada jenis jabatan ini termasuk dalam wewenang khusus. Peradilan al-Mazhalim juga termasuk wilayah khusus, menjadi wewenang apa yang disebut Wali al-Mazhalim (pejabat masalah ketidakadilan). Masalah uang dan mata uang juga termasuk wewenang peradilan khusus dan yang menjadi pejabat disebut wazir (menteri) dan nazir al-balad (inspektur negeri) yang bertugas memeriksa masalah keuangan dan dikenal dengan istilah wilayah istifa‘ (pemenuhan sukatan, timbangan, dan sebagainya). Orang yang bertanggung jawab untuk mengelolanya disebut wilayah al-syarr (pejabat sengketa, pembuktian hak-hak, penyelesaian masalah perkawinan, perceraian, nafkah, sah dan tidaknya menjadi wewenang khusus *al-hakim* serta *al-qadli*)[365].

Pada dasarnya proses peradilan dalam Islam itu berdasarkan pada asas kesederhanaan, sehingga tidak terjadi proses peradilan yang berkepanjangan Namun meskipun proses peradilan ini berdasarkan pada asas kesederhanaan, ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran, seorang hakim dalam mengambil sebuah keputusan hukum harus

[364] *Ibid*, hlm. 5.
[365] *Ibid*.

mempertimbangkan pengaduan dari kedua belah pihak. Tujuan utama dari peradilan adalah menemukan keadilan. Untuk itu, sejumlah prosedur diletakkan agar membantu qadhi dan menyediakan untuknya sarana untuk mengerjakan tugas yudisial. Prosedur itu tidak dimaksudkan untuk mengikatnya dengan aturan pekerjaan jika tidak konsisten dengan keadilan. Dengan begitu, tidak ada prosedur yang terlampau banyak dan kaku, qadhi dapat mengacu pada preseden atau dengan ijtihadnya." Seorang hakim tidak boleh mengambil keputusan kecuali setelah dia mendengarkan pengaduan dari kedua belah pihak secara sempurna hingga tidak ada lagi keraguan tentang kebenaran yang sesungguhnya, hal itu sesuai dengan hadist yaitu dari Ali bahwa : *Rasulullah SAW berkata kepadaku: Jika datang kepadamu dua orang untuk meminta putusan darimu, maka janganlah engkau beri putusan kepada orang pertama sebelum engkau mendengarkan juga (laporan) dari orang kedua, sehingga engkau tahu bagaimana seharusnya kamu memutuskan*[366].

Dalam memutuskan suatu perkara hukum, harus disertakan alat pembuktian dari setiap orang yang berperkara. Adapun alat bukti yang dimaksud dalam peradilan Islam adalah fakta kebenaran yang dikenal dengan nama bayinah, sumpah, saksi, bukti tertulis, dan pengakuan. Kaitannya dengan bukti dan sumpah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibn "Abbas, Nabi SAW bersabda : *Seandainya diberikan kepada manusia apa-apa yang mereka gugat, maka orang-orang akan menggugat harta-harta atau jiwa-jiwa suatu*

[366] Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 14.

kaum. Tetapi (semestinya adalah) bahwa bukti itu didatangkan dari orang yang menggugat dan sumpah itu didatangkan atas orang yang tergugat‖[367].

Adapun mengenai masa yang dibutuhkan bagi berlangsungnya proses mulai dari putusan hingga eksekusi, tidak menunggu waktu melainkan dijalankan secara langsung. Kesimpulan ini bisa dipahami dari beberapa hadis seperti saat Nabi memutuskan persengketaan Ka'ab ibn Malik dengan Ibn Abi Hadrad mengenai piutangnya. Nabi memutuskan agar Ka'ab mengambil separuh dari piutangnya dan merelakan separuhnya. Saat itu juga Nabi memerintahkan Ka'ab untuk segera melaksanakan putusan tersebut dengan mengatakan -*Qum fa iqdlihi* (Lekaslah berdiri wahai Ka'ab dan tunaikanlah)[368].

Terkait prosedur peradilan Islam ini setidaknya dapat mengambil hikmah dari pesan Umar bin Khattab kepada Abu Musa sebagai qadhi adalah sebagai berikut :

1. Hak atas putusan hukum adalah suatu tugas mutlak sesuai sunah.
2. Selidikilah setiap kasus yang dicurigai (untuk menghasilkan kebenaran), karena kebenaran tanpa pelaksanaan adalah sia-sia.
3. Bersikaplah sama antara berbagai pihak.
4. Putusan janganlah karena memandang sosok salah satu pihak alias subjektivitas.
5. Beban pembuktian adalah pada pihak yang menuduh dan sumpah adalah pada pihak yang menyanggahnya.

[367] *Ibid*, hlm. 15.
[368] *Ibid*.

6. Jika ada membuat putusan dan setelah satu periode ternyata diketahui salah, maka jangan ragu memperbaikinya. Memperbaiki keputusan lebih baik daripada mempertahankan ketidakadilan[369].

Menurut H.M. Fauzan asas-asas hukum acara perdata dalam naskah risalah Al-Qadla adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan lembaga peradilan

   Keberadaan lembaga peradilan di suatu negara hukumnya wajib dan sunnah yang harus dilestarikan.

2. Memahami kasus persoalan, baru memutuskannya.

   Pahami persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda dan ambilah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.

3. Samakan pandangan Anda kepada kedua belah pihak dan berlaku adilah.

   Dudukan kedua belah pihak dimajelis secara sama, pandangan mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.

4. Kewajiban pembuktian

   Kewajiban wajib membuktikan gugatannya dan tergugat wajib membuktikan bantahannya.

5. Lembaga damai

   Penyelesaian perkara secara damai dibenarkan sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

[369] *Ibid*.

6. Penundaan persidangan

   Barangsiapa mengatakan ada sesuatu hal yang tidak ada di tempatnya atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian jika dia memberi keterangan hendaklah engkau memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, maka engkau dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya (tidak ada jalan baginya untuk mengatakan ini dan itu lagi), dan lebih menampakan apa yang tersembunyi.

7. Kebenaran dan keadilan adalah masalah universal

   Janganlah engkau dihalangi oleh sesuatu putusan yang telah anda putuskan pada hari ini, kemudian anda tinjau kembali putusan itu lalu anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran itu suatu hal yang qodim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.

8. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan Melakukan Penalaran Logis

   Gunakanlah kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang diajukan kepada anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas dalam **Al-Qur'an dan Sunnah**. Kemudian bandingkan permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum yang serupa kemudian ambilah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.

9. Orang Islam haruslah berlaku adil

Orang Islam dengan orang Islam lainnya haruslah adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka terkecuali dengan apa keterangan dan sumpah.

10. Larangan bersidang ketika sedang emosi

Jauhilah diri anda dari marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenarna itu hanya berada di dalam jiwa yang terang dan niat yang bersih[370].

Peradilan dalam hukum Islam harus dilaksanakan secara cepat dan sederhana, hal ini berdasarkan Q.S. al-Nisa (4): ayat 105, yang artinya bahwa sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. Wahbah Zuhayli menjelaskan bahwa perintah Allah tersebut memberikan makna bahwa peradilan harus dilaksanakan secara cepat sebagaimana pendapat mayoritas Ulama Ushul[371].

Begitu pula nash hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar peradilan dilaksanakan secara cepat tanpa menunda-nunda sebagaimana dijelaskan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinyabahwa saya hanyalah manusia biasa, dan kalian seringkali mengadukan

[370] M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah Di Indonesia*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 94-96.
[371] Wahbah Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, *juz 1, Cet. 1*, Dar Fikr, Damskus, 1986, hlm. 230

sengketa kepadaku, bisa jadi sebagian diantara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada lainnya sehingga aku putuskan seperti yang kudengar, maka barangsiapa yang kuputuskan menang dengan menganiaya hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, sebab sama artinya aku ambilkan sundutan api baginya (Muttafaqun _alaih).

Hadis ini menunjukkan bahwa mengadili antara kedua orang yang berselisih harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah mendengar argumentasi dari kedua orang tersebut. Hal ini dikuatkan dengan Sunnah fi'liyah Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan sengketa antara seseorang dari kaum anshor dan Az Zubair sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dan Shohih Bukhori, yang artinya bahwa Dari 'Abdullah bin Az Zubair radliallahu 'anhuma bahwasanya dia menceritakan bahwa ada seorang dari kalangan Anshar bersengketa dengan Az Zubair di hadapan Nabi SAW tentang aliran air di daerah Al Harrah yang mereka gunakan untuk menyirami pepohonan kurma. Berkata, orang Anshar tersebut: "Bukalah air agar bisa mengalir?" Az Zubair menolaknya lalu keduanya bertengkar di hadapan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, kepada Az Zubair: "Wahai Zubair, berilah air dan kirimlah buat tetanggamu". Maka orang Anshar itu marah seraya berkata; "Tentu saja kamu bela dia karena dia putra bibimu". Maka wajah Rasulullah SAW memerah kemudian berkata: "Wahai Zubair, berilah air kemudian bendunglah hingga air itu kembali ke dasar ladang". Maka Az Zubair berkata: "Demi Allah, sungguh aku menganggap bahwa ayat ini turun tentang kasus ini, yaitu firman Allah dalam surah An-

Nisa ayat 65 yang artinya: ("Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan (H.R. Bukhori). Demikian juga, Nabi MuhammadSAW dengan cepat menyelesaikan sengketa terkait hutang piutang sebagaimana hadis riwayat Muslim, yang artinya bahwa Kaʿab meriwayatkan bahwa beliau mempunyai hutang yang mesti ditunaikan oleh Ibnu Abi Hadrat ; mereka telah berbincang tentang hutang tersebut di masjid dan mereka telah mengangkat suara mereka hingga didengar oleh Rasulullah

S.A.W yang sedang berada di rumahnya. Lalu baginda s.a.w telah keluar menemui kedua-duanya hingga kelihatan langsir biliknya. Baginda berseru: _wahai Kaʿab!‘ lalu Kaʿab menjawab: _ya, wahai Rasulullah.‘ Baginda berkata: _kurangkanlah hutang kamu ini.‘ (dengan memberi isyarat sebahagian daripadanya). Jawab Kaʿab: _saya telah melaksanakannya wahai Rasulullah.‘ Rasulullah lantas berkata (kepada Ibnu Abi Hadrat): _Bangunlah dan tunaikan hutang kamu.‘ (H.R. Muslim). Isyarah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait peradilan dilakukan secara cepat, diikuti oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Umar bin Khattab. Sebagaimana diketahui bahwa Umar bin Khattab selaku Khalifah (pemegang tampuk pemerintahan) sifatnya keras, selalu berusaha bertindak adil dalam menegakkan hukum. la terkenal dan berani serta bijaksana dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan

umum dan keputusan yang diambil oleh Umar bin Khattab dilaksanakan dengan segera. Beberapa keputusan itu adalah sebagai berikut:

1. Masalah *Ghanimah*

Dalam al-Quran masalah *ghanìmah* (harta rampasan perang) telah diatur dengan jelas dalam Q.S. al-Anfal (8) ayat: 41. Secara teks dalam ayat ini disebutkan bahwa pembagian harta rampasan perang itu dibagi berdasarkan ketentuan yang menurut al-Quran dengan menggunakan istilah *khumusahu* yang berarti seperlima. Seperlima tersebut sesuai dengan makna secara teksnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan amal sosial.[372] Sementara seluruh sisanya diperuntukkan bagi pasukan perang yang berhasil memperolah harta rampasan yang pernah dilakukan oleh nabi, termasuk pula cara ini juga diikuti hingga pada masa Abu Bakar al-Shiddiq[373].

Ketika khalifah berganti kepada Umar, penafsiran ayat di atas mengalami perubahan yang sangat drastis, apalagi setelah terjadinya penaklukan kota Iraq. Pandangan Umar tentang harta rampasan perang ini dilandasi oleh paradigma pemikiran, bahwa kemaslahatan umat harus lebih diutamakan dibanding dengan kemaslahatan individu. [374] Pandangan ini, dianggap kuat oleh Umar untuk dijadikan hujjah dalam mereformulasi praktik pembagian harta rampasan sebagaimana yang dipelopori oleh Nabi dan Abu Bakar. Sehingga langkah penyelesaian selanjutnya, oleh Umar

[372] Roibin, *Sosiologi Hukum Islam (Telaah Sosio Historis Pemikran Imam Syafi'i)*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm. 38
[373] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993, hlm. 97
[374] *Ibid*.

harta rampasan tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang memilikinya, dari sana kemudian diambil pajak tertentu yang disebut dengan istilah *kharaj* dan dimasukkan ke dalam kas negara demi kepentingan masyarakat umum. Bila dicermati kasus ini lebih jauh, proses terjadinya perubahan penafsiran teks yang dilakukan oleh Umar di atas, banyak di latar belakangi oleh situasi dan kondisi perang pada saat itu, baik berupa materi maupun non-materi. Secara materi, Islam pada saat itu telah mengalami kejayaan dan kemenangan, sehingga secara psikis Umar ingin menunjukkan bahwa Islam adalah sebagai agama yang kaya moral dan sosial. Sementara praktik harta rampasan yang terjadi pada masa Rasulullah dan Abu Bakar tidaklah demikian, hal ini karena banyak didasarkan pada pertimbangan kondisi Islam saat itu, yaitu situasi yang masih lemah ditambah lagi dengan jumlah pasukannya yang masih sedikit/minim. Dalam konteks sosial, perubahan yang dilakukan oleh Umar terhadap kasus pembagian *ghanìmah* ini adalah sebagai wujud respon terhadap perkembangan masyarakat saat itu. Inilah yang selanjutnya dikatakan oleh Giddens sebagai teori ‖strukturisasi‖, dimana Umar sebagai aktor bertindak untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan kepentingan masyarakat (struktur), demi kemaslahatan umat. Maka hubungan saling mempengaruhi dalam konteks ini adalah sangat terlihat. Ekspansi masyarakat Islam yang dilakukan oleh Umar menuntut perlunya kebijakan yang dapat memihak pada komunitas yang baru, sehingga kekuatan Islam akan tetap terjaga di kalangan mereka, lebih–

lebih Umar terlihat menunjukkan nilai kepekaan sosial yang dibangun oleh Islam, yang sekaligus sebagai nilai moral dalam Islam.

2. Masalah Talak

Pada zaman Rasulullah maupun pada masa Khalifah Abu Bakar, talak 3 (tiga) dapat diucapkan sekaligus dan dianggap sebagai talak 1 (satu). Oleh Umar ditegaskan bahwa pengucapan talak tidak boleh langsung talak 3 tapi secara bertahap. Umar bin Khattab menganggap bahwa Talak 3 (tiga) yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami istri, kecuali mantan istri kawin dahulu dengan orang lain, kemudian bercerai dan sudah habis masa iddahnya baru bisa kembali ke suami pertama dengan akad nikah yang baru. Garis hukum ini ditentukan oleh Umar berdasarkan kepentingan para wanita, karena dizamannya banyak suami yang dengan mudah mengucapkan talak tiga kepada istrinya untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria[375]. Dengan demikian, Tindakan Umar yang melarang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus tanpa tahapan talak 1 maupun 2 terlebih dahulu, dimaksudkan agar suami berhati-hati mempergunakan hak talak itu dan sewenang-wenang mempergunakan haknya. Secara yuridis maupun sosiologis, tindakan Umar seperti tesebut di atas sudah benar adanya karena di satu sisi beliau tetap menghargai dan menghormati hak

[375] Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*., hlm. 176.

talak yang ada pada suami dan di sisi lain penjatuhan talak tetap melindungi kaum istri.

3. Masalah hukuman potong tangan

Q.S. Al-Maidah ayat 38 menegaskan bahwa orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan, akan tetapi, Umar Ibn Khattàb pernah membatalkan hukuman tersebut pada suatu tahun terjadinya era kelaparan [376] . Argumentasi lain mengatakan bahwa hukuman tersebut dibatalkan karena pencurian dilakukan oleh orang yang terdesak mencari makan [377] . Ini artinya dalam menentukan sanksi hukum, Umar selalu melihat pada persoalan yang melatarbelakanginya. Hal demikian berarti didasarkan atas alasan darurat, alasan kepentingan dan alasan menghidupi jiwa orang. Dasar inilah yang diikuti oleh ijma'nya ulama fikh.[378]

4. Masalah hukuman zina bagi seorang gadis

Terkait dengan sanksi bagi pezina yang masih gadis atau belum terikat dengan tali perkawinan yang sah, oleh Nabi yang kemudian disepakati oleh jumhur ulama' adalah hukumannnya didera seratus kali dan dibuang ke luar negeri[379]. Umar berpendapat bahwa pada masanya dia pernah mengasingkan Ruba'iah binti Umayyah bin Khallaf yang kemudian pergi ke Romawi, namun belajar dari pengalaman ini, menurutnya tidak ada kemaslahatan mengenai alasan pembuangan ke luar

[376] Subhi Mahmashani, *"Falsafat al-Tasyrì' fi al-Islàm", Diterjemahkan oleh Adri Ahmad Sudjono, Menjadi Filsafat Hukum dalam Islam*, Al-Ma'àrif, Bandung, 1981, hlm. 69
[377] Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 98
[378] Subhi Mahmashani, Op.Cit., hlm.
[379] Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Ilmiah, Beirut, 2003, juz 3, hlm. 45.

negeri tersebut. Bahkan sangat dikhawatirkan jika orang yang dibuang tersebut akan bergabung menjadi musuh Islam. Maka dia berkata: ‖Saya tidak akan mengasingkan lagi seseorang setelah dia‖[380]. Dari ungkapan terakhir ini, hampir bisa disimpulkan bahwa berubahnya penafsiran hukum Islam di atas, disebabkan oleh kekhawatirannya pada posisi negara pada saat itu. Dengan kata lain situasi politik dan kemanan masyarakat ikut mempengaruhi pada tampilnya penggalian hukum Islam.

5. Maslah mu‘allaf

Dalam kaitan dengan masalah mu‘allaf ini, al-Quran juga telah mengcovernya dalam Q.S. Yunus ayat 60. Istilah mu‘allaf dikaitkan dengan ketentuan sedekah. Maksud dari istilah *al-mu’allafatu qulubuhum* adalah orang yang oleh Nabi diberi bagian sedekah dengan maksud untuk menarik dan menjinakkan hatinya pada Islam [381] . Selain juga karena imannya yang masih lemah atau untuk tujuan menghilangkan niat jahat mereka yang masih ada. Meskipun keterangan al-Qur`an demikian jelas menyangkut persoalan mu‘allaf ini, namun Umar ketika menjabat sebagai khalifah berupaya menangkap pesan teks yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Pandangan Umar mengenai mua‘allaf ini adalah mereka yang derajatnya ditinggikan dan dimenangkan oleh Allah karena keislamannya. Dalam waktu yang bersamaan menurutnya mereka tidak perlu berhadapan dengan pedang Umar ibn Khattàb. Dalam logika Umar, siapapun yang hendak masuk Islam, maka berimanlah dan siapa

[380] Subhi Mahmashani, *Op.Cit*., hlm.
[381] Ibn Qutaibah, al–Ma‘àrif, *Dar al–Ma’arif al–Islamiyah*, Mesir, 1934, hlm. 149

yang mau kufur, maka kufurlah. Logika Umar di atas, nampaknya cukup bisa diterima oleh nalar, sebab ketentuan teks dalam ayat di atas memang didasarkan pada keadaan darurat, dalam rangka dakwah Islamiyah dan berusaha untuk kemenangan Islam, namun ketika keadaan Islam menjadi kuat, maka alasan di atas menjadi kurang relevan lagi. Dengan demikian Umar Ibn Khattàb telah menasakh nàsh tersebut, karena atas dasar alasan realitas dan kondisi umat yang sudah kuat pada saat itu.

Meskipun ketentuan bahwa peradilan dalam hukum Islam dilaksanakan cepat, sederhana dan biaya murah, akan tetapi ada beberapa kondisi yang membolehkan agar peradilan tidak segera dilaksanakan, antara lain yaitu :

1. Mengharapkan terjadinya perdamaian antara kedua orang yang berselisih. Terlebih kedua orang yang berselisih itu adalah pasangan suami istri, sanak famili atau ketika khawatir terjadinya fitnah dan pertumapahan darah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Hujurat (49) ayat 9, yang artinya bahwa : dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Begitu pula, ketika ada dua orang yang berselisih terkait harta warisan,

Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebagai berikut : Jika kalian berdua telah menyampaikan maksud kalian, maka pergilah dan bagilah warisan tersebut, dan hendaklah salah satu dari kalian berdua menghalalkan bagian yang lain (H.R Abu Daud).

2. Bila kasus yang dihadapi oleh hakim masih samar, dan hakim butuh analisa lebih jauh dan bermusyawarah dengan hakim yang lain, terlebih bila saksi sulit untuk hadir. Sya'bi berkata: suatu kasus dihadapkan kepada Umar bin Khattab, dan Umar menganalisa serta memikirkan kasus tersebut selama sebulan, dan bermusyawarah dengan rekannya. Hal ini didasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: menunda-nuda/ tidak tergesa-gesa adalah berasal dari Allah dan tergesa-gesa adalah berasal dari Syaithan[382].

[382] Ahmad Gamam Ghamarat, *Atsar sur'ati al-fashli fi al-Khusumah fi tahqiqi al-amni al-qodho`i fi al-syari'ati al-islamiyyah*, Majallah Buhuts wa al-dirasah, Vol. 17, Nomor 11, 2014.

BAB III

PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Putusan Hakim dan Tujuannya

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan masak-masak yang dapat berbentuk putusan lisan[383].

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang

[383] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 305-306.

tertulis. Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, dapat dicegah pula adanya perbedaan antara yang diucapkan dan yang tertulis. Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, yang sah adalah yang diucapkan karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Tetapi sulitnya disini ialah pembuktian bahwa yang diucapkan dengan yang ditulis. Oleh karena itu, setiap berita acara sidang seyogianya harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya atau paling lama satu minggu sesudah sidang dan setiap putusan yang akan dijatuhkan sudah ada konsepnya.[384]

Krisna Harahap menyatakan putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menghakimi atau menyelesaikan suatu perkara. Suatu konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan hakim di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis). Kalau ternyata terdapat perbedaan antara putusan yang diucapkan, maka yang sah adalah yang diucapkan. Lahirnya putusan adalah sejak diucapkan[385].

Erfaniah Zuhriah dengan mengutip pendapat Gemala Dewi menyatakan putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk

[384] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara…, Op.Cit*., 2010, hlm. 220.
[385] Krisna Harahap. *Op.Cit*., hlm. 86.

tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Jadi pengertian putusan dapat disimpulkan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. [386] Abdul Manan mengatakan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum[387].

Djamanat Samosir mengatakan bahwa putusan hakim atau putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim karena jabatannya yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dalam bentuk tertulis sebagai hasil dari pemeriksaan perkara yang dimaksudkan mengakhiri perkara [388] . Djamanat Samosir menguraikan unsur-unsur dari putusan hakim adalah sebagaiberikut :

1) Merupakan pernyataan hakim karena jabatannya.
2) Putusan hakim yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum.
3) Putusan hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

[386] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 170.
[387] Abdul Manan, *Op.Cit*., hlm. 306.
[388] Djamanat Samosir, *Op.Cit*, hlm. 271.

4) Putusan yang dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya.

5) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis. [389]

Tujuan pertama dan utama orang datang di Pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa, mereka mengharapkan penyelesaian yang efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan[390] sehingga putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi [391] . Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (—dengan kekuatan hukum‖)[392].

Hakim atau Pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi. Hakim atau pengadilan itu harus memutuskan atau menetapkan, bahwa memanglah saya adalah pemilih yang sah atas rumah

[389] *Ibid*.
[390] H. A. Mukti Arto, *Op.Cit.*, hlm. 11.
[391] Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.,* hlm. 124.
[392] R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 124.

yang saya diami itu, bahwa si pembeli barang sudah membayar lunas utangnya kepada si penjual, sehingga gugatan pihak yang terakhir ini untuk menuntut pembayaran harus ditolak, bahwa pihak penggugat adalah anak angkat dari si meninggal dan berhak atas sebagian harta peninggalannya[393].

Dengan putusan hakim itu misalnya ditetapkan bahwa hubungan antara pihak Penggugat dan pihak tergugat adalah demikian bahwa tergugat (menurut hukum) berutang sejumlah uang dari Penggugat, sehingga hubungan mereka adalah hubungan antara seorang debitur dengan seorang kreditur dan berdasarkan hubungan hukum tersebut, tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Penggugat. Atau bahwa hubungan itu adalah demikian bahwa tergugat secara tanpa hak menguasai barang miliknya Penggugat dan berdasarkan hubungan hukum tersebut, tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada Penggugat[394].

Adanya suatu proses adalah demikian bahwa hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini menerapkan hukum yang berlaku antara kedua pihak yang berselisih (berperkara) yaitu menetapkan ‑hubungan hukum‖ seperti disebutkan di atas. Oleh karena itu maka dalam putusan-putusan pengadilan selalu dapat kita baca terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan ‑mengenai duduknya perkara‖ dan kemudian pertimbangan-pertimbangan ‑mengenai hukumnya‖[395].

[393] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 7.
[394] *Ibid*.
[395] *Ibid*.

Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Tegasnya sebagai konklusi dasar maka putusan hakim merupakan sebuah ‑mahkota‖, ‑puncak‖, dan ‑akta penutup‖ dari proses perkara perdata[396].

B. Macam-macam Putusan Hakim

Apabila pengadilan telah mengetahui peristiwa yang terjadi dan telah menemukan hukumnya, dia segera akan menjatuhkan putusan. Dalam putusan itu pengadilan wajib mengadili semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti pengadilan harus memberikan putusan secara nyata untuk setiap bagian tuntutan Penggugat[397]. Akan tetapi pengadilan dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut, misalnya Penggugat menuntut agar tergugat membayar utangnya, tetapi tidak menuntut membayar bunga. Pengadilan tidak boleh memutuskan menghukum tergugat membayar utangnya ditambah dengan bunganya. Contoh lagi, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar utangnya. Pengadilan tidak boleh memutuskan menghukum tergugat agar menyerahkan barang milik tergugat kepada Penggugat[398].

[396] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah…, Op.Cit.*, hlm. 153.
[397] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm. 162.
[398] *Ibid*, hlm. 162-163.

Pengadilan karena fungsinya wajib melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Pengadilan dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapi perlu menggunakan semua kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu karena pengadilan mengetahui dasar hukumnya, misalnya Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat dan Penggugat menuntut agar tergugat mengembalikan uang pinjamannya tanpa menyebutkan dasar hukumnya karena pengadilan melengkapi dasar hukumnya karena pengadilan mengetahui bahwa menurut hukum materil (perjanjian utang piutang) orang yang berutang wajib membayar utang[399]. Menurut Riduan Syahrani putusan pengadilan ada dua macam, yaitu putusan sela dan putusan akhir, adapun yang dimaksud putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, misalnya putusan sela pengadilan negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara [400], dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa macam putusan sela yaitu sebagai berikut :

- Putusan Prepatoir adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran sidang pemeriksaan saksi.

[399] *Ibid*, hlm. 163.
[400] Riduan Syahroni, *Op.Cit*., hlm. 123.

- Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan interlocutoir akan mempengaruhi perkara.
- Putusan insidentieel adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini pun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara (*vrijwaring, voeging, dan tussenkomst*).
- Putusan provisioneel adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna putusan akhir dijatuhkan. Misalnya, dalam perkara perceraian sebelum perkara pokok diputuskan, isteri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya[401].

Sedangkan Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada tiga tingkatan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu putusan *condemnatoir*, putusan *constitutif* dan putusan *declaratoir*.

- Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir*, hak

[401] *Ibid*.

perdata Penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim. Amar putusan *condemnatoir* selalu berbunyi :

-Menghukum…. dan seterusnya‖.

- Putusan *Constitutief* adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan *constitutief* berbunyi :

  -Menyatakan….. dan seterusnya‖

- Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara Penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum, kemudian Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, dan sebagainya. Putusan *declaratoir* berbunyi :

  -Menyatakan…. sah menurut hukum‖[402]

Soebyakto mengatakan putusan yang memerlukan pelaksanaan (*executie*) hanyalah yang bersifat *condemnatoir*. Dan tanda ciri dari putusan yang bersifat *condematoir* adalah bahwa dalam amar putusan terdapat pernyataan penghukuman terhadap Tergugat untuk melakukan salah satu perbuatan :

a. Menyerahkan suatu barang;
b. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah;
c. Melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;
d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;
e. Membayar sejumlah uang;

[402] *Ibid*.

Dan setiap putusan yang bersifat *condemnatoir* mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Ini berarti dapat dilaksanakan secara paksa oleh kekuatan umum[403], sedangkan putusan yang bersifat *constitutief* dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan dan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat[404].

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa bentuk-bentuk putusan hakim yang dikenal dalam hukum acara perdata dikaji dari perspektif teoretis dan praktik peradilan adalah sebagai berikut :

1. **Putusan Hakim dengan Amar/Diktum Gugatan Dikabulkan**

   Pada asasnya apabila putusan dengan amar/diktum gugatan dikabulkan, berarti apa yang diminta oleh Penggugat dalam surat gugatan terbukti karena didukung oleh alat-alat bukti. Apabila gugatan dikabulkan, dalam putusan hakim pada amar/diktum dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian. Apabila gugatan dikabulkan untuk Seluruhnya, berarti apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum surat gugatannya tersebut dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim tanpa terkecuali[405].

2. **Putusan Hakim dengan Amar/Diktum Gugatan Ditolak**

   Lazimnya putusan hakim dengan amar/diktum gugatan ditolak berarti bahwa pihak Penggugat gagal untuk membuktikan kepada hakim tentang dalil-dalil gugatan karena bukti-bukti yang diajukan oleh

[403] Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 98.
[404] Riduan Syahroni, *Op.Cit*., hlm. 122-125.
[405] Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah… Op.Cit*., hlm. 153.

Penggugat yang memperkuat dasar gugatan tersebut terhadap petitum ternyata tidak beralasan sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Tegasnya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan, sedangkan sebaliknya, malah tergugat dapat meyakinkan hakim berdasarkan alat buktinya (*tegan bewijs*) bahwa tergugat dapat membuktikan dalil sangkaannya[406].

3. Putusan Hakim dengan Amar/Diktum Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanketijke Verklaraad*)

Jika putusan hakim dengan amar/diktum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*), ini berarti bahwa ada kesalahan formil dalam surat gugatan Penggugat dasar hukum gugatan (posita) tidak sesuai dengan petitum posita, dengan mendukung petitium begitu pula sebaliknya, subjek hukum gugatan tidak lengkap objek perkara tidak jelas bedanya *anasir Inkracht van gewijsde zaak*, surat kuasa tidak memenuhi syarat, dan sebagainya sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan putusan hakim dengan amar/diktum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*)[407].

Yahya Harahap menjelaskan putusan hakim dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu dari segi aspek kehadiran para pihak, segi sifatnya dan segi-segi saat penjatuhannya dengan penjelasan yaitu sebagai berikut :

[406] *Ibid*, hlm. 156.
[407] *Ibid*, hlm. 157.

1. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak

Seperti yang dijelaskan, dalam gugatan yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak yang bersengketa, yang terdiri dari Penggugat dan tergugat. Itu sebabnya *contentiosa* disebut juga *adversary proceeding* atau *adversary system* proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pertentangan antara dua partai sistem penyelesaian perkara antara partai-partai yang bersengketa. Berarti pada prinsipnya, setiap penyelesaian sengketa yang bersifat partai di sidang pengadilan, harus dihadiri para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut oleh juru sita sesuai dengan tata cara yang digariskan Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 1-14 Rv. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil dengan patut, kemungkinan salah satu pihak tidak hadir memenuhi panggilan tanpa yang sah, sehingga pihak yang tidak hadir itu dikategori melakukan pengingkaran menghadiri pemeriksaan persidangan. Untuk mengantisipasi tindakan keingkaran yang demikian, undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Sehubungan dengan itu, berdasarkan faktor keingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang memperkenalkan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim yaitu sebagai berikut :

a. Putusan Gugatan Gugur

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv. Jika Penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau

tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu :

- hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan Penggugat,
- berbarengan dengan itu, Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, adalah sebagai berikut :

1) Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud

   Putusan pengguguran gugatan yang didasarkan atas keingkaran Penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Pihak tergugat dibebaskan dari perkara itu. Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau *Verzet*.

2) Terhadap putusan tersebut, tertutup hak Penggugat untuk mengajukan perlawanan atau verzet, sifat putusannya adalah :
   - langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau final and binding,
   - selain terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan, juga tertutup upaya hukum, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

3) Penggugat dapat mengajukan gugatan baru

Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Penggugat menghadapi putusan pengguguran gugatan, hanya :

- mengajukan gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga dapat lagi diajukan sebagai perkara baru,
- dan untuk itu, Penggugat dibebani membayar biaya perkara karena biaya yang semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan.

b. Putusan Verstek

Mengenai bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek :

- apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah,
- padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan verstek.

Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Bentuk hukuman yang dikenakan kepada tergugat atas keingkaran itu:

1. dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUH Perdata,

2. atas dasar anggapan pengakuan itu, gugatan Penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum.

Cuma kepada tergugat yang dijatuhi putusan verstek, masih :

- diberi hak mengajukan perlawanan atau verzet,
- dan hal itu dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat.

c. Putusan *Contradictoir*

Bentuk putusan lain ditinjau dari segi kehadiran para pihak dalam pemeriksaan persidangan adalah putusan *contradictoir* (kontradiktor). Bentuk putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Ditinjau dari segi ini, terdapat dua jenis putusan kontradiktor.

1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir

Pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak Penggugat dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan namun

- kemungkinan pada sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, Penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri persidangan,
- dan pada saat putusan diucapkan, kedua belah pihak datang menghadiri persidangan maka bentuk putusan yang dijatuhkan berbentuk kontradiktor.

Jadi, yang menentukan apakah putusan itu berbentuk kontradiktor adalah faktor kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan hakim.

2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir

Bentuk ini merupakan variabel dari putusan kontradiktor yang pertama, dan rujukannya mengacu kepada ketentuan Pasal 127 HIR, Pasal 81 Rv dengan tata cara sebagai berikut :

- baik pada sidang pertama maupun pada sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir dalam persidangan. Atau mungkin juga pada salah satu sidang tidak hadir, sehingga hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspraak*. Atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir,
- akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir maka dalam kasus yang seperti ini, putusan yang dijatuhkan adalah berbentuk putusan kontradiktor, bukan putusan verstek. Misalkan, pada saat putusan diucapkan, pihak tergugat atau Penggugat tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran itu tidak merubah putusan dari bentuk kontradiktor menjadi verstek. Oleh karena itu, Pasal 127 HIR dan Pasal 81 Rv memperingatkan, terhadap putusan kontradiktor yang dijatuhkan tanpa dihadiri salah satu pihak :

- -tidak dapat diajukan perlawanan atau verzet,
- upaya hukum yang dapat diajukan adalah permintaan banding atau upaya hukum biasa.

Sebagai contoh Putusan MA No. 252 K/Sip/1971 yang menegaskan, putusan PN dan PT harus dibatalkan, karena PN telah menjatuhkan verstek atas alasan pada saat putusan dijatuhkan tergugat tidak hadir, padahal semestinya dalam kasus yang seperti itu adalah putusan atas bantahan atau *contradictoir*. Kekeliruan berlanjut lagi, karena terhadap putusan itu diajukan verzet, dan atas permohonan itu PN menjatuhkan putusan lagi, sedangkan semestinya upaya hukumnya bukan verzet, tetapi banding. Itulah gambaran berbagai bentuk putusan ditinjau dari segi kchadiran para pihak dalam persidangan pengadilan. Yang terpenting diperhatikan adanya kekeliruan yang menyamakan putusan *verstck* dengan kontradiktor. Padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang undamental. Pengambilan putusan verstck mesti didasarkan atas ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah. Sedang putusan kontradiktor, ketidakhadiran itu terjadi pada saat putusan diucapkan.

2. Putusan Ditinjau dari Sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim, yang terpenting di antaranya sebagai berikut.

a. Putusan *Deklarator*

Putusan *declatoir*, selanjutnya ditulis *deklarator* adalah yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata, Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik Penggugat, Penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan Penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Atau putusan yang menyatakan peralihan saham dari pemegang saham semula kepada Penggugat adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan. Dari berbagai contoh di atas, putusan yang bersifat *deklarator* atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Dengan adanya pernyataan itu, putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan. Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar deklarator apabila gugatan dikabulkan. Misalnya sengketa perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jika gugatan dikabulkan, putusan didahului dengan amar deklarator berupa pernyataan, bahwa tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan

melawan hukum. Bahkan putusan yang menolak gugatan pun, mengandung pernyataan atau deklarasi, bahwa gugatan Penggugat ditolak. Penolakan itu sendiri, tiada lain dari penegasan bahwa Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status atas masalah yang disengketakan.

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* atau konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul kendaan hukum baru sebagai suami-istri sebagai janda dan duda, Begitu Juga putusan pailit atau pembatalan perjanjian. Apabila hakim membatalkan perjanjian di antara pihak yang berperkara, berarti putusan itu meniadakan hubungan hukum semula dan serta merta para pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restorated to the original condition*). Sebenarnya hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif misalnya putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat deklaratif yakni yang berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak

dalam perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal.

c. Putusan *Condemnatoir*

Condemnatoir atau kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang beperkara, Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor dengan amar deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator. Ambil contoh sengketa mengenai wanprestasi. Amar putusan dcklaratif dalam kasus itu dapat berdiri sendiri tanpa amar kondemnator. Hakim dapat menjatuhkan putusan menyatakan tergugat wanprestasi, dan hal itu dituangkannya dalam amar yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi. Putusan yang berisi amar deklaratif itu, dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi amar kondemnator berupa penjatuhan hukuman kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian. Sebaliknya amar putusan kondemnator berupa penjatuhan hukuman membayar ganti rugi kepada tergugat, tidak dapat berdiri sendiri, karena tidak mungkin menghukum tergugat membayar ganti rugi tanpa lebih dahulu ada amar deklaratif yang menyatakan tergugat melakukan wanprestasi yang menimbulkan

kerugian kepada Penggugat. Oleh karena itu, amar putusan kondemnator :

- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklarator merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator,
- dan penempatan amar deklarator dalam putusan yang bersangkutan, mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator.

Ambil contoh lain, sengketa harta warisan diantara para ahli waris. Amar kondemnator yang menghukum tergugat menyerahkan dan melakukan pembagian harta warisan, harus didahului amar deklarator yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris, dan objek terperkara adalah harta warisan pewaris serta penguasaan tergugat atasnya tanpa hak. Tanpa didahului amar deklarator yang seperti itu, hakim tidak mungkin menjatuhkan amar kondemnator menghukum tergugat menyerahkan harta tersebut untuk selanjutnya menghukum mereka melakukan pembagian harta warian dimaksud. Dapat dijelaskan, suatu putusan yang hanya berisi amar decklarator tanpa dibarengi amar kondemnator :

- tidak besar manfaatnya karena putusan yang demikian tidak efektif menyelesaikan sengketa,
- Putusan yang dijatuhkan tidak tuntas menyelesaikan sengketa, karena tanpa amar kondemnator pelaksanaan atas pemenuhan

putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Misalkan hakim menjatuhkan putusan yang hanya berisi amar deklarator berupa pernyataan tergugat melakukan wanprestasi, dan atas perbuatan itu Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1 miliar Putusan yang demikian tidak efektif, karena hampir tidak ada manfaatnya. Sebab meskipun terdapat amar yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian Rp. 1 miliar, pernyataan itu tidak ada gunanya, karena pemenuhannya tidak dapat dipaksakan kepada tergugat. apabila tidak mau membayar secara sukarela. Kenapa demikian ? Karena putusan yang dijatuhkan tidak mencantumkan amar kondemnator yang menghukum tergugat untuk membayarnya. Menghadapi kasus putusan yang hanya berisi amar deklartif maka agar pemenuhan putusan itu dapat dipaksakan melalui eksekusi, terpaksa Penggugat mesti mengajukan gugatan atau perkara baru yang meminta pencantuman amar putusan kondemnator pada putusan tersebut agar tergugat dihukum untuk memenuhi putusan deklaratif dimaksud. Sehubungan dengan itu, sangat dituntut kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila petitum gugatan yang diajukan Penggugat secara nyata mengandung kondemnator agar tergugat dihukum melakukan sesuatu, mcrupakan keharusan bagi hakim mengabulkan petitum tersebut, agar putusan yang dijatuhkam efcktif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa. Lain halnya jika gugatan

tidak mencantumkan petitum kondemnator, hakim tidak boleh mengabulkan amar yang demikian, karena bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR. Putusan seperti itu, dianggap melampaui batas wewenang. Demikian penegasan Putusan MA No. 339 K/Sip/1969. Bahwa putusan yang menyimpang dari isi tuntutan baik karena hanya meliputi sebagian dari tuntutan maupun karena melebihi dari apa yang dituntut, tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan. Mengenai ciri putusan kondemnator, di dalamnya tercantum amar atau diktum yang berisi kalimat :

- menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya, atau
- memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya.

Kata atau kalimat menghukum atau memerintahkan, merupakan istilah hukum (*legal term*) yang memiliki arti yang sama, oleh karena itu dalam praktik peradilan saling dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Memang terkadang sifat kondemnator yang tersirat dalam putusan bisa samar apabila dibarengi dengan klausul. Ambil contoh Putusan MA No. 2869 K/Sip/1982. Amar putusan kondemnatornya berbunyi :

Menghukum Penggugat dan tergugat untuk mengadakan pemisahan dan pembagian harta peninggalan tersebut, dengan ketentuan kalau dalam tempo satu bulan setelah putusan mempunyai

kekuatan hukum tetap, salah seorang dari Penggugat/tergugat atau lebih enggan melaksanakan pembagian, Pengadilan mengangkat seorang ketiga yang tidak memihak (notaris setempat) untuk mewakili Penggugat dan tergugat mengadakan pembagian dan pemisahan harta peninggalan tersebut.

Mungkin ada yang berpendapat, dengan adanya klausul menyerahkan penyelesaian kepada notaris atau pihak ketiga, telah menghilangkan sifat kondemnator yang melekat pada amar tersebut. Pendapat itu jelas keliru. Amar itu dengan tegas dimulai dengan perkataan menghukum para Penggugat dan tergugat mengadakan pembagian harta warisan dimaksud. Meskipun kalimat itu dibarengi dengan klausul pembagian akan dilakukan pihak ketiga, amar kondemnator itu meliputi klausul tersebut. Namun, klausul itu pada dasarnya tidak perlu, karena seolah-olah mengurangi fungsi PN untuk melakukan eksekusi apabila para pihak tidak melaksanakan secara sukarela. Semestinya klausul itu tidak perlu, agar fungsi dan kewenangan PN melaksanakan eksekusi dapat langsung tanpa memerlukan lebih dahulu peran dari notaris. Sedapat mungkin hakim menghindari rumusan diktum kondemnator di atas. Yang diinginkan hukum adalah kondemnator yang tegas dan langsung memberi wewenang kepada pengadilan melaksanakan eksekusi. Sekiranya hakim menemukan petitum gugat yang berisi rumusan kondemnator

yang tidak jelas, fungsi hakim untuk merumuskan petitum itu menjadi jelas dan tegas.

3. Putusan Ditinjau pada Saat Penjatuhannya

Ditinjau dari segi saat putusan dijatuhkan, dikenal beberapa jenis putusan yang dapat diklasifikasi sebagai berikut.

a. Putusan Sela

Disebut juga putusan sementara (*temporary award, interim award*). Ada juga yang menyebutnya dengan *incidenteel vonnis* atau putusan insidentil. Bahkan disebut juga *tussen vonnis* yang diartikan putusan antara. Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut :

1) Putusan Preparatoir

Salah satu bentuk spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela ialah putusan *preparatoir* atau *preparator* (*preparatoir vonnis*). Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan *preparatoir* tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Umpamanya pembatasan tahap jawab-menjawab atau replik duplik dan tahap pembuktian. Dalam praktik, hal ini jarang terjadi. Proses pemeriksaan berjalan dan langsung sesuai dengan kebijakan dengan memperhitungkan tenggang pemunduran persidangan oleh hakim tanpa lebih dahulu ditentukan tahap-tahapnya dalam suatu putusan sela yang disebut putusan preparatoir. Sebenarnya sesuai dengan tuntutan peradilan modern, sangat beralasan mengembangkan putusan preparatoir dengan jalan menggabung prinsip manajemen dalam sistem peradilan. Seperti yang pernah disinggung, di beberapa negara misalnya di Inggris, telah dimunculkan konsep *timetable program*. Sebelum proses persidangan dimulai, hakim lebih dahulu menetapkan *timetable* persidangan secara pasti, sehingga jalannya pemeriksaan telah terprogram dengan pasti pada setiap tahap pemeriksaan. Berdasarkan *timetable* dimaksud, hakim memerintahkan agar para pihak tunduk mematuhinya. Berdasarkan *timetable* itu, hakim dan

para pihak terikat melaksanakannya. Tidak seperti yang berlaku sekarang. Jadwal pemeriksaan tidak pasti. Tergantung pada selera hakim. Terkadang meskipun hakim sendiri yang menetapkan pemunduran sidang, tanpa alasan yang masuk akal, pemeriksaan tidak dilangsungkan dan dimundurkan lagi pada hari yang lain.

2) Putusan *Interlocutoir*

Menurut Soepomo,‖ seringkali PN menjatuhkan putusan *interlocutoir* saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela (*een interlocutoir vonnis is een special sort lussen vonnis*) yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapas hakim, antara lain sebagai berikut :

a) Putusan interlokutor yang memerintahkan pendengaran keterangan ahli, berdasarkan Pasal 154 HIR.

   Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan, hal itu dituangkan dalam putusan sela yang disebut putusan *interlokutor*.

b) Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechrtelijke plaatssopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR.

   Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya

dituangkan dalam putusan *interlokutor* yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya.

c) Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUH Perdata maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlokutor.

d) Bisa juga memerintahkan pemanggilan saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan Penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan Pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita. Apabila permintaan ini dikabulkan, hakim menerbitkan surat perintah untuk itu yang dituangkan dalam bentuk putusan interlokutor.

e) Putusan interlokutor dapat juga diterbitkan hakim untuk memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

3) Putusan Insidentil

Dulu disebut *incidenteel vonnis* atau putusan dalam insidentil, yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang

membebankan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan, yang disebut *cautio judicatum solvi*.

Dari penjelasan di atas, secara teori dan praktik, pada umumnya dikenal dua bentuk putusan insidentil.

a) Putusan insidentil dalam gugatan intervensi

Pasal 279 Rv mengatur lembaga gugatan intervensi yakni :

(1) Memberi hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama.

Misalnya A dan B beperkara dan prosesnya masih berlangsung di PN (Pengadilan Tingkat Pertama). Ternyata apa yang mereka sengketakan atau pada objek yang disengketakan tersangkut kepentingan C, karena objek tersebut adalah miliknya, bukan milik A dan B. Dalam kasus yang demikian Pasal 279 Rv memberi hak kepada C menggabungkan diri dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, dengan mengajukan gugutan intervensi.

(2) Bentuk gugatan intervensi yang dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan, bisa berbentuk :

i. *Voeging*, pihak ketiga tersebut masuk ikut serta dalam proses perkara atau ikut campur tangan dalam perkara

dalam bentuk tindakan memihak kepada salah satu pihak, boleh kepada Penggugat atau tergugat.

ii. *Tussenkomst*, pihak ketiga ikut terjun bergabung dalam proses perkara yang sedang berlangsung, demi membela kepentingannya sendiri, karena apa yang diperkarakan atau objek yang disengketakan adalah miliknya. Dalam bentuk intervensi *tussenkomst* benar-benar tersangkut atau melekat kepentingan pihak ketiga tersebut. Berbeda dengan vioeging, terjunnya pihak ketiga bertujuan untuk membela kepentingan salah satu pihak (Penggugat atau tergugat), sedang pada *tussenkomst* semata-mata secara langsung untuk membela dan mempertahankan kepentingan dirinya sendiri.

iii. *Vrijwaring*, merupakan intervensi dalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak dalam proses perkara yang sedang berlangsung berdasarkan Pasal 70 Rv.

Penarikan pihak ketiga itu atas permintaan tergugat dalam rangka meminta pertanggungjawaban kepadanya sehubungan dengan gugatan Penggugat yang diajukan kepada tergugat. Namun, bukan pihak tergugat saja yang berhak meminta *vrijwaring*. Menurut Pasal 70 Rv,

pihak Penggugat pun dapat mengajukannya. Umpamanya, A membeli barang dari B, kemudian A menjualnya lagi kepada C. Lantas C menggugat A dengan dalil gugatan bahwa pada barang tersebut terdapat cacat tersembunyi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1504 KUH Perdata, C menuntut A agar bertanggung jawab atas cacat dimaksud. Menghadapi gugatan C tersebut, A dapat meminta kepada pengadilan untuk menarik B sebagai penjual semula agar bertanggung jawab atas cacat tersembunyi dimaksud. Jadi, dalam hal ini penarikan B ikut bergabung dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya baik kepada A maupun C yakni tanggung jawab yuridis atas kenikmatan dan ketenteraman kebendaan atas barang yang dijualnya, karena menurut hukum pada saat dia menjual barang itu kepada A, Pasal 1504 KUH Perdata membebani B sebagai penjual untuk memberikan garansi bahwa barang itu bebas dari cacat tersembunyi. Atau bisa juga terjadi, barangnya yang dijual B kepada A adalah milik orang lain, dan A telah menjual pula kepada C, kemudian C digugat D sebagai pemilik yang sebenarnya, Dalam kasus yang seperti itu, C dapat menarik B untuk mempertanggungjawabkan

jual beli yang melanggar Pasal 1471 KUH Perdata tersebut.

(3) Cara Ikut sertanya bergabung melalui gugatan intervensi, Pasal 210 Rv, mengatur tata cara yang harus ditempuh pihak ketiga atau penarikan pihak untuk ikut serta bergabung dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung.

i. Mengajukan permohonan yang disebut gugatan intervensi atau *vrijwaring*. Jika penggabungan yang hendak dilakukan berbentuk *voeging* atau *tussenkomst*, permohonannya dalam praktik diajukan dan disebut gugatan Intervensi, sehingga ada gugatan intervensi yang bersifat *voeging* atau *tussenkomst*. Sedang apabila pihak tergugat yang mengajukan permohonan untuk menarik pihak ketiga, disebut gugatan atau permohonan *vrijwaring*.

ii. Terhadap gugatan intervensi, hakim mengambil putusan insidentil

Hal ini digariskan dalam Pasal 282 Rv. Terhadap gugatan intervensi atau *vrijwaring*, hakim mengeluarkan putusan insidentil, dengan alternatif sebagai berikut :

- Pertama, hakim menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan intervensi,

  Jika putusan insidentil yang dijatuhkan menolak atau menyatakan tidak dapat diterima, berarti secara formil, tidak dibenarkan penggabungan keikutsertaan pihak ketiga itu dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.
- Kedua, hakim mengabulkan gugatan intervensi

  Dalam hal gugatan intervensi dikabulkan, berarti pihak yang terlibat dalam perkara menjadi tiga pihak. Pibak Penggugat dan tergugat semula tetap berhadapan sebagai pihak dalam perkara semula tersebut, dan Penggugat intervensi, bertindak sebagai pihak yang menempatkan Penggugat dan tergugat semula berkedudukan sebagai Tergugat Intervensi I dan II.

Demikian sepintas lalu gambaran putusan insidentil dikaitkan dengan gugatan intervensi. Sebenarnya lembaga gugatan intervensi maupun *vrijwaring*, tidak diatur dalam HIR maupun RBG. Akan tetapi demi kebutuhan dan kepentingan beracara, telah diadopsi dalam praktik peradilan sesuai dengan doktrin *process doelamatigheid*,

b) Putusan insidentil dalam pemberian jaminan atas pelaksanaan sita jaminan

Putusan insidentil yang dikaitkan dengan pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) disebut *cautio judicatum solvi*. Scbagai contoh Pasal 722 Rv yakni penyitaan atas barang debitur. Menurut pasal ini, hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, dapat memerintahkan kepada tergugat agar membayar uang jaminan meliputi kerugian dan bunga yang mungkin timbul akibat penyitaan, dengan ketentuan dan acaman: selama uang jaminan belum dibayar Penggugat, penyitaan tidak dilaksanakan. Jika hakim bermaksud menerapkan ketentuan Pasal 722 Rv tersebut, harus dituangkan dalam bentuk putusan insidentil. Begitu juga apabila hakim hendak menerapkan ketentuan Pasal 763j Rv tentang pengangkatan sita yang diletakkan atas pesawat terbang, harus dituangkan dalam putusan insidentil. Menurut pasal ini, hakim dapat mengangkat sita atas pesawat terbang, dengan syarat, pihak tersita memberi sejumlah uang jaminan yang cukup menutup jumlah gugatan dan bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur (Penggugat). Apabila syarat ini terpenuhi, hakim dapat segera mengeluarkan perintah pengangkatan sita, yang dituangkan dalam putusan insidentil.

4) Putusan Provisi

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG. Disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award* (*temporary disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MA No. 1788 K/S1p/1976. Begitu juga penegasan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976. Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak. Putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasar gugatan provisi (*provisionele eis*) atau disebut juga *provisionele vordering* :

- bisa diajukan berdiri sendiri dalam gugatan tersendiri, berbarengan dengan gugatan pokok,
- tetapi biasanya diajukan bersama-sama sebagai satu kesatuan dengan gugatan pokok,

- tanpa gugatan pokok, gugatan provisi tidak mungkin diajukan, karena itu gugatan tersebut asesor dengan gugatan pokok.

Dengan demikian, gugatan provisi biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Dari segi sistematika, diformulasi mengikuti uraian dalil gugatan pokok. Dan isinya berupa tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, hakim lebih dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan Penggugat atau kepentingan kedua belah pihak. Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil :

a) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
c) gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Apabila Penggugat mengajukan gugatan provisi, pemeriksaan perkara harus tunduk pada tata tertib berikut :

(1) Mendahulukan pemeriksaan gugatan provisi

Dengan adanya gugatan provisi, hakim dilarang atau mesti menunda pemeriksaan pokok perkara, tetapi harus memeriksa lebih dahulu gugatan provisi.

(2) Sistem pemeriksaan gugatan provisi mempergunakan prosedur singkat

Pemeriksaan gugatan provisi dilakukan secara singkat atau secara kilat (*expedited procedure*) berpedoman kepada yang digariskan Pasal 283 Rv. Oleh karena gugatan provisi menghendaki segera diberikan putusan, pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus pada hari itu juga. Namun, Pasal 285 Rv memberi kemungkinan untuk menunda atau mengundurkan pemeriksaan dengan syarat apabila hal itu tidak menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tak dapat diperbaiki.

(3) Harus menjatuhkan putusan provisi

Pada dasarnya, secara tersirat Pasal 286 Rv tidak memberi pilihan kepada hakim, selain daripada mesti menjatuhkan putusan atas gugatan provisi tersebut. Menurut Pasal 286 Rv dimaksud, putusan provisi yang dijatuhkan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap perkara pokok. Putusan yang dapat dijatuhkan hakim, tergantung pada syarat dan fakta yang melekat pada gugatan provisi itu.

- Pertama, gugatan provisi tidak dapat diterima

  Kalau tuntutan gugatan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima,

atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang,

- Kedua, menolak gugatan provisi

  Apabila apa yang diminta dalam gugatan tidak ada kaitan dengan pokok perkara atau tidak ada urgensinya, karena secara objcktif dan realistis apa yang dituntut tidak perlu dilakukan maka gugatan harus ditolak.

- Ketiga, mengabulkan gugatan provisi

  Apabila secara objektif dan realistis gugatan provisi berkaitan erat dengan pokok perkara dan apabila tidak diambil tindakan scmentara akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, cukup alasan untuk mengabulkan gugatan. Ambil contoh gugatan provisi atas penghentian operasional pabrik tergugat, karena kalau tidak dihentikan polusi yang ditimbulkannya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada masyarakat luas.

Akibat langsung yang melekat pada putusan provisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR, dan Pasal 287 Rv :

- dalam putusan melekat langsung putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*.

- dengan demikian putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan serta merta lebih dahulu, meskipun perkara pokok belum diperiksa dan diputus.

Namun, apabila PN hendak melaksanakan eksekusi serta merta atas putusan provisi itu, PN harus tunduk dan menaati SEMA No. 16 Tahun 1969, jo. SEMA No. 3 Tahun 1971, jo SEMA No. 3 Tahun 1978 dengan acuan penerapan :

- KPN meminta izin lebih dahulu dari KPT.
- KPT dapat menolak atau memberi izin.
- apabila perkaranya sudah pada tingkat kasasi, izin eksekusi diminta dari KMA.

Selama belum ada izin dari KPT atau KMA, putusan provisi tidak bisa dilaksanakan secara serta merta. Selain daripada itu, guna menghindari kemungkinan putusan provisi itu dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi maka apabila hendak dilaksanakan secara serta merta, cukup beralasan Ketua PN memperhatikan penggarisan SEMA No. 3 Tahun 1978 yang memberi wewenang kepada Ketua PN untuk memerintahkan atau meminta jaminan barang atau uang kepada Penggugat. Mengenai upaya hukum terhadap putusan provisi, agaknya terdapat kontroversi antara ketentuan Pasal 289 Rv dengan Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 :

- satu segi Pasal 289 Rv memberi hak kepada para pihak, terutama kepada tergugat mengajukan banding terhadap putusan provisi secara tersendiri, sesuai dengan kalimat yang mengatakan : banding dapat segera dilakukan setelah dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan segera kepada MA (HGH, Hooggrechtshof),
- pada pihak lain, Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, menegaskan putusan PN yang bukan putusan akhir, tidak dapat diajukan secara tersendiri, tetapi mesti bersama-sama dengan putusan akhir.

Ditinjau dari segi kedudukan Rv berhadapan dengan UU No. 20 Tahun 1947 maka dari segi tata tertib perundang-undangan, ketentuan UU No. 20 Tahun 1947, harus diunggulkan (*must prevail*). Karena pada dasarnya Rv tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku oleh UU Darurat No. 1 Tahun 1951. Selain daripada itu, ke dalam putusan provisi termasuk permintaan sita jaminan. Pada dasarnya sita jaminan merupakan tindakan sementara yang bersifat mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara, yakni berupa tindakan sementara atas penyitaan harta terperkara atau harta debitur guna menjamin pemenuhan putusan kelak, apabila putusan berkekuatan tetap. Demikian pendapat sementara kalangan yang memasukkan permintaan sita jaminan ke dalam gugatan

provisi. Pendapat ini kurang tepat. Dari segi sistem, penyitaan telah diatur secara khusus dalam hukum acara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 226 HIR tentang sita revindikasi, dan Pasal 227 HIR tentang sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), penyitaan atas kapal dalam Pasal 559 Rv, dan penyitaan atas pesawat terbang dalam Pasal 763 h Rv. Lagi pula, pelaksanaan sita tidak dimasukkan dalam SEMA No. 3 Tahun 1978, sehingga pelaksanaannya tidak perlu meminta izin dari KPT atau KMA. Oleh karena itu, tidak tepat mengkategorikan sita jaminan sama dengan gugatan provisi. Dengan demikian, gugatan yang memformulasi permintaan sita jaminan dalam bentuk gugatan provisi adalah keliru. Yang tepat, kedudukan dan formulasinya merupakan gugatan tambahan yang asesor kepada gugatan pokok. Sebenarnya dalam praktik, tidak begitu dipermasalahkan klasifikasi jenis putusan-putusan yang diuraikan di atas. Para praktisi hukum maupun hakim, tidak terlampau sungguh-sungguh membedakan antara putusan preparator, interlokutor, dan insidentil. Semua jenis itu dimasukkan dalam satu kelompok saja yang disebut dengan istilah umum, yakni putusan sela atau tussen vonnis. Hanya putusan provisi saja yang agak dikhususkan penyebutannya, meskipun dimasukkan juga dalam kelompok putusan sela.

b. Putusan Akhir

Jenis putusan lain ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah putusan akhir (*eind vonnis*) atau dalam *Common Law*, sama dengan final judgement. Kalau putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan perkara pokok sedang berlangsung maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok. Banyak juga yang menyebutnya putusan penghabisan sebagai alih bahasa dari *eind vonnis*. Kalau begitu, putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang beperkara. Ada beberapa permasalahan yang perlu diketahui mengenai putusan akhir, seperti yang diuraikan berikut ini :

1) Secara formil menampung semua fakta yang ditemukan dan putusan sela yang diambil

   Tindakan apa saja yang dilakukan hakim seperti penyitaan, pemeriksaan setempat atau segala fakta yang ditemukan dan yang disampaikan para pihak. Putusan sela yang diambil maupun segala fakta :

   - harus ditampung dan dimasukkan dalam putusan akhir,
   - dengan demikian segala tindakan dan putusan sela yang diambil, harus tercantum atau direkam sebagai satu kesatuan

yang tidak terpisah dengan putusan materi pokok perkara dalam putusan akhir.

Kelalaian memasukkan dan mencantumkan hal itu dalam putusan akhir, secara formil putusan terscbut dianggap mengandung cacat, dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan, Paling tidak kelalaian pencantuman itu harus diperbaiki oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi.

Memang tidak perlu secara utuh fakta serta tindakan dan putusan sela tersebut dicantumkan dalam putusan akhir. Secara formil cukup menyebut nomor, tanggal, dan esensi pokok putusan itu dalam pertimbangan putusan akhir dengan penegasan, bahwa putusan sela itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan akhir.

2) Menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak

Hal yang kedua, putusan akhir berisi pernyataan dan penegasan tentang kepastian hubungan hukum antara para pihak dengan permasalahan atau objek yang disengketakan. Dalam putusan akhir inilah ditentukan sah atau tidak hubungan hukum yang terjadi antara pihak maupun pihak yang berhak atas objek sengketa. Bertitik tolak dari penetapan dan penegasan kepastian hubungan hukum tersebut, putusan akhir dapat diklasifikasi sebagai berikut.

a) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum : menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut :

(1) Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR jo. SEMA No 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 Tahun 1996.

(2) Gugatan mengandung *error in persona*

Kemungkinan adanya cacat yang scperti itu bisa berbentuk *diskualifikasi in person*, yakni yang bertindak sebagai Penggugat tidak memilih *persona standi in judicio*. Bisa juga pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoedanigheid*). Atau yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan mengandung cacat formil *plurium litis consortium*. Dalam hal yang demikian, hakim harus menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(3) Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan

Apa yang disengketakan berada di luar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut lingkungan peradilan lain, misalnya Peradilan Agama atau Peradilan TUN. Atau PN yang bersangkutan secara relatif tidak berwenang mengadili, karena meskipun secara absolut termasuk yurisdiksinya, namun secara relatif jatuh menjadi kewenangan PN lain. Misalnya, tempat tinggal tergugat berada di luar wilayah hukum PN tersebut, sehingga sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadilinya adalah PN di tempat mana tergugat bertempat tinggal. Apabila hakim berhadapan dengan kasus perkara yang secara absolut atau relatif berada di luar yurisdiksinya, dia harus menjatuhkan putusan yang berisi amar :

- tidak berwenang mengadili, dan
- menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(4) Gugatan *obscuur libel*

Gugatan yang diajukan, mengandung cacat *obscuur libel*, yakni gugatan Penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan Pasal 8 ke-3 Rv. Oleh karena itu, makna gugatan yang kabur sangat luas spektrumnya, bisa berupa :

(a) Dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Misalnya, gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh objek sengketa. Tidak menjelaskan siapa saja yang berhak atas harta warisan. Tentang hal ini antara lain ditegaskan dalam Putusan MA No. 239 K/SIP/1968, bahwa olch karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak.

(b) Tidak jelas objek sengketa

Letak batas dan luasnya tidak jelas, sedang objek tersebut tidak didukung sertifikat. Bisa juga letak dan luasnya berbeda dengan kenyataan konkreto.

(c) Petitum gugatan tidak jelas

Misalnya petitum tidak dirinci, sehingga tidak jelas dengan pasti apa yang dituntut. Atau terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita gugatan, Dengan kata lain, terdapat saling pertentangan antara dalil gugatan dengan petitum. Sehubungan dengan itu, apabila hakim menemui gugatan yang mengandung

cacat *obscuur libel*, harus menjatuhkan putusan akhir yang berisi diktum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(d) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya, apabila gugatan yang diajukan sama dalil dasar alasannya dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, dalam hubungan yang sama pula dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam gugatan itu melekat unsur *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap gugatan itu harus dijatuhkan putusan akhir dengan amar: menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(5) Gugatan masih prematur

Apabila gugatan yang diajukan masih prematur cukup dasar alasan bagi hakim menjatuhkan putusan negatif dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(6) Gugatan telah daluwarsa

Pasal 1941 KUH Perdata, selain merupakan dasar untuk memperoleh hak, juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Dengan demikian, apabila gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang untuk menggugatnya, berarti tergugat telah terbebas untuk memenuhinya. Jika hakim menemukan gugatan telah daluwarsa, harus menjatuhkan putusan akhir dengan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Demikian gambaran sepintas lalu putusan akhir yang memuat diktum gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), apabila dalam gugatan Penggugat terkandung cacat formil. Dalam putusan akhir yang bersifat negatif seperti yang dibicarakan di atas, status dan hubungan hukum antara para maupun dengan objek perkara :

- tidak mengalami perubahan apa pun,
- oleh karena itu, hubungan hukum di antara mereka kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadi perkara,
- dengan demikian, jika sekiranya pada saat proses berlangsung telah sempat diletakkan sita atas objek perkara atau atas harta tergugat maka putusan akhir tersebut disertai dengan diktum : memerintahkan pengangkatan sita.

Memang Penggugat berhak atau dapat lagi mengajukan gugatan baru, kecuali terhadap putusan akhir berdasar *ne bis in idem* dan daluwarsa (*exceptio temporis*), dengan jalan menghilangkan cacat formil yang bersangkutan. Namun, seandainya diajukan kembali gugatan yang sama maka selama gugatan baru itu belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, kedudukan dan hubungan hukum para pihak tetap seperti keadaan semula.

b) Menolak gugatan Penggugat

Bentuk yang kedua, putusan akhir yang berisi diktum menolak gugatan Penggugat. Putusan akhir yang menolak gugatan Penggugat, merupakan penetapan dan penegasan yang pasti dan permanen mengenai hubungan hukum di antara para pihak maupun dengan objek sengketa. Berarti secara pasti Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tergugat maupun dengan objek gugatan, sehingga tidak ada kewajiban hukum apa pun yang harus dipenuhi tergugat kepada Penggugat. Landasan dasar hukum bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan Penggugat, apabila :

- Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian,

- atau alat bukti yang diajukan Penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan tergugat.

Pokoknya, patokan yang menjadi dasar hukum menjatuhkan putusan akhir dengan amar: menolak gugatan Penggugat seluruhnya, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Demikian pencgasan Putusan MA No. 1201 K/Sip 1973, bahwa apabila pengadilan berpendapat Penggugat tdak berhasil membuktikan apa yang barus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Demikian pula dalam Putusan MA No. 570 K/Sip/1972 ditegaskan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukan dinyatakan tidak dapat diterima. Memperhatikan penjelasan dan putusan yang dikemukakan di atas, terdapat landasan hukum yang sangat berbeda antara putusan akhir yang amar gugatannya tidak dapat diterima dengan yang menolak gugatan Penggugat.

- Pada yang pertama, landasan untuk menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, didasarkan pada cacat formil yang terkandung atau melekat pada gugatan Penggugat, seperti surat kuasa tidak memenuhi syarat, *error in persona*, gugatan berada di luar

yurisdiksi absolut atau relatif, *obscuur libel*, *ne bis in idem*, prematur atau daluwarsa.

- Sedang putusan akhir dengan amar menolak gugatan Penggugat seluruhnya, landasan dasar pertimbangannya, Penggugat tidak berhasil atau tidak mampu membuktikan dalil gugatannya.

Oleh karena itu, antara kedua diktum tersebut tidak dapat saling dipertukarkan (*inrerchangeable*) penerapannya. Masing-masing telah memiliki landasan dan cantolan tertentu secara spesifik. Apalagi jika dihubungkan dengan akibat hukum yang timbul dari kedua jenis putusan itu, terdapat perbedaan yang sangat jauh.

- Perkara yang diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima, tidak melekat *ne bis in idem* yang digariskan Pasal 1917 KUH Perdata, meskipun putusan telah berkekuatan tetap, oleh karena itu, perkara tersebut masih dapat diajukan kembali untuk kali yang kedua dengan jalan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan.
- Lain halnya dengan perkara yang diputus dengan amar menolak gugatan Penggugat, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, pada putusan tersebut melekat *ne bis in idem* yang digariskan Pasal 1917 KUH Perdata,

sehingga apa yang disengketakan sudah final, dan tidak dapat lagi diajukan gugatan baru untuk kali yang kedua. Sehubungan dengan berbagai perbedaan yang dikemukakan di atas, sangat keliru mencampur aduk antara kedua diktum putusan tersebut dalam putusan akhir yang dijatuhkan. Hakim yang tidak menerapkan amar putusan tersebut secara tepat dan proporsional, dapat dikualifikasi melakukan tindakan tidak profesional (*unprofessional conduct*).

Kesalahan penerapan atas diktum yang dijelaskan di atas, menjadi dasar alasan pengadilan tingkat banding atau kasasi untuk membatalkan putusan, dan berbarengan dengan itu, langsung meluruskannya dengan diktum yang proporsional dengan kenyataan yang ditemukan dalam persidangan. Jika fakta yang ditemukan dalam persidangan gugatan mengandung cacat formil maka amar putusannya mesti menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Kalau fakta yang ditemukan, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, diktum putusan harus menolak gugatan seluruhnya.

c) Mengabulkan gugatan Penggugat

Bentuk putusan akhir yang ketiga, memuat diktum mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan ini bersifat positif, dan merupakan kebalikan dari diktum menolak gugatan Penggugat. Kalau dalam penolakan gugatan tidak terjadi

perubahan hubungan hukum, sehingga apa yang disengketakan maupun objek sengketa, tetap seperti sediakala di tangan pihak tergugat maka dalam pengabulan gugatan, terjadi koreksi hubungan hukum ke arah yang menguntungkan pihak Penggugat. Sekaligus koreksi itu dibarengi dengan pembebanan kewajiban hukum kepada tergugat berupa hukuman untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu. Bisa merupakan hukuman menyerahkan dan mengosongkan, membayar jumlah tertentu, membagi sesuatu atau menghentikan sesuatu perbuatan, dan sebagainya.

(1) Pengabulan gugatan dapat sekaligus bersifat deklaratif, konstitutif, dan kondemnator

Putusan akhir yang berbentuk pengabulan gugatan, boleh saja hanya bersifat deklarator atau konstitutif saja tanpa bersifat kondemnator. Misalnya, hanya pengabulan gugatan saja dengan diktum menyatakan Penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari orang tua mereka dan harta terperkara merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat dan tergugat. Putusan yang demikian hanya memuat diktum yang bersifat deklaratif. Atau putusan yang hanya mengabulkan pembatalan perjanjian atau perkawinan adalah diktum yang bersifat konstitutif yang mengakhiri atau meniadakan hubungan hukum di antara para pihak.

Seperti telah dijelaskan, putusan yang hanya bersifat deklaratif atau konstitutif saja, tidak efektif dan tidak tuntas menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, pengabulan gugatan yang ideal adalah putusan yang sekaligus memuat amar yang bersifat deklaratif, konstitutif, dan kondemnator. Misalnya, secara deklaratif tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi yang dibarengi dengan diktum konstitutif bahwa akibat perbuatan itu telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sejumlah tertentu, sehingga tergugat wajib membayarnya. Sampai pada diktum yang demikian, putusan tersebut tidak memberi penyelesaian dan manfaat apa-apa kepada Penggugat. Supaya diktum deklaratif dan konstitutif itu, efektif, bermanfaat, dan menyelesaikan sengketa, harus dibarengi dengan diktum kondemnator yang berbunyi : menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Dengan adanya diktum kondemnator, hal-hal yang dinyatakan dalam diktum deklaratif dan konstitutif dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan, apabila tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Hal ini perlu disadari dengan baik oleh Penggugat pada saat merumuskan petitum gugatan. Jangan hanya mencantumkan petitum yang bersifat deklaratif dan

konstitutif saja, tetapi harus diikuti dengan petitum kondemnator. Begitu juga hakim yang mengadili perkara. Jika Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatan, sehingga cukup beralasan mengabulkan gugatan, dan ternyata gugatan mencantumkan petitum kondemnator, dengan sendirinya menurut hukum hakim harus mengabulkan petitum kondemnator tersebut.

(2) Pengabulan gugatan dapat seluruhnya atau sebagian

Sejauh mana pengabulan gugatan yang dapat diwujudkan dalam putusan akhir, tergantung pada beberapa faktor, seperti yang diuraikan di bawah ini.

(a) Kabulkan seluruh gugatan

Hakim berwenang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Akan tetapi agar kewenangan itu tidak melampaui batas atau supaya kewenangan itu tidak bercorak penyalahgunaan kekuasaan, pengabulan itu harus ditegakkan berdasarkan patokan berikut.

- Dalil atau posita gugatan mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang jelas dan terang sehingga gugatan itu mengenai sesuatu yang dapat disimpulkan secara jelas dan nyata (*een duidelijk en bepaalde conclisie*). Gugatan tidak mengandung cacat formil dalam segala

bentuk, tidak mengandung cacat *ne bis in idem*, *obscuur libel*, prematur, daluwarsa, dan sebagainya.

- Seluruh dalil gugatan berhasil dibuktikan Penggugat dengan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian. Tidak ada yang tidak terbukti, apalagi kalau dalil gugatan itu diakui tergugat secara murni dan bulat maka cukup dasar alasan bagi hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan.
- Patokan ketiga, apa yang dituntut dalam petitum, sejalan atau sinkron dengan dalil gugatan. Tidak terdapat kontroversi atau saling pertentangas antara posita dengan petitum gugatan.
- Patokan selanjutnya, apa yang dituntut Penggugat dalam petitum masih dalam batas-batas kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan atau tidak bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum dan kesusilaas yang digariskan Pasal 1337 KUH Perdata.

Apabila terpenuhi patokan atau kriteria di atas, cukup dasar alasan bagi hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan. Sebaliknya salah satu dari patokan itu tidak terpenuhi, tidak cukup alasan untuk mengabulkan seluruh gugatan. Misalnya yang

terbukti hanya scbagian dari dalil gugatan, bertentangan dcngan hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

(b) Mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya

Sebagai kebalikan dari pengabulan seluruh gugatan adalah pcngabulan sebagian saja. Meskipun terpenuhi kriteria gugatan mempunyai dasar hukum yang jelas, antara posita dan petitum sejalan dan saling mendukung, akan tetapi :

- dalil gugatan yang terbukti hanya sebagian saja, atau
- sedang yang sebagian lagi tidak terbukti.

Maka dalam kasus yang seperti ini, tidak ada dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan. Yang boleh atau yang dapat dikabulkan hanya sebagian saja. Dalam kasus seperti ini, dalam amar putusan harus terdapat penegasan :

- mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sebagai diktum pertama,
- dan penegasan menolak gugatan selebihnya sebagai diktum terakhir.

Jadi, kalau dalil gugatan yang terbukti hanya sebagian, oleh karena itu yang dapat dikabulkan hanya sebagian

saja, dalam amar putusan harus terdapat dua penegasan yakni penegasan pengabulan sebagian gugatan, yang dibarengi dengan amar terakhir penegasan menolak gugatan selebihnya. Tata cara penerapan yang demikian antara lain dikemukakan dalam Putusan MA No. 797 K/Sip/1972 yang mengatakan, jika pengadilan hanya mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam putusan tersebut harus pula tercantum amar yang berbunyi: menolak gugatan selebihnya. Sekiranya yang dikabulkan hanya sebagian saja, kemudian tidak ada amar yang menegaskan menolak selebihnya, terkesan putusan mengandung kontroversi. Seolah-olah putusan mengabulkan seluruh gugatan, padahal yang dikabulkan hanya sebagian. Maka untuk menghilangkan kontroversi itulah urgensi mencantumkan amar tersebut.

(c) Mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain.

Variabel putusan mengabulkan gugatan yang lain, berupa :

- menyabulkan gugatan sebagian, dan
- menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima.

Penerapan yang demikian, apabila berhadapan dengan gugatan, di mana sebagian dalil gugatan mempunyai dasar hukum dan dasar fakta yang jelas dan benar. Di samping itu, terdapat lagi dalil gugatan yang mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak memiliki dasar hukum, prematur atau daluwarsa, dan sebagainya. Sedang dalil gugatan yang mempunyai hukum tersebut dapat dibuktikan Penggugat kebenarannya. Maka dalam yang seperti itu putusan yang dijatuhkan harus mencantumkan amar :

- mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, yang dirinci satu per satu,
- dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk yang sclebihnya (misalnya petitum No ... tidak dapat diterima).

Apabila dijumpai kasus seperti itu, dan amar putusan hanya menegaskan mengabulkan gugatan sebagian tanpa dibarengi amar yang menyatakan gugatan yang lain tidak dapat diterima, berarti gugatan dan petitum tentang itu, seolah-olah tidak mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, demi tegaknya kepastian hukum, jika terdapat sebagian gugatan yang tidak dapat diterima, hal itu mesti ditegaskan dalam amar putusan.

Demikian penerapan yang diperlihatkan Putusan MA No. 216 K/Sip/1974. Dikatakan oleh karena petitum 1 dan 4 tidak mempunyai dasar hukum atas alasan tanah yang digugat masih dikuasai dan diusahai Penggugat, tidak ada dasar hukum untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi kepada tergugat atas tindakannya melakukan balik nama atas tanah tersebut. Oleh karena itu, terhadap petitum tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sedang terhadap gugatan selebihnya dapat dikabulkan. Dengan demikian amar putusan yang harus tercantum :

- mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,
- menyatakan gugatan petitum 1 dan 4, tidak dapat diterima.

(d) Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta tidak dapat diterima sebagian

Corak mengabulkan yang lain, memuat amar yang berisi tiga jenis penegasan.

- Mengabulkan sebagian gugatan
- Pengabulan ini meliputi petitum yang dalil gugatannya berhasil dibuktikan Penggugat. Mungkin dari sekian banyak petitum yang berkaitan dengan dalil gugatan, yang dapat dibuktikan hanya

sebagian saja. Dengan demikian putusan hanya terbatas mengabulkan dalil dan petitum gugatan dimaksud.

- Menolak sebagian gugatan
- Amar yang berisi penegasan menolak sebagian gugatan, ditujukan kepada petitum yang dalil gugatannya tidak terbukti. Maksudnya dari sekian banyak dalil yang diajukan, sebagian terbukti maka terhadapnya amar putusan menegaskan mengabulkan gugatan tersebut, sedang terhadap dalil yang tidak terbukti, amar putusan menegaskan menolak gugatan tersebut.
- Menyatakan bagian yang lain tidak dapat diterima

Selain dijumpai dalil gugatan yang dapat dibuktikan maupun yang tidak dapat dibuktikan, ternyata pula ditemukan sebagian dalil gugatan tidak memenuhi syarat formil, misalnya dalil yang bersangkutan tidak mempunyai dasar hukum atau dalil gugatan itu masih prematur. Bisa juga tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak dirinci satu per satu komponen yang mendukung jumlah yang diminta.

Demikian ragam corak putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Dijumpai berbagai

variabel yang dapat dijatuhkan hakim. Tergantung sejauh mana dasar hukum gugatan pada satu segi, dihubungkan dengan kemampuan Penggugat membuktikan seluruh atau sebagian dalil gugatan yang diajukan, dihubungkan pula dengan sifat petitum yang dikemukakan. Bertitik tolak dari itu semua, hakim dapat menjatuhkan putusan mengabulkan atas seluruh, sebagian, dan menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan yang lain. Dan pada setiap putusan pengabulan yang bagaimanapun kualitasnya, selalu atau boleh sekaligus melekat padanya sifat deklaratif, konstitutif, dan kondemnator[408].

C. Praktek Putusan Hakim Atas Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata

Pada penelitian disertasi ini dapat dikemukakan praktek putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga formalitas-formalitas yang diperlukan untuk pemeriksaan terhadap pokok perkara tetap dilaksanakan, akan tetapi pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim, karena yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim adalah diterima dan dibenarkannya eksepsi gugatan kabur dengan amar atau diktum putusan hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verrklard*), yang terjadi

[408] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 873-897.

pada dua lingkungan badan peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata yaitu sebagai berikut :

1. Badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB telah menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Cms

   Perkara perdata yang diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB tersebut dapat diuraikan dengan gambaran sebagai berikut :

   Kasus Posisi

   Bahwasannya yang menjadi permasalahan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Cms adalah bahwa seorang isteri telah ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dunia dan isteri tersebut merasa almarhum suaminya meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan permanen, akan tetapi bidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri di atasnya tersebut, telah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, sehingga bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen tersebut telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain dan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen tersebut telah dibebani hak tanggungan atas pinjaman pada sebuah lembaga perbankan, sehingga pihak-pihak yang menguasai dan memiliki tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen serta telah

menjaminkannya pada lembaga perbankan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan perempuan tersebut.

Untuk menuntut haknya atas bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen tersebut yang dianggap telah dilanggar oleh orang lain tersebut, maka kemudian perempuan tersebut mengajukan tuntutan hak dalam bentuk gugatan melalui Badan Peradilan yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB dengan mendudukan diri sebagai Penggugat dengan menggugat yang berjumlah 7 (tujuh) orang pihak yang dianggap telah melanggar haknya dengan mendudukan mereka sebagai Tergugat yang masing-masing secara berurutan didudukan sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII.

Posita atau Pundamentum Petendi

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada Posita atau Pundamentum Petendi gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Bapak XXXXXXXXXXX, Almarhum yang sebagai ahli waris;
2. Bahwa sekitar tanggal 5 Juni 1995 Bapak XXXXXXXX Almarhum membeli tanah hak milik dari Bapak XXXXX yang terletak di Desa xxxxxxx Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu yang terdiri dari tanah milik adat seluas 1400 M^2 yang dikemudian sejak setelah adanya jual beli tanah tersebut maka pada tanggal 21 Pebruari 2013 tanah tersebut diatas menjadi hak milik atas nama xxxxxxxx dan langsung dianggunkan ke XXX Banjar dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,

dan sertifikat hak milik (SHM) No. 243 tersebut dibaliknamakan ke atas nama xxxxxxxx dengan tidak wajar;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2013 sertifikat SHM No. 243 dibalik namakan ke atas nama xxxxxxxx dan langsung dijaminkan ke XXXX Banjar sampai saat ini tidak pernah dibayar kreditnya;
4. Bahwa Bapak xxxxxxxxxxx tidak pernah menjual tanah SHM tersebut di atas yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah ke pihak lain tetapi sertifikat tersebut di atas tadi menjadi hak milik ke atas nama xxxxxxx xxxx dengan batas-batas antara lain :

   Utara : Tanah xxxxxx

   Selatan : Jalan xxxxxx

   Timur : Tanah xxxxxx

   Barat : Tanah xxxxxx
5. Bahwa tetapi kemudian, Tergugat sekitar tanggal 21 Pebruari 2013 telah merasa mengakui terhadap sertifikat SHM No. 243 seluas 1400 M^2 bahwa tanah tersehut adalah kepunyaan dia dengan alasan karena tanah tersebut adalah hasil beli dari Saudara xxxxxxxx suami Penggugat dan langsung dijadikan jaminan ke XXX Banjar sampai saat ini kredit tersebut macet tidak pernah ada pembayaran;
6. Bahwa setelah SHM No. 243 tersebut balik nama ke atas nama xxxxxxx xxxxxxxxx maka pada bulan Maret langsung dijaminkan ke Bank tersebut di atas dengan nilai Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dengan saudara xxxx, xxxxxxxxxxx mendapat Rp. 80.000.000, dan XXXX mendapat Rp. 70.000.000,- selaku Tergugat I dan II;
7. Bahwa Sertifikat atas nama xxxxxxxxxx tadinya oleh saudara xxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxx diberikan kepada Saudara xxxx dan dari xxxx diberikan ke saudara xxxx dan oleh saudara xxxx baru ke xxxxxxxxxx dan oleh xxxxxxxxxxx dibaliknamakan sekaligus ke xxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini sertifikat SHM No. 243 diberikan kepada suadara xxxx untuk pinjam uang sebesar Rp. 17.000.000, karena pada waktu itu

suami Penggugat kena musibah kecelakaan (tabrakan) di daerah Purwakarta, maka Penggugat kepeped terpaksa sertifikat tersebut dijaminkan untuk pinjam uang ke saudara xxxx, tetapi uang hasil pinjaman tesebut sudah dikembalikan secara kontan oleh Pihak Pengguat, tetapi sertifikat tidak dikembalikan sampai saat ini, tahu-tahu ada pihak Bank xxx xxxxx menagih utang kepada Pihak Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Penggugat sebenarnya tidak mempunyai utang piutang terhadap Bank xxx xxxxx sebesar itu :

8. Bahwa oleh karena demikian dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat I sampai Tergugat VII baik secara materil maupun secara imateril:

   Dengan perincian adalah sebagai berikut :

   a. Kerugian materil, yaitu kerugian yang telah dibaliknamakan sebagai milik dari Pihak Penggugat maka dengan adanya tindakan tersebut sangatlah rasional bilamana Pengaugat dalam perkara ini menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan atas nama xxxxxxxxxxx menjadi xxxxxxxxxxx;
   b. Kerugian imateril, yaitu kerugian yang tidak dapat diukur dengan nilai yang karena selama terdapatnya persoalan tersebut, Penggugat telah banyak terganggu baik secara fisik atau mental dan moral, yang akan tetapi bilamana kerugian tersebut dapat diganti dengan dikembalikan lagi atas nama maka Penggugat menerima;

Petitum atau Tuntutan

Sedangkan yang menjadi tuntutan primair atau tuntutan pokok gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum, Penggugat adalah selaku istri almarhum xxxxxxxxxxx;
3. Menyatakan sah secara hukum sertifikat SHM No. 243 tersebut atas nama xxxxxxxxxxx;

4. Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah sebagai pemilik tanah SHM No. 243 atas nama xxxxxxxxxxxx dengan tuas 1400 M^2 yang terletak di Desa xxxxxxxx Kabupaten Ciamis;
5. Menyatakan sah secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Penggugat, atas segala tindakan-tindakannya yang berkaitan dengan tanah milik Penggugat dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah secara hukum bahwa xxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxx selaku ahli waris dari xxxxxxxxxxx Almarhum;
7. Mengembalikan sertifikat SHM No. 243 atas nama xxxxxxxxxxxx menjadi nama xxxxxxxxxxx;
8. Membatalkan akta jual beli (AJB) No. 95 tahun 2013 atas nama xxxxxxxxxx yang dilakukan oleh notaris xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
9. Membebankan pembayaran utang piutang terhadap Bank xxx Banjar kepada para Tergugat;
10. Menyatakan sah secara hukum bahwa xxxxxxxxxxxxx tidak pernah menjual tanah di atasnva berdiri sebuah bangunan yang dalam sertifikat SHM No. 243 seluas 1400 M^2 yang berlokasi Dusun xxxxxxxx Kabupaten Ciamis;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian terhadap Pengaugaat baik kerugian materil sebesar Rp. 25.000.000,- maupun kerugian imateril 10 x dari jumlah kerugian miaterit Rp. 25.000.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai, kontan dan sekaligus kepada Penggugat;
12. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini disertai dengan ketentuan Pasat 180 ayat 1 H.I.R (*uit voorbaar bij voorraad*) sekalipun terdapatnya upaya hukum lain dari Pihak lawan;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tunai, kontan dan sekaligus sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap

kali atau perhari apabila para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;

14. Menghukum turut Tergugat I untuk taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum para Tergugat untuk merbayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, untuk semua tindakan peradilan;

Jawaban Para Tergugat

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan jawaban baik jawaban diluar pokok perkara atau eksepsi maupun jawaban terhadap pokok perkara, akan tetapi karena yang menjadi fokus dalam penelitian disertai ini adalah mengenai putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur, maka yang dideskripsikan dalam penelitian disertasi ini dibatasi terhadap hal yang menjadi fokus penelitian disertasi ini sehingga yang diuraikan hanya jawaban di luar pokok perkara yang berupa eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*), yaitu sebagai berikut :

Jawaban Tergugat III terhadap gugatan penggugat di luar pokok perkara yang berupa eksepsi gugatan Penggugat kabur yang diuraikan dalam keberatan dengan uraian sebagai berikut :

Kecermatan yang dimaksud adalah Penggugat dalam mengkonstatir, mengkualisir dan mengkonstutir objek sengketa yang didasarkan kepada dasar hukum, sehingga tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat gugatan (*Niet Ontvankeliike Verklaard/NO*) atau yang berkaitan dengan syarat formil, misalnya dalam hal penentuan objek sengketa secara rinci. Dalam hal ini Tergugat tidak cermat dalam menguraikan kronologis sebagai dasar gugatan, yang ditandai dengan poin 2 pada gugatan Penggugat bahwa "sekitar tanggal 5 Juni 1995 Bapak xxxxxxxxxxx Almarhum membeli tanah hak milik dari Bapak xxxx yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu yang terdiri dari tanah milik

adat seluas 1400 M^2 yang kemudian sejak setelah adanya jual beli tanah tersebut maka pada tanggal 21 Februari 2013 tanah tersebut di atas menjadi hak ma xxxxxxxxxxx ....(dan seterusnya)". dari alasan poin 2 gugatan Penggugat ini Tidak Cermat dalam mengurutkan kronologisnya, sedang cerita fakta pada tahun 1995 tapi tahu-tahu Penggugat cerita fakta tahun 2013. Yang sebenarnya adanya peristiwa hukum yang terjadi tanpa sepengetahuan Penggugat tidak ketahui, dan ini berhubungan dengan peristiwa hukum antara saya (xxxx) sebagai Tergugat 3 dengan Bapak xxxxxxxxxxx almarhum selaku suami xxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxx Sebagai Penggugat;

Kejelasan yang dimaksud adalah Penggugat harus merumuskan unsur-unsur objek hukum sengketa dengan menguraikan dasar fakta-fakta yang mudah dipahami oleh para pihak, sehingga memberikan kejelasan bagi pihak lain untuk menjawab/membantah dalil-dalil yang dipermasalahkan, misalnya dalam hal menjelaskan hubungan hukum dengan objek sengketa dengan pelanggaran hukum yang hendak digugat. Beberapa ketidakjelasan yang dimaksud yaitu tidak menjelaskan hubungan hukum dengan objek sengketa, hanya menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Bapak xxxxxxxxxxx Almarhum sebagai Ahli Waris dan itu tertuang dalam poin 1 dalam gugatan Penggugat. Kemudian dalam perkara ini dikatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum atas objek sengketa. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci unsur-unsur sebagaimana Perbuatan Melawan Hukum yang dipersangkakan kepada saya (xxxx) sebagai Tergugat 3 lakukan. Apakah melanggar hak orang lainkah? Apakah bertentangan dengan kewajiban hukum saya (xxxx) sebagai Tergugat 3 kah? Apakah bertentangan dengan kesusilaankah? Atau bahkan bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Kelengkapan yang dimaksud adalah terkumpulnya dokumen-dokumen yang bersifat administratif untuk membuktikan adanya

hubungan hukum dengan obiek sengketa termasuk di dalamnya alat bukti sebagaimana hukum acara perdata mengatur yaitu keterangan surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Disinilah saya (xxxx) sebagai Tergugat 3 yang seharusnya menuntut balik atas perbuatan Bapak xxxxxxxxxxx Almarhum sebagai suami xxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat yang dapat dikatakan merugikan. Keadaan tersebut dapat saya buktikan dengan bukti-bukti yang dapat menguatkan posisi saya sebagai Tergugat dalam perkara ini hanya terbawa-bawa saja. Yang sebenarnya saya (xxxx) sebagai Tergugat 3 hanya memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa berdasarkan peristiwa hukum yang saya (xxxx) Tergugat 3 dengan Bapak xxxxxxxxxxx Almarhum selaku suami xxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxx sebagai : Penggugat lakukan pada saat beliau masih hidup dulu;

Berdasarkan ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan dalam meneguhkan hak Penggugat, sudah selayaknya gugatan Pengugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Sedangkan jawaban Tergugat IV dan Tergugat V di luar pokok perkara yang berupa eksepsi gugatan Penggugat kabur didalilkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang diuraikan dalam eksepsi dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat sangat-sangat kacau sekali dan tidak memenuhi syarat-syarat baik formil mupun materil gugatan. Hal tersebut dapat terlihat dari :

a. Dalam identitas, gugatan Penggugat, tidak menuliskan umur daripara Tergugat, padahal ini sangat penting untuk menentukan apakah Para Tergugat tersebut sudah dewasa atau masih di bawah umur, sebagai apakah benar Para Tergugat yang ditujukan oleh Penggugat itu benar ada atau orang lain yang namanya sama dan alamatnya sama, akan

tetapi umurnya berbeda sehingga gugatan menjadi salah orang atau *error in subyecto*;

b. Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V sehingaa ditarik menjadi pihak di dalam perkara *aquo*, tiba-tiba di dalam dalil point 8 gugatan Penggugat menyatakan bahwa oleh karena demikian dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan oleh Tindakan Tergugat I sampai Tergugat VII baik secara materiil maupun imateriil. Seharusnya Tergugat menyebutkan secara jelas dan lengkap perbuatan dari masing-masing Tergugat, sehingga jelas duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk gugatan yang *obscuur libel*. atau gugatan yang tidak jelas atau samar-samar;

Bahwa berdasarkan azas Hukum Acara Perdata, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, maka apabila suatu gugatan apabila cacat formil, maka lebih baik gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeliike verklaard/NO*) di dalam putusan sela;

Selanjutnya jawaban Tergugat VI di luar pokok perkara yang berupa eksepsi gugatan Penggugat kabur didalilkan oleh Tergugat VI yang diuraikan dalam eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa jelas gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena posita gugatan tidak jelas dasar hukumnya, dan kejadian yangmendasari gugatan yang diajukan bertentangan dengan petitum dan posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum;

b. Bahwa Penggugat pada butir 2 posita gugatannya menyatakan hal sebagai berikut :

-….dst...Bapak xxxxxxxxxxx Almarhum membeli tanah milik dari Bapak xxxx yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu yang terdiri dari tanah milik adat seluas 1400 m^2 yang kemudian sejak setelah adanya jual beli tanah tersebut maka

pada tanggai 21 Februari 2013 tanah tersebut di atas menjadi hak milik atas nama xxxxxxxxxxx ...dst...dst..";

Berdasarkan posita gugatan yang diuraikan Pengaugat tersebut menunjukan bahwa gugatan Penggugat obscuur libel, karena Penggugat tidak menerangkan dengan jelas status tanah setelah dibeli oleh Bapak xxxxxxxxxxx apakah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik atau tidak. Apakah telah diterbitkan hak milik xxxxxxxxxxx atau atas nama siapa. Karena nyatanya dalam posita tiba-tiba saia Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 tanah tersebut menjadi hak milik atas nama xxxxxxxxxxx:

c. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau obscuur libel, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menerangkan sejak kapan suami Penggugat yang bernama Bapak xxxxxxxxxxx meninggal dunia, sedangkan menurut keterangan Tergugat I yang disebutkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I membeli tanah sengketa dari xxxxxxxxxxx;
d. Bahwa selanjutnya pada butir 8 petitum gugatannya Penggugat menyatakan agar Pengadilan membatalkan akta jual beli (AJB) No. 95 Tahun 2013 atas nama xxxxxxxxxxx yang dilakukan oleh notaris xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sementara dalam posita gugatannya Penggugat tidak pernah menerangkan mengenai akta jual beli No. 95 tahun 2013 tersebut. Demikian, oleh karena petitum butir 8 tersebut tidak diterangkan dan diuraikan dalam bagian posita gugatannya maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Tahap Pembuktian

Pada tahapan pembuktian persidangan perkara perdata tersebut, telah diperiksa alat bukti baik yang berupa alat bukti tertulis maupun bukti saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat, adapun alat bukti yang diajukan Penggugat meliputi bukti tertulis sebanyak 13 (tiga belas) buah dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah.

Sedangkan Tergugat III mengajukan bukti tertulis sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya Tergugat VI mengajukan bukti tertulis sebanyak 6 (enam) buah kemudian pula Tergugat VII mengajukan bukti tertulis sebanyak 1 (satu) buah.

Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwasannya setelah proses jawab menjawab dan proses pembuktian serta kesimpulan dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan terhadap perkara perdata tersebut diakhiri oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yaitu sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 136 HIR, yang menyatakan bahwa Eksepsi yang dimukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu persatu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII di dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang apabila dirangkum adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Obscuur libel,
2. Gugatan Error in persona

Ad. 1. Gugatan Obsuur libel

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh Para tergugat eksepsi mengenai gugatan obscuur libel telah diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Tergugat III mendalilkan gugatan Penggugat obsuur libel dikarenakan Penggugat tidak cermat dalam menguraikan kronologis sebagai dasar gugatan yang ditunjukkan dalam gugatan Penggugat Poin ke-2 dimana Penggugat menceritakan kejadian di tahun 1995 suami Penggugat membeli tanah tetapi tiba-tiba cerita langsung

kepada fakta di tahun 2013, Pengugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan tidak disebutkan pula perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa selain Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga mendalilkan hal yang sama dengan Tergugat III yaitu mengenai tidak dijelaskannya perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V, sedangkan Tergugat VI mendalilkan posita gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, dan kejadian yang mendasari gugatan yang diajukan bertentangan dengan petitum dan posita gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menerangkan dengan jelas status tanah setelah dibeli oleh Bapak Xxxxxxxxxxx apakah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik atau tidak dan sejak kapan suami Penggugat yang bernama Bapak xxxxxxxxxxx meninggal dunia, sedangkan Tergugat I membeli tanah sengketa dari xxxxxxxxxxx, pada butir 8 petitum gugatannya Penggugat juga menyatakan agar Pengadilan membatalkan akta jual beli (AJB) No. 95 Tahun 2013 atas nama xxxxxxxxxxx yang dilakukan oleh notaris Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sementara dalam posita gugatannya Tergugat tidak pernah menerangkan mengenai akta jual beli No. 95 tahun 2013;

Menimbang, bahwa secara garis besar eksepsi dapat dikelompokan menjadi :

1. Eksepsi Kompetensi yang terdiri dari kompetensi absolut dan relatif;
2. Eksepsi Syarat Formil yang bisa disebabkan karena :
    1) Surat Kuasa Khusus tidak sah;
    2) Error in persona;
    3) Nebis in idem;
    4) Gugatan prematur;
    5) Obsuur libel, yang disebabkan karena :
        (1) hukum yang menjadi dasar gugatan;
        (2) ketidakjelasan mengenai objek gugatan;
        (3) petitum yang tidak jelas,

(4) terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Maielis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat IlI, Tergugat IV dan Tergugat V bahwa Penggugat tidak menerangkan Perbuatan Melawan Hukum apa yana dilakukan oleh Para Tergugat, setelah Majelis Hakim cermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata benar di dalam posita gugatannya Penggugat hanya menyebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 243 yang semula adalah atas nama xxxxxxxxxxx telah dibalik namakan menjadi atas nama xxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5, Penggugat tidak menjelaskan Tergugat siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum apa yang dimaksudkan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain adanya eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI, Maielis Hakim juga menemukan adanya kontradiksi antara petitum dengan posita yaitu dalam petitum gugatan angka 6, Penggugat meminta agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxxxxxxx, akan tetapi dalam posita, Tergugat tidak mandalilkan bahwa telah adanya Penetepan Pengadilan Agama mengenai Ahli Waris yang sah dari almarhum xxxxxxxxxxx, sedangkan saksi xxxxxxx xxxxxxx menerangkan -sebelum menikah dengan Penggugat, almarhum xxxxxxxxxxx telah menikah dan mempunyai anak‖, hal tersebut dapat mempengaruhi kedudukan Penggugat sebagai pihak (legal standing);

Menimbang, bahwa akibat adanya kontradiksi antara petitum dengan posita tersebut, Penggugat telah mencampur adukan antara sengketa melawan hukum dengan sengketa mengenai kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) karena adanya ketidakjelasan dari gugatan yaitu mengenai hukum yang menjadi dasar gugatan dan kontradiksi antara posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Terguaat V diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan pemeriksaan terhadap gugatan pokok tidak perlu dipertimbangkan lagi;

***Amar/Dictum* Putusan**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan dengan amar atau diktum sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankeliike verklaard*):
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.066.000,(empat juta enam puluh enam ribu rupiah);

Adapun tahapan proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB dengan Register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Cms dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Tanggal Sidang	Agenda Sidang	Alasan Tunda	Keterangan
1	10 April 2017	Sidang Pertama	Para Tergugat tidak hadir	dihadiri oleh Penggugat saja
2	25 April 2017	Sidang Kedua	Sebagain besar Para Tergugat tidak hadir	dihadiri semua pihak
3	09 Mei 2017	Sidang Ketiga	Untuk Mediasi	dihadiri semua pihak
4	30 Mei 2017	Pembacaan Gugatan	Para Tergugat tidak hadir	dihadiri semua pihak
5	08 Juni 2017	Pembacaan Gugatan	Jawaban Para Tergugat belum siap	dihadiri semua pihak
6	19 Juni 2017	Untuk Jawaban Para Tergugat	Tergugat III belum siap dengan jawabannya	dihadiri semua pihak
7	22 Juni 2017	Untuk Jawaban Teergugat III	Replik dari Penggugat belum siap	dihadiri semua pihak
8	10 Juli 2017	Untuk Replik dari Penggugat	Para Tergugat belum siap dengan dupliknya	dihadiri semua pihak
9	17 Juli 2017	Untuk Duplik dari Para Tergugat	bukti surat dari Penggugat belum siap	dihadiri semua pihak
10	25 Juli 2017	Untuk bukti surat dari Penggugat	Kuasa Penggugat tidak hadir	dihadiri semua pihak
11	01 Agustus 2017	Untuk bukti surat dari Penggugat	Untuk tambahan bukti surat dari Penggugat dan bukti surat dari Para Tergugat	dihadiri semua pihak
12	08 Agustus 2017	Tambahan bukti Surat dari Penggugat dan bukti surat dati Para Tergugat	Untuk pemeriksaan setempat	dihadiri semua pihak
13	21 Agustus 2017	Pemeriksaan setempat	Untuk saksi dari pihak Penggugat	dihadiri semua pihak
14	29 Agustus 2017	Pemeriksaan saksi dari pihak	Untuk saksi dari Tergugat III	dihadiri semua pihak

		Penggugat		
15	04 September 2017	Pemeriksaan saksi dari Tergugat II	Kesimpulan belum siap	dihadiri semua pihak
16	11 September 2017	Untuk kesimpulan	Putusan belum siap	dihadiri semua pihak
17	04 Oktober 2017	Untuk Putusan		dihadiri semua pihak

Tabel 1.
Tahapan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Cms

Berdasarkan gambaran perkara perdata sebagaimana dikemukakan di atas. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi gugatan kabur telah menempatkan dirinya dengan menjalankan fungsinya untuk menerapkan undang-undang ke dalam perkara yang dihadapinya atau dengan kata lain dalam menjalankan fungsinya Majelis Hakim tersebut hanya sebagai terompet undang-undang, hal tersebut dapat terlihat dalam mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 136 HIR sehingga eksepsi gugatan kabur dalam perkara tersebut dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga tahapan-tahapan dan formalitas-formalitas yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam hal ini repliek, dupliek dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti baik dari Penggugat maupun bukti dari Tergugat dilaksanakan, akan tetapi tidak dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut, karena yang dipertimbangkan diterima dan dibenarkannya eksepsi gugatan kabur sehingga putusan hakim tersebut tidak menggambarkan peradilan perdata yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang dapat mewujudkan peradilan perdata berbasis nilai keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo penempatan fungsi majelis hakim yang demikian merupakan pengutamaan bekerjanya hukum secara peraturan dan logika, yang seharusnya telah ditinggalkan dan hakim harus menerapkan hukum progresif, yang menolak pengutamaan dan pengunggulan ilmu hukum yang bekerja secara analitis (*analytical jurisprudence*) yaitu yang mengedepankan ‑peraturan dan logika‖ (*rules and logic*). Cara kerja analitis yang berkutat dalam ranah hukum positif tidak akan banyak menolong hukum untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukannya secara bermakna[409].

Tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan yang adil dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, putusannya tidak mencerminkan fungsi hakim yang mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keadilan yang mencipptakan masyarakat yang bermartabat, untuk mewujudkan hukum yang memanusiakan manusia atau hukum yang nguwengko uwong yaitu hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya, hal itu dikarenakan manusia adalah mahluk yang mulia sebagai ciptaan Allah Subhanahuwata‘ala yang tercantum dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang sila tersebut mengandung nilai berupa pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap penciptanya sebagaimana dikehendaki teori keadilan bermartabat dan Majelis Hakim tersebut tidak melaksanakan sebagaimana dikehendaki teori hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia [410] hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, maka hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar[411].

---

[409] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif..., Op.Cit, hlm. 21.*
[410] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.
[411] *Ibid*, hlm. 5.

Suatu gugatan yang telah disusun dengan tidak cermat dan tidak teliti, sehingga terdapat pertentangan atau kontradiksi antara posita atau pundamentum petendinya dengan posita atau tuntutannya sehingga gugatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (*obsur libel*) telah dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dengan hanya membaca redaksional dari gugatan tersebut, oleh karena suatu gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscur libel*) telah dapat diketahui dengan membaca redaksional gugatan tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim tersebut setelah menerima eksepsi gugatan kabur kemudian memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memberi tanggapan atas eksepsi tersebut yang dapat disampaikan dalam repliek dan setelah menerima repliek tersebut seharusnya Majelis Hakim tersebut telah dapat dapat mempertimbangkan diterima dan dibenarkannya eksepsi tersebut, sehingga dalam perkara perdata tersebut Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada persidangan tanggal 10 Juli 2017 sehingga tidak harus menunggu untuk menjatuhkan putusannya pada persidangan tanggal 04 Oktober 2017.

Oleh karena itu menurut Yadi Supriadi, S.H., selaku kuasa hukum dari Penggugat dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Cms menyatakan bahwa putusan hakim atau eksepsi gugatan kabur yang dipertimbangkan dan diputuskan bersama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara merupakan proses pemeriksaan perkara yang berbelit-belit, tidak sederhana, memerlukan waktu yang panjang, pemeriksaan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi tidak ada manfaatnya untuk Penggugat, sehingga sebaiknya agar peradilan perdata dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebaiknya pertimbangan hakim dan putusan hakim terhadap eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok

perkara[412], dengan nada yang hampir sama begitu pula menurut Yuliana Surya Galih, S.H. M.H., selaku Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB dengan register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Cms mengatakan bahwa Putusan Hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara mengakibatkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan menjadi tidak sederhana, memerlukan waktu panjang dan lama serta berbelit-belit. Pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak ada manfaatnya dan telah membuang-buang waktu yang seharusnya tidak perlu. Agar dilakukan perubahan terhadap ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara. Putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses perkara perdata. Putusan atau eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan[413].

2. Badan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA telah menerima, memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dengan Register Perkara Nomor : 796/Pdt.G/2018/PA.Cms.

   Perkara Perdata yang diperiksa dan diadili pada Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA tersebut dapat diuraikan dengan gambaran sebagai berikut :

   Kasus Posisi

   Bahwasannya yang menjadi permasalahan perkara perdata pada Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA dengan Register Perkara Nomor 796/Pdt.G/2018/PA.Cms adalah bahwa telah meninggal dunia pasangan

[412] Hasil Wawancara dengan Yadi Supriadi, S.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat Perkara Perdata Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB Register Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Cms pada tanggal 13 Nopember 2022.

[413] Hasil Wawancara dengan Yuliana Surya Galih, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Tergugat IV dan Tergugat V Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB tertanggal 06 Nopember 2022 di Fakultas Hukum Universitas Galuh.

suami isteri dan pasangan suami isteri yang meninggal dunia tersebut tidak mempunyai anak kandung akan tetapi mempunyai seorang anak angkat laki-laki, sementara almarhum isterinya sebelumnya telah menikah dengan lelaki lain yang dari perkawinan sebelumnya tersebut mempunyai seorang anak perempuan, akan tetapi anak perempuan tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan 25 (dua puluh lima) orang, sehingga sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang merasa sebagai ahli waris dari isteri dari pasangan suami isteri yang meninggal dunia tersebut. Orang yang merasa sebagai ahli waris suami isteri yang tidak mempunyai anak kandung, melainkan hanya mempunyai satu orang anak angkat tersebut mereka merasa sebagai ahli warisnya, karena mereka adalah merupakan keturunan dari isteri dari pasangan suami isteri yang meninggal dunia tersebut dari perkawinan sebelumnya. Harta peninggalan suami isteri tersebut dianggap dikuasai dan dimiliki oleh anak angkat dan karena anak angkat dari pasangan suami isteri tersebut telah meninggal dunia, maka harta kekayaannya beralih dikuasai dan dimiliki oleh isterinya dan anak-anaknya, sehingga perbuatan isteri dan anak-anak almarhum anak angkat suami isteri yang meninggal dunia sebagaimana diuraikan di atas dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dianggap merugikan kepentingannya.

Untuk menuntut haknya ke 25 (dua puluh lima) orang yang dianggap telah dilanggar oleh isteri dan anak-anak almarhum anak angkat suami isteri yang telah meninggal sebagaimana diuraikan di atas, mereka mengajukan tuntutan hak dalam bentuk gugatan melalui Badan Peradilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA dengan menggugat isteri dan anak-anak dari almarhum anak angkat suami isteri yang telah meninggal dunia sebagaimana diuraikan di atas, dengan mendudukan mereka sebagai Tergugat dengan berjumlah 3 (tiga) orang yang masing-masing secara berurutan didudukan sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Posita atau Pundamentum Petendi

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada Posita atau Pundamentum Petendi gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) pada tanggal 28 Desember 1939 akan tetapi tidak dikaruniai anak lalu mengangkat anak bernama xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelumnya Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pernah menikah dengan xxxxxxxx Bin xxxxxxxxmempunyai anak yaitu Xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 April 1996 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/562-Des/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
4. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 di di rumah duka karena lanjut usia sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan Nomor : 474.3/563-Des/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
5. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxx pernah menikah dengan xxxxxxx Bin xxxxxxxx dan dari pernikahan tesebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1). Xxxxx xxxxx Bin xxxxxxxx, 2). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 3). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan 4). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Mei 1993 di rumah kediaman karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten/Kota xxxxxxxx dengan nomor : 474.3/75/Ds/2017 tertanggal 06 Nopember 2017;
7. Bahwa xxxx Xxxxxx Bin xxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 di rumah karena diabetis sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx

Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/564-Des/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017;

8. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 di rumah kediaman karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx dengan nomor : 474.3/122/Desa/2017 tertanggal 07 Nopember 2017 ;
9. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 02 September 1982 di rumah kediaman karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx dengan nomor : 474.3/124/Desa/2017 tertanggal 07 Nopember 2017;
10. Bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai 8 saudara kandung sebagai ahli waris yaitu 1). xxxxxx Binti xxxxxxx Alias xxxxxxxxxx, 2). xxxxxx Binti xxxxxxx Alias xxxxxxxxxx, 3). xxxxxx Binti xxxxxxx Alias xxxxxxxxx, 4). xxxxxx Bin xxxxxxx Alias xxxxxxxxxx, 5). xxxxxx Binti xxxxxxx Alias xxxxxxxxxx, 6). xxxxxx Bin xxxxxxx Alias xxxxxxxxxx, 7). xxxxxx Binti xxxxxxx Alias xxxxxxxxxx, 8). xxxxxx Binti xxxxxxx Alias xxxxxxxxxx;
11. Bahwa xxxxxxxx Binti xxxxxxxxx Alias xxxxxxxxxx selama perkawiannnya dengan Sumirta dikaruniai 9 orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu 1). xxxxxxxx Bin xxxxxxxx, 2). xxxxxxxx Binti xxxxxxxx, 3). xxxxxxxx Binti xxxxxxxx, 4). xxxxxxxx Bin xxxxxxxx, 5). xxxxxxxx Binti xxxxxxxx 6), xxxxxxxx Binti xxxxxxxx, 7). xxxx/ xxxx Bin xxxxxxx, 8). xxxxxxxx Bint xxxxxxxx (Pemohon 4) dan 9). xxxxxxxx Binti xxxxxxxx;
12. Bahwa xxxxxxxx Binti xxxxxxxxx Alias xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 1985 di rumah duka karena sakit sesuai dengan Surat Kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan Nomor : 474.3/504/Ds/2017 tertanggal 15 Desember 2017 ;

13. Bahwa xxxxx Bin xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 1994 jam 19.00 di rumah kediaman karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten/Kota xxxxxxxx dengan nomor : 474.3/74/Ds/2017 tertanggal 06 Nopember 2017;
14. Bahwa xxxxx Bin xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2001 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/51/Ds/2017 tertanggal 06 Nopember 2017;
15. Bahwa xxxxx Bin xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 April 1998 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/50/Ds/2017 tertanggal 06 Nopember 2017;
16. Bahwa xxxxx Bin xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/49/Ds/2017 tertanggal 06 Nopember 2017;
17. Bahwa xxxxx Binti xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Jum‘at tanggal 10 Mei 2013 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Pangandaran dengan nomor : 474.3/125/Desa/2017 tertanggal 20 Nopember 2017;
18. Bahwa xxxxx Binti xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2011 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx dengan nomor : 108/DM/XII tertanggal 10 Desember 2017;
19. Bahwa xxxx/xxxx Bin xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2005 di rumah duka karena sakit sesuai

dengan surat keterangan kematian dari dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/48/05/2017 tertanggal 06 Nopember 2017;

20. Bahwa xxxxx Binti xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1994 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/47/Ds/2017 tertanggal 06 Nopember 2017;
21. Bahwa xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx selama perkawiannya dengan xxxxxxx dikaruniai 3 orang anak yaitu 1). Xxx Bin xxxxxxx, 2). xxxxxx Binti xxxxxx dan 3). Xxxxxxxxxxxxx (Pemohon 5);
22. Bahwa xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Pebrauri 2008 di rumah duka karena sakit sesuai dengan Surat Kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan Nomor : 474.3/509/Ds/2017 tertanggal 15 Desember 2017 ;
23. Bahwa xxx Bin xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 Januari 2001 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/508/Ds/2017 tertanggal 15 Desember 2017 ;
24. Bahwa xxxxx Binti xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Mei 2014 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/507/Ds/2017 tertanggal 15 Desember 2017 ;
25. Bahwa Xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx selama perkawinannya dengan Ojoh dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1). Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon 6) 2). Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon 7), 3). Xxxxxxxxxxxx (Pemohon 8) ;

26. Bahwa Xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Jum‘at tanggal 09 Nopember 1985 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx Nomor : 474.3/ /Ds/2017 tertanggal 15 Desember 2017 ;
27. Bahwa Xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx selama perkawiannya dengan Ocot dikaruniai 2 orang anak yaitu 1). Xxxxxx Bin xxxxxxx (Pemohon 9), 2). Xxxxxxx Bin xxxxxxxx (Pemohon 10) ;
28. Bahwa Xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 jam 13.00 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor : 109/DM/XII/2017 tertanggal 10 Desember 2017 ;
29. Bahwa Xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx selama perkawinanya dengan xxxxxx dikaruniai 4 orang anak yaitu 1). Xxx Bin xxxxx 2). Xxxxxxxxxxxxxx (Pemohon 11), 3). Xxxxxxxxxxxxx (Pemohon 12) dan 4). Xxxxxx Binti xxxxx (Pemohon 13) ;
30. Bahwa Xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2000 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat kematian dari Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan Nomor : 474.3/502/Ds/2017 tertanggal 15 Desember 2017 ;
31. Bahwa xxx Bin xxxxx telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 27 Maret 1994 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari dari Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/503/Ds/2017 tertanggal 15 Desember 2017 ;
32. Bahwa Xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx selama perkawinannya dengan Markonah dikaruniai 5 orang anak yaitu 1). Xxxxxxxxxxxxx (Pemohon 14), 2). Xxxx Bin xxxxx (Pemohon 15), 3).

Xxxx Binti xxxxx (Pemohon 16), 4). Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon 17), dan 5). Xxxxxx Binti xxxxx (Pemohon 18) ;

33. Bahwa Xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 di rumah duka karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan Nomor : 474.3/512/Ds/2017 tertanggal 13 Desember 2017 ;
34. Bahwa Xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx selama perkawinannya dengan xxxxxx dikarunai 3 orang anak yaitu 1). Xxx Binti xxxxx (Pemohon 19), 2). Xxxx Binti xxxxx (Pemohon 20), 3). Xxxxx Binti xxxxx (Pemohon 21) ;
35. Bahwa Xxxxx Binti xxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat kematian dengan nomor : 474.3/501/Ds/2017 tertanggal 13 Desember 2017 ;
36. Bahwa Almarhum xxxxxxx Bin xxxxxxxxxx selama perkawinannya dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai 4 orang anak kandung yaitu 1). Xxxx Bin xxxxx , 2). Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 3). Xxxx Bin xxxxx dan 4). Xxxxxx Bin xxxxxx (Pemohon 1) ;
37. Bahwa xxxx Bin xxxxxx pernah menikah dengan xxxx xxxxxx dari hasil pernikahan tesebut dikaruniai 2 orang anak yaitu 1). Xxxx Binti xxxx Xxxxxx (Tergugat 1), 2). Xxxx Binti xxxx Xxxxxx (Tergugat 2) ;
38. Bahwa xxxx Bin xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/564-Des/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
39. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxx pernah menikah dengan xxxxxx dari hasil pernikahan tesebut dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxx (Pemohon 2) ;

40. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx dengan nomor : 474.3/122/Desa/2017 tertanggal 07 Nopember 2017 ;
41. Bahwa xxxxxx Bin xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 02 September 1982 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx dengan nomor : 474.3/124/Desa/2017 tertanggal 07 Nopember 2017 ;
42. Bahwa xxx Binti xxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 1997 di rumah duka karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx dengan nomor : 474.3/46/Ds/2017 tertanggal 06 Nopember 2017;
43. Bahwa selama berumah tangga antara Almarhumah Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhum Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 28 Desember 1939 mempunyai harta peninggalan yaitu :
    1. Tanah dan bangunan terletak di blok 07 Jl. xxxxxxxx RT. 02 RW. 07 Dusun xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx, persil D.17 No. 672 atas nama Jued / Juhanah luas tanah 3.202 M^2 dan bangunan 145 M^2 dengan batas-batas :
       Sebelah Utara: Tanah milik H. xxxx, Bapak xxxxx, xxxxx, xxxxx
       Sebelah Selatan : Tanah Milik Bpk. xxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxx
       Sebelah Timur : Jl. Kabupten
       Sebelah Barat : Jl. Dusun
       Tanah tersebut awalnya dikuasai oleh xxxxx K setelah meninggal dikuasai oleh Iin. S/xxxxxxxx (istri dan anak ke 2 Dedi Xxxxxx);
    2. Tanah darat terletak di Blok 07 xxxxxxxx RT. 01 RW. 07 Dusun xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten

xxxxxxxxxx, Persil D.17 No. 671 atas nama xxxxxxxx luas tanah 1.453 M^2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sxxxxx

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ixxx, Jxxx

Sebelah Timur : Tanah Milik Kxxxx, Exx, Sxxxxx

Sebelah Barat : Sungai, Nxxxx Kxxxx

Tanah tersebut awalnya dikuasai oleh Dxxxx Xxxxxx setelah meninggal dikuasai oleh Gina Kuswiani (anak pertama Dedi Xxxxx);

3. Tanah darat terletak di blok 07 Jl. xxxxxxxx Persil D.40 RT. 03 RW. 07 Dusun xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx No. 672/2969 atas nama xxxxxxxx luas tanah 528 M^2 dengan batas-batas :

   Sebelah Utara : Jalan Kabupaten

   Sebelah Selatan : Tanah Milik Exxx/Exxxx

   Sebelah Timur : Jl. Desa

   Sebelah Barat : Tanah Milik Axxxx

   Tanah tersebut dikuasai oleh Ixxx Sxxxx (istri dari xxxx Xxxxxx) ;

4. Tanah dan Bangunan di Blok xxxxxxxx Dusun xxxxxxxx RT. 02 RW. 01 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx persil D.III No. P 80 C 794 atas nama Dedi Xxxxxx dengan Sertifikat Nomor : 00806 luas tanah 518 M^2 dan bangunan 68 M^2 dengan batas-batas :

   Sebelah Utara : Tanah Milik Dxxx Jxxxx

   Sebelah Selatan : Jalan Desa

   Sebelah Timur : Jalan Kabupaten

   Sebelah Barat : Tanah Milik Hxxxx

   Tanah tersebut awalnya dibeli H. Jxxx dan dikuasai oleh xxxxxxxxx dan setelah meninggal dikuasai oleh Gxxx Kxxxxx (anak pertama Dxxx Xxxxxx);

   (Point 1 s/d point 4 selanjutnya disebut objek sengketa) ;

44. Bahwa tanah objek sengketa tersebut awalnya dikelola oleh Dxxx Xxxxxx dan setelah meninggal dunia dikelola oleh Mxxx, Ixx, Gxxx ;
45. Bahwa tanah objek sengketa sampai sekarang dikuasai oleh Mxxx, Ixx, Gxxx dan kondisinya masih utuh belum dialih tangankan kepada pihak yang lain, namun demikian tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 2014 sejak Dxxx Xxxxxx meninggal dunia ;
46. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa (1. Tanah dan bangunan di blok 07 Jl. xxxxxxxx persil D.17 No. 672 tas nama Jxxxx / Jxxxxxx luas tanah 3.202 M^2 dan bangunan 145 M^2, 2. Tanah Darat di Blok 07 Kedung xxxxxxxx Persil D.17 No. 671 atas nama Jued luas tanah 1.453 M^2, 3. Tanah darat blok 07 Jl. Kertajaya Persil D.40 No. 672/2969 atas nama H. Jxxx / Jxxxxxx luas tanah 528 M^2, 4. Tanah dan Bangunan di Dusun xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx persil D.III No. P 80 C 794 atas nama Oxxx K. luas tanah 518 M^2 dan bangunan 68 M^2) adalah harta Peninggalan antara Almarhumah Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhum Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan oleh karena Almarhumah Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhum Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal lebih dahulu dan tidak ada pengganti kedudukannya sebagai ahli waris kecuali Para Penggugat dan Para Tergugat, maka atas tanah objek sengketa tersebut yang berhak adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;
47. Bahwa tanah sengketa asal dari Oxxx K. di jual kepada Jxxx Bin Kxxxx Axxxxx dan belum pernah balik nama ke Jxxx Bin Kxxxx Axxxx karena meninggal, sekarang tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Dxxx Xxxxxx (anak angkat Jxxx / Jxxxxxxx) ;
48. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhumah Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhum Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan hak yang sama, maka sudah sepatutnya/selayaknya menurut hukum Para Tergugat

harus menyerahkan seluruh harta bersama dari tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, dengan tidak dibebani oleh kewajiban apapun ;

49. Bahwa olah karena gugatan waris ini didasarkan pada bukti-bukti outentik dan mengikat, serta untuk menghindari Gugatan ini menjadi illusoir, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Ciamis berkenan meletakan sita jaminan atas obyek gugatan waris tersebut dalam point 43 dalil gugatan Penggugat ;

Petitum atau Tuntutan

Sedangkan yang menjadi tuntutan primair atau tuntutan pokok gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
2. Menetapkan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXV sebagai Para Ahli Waris ;
3. Menetapkan bahwa tanah-tanah sebagaimana tercantum dalam objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat dan Para Tergugat ;
4. Menetapkan pembagian harta bersama untuk Para Pewaris ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek gugatan waris sebagaimana tercantum didalam point 43 Gugatan tersebut di atas ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta bersama dari tanah objek sengketa kepada Para Penggugat ;
7. Mengosongkan objek gugatan selama dalam proses gugatan ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Jawaban Para Tergugat

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban baik jawaban di luar pokok perkara atau eksepsi maupun jawaban terhadap pokok perkara, akan tetapi karena yang menjadi fokus dalam penelitian disertasi ini adalah putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur, maka yang dikemukakan dalam disertasi ini dibatasi terhadap hal yang menjadi fokus penelitian disertai ini, sehingga yang diuraikan hanya jawaban di luar pokok perkara yang berupa eksepsi gugatan penggugat kabur.

Adapun Jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat di luar pokok perkara yang berupa eksepsi gugatan kabur didalilkan oleh Para Tergugat yang diuraikan dalam eksepi dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa Para Penggugat menyusun gugatannya dengan tidak teliti dan tidak cermat, sehingga karenanya gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*oscuur libel*) yang menurut Hukum Acara Perdata, gugatan demikian dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

   Bahwa dalam hukum acara perdata tuntutan hak terdiri dari dua, yaitu *Contentieseu Jurisdictie,* pihak yang mengajukan tuntutan haknya disebut sebagai Penggugat*,* dan *Voluntaire Jurisdictie,* pihak yang mengajukan tuntutan haknya disebut sebagai Pemohon ;

   Bahwa perkara tuntutan hak dalam perkara ini tidak jelas, apakah merupakan *Voluntaire Jurisdictie* ataukah *Contentieseu Jurisdictie,* karena dalam gugatan pada uraian bagian identitas, pada awalnya Para Penggugat menyebut diri sebagai Penggugat, yang menurut hukum acara Perdata menunjukkan pihak yang mengajukan tuntutan hak dalam perkara *Contentieseu Jurisdictie,* selanjutnya pada gugatan bagian identitas lainnya mereka menyebut diri sebagai Pemohon, yang menurut hujum acara perdata merupakan pihak yang mengajukan tuntutan hak dalam perkara *Voluntaire Jurisdictie,* hal itu terbukti dalam gugatan yang telah dibacakan dalam persidangan perkara ini, yaitu :

   Pada Gugatan bagian Identitasnya antara lain : diuraikan sebagai berikut : 1. Xxxx xxxxxx Bin xxxxxx disebut sebagai Penggugat I, 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat II, 3. Xxxx Binti xxxxxxxxxxxx Alias xxxxx Alias xxxxx disebut sebagai Penggugat III, 4. xxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat IV, 5. Xxxxx Binti xxxxxxx disebut

sebagai Penggugat V, 6. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat VI, 7. Xxxxxx Bin xxxx disebut sebagai Penggugat VII, 8. Xxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat VIII, 9. Tayum Bin Endoy disebut sebagai Penggugat IX, 10. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat X, 11. Xxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XI, 12. Xxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XII,13. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XIII, 14. Xxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XIV, 15. Xxxxxxxxxxxxxx Binti xxxx disebut sebagai Penggugat XV, 16. Xxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XVI, 17. Xxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XVII, 18. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XVIII, 19. Xxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XIV, 20. Xxxx Binti xxxxx disebut sebagai Penggugat XX, 21. Atik Nurhayati Binti Iho disebut sebagai Penggugat XXI, 22. Xxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XXII, 23. Xxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XXIII, 24. Xxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XXIV,dan 25. Xxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XXV ;

Sehingga karenanya berdasarkan penyebutan Pihak dalam Gugatannya sebagaimana diuraikan diatas, Gugatan yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini, pada bagian Identitasnya mereka secara jelas dan tegas menyebut diri sebagai Penggugat;

Bahwa akan tetapi kemudian dalam Gugatan bagian Identitas selanjutnya setelah mereka menyebut diri sebagai Penggugat, lalu mereka menyebut diri sebagai Pemohon hal itu sebagaimana dibacakan dalam persidangan perkara ini pada Gugatan halaman 13 (tiga belas) di tuliskan dan dibacakan sebagai berikut :

-Selanjutnya untuk memudahkan penyebutan Pemohon I s/d Pemohon XXV akan disebut sebagai Para Penggugat‖;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini sangat jelas dan tegas mereka pada awalnya menyebut diri sebagai Penggugat, selanjutnya mereka menyebut diri sebagai Pemohon dan kemudian mereka menyebut diri sebagai Para Penggugat, sehingga karenanya penyebutan diri mereka menjadi tidak jelas;

Bahwa dalam Gugatan bagian Identitas Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di sebut sebagai Penggugat IV, akan tetapi pada Gugatan bagian Posita Butir 11 (Sebelas) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Pemohon 4;

Bahwa dalam Gugatan bagian Identitas Xxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat VI, Xxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat VII dan Xxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat VIII, akan tetapi pada Gugatan bagian Posita Butir 25 (Dua Puluh Lima) Xxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Pemohon 6, Xxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Pemohon 7 dan Xxxxxxxxxxxx disebut sebagai Pemohon 8;

Bahwa dalam Gugatan bagian Identitas Tayum Bin Endoy disebut sebagai Penggugat IX dan Xxxxx Bin xxxxx disebut sebagai Penggugat X, akan tetapi pada Gugatan bagian Posita Butir 27 (dua puluh tujuh) Xxxxx Bin xxxxx disebut sebagai Pemohon 9 dan Xxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Pemohon 10;

Bahwa dalam Gugatan bagian Identitas Xxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XI, Xxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XII dan Xxxxxxx Binti xxxxx disebut sebagai Penggugat XIII, akan tetapi pada Gugatan bagian Posita Butir 29 (dua puluh sembilan) Xxxxxxxxxxxx disebut sebagai Pemohon 12 dan Xxxxxxx Binti xxxxx disebut sebagai Pemohon 13;

Bahwa dalam Gugatan bagian Identitas Xxxxxxxxxxxxx, disebut sebagai Penggugat XIV, Xxxx Bin xxxxx disebut sebagai Penggugat XV, Xxxxxx Bin xxxxx disebut sebagai Penggugat XVI, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XVII, Xxxxxx Binti xxxxx disebut sebagai sebagai Penggugat XVIII, akan tetapi pada Gugatan bagian Posita Butir 32 (tiga puluh dua) diuraikan Xxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Pemohon 14, Xxxx Bin xxxxx disebut sebagai Pemohon 15, xxxxxx (ditulis xxxxx xxxxxx) disebut sebagai Pemohon 16, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Pemohon 17 dan Xxxxxx Binti xxxxx disebut sebagai Pemohon 18;

Bahwa dalam Gugatan bagian Identitas xxx Binti xxxxxxx disebut sebagai Penggugat XIV, xxxx Binti xxxxxx disebut sebagai Penggugat XX dan xxxx Binti xxxxxx disebut sebagai disebut sebagai Penggugat XXI, akan tetapi pada Gugatan bagian Posita Butir 34 (tiga puluh empat) diuraikan Xxx Binti xxxxxx disebut sebagai Pemohon 19, xxxx Binti xxxx disebut sebagai Pemohon 20, dan xxxx Binti xxxxx disebut sebagai Pemohon 21;

Bahwa pada Gugatan bagian Identitas Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat I, akan tetapi pada Gugatan bagian Posita Butir 36 (tiga puluh enam) diuraikan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Pemohon I ;

Bahwa pada Gugatan bagian Identitas diuraikan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat II, akan tetapi pada Gugatan bagian Posita Butir 39 (tiga puluh sembilan) diuraikan Kurniawan bin Carma disebut sebagai Pemohon 2;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sangat jelas dan tegas Gugatan yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini pihaknya tidak jelas apakah sebagai Penggugat ataukah sebagai Pemohon, karena pada gugatan bagian Identitas mereka menyebut diri sebagai Penggugat selanjutnya menyebut diri

sebagai Pemohon kemudian menyebut diri sebagai Para Penggugat, sedangkan pada Gugatan bagian Posita mereka menyebut diri sebagai Pemohon ;

Bahwa selain penyebutan mereka dalam Gugatan apakah sebagai Penggugat ataukah sebagai Pemohon yang tidak jelas, Gugatan yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini menjadi tidak jelas lagi karena Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat XIV terdapat 2 (dua) orang yaitu Xxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxx, hal itu sangatjelas dan tegas terbukti dalam Gugatan yang telah dibacakan dalam persidangan perkara ini, yaitu pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (delapan) dan halaman 10 (sepuluh) yang menguraikan sebagai berikut ;

14. Xxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XIV .

19. Xxxxxxxxxxxxx disebut sebagai Penggugat XIV, angka XIV berdasarkan pengetahuan yang telah diketahui oleh umum angka XIV dalam ejaan Romawi adalah menunjukan 14 (empat belas);

Bahwa berdasarkan penyebutan diri mereka dalam Gugatan yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini berarti pihak yang mengajukannya adalah terdiri dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dan atau ditambah dengan Penggugat XIV sampai dengan Penggugat XXV.

Bahwa penyebutan diri mereka apakah sebagai Penggugat ataukah sebagai Pemohon juga tidak jelas terdapat dalam Gugatan pada bagian Petitum atau tuntutan, hal tersebut dapat diketahui secara tegas dan jelas karena telah dibacakan dalam persidangan perkara ini yaitu pada Gugatan bagian tuntutan Pramair Poin 1 (satu), Point 3 (tiga) dan Poin 6 (Enam), mereka menyebut diri sebagai Para Penggugat akan tetapi pada tuntutan Primair Poin 2 mereka menyebut diri sebagai Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, penyebutan diri dalam Gugatan yang diperiksa dan diadili dalam perkara ini menjadi

tidak jelas karena pada bagian Identitas menyebut diri sebagai Penggugat selanjutnya menyebut diri sebagai Pemohon dan kemudian mereka menyebut diri sebagai Para Penggugat, akan tetapi pada bagian Posita mereka menyebut diri sebagai Pemohon, serta begitu pula pada Gugatan bagian Petitum butir yang satu mereka menyebut diri sebagai Pemohon, akan tetapi pada Gugatan bagian Petitum butir yang lain mereka menyebut diri sebagai Penggugat ;

3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIV, Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, dan Penggugat XXV yang selanjutnya dalam Gugatan tersebut disebut Pemohon 1 s/d Pemohon XXV dan kemudian di sebut sebagai Para Penggugat dalam menyusun Gugatannya telah disusun dengan tidak teliti dan tidak cermat karena antara dalil-dalil yang didalilkan dalam Gugatan bagian Posita berbeda atau tidak berkesesuaian dengan apa yang dituntut pada Gugatan bagian Petitum, sehingga karenanya Gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) yang menurut ketentuan hukum yang berlaku Gugatan yang demikian dapat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

   Bahwa Gugatan yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini tidak jelas apakah Gugatan Pembagian Waris ataukah Gugatan Pembagian Harta Bersama, hal itu terbukti dalam gugatan yang telah dibacakan dalam perkara ini yaitu pada Gugatannya dimulai dengan Perihal : Gugatan Waris, selanjutnya mereka dalam Gugatan bagian Posita atau Pundamentum Petendinya mendalilkan mengenai Ahli Waris dan Harta Warisnya, akan tetapi kemudian pada Gugatan bagian Petitum atau bagian Tuntutan Primair dituntut Pembagian Harta Bersama untuk Para Pewaris, sehingga dengan demikian

Gugatan yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini tidak berkesesuaian antara dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan bagian Posita atau Pundamentum Petendinya dengan Gugatan bagian Petitum atau Tuntutannya ;

Bahwa oleh karena Gugatan yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini antara Gugatan bagian Posita atau Pundamentum Petendi dengan Gugatan bagian Petitum atau bagian Tuntutan berbeda atau tidak berkesesuaian dan bahkan bertentangan antara gugatan bagian Posita dengan Gugatan pada bagian Petitum, maka layak dan patut menurut hukum Gugatan yang demikian dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) ;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat jelas dan tegas sebagai fakta hukum di persidangan perkara ini, Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIV, Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, dan Penggugat XXV, yang selanjutnya dalam Gugatan tersebut disebut Pemohon 1 s/d Pemohon XXV dan kemudian di sebut sebagai Para Penggugat yang diperiksa dan diadili dalam perkara ini telah disusun dengan tidak teliti *dan* tidak cermat sehingga menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Tahap Pembuktian

Pada tahapan pembuktian persidangan perkara tersebut telah diperiksa alat bukti baik yang berupa alat bukti tertulis maupun bukti saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, adapun alat bukti yang diajukan Penggugat meliputi bukti tertulis sebanyak 61 (enam puluh satu) buah, 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah.

Sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti tertulis sebanyak 15 (lima belas) buah dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah.

Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwasannya setelah proses jawab menjawab dan proses pembuktian serta kesimpulan dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan terhadap perkara perdata tersebut diakhiri oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum dan putusan yaitu sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dan dalam bagian jawaban Para Tergugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap gugatan Para Penggugat, disebabkan dalam bagian identitasnya telah disusun secara tidak cermat, dalam penyebutan kedudukan individu-individu yang menggugat terdapat yang disebut Penggugat, dan terdapat pula yang disebut Pemohon. Sehingga oleh karenanya Para Tergugat mempertanyakan, apakah perkara *a quo* ini perkara volunter ataukah perkara contentius. Dengan demikian, Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan demikian dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Gugatan yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini tidak jelas apakah Gugatan Pembagian Waris ataukah Gugatan Pembagian Harta Bersama, hal itu terbukti dalam gugatan yang telah dibacakan dalam perkara ini yaitu pada Gugatannya dimulai dengan Perihal : Gugatan Waris, selanjutnya mereka dalam Gugatan bagian Posita atau Pundamentum Petendinya mendalilkan mengenai Ahli Waris dan Harta

Warisnya, akan tetapi kemudian pada Gugatan bagian Petitum atau bagian Tuntutan Primair dituntut Pembagian Harta Bersama untuk Para Pewaris, sehingga dengan demikian Gugatan yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini tidak berkesesuaian antara dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan bagian Posita atau Pundamentum Petendinya dengan Gugatan bagian Petitum atau Tuntutannya ;

3. Bahwa oleh karena Gugatan yang harus diperiksa dan diadili dalam perkara ini antara Gugatan bagian Posita atau Pundamentum Petendi dengan Gugatan bagian Petitum atau bagian Tuntutan berbeda atau tidak berkesesuaian dan bahkan bertentangan antara gugatan bagian Posita dengan Gugatan pada bagian Petitum, maka layak dan patut menurut hukum Gugatan yang demikian dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas sekali pada halaman 1 sampai dengan 13 Para Penggugat telah membuat dan menjelaskan tentang identitas Para Penggugat dalam gugatan dan juga telah dinyatakan dalam identitas kapasitas Para Penggugat adalah sebagai Penggugat, dalam artian Gugatan Penggugat adalah bersifat Contentiesseu, adanya Pihak Penggugat dan Tergugat yang dalam sidang berperkara di Pengadilan Agama Ciamis;

2. Bahwa juga dalam Gugatan Para Penggugat juga sangat jelas sekali perihal apa yang dituju/maksud oleh Para Penggugat yaitu perihal warisan dari Xxxx/Xxxxxxx yang semasa hidupnya memiliki harta warisan dan hanya memiliki anak angkat yang bernama Xxxx Xxxxxx yang sekarang seluruh harta milik Xxxx Xxxxxx yang didapat dari warisan Xxxx dan Juhannah dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Tergugat terhadap adanya inkonsistensi penyebutan kedudukan individu-individu yang menggugat, yang dalam hal ini, yang menggugat ada yang menyebut dirinya sebagai Penggugat, akan tetapi ada juga yang menyebut dirinya sebagai Pemohon dan selanjutnya mereka menyebut sebagai Para Penggugat, adalah terjadi semata-mata dikarenakan adanya kekurang telitian dari Para Penggugat di dalam penyebutan kedudukan masing-masing individu yang menggugat yang tidak menimbulkan adanya kekaburan tentang apakah perkara ini perkara volunter ataukah contentius. Menurut pendapat Majelis, dengan adanya pihak Para Tergugat yang didudukkan sebagai pihak lawan sebagaimana jawaban Para Penggugat, jelas menunjukkan bahwa perkara *a quo* adalah merupakan perkara contentius dan bukan perkara volunter. Dengan demikian, maka keberatan Para Tergugat sepanjang mengenai adanya inkonsestensi Para Penggugat dalam penyebutan diri masing-masing individu yang menggugat adalah keberatan yang tidak berdasar, dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Tergugat bahwa antara posita gugatan dengan petitum tidak bersesuaian karena Para Penggugat dalam bagian positanya mendalilkan mengenai Ahli Waris dan Harta Warisnya, akan tetapi kemudian pada Gugatan bagian Petitum atau bagian Tuntutan Primair dituntut Pembagian Harta Bersama untuk Para Pewaris dan selanjutnya Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan jawaban bahwa Gugatan Para Penggugat juga sangat jelas sekali perihal apa yang dituju/maksud oleh Para Penggugat yaitu perihal warisan dari xxxx/xxxxxxx yang semasa hidupnya memiliki harta warisan dan hanya memiliki anak angkat yang bernama xxxx xxxxxx yang sekarang seluruh harta milik xxxx xxxxxx yang didapat dari warisan xxxx dan Juhannah dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam positanya Para Penggugat mendalilkan adanya ahli waris dan harta peninggalan Almarhum xxxx dan Almarhumah xxxxxxx, akan tetapi setelah Majelis mencermati posita gugatan Para Penggugat terdapat 3 (tiga) orang Penggugat, yaitu ; 1. Penggugat XXII (Xxxxxxxxxxxxx), 2. Penggugat XXIII (Xxxxxxxxxxxxxxx), dan 3. Penggugat XXV (Xxxxxxxxxxxxx) tidak dijelaskan hubungan hukumnya dengan Almarhum Xxxx dan/atau dengan Almarhumah Xxxxxxx, padahal dalam penentuan hukum waris seseorang, baik hubungan nasab atau hubungan pertikahan harus dijelaskan sedemikian rupa jauh dekatnya sehingga nampak dengan jelas ada atau tidak adanya hubungan kewarisan antara yang telah meninggal dunia dengan seseorang yang masih hidup, sehingga dengan demikian posita gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam bagian petitum Para Penggugat angka 2, Para Penggugat memohon agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris, selanjutnya dalam petitum angka 3, Para Penggugat memohon agar Majelis menetapkan harta-harta sengketa adalah hak milik Para Penggugat dan Para Tergugat serta di bagian petitum angka 4, Para Penggugat memohon pembagian harta bersama untuk Para Pewaris. Menurut Majelis, antara petitum yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, karena dari petitum angka 1 menggambarkan tentang sengketa waris dan dimohon oleh Para Penggugat agar Para Penggugat saja yang ditetapkan sebagai ahli waris dan tidak termasuk Para Tergugat, sedangkan dari petitum angka 3 gugatan Para Penggugat, menggambarkan pemahaman bahwa tanah-tanah sengketa pada dasarnya adalah milik Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Para Penggugat memohon agar objek-objek sengketa ditetapkan sebagai hak milik Para Penggugat dan Para Tergugat. Kalaulah objek-objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat dan Para Tergugat, adalah juga bertentangan dengan

petitum Para Penggugat angka 4, karena Para Penggugat memohon untuk menetapkan terhadap objek-objek sengketa sebagai harta bersama untuk Para Pewaris. Dengan demikian, antara posita dengan petitum gugatan Penggugat dan antara petirum yang satu dengan petirum yang lainnya tidak bersesuaian atau tidak saling mendukung dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dan dinilai mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat cukup alasan untuk menerima eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan Para Tergugat yang lainnya, serta segala bukti-bukti yang telah diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat beserta kesimpulannya masing-masing, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Amar/Dictum Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan dengan amar atau dictum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Adapun tahapan proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA dengan Register Perkara Nomor : 796/Pdt.G/2018/PA.Cms dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Hari dan Tanggal	Sidang Ke-	Tahapan Acara
1	10 April 2018	1	Para Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Para Tergugat, untuk sidang pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018
2	08 Mei 2018	2	Para Penggugat dan Para Tergugat hadir didampingi kuasanya dipersidangan, selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, kemudian Ketua Majelis menunjuk seorang mediator dan menunda persidangan sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 untuk mediasi.
3	15 Mei 2018	3	Para Penggugat dan Kuasanya tidak hadir dipersidangan, Para Tergugat dan kuasanya tidak hadir dipersidangan, karena Para Penggugat dan Para Tergugat serta kuasanya tidak hadir, lalu Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 untuk memanggil Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat
4	22 Mei 2018	4	Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Para Tergugat diwakili kuasa hukumnya, dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai. Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator yang hasilnya tetap pada pendirian masing-masing. Oleh karena tidak tercapai kesepakatan damai, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, oleh karena Kuasa Para Tergugat menyatakan belum siap dengan jawaban gugatan Penggugat. Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Para Tergugat

			untuk mempersiapkan jawaban. Sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 05 Juni 2018
5	05 Juni 2018	5	Para Penggugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan. Kuasa Para Tergugat menyatakan belum siap dengan jawaban tertulisnya. Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk mempersiapkan jawaban tertulisnya. Sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Juni 2018
6	26 Juni 2018	6	Para Penggugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan dengan menyerahkan jawaban tertulisnya kepada Ketua Majelis dan dibacakan dalam persidangan. Kuasa Para Penggugat akan menyampaikan replik secara tertulis dan mohon sidang ditunda untuk mempersiapkan repliknya. Sidang ditunda sampai dengan hari selasa tanggal 10 Juli 2018 untuk memberi kesempatan Kuasa Para Penggugat untuk mempersiapkan replik
7	10 Juli 2018	7	Para Penggugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan. Kuasa Para Penggugat telah siap dengan replik tertulisnya dan dibacakan dalam persidangan. Kemudian Kuasa Para Tergugat akan menyampaikan duplik secara tertulis dan mohon sidang ditunda untuk mempersiapkan dupliknya. Sidang ditunda sampai dengan hari selasa tanggal 31 Juli 2018 untuk memberi kesempatan Kuasa Para Tergugat untuk mempersiapkan duplik.
8	31 Juli 2018	8	Para Penggugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan yang telah

			siap menyampaikan duplik tertulisnya dan dibacakan dalam persidangan. Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan telah cukup dengan agenda jawab menjawabnya. Ketua Majelis menjelaskan bahwa agenda selanjutnya yaitu agenda pembuktian. Pembuktian pertama dibebankan kepada Para Penggugat. Oleh karena Para Penggugat menyatakan belum siap dengan alat buktinya baik bukti surat maupun bukti saksi, maka sidang ditunda sampai dengan hari selasa tanggal 14 Agustus 2018 untuk memberi kesempatan Kuasa Para Penggugat mempersiapkan alata buktinya.
9	14 Agustus 2018	9	Para Penggugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan. Kuasa Para Penggugat menyatakan belum siap dengan alat buktinya baik bukti surat maupun bukti saksi. Oleh karena Kuasa Para Penggugat belum siap dengan bukti surat maupun bukti saksi selanjutnya Kuasa Para Penggugat mohon sidang ditunda. Sidang ditunda sampai dengan hari selasa tanggal 21 Agustus 2018 untuk memberi kesempatan Kuasa Para Penggugat mempersiapkan alata buktinya.
10	21 Agustus 2018	10	Para Penggugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan, Kuasa Para Penggugat menyerahkan 56 (lima puluh enam) buah bukti surat, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan melengkapi bukti tertulis tambahan dan mohon sidang ditunda, sidang ditunda sampai dengan hari selasa tanggal 04 September 2018 untuk penyampaian alat bukti tambahan dari Para Penggugat.
11	04 September 2018	11	Para Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan, Para Penggugat menyerahkan 5 (lima) buah bukti tertulis dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi, selanjutnya majelis hakim memeriksa saksi-saksi. Para Penggugat menyatakan masih akan menghadirkan saksi tambahan dan mohon ditunda sidang ditunda sampai dengan hari selasa tanggal 18 September 2018 untuk penyampaian saksi tambahan dari Para Penggugat.

12	18 September 2018	12	Para Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan. Para Penggugat menghadirkan sebanyak 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya saksi diperiksa oleh majelis hakim, Para Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti surat maupun bukti saksi. Ketua Majelis menjelaskan tahap selanjutnya yaitu pembuktian dari Para Tergugat, Para Tergugat belum siap dengan bukti kemudian sidang ditunda sampai dengan hari selasa tanggal 02 Oktober 2018 untuk pembuktian dari Para Tergugat.
13	02 Oktober 2018	13	Para Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan dengan bukti surat, 11 bukti surat kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti tersebut. Para Tergugat menyatakan akan melengkapi bukti surat, mohon sidang ditunda. Sidang ditunda sampai dengan hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 untuk penyampaian bukti tambahan dari Para Tergugat
14	16 Oktober 2018	14	Para Penggugat I dan Penggugat II tanpa didampingi kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan
			Para Tergugat telah siap dengan bukti tambahan dan Kuasa Para Tergugat menyerahkan 4 macam bukti surat. Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti tersebut.
			Para Tergugat telah siap dengan bukti saksi sebanyak 2 orang. Kemudian saksi diperiksa. Kuasa Para Tergugat menyatakan cukup dengan bukti surat maupun bukti saksi
			Para Tergugat menyatakan akan menghadirkan saksi tambahan dan mohon ditunda. sidang ditunda sampai hari selasa tanggal 30 Oktober 2018 untuk bukti saksi tambahan
15	30 Oktober 2018	15	Para Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan
			Para Tergugat telah siap dengan bukti saksi tambahan sebanyak 2 orang. Kemudian saksi diperiksa. Kuasa Para Tergugat menyatakan cukup dengan bukti tersebut.
			sidang ditunda sampai dengan hari selasa tanggal

			06 November 2018 untuk menghadirkan Penggugat IV dan Penggugat V.
16	06 November 2018	16	Para Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan
			Kuasa Para Penggugat mohon untuk melaksanakan sita jaminan. Sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 27 November 2018 untuk pembacaan penetapan sita jaminan
			untuk menjatuhkan putusan sela sekaligus untuk menyampaikan kesimpulan dari Para Penggugat dan Para Tergugat.
17	27 November 2018	17	Para Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat diwakili kuasanya menghadap dipersidangan
			Pembacaan putusan sela yang isinya menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat. Setelah pembacaan putusan sela
			Para Tergugat dan Para Penggugat menyampaikan kesimpulannya. Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan dianggap selesai dilanjutkan rapat musyawarah majelis hakim.
			sidang ditunda sampai dengan hari selasa tanggal 08 Januari 2019 untuk pembacaan putusan
18	08 Januari 2019	18	Para Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan dan Para Tergugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan
			Pembacaan putusan

Tabel 2.
Tahapan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA Dengan Register Perkara Nomor : 796/Pdt.G/2018/PA.Cms

Berdasarkan gambaran perkara perdata sebagaimana dikemukakan di atas. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi gugatan kabur telah menempatkan dirinya dengan menjalankan fungsinya untuk menerapkan undang-undang ke dalam perkara yang dihadapinya atau dengan kata lain dalam menjalankan fungsinya Majelis Hakim tersebut hanya sebagai terompet undang-undang, hal tersebut dapat terlihat dalam mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 136 HIR sehingga eksepsi gugatan kabur dalam perkara tersebut dipertimbangkan dan

diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga tahapan-tahapan dan formalitas-formalitas yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam hal ini repliek, dupliek dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti baik dari Penggugat maupun bukti dari Tergugat dilaksanakan, akan tetapi tidak dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut, karena yang dipertimbangkan diterima dan dibenarkannya eksepsi gugatan kabur sehingga putusan hakim tersebut tidak menggambarkan peradilan perdata yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang dapat mewujudkan peradilan perdata berbasis nilai keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo penempatan fungsi majelis hakim yang demikian merupakan pengutamaan bekerjanya hukum secara peraturan dan logika, yang seharusnya telah ditinggalkan dan hakim harus menerapkan hukum progresif, yang menolak pengutamaan dan pengunggulan ilmu hukum yang bekerja secara analitis (*analytical jurisprudence*) yaitu yang mengedepankan ‑peraturan dan logika‖ (*rules and logic*). Cara kerja analitis yang berkutat dalam ranah hukum positif tidak akan banyak menolong hukum untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukannya secara bermakna[414].

Tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan yang adil dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, putusannya tidak mencerminkan fungsi hakim yang mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keadilan yang mencipptakan masyarakat yang bermartabat, untuk mewujudkan hukum yang memanusiakan manusia atau hukum yang nguwengko uwong yaitu hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya, hal itu dikarenakan manusia adalah mahluk yang mulia sebagai ciptaan Allah Subhanahuwata‘ala yang tercantum dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang sila tersebut mengandung nilai berupa pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya

[414] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif..., Op.Cit, hlm. 21.*

serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap penciptanya sebagaimana dikehendaki teori keadilan bermartabat dan Majelis Hakim tersebut tidak melaksanakan sebagaimana dikehendaki teori hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia [415] hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, maka hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar[416].

Suatu gugatan yang telah disusun dengan tidak cermat dan tidak teliti, sehingga terdapat pertentangan atau kontradiksi antara posita atau pundamentum petendinya dengan posita atau tuntutannya sehingga gugatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (*obsur libel*) telah dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dengan hanya membaca redaksional dari gugatan tersebut, oleh karena suatu gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscur libel*) telah dapat diketahui dengan membaca redaksional gugatan tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim tersebut setelah menerima eksepsi gugatan kabur kemudian memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memberi tanggapan atas eksepsi tersebut yang dapat disampaikan dalam repliek dan setelah menerima repliek tersebut seharusnya Majelis Hakim tersebut telah dapat dapat mempertimbangkan diterima dan dibenarkannya eksepsi tersebut, sehingga dalam perkara perdata tersebut Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada persidangan tanggal 21 Juli 2018 sehingga tidak harus menunggu untuk menjatuhkan putusannya pada persidangan tanggal 08 Januari 2019.

Oleh karena itu menurut Jenal S.H., M.H. sebagai Kuasa Hukum Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA dengan Register Perkara Nomor : 796/Pdt.G/2018/PA.Cms menyatakan bahwa Putusan hakim

[415] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.
[416] *Ibid*, hlm. 5.

atau eksepsi gugatan kabur yang dipertimbangkan dan diputuskan bersama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara berakibat sebagai berikut :

Penggugat harus menunggu dalam waktu yang lama untuk mendapatkan putusan hakim dan yang didapatkan bukan berhak atau tidaknya atas objek gugatan, pemeriksaan terhadap alat bukti baik tertulis maupun saksi tidak ada manfaatnya, penggugat harus mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu, putusan hakim menjadi tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam proses peradilan perdata, putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu dilakukan pembaharuan terhadap ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur harus dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara[417].

Berdasarkan keterangan dari H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., sebagai advokat yang sering menangani perkara perdata menyatakan bahwa putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur mengakibatkan persidangan berbelit-belit, pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan tidak ada manfaatnya sehingga agar putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mewujudkan keadilan, maka diperlukan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur putusan eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara[418], hal senada disampaikan oleh Edi Kurniadi, S.H., M.H., sebagai advokat yang sehari-hari berpraktek di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA mengatakan bahwa putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara mengakibatkan persidangan berbelit-belit, pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan tidak ada manfaatnya

[417] Hasil Wawancara dengan Jenal, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Perkara Perdata Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA dengan Register Perkara Nomor 796/Pdt.G/2018/Pa.Cms pada tanggal 09 Nopember 2022.

[418] Hasil Wawancara dengan H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., selaku Advokat senior yang sering menangani perkara perdata pada tanggal 10 Nopember 2022.

sehingga agar putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mewujudkan keadilan, maka diperlukan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur eksepsi gugatan kabur harus dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara[419].

D. Putusan Hakim Atas Eksepsi Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata Belum Berbasis Nilai Keadilan

Tujuan pertama dan utama orang datang di Pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa, mereka mengharapkan penyelesaian yang efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan[420] sehingga putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi[421]. Putusan hakim yang disebut juga putusan pengadilan, merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu para pihak yang berperkara. Putusan hakim diharapkan dapat mengakhiri perkara dan pihak yang berperkara dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan[422].

Putusan hakim dalam peradilan perdata terdiri dari putusan bukan putusan akhir atau putusan sela atau putusan antara yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara dan putusan akhir yang dijatuhkan

[419] Hasil Wawancara dengan Edi Kurniadi, S.H., M.H., selaku Advokat sehari-hari berpraktek di Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA pada tanggal 09 Nopember 2022.
[420] H. A. Mukti Arto, *Op.Cit.*, hlm. 11.
[421] Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.* hlm. 124.
[422] Djamanat Samosir, *Hukum ... Tahap-Tahap ...*, *Op.Cit.*, hlm. 269.

oleh hakim setelah pemeriksaan pokok perkara, sehingga putusan akhir tersebut merupakan putusan untuk memutuskan penyelesaian pokok perkara.

Putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, hal itu sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Ketentuan Pasal 136 HIR diikuti oleh Pasal 76 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Perdata yang berbunyi bahwa semua eksepsi yang diajukan tergugat, harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara kecuali eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan[423].

Ada sarjana yang berpendapat bahwa, eksepsi dalam Pasal 136 HIR ini sebagai perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai soal acara belaka. Dengan demikian, jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi itu tidak menyinggung mengenai soal pokok perkara. Karena itu, jawaban seperti ini harus diputus terlebih dahulu sebelum hakim mengarahkan pemeriksaan kepada pokok perkara. Jadi tidak perlu harus

[423] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2015, hlm. 17.

diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara menurut Pasal 136 HIR[424].

Maksud Pasal 136 HIR itu ialah untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau yang dibikin-bikin, supaya proses berjalan lama. Berdasarkan yurisprudensi juga, pasal tersebut melarang adanya putusan formal mengenai eksepsi yang bukan putusan akhir yang hanya akan mengulur waktu saja. Tetapi seandainya eksepsi yang menyatakan bahwa soal yang diperkirakan itu telah diputus oleh hakim adalah tepat, maka jika eksepsi itu tidak boleh diputus seketika, hakim hanya akan membuang waktu saja meneruskan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang pada akhirnya juga tidak akan diterima, karena perkara itu telah diputus pada waktu lampau. Karena hakim adalah aktif menurut sistem HIR dan RBg, maka terserah kepada pertimbangan hakim untuk menentukan apakah eksepsi itu akan dipertimbangkan hakim untuk menentukan apakah eksepsi itu akan dipertimbangkan lebih dahulu sehingga pemeriksaan perkara itu diteruskan atau diakhiri atau dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara yang berarti pemborosan waktu dan tenaga saja tanpa perlu[425].

Oleh karena berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku putusan hakim atas eksepsi selain eksepsi terhadap kewenangan pengadilan harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka karena eksepsi gugatan kabur, bukan merupakan bagian dari eksepsi terhadap kompetensi pengadilan, maka eksepsi

[424] Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op.Cit.,* hlm. 51.
[425] *Ibid*.

atas gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga karenanya harus mengikuti formalitas-formalitas dalam proses jawab menjawab, para pihak harus mengajukan pembuktian untuk pokok perkara, akan tetapi peristiwa hukum yang disampaikan dalam jawab menjawab tidak dikonstatir, alat bukti yang diajukan para pihak tidak dipertimbangkan untuk memutuskan pokok perkara, karena yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim adalah dibenarkan dan diterimanya eksepsi terhadap gugatan kabur dengan putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga jawab menjawab terhadap pokok perkara dan pembuktian dari para pihak menjadi tidak ada manfaatnya, para pihak harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk pemeriksaan terhadap pokok perkara, waktunya menjadi lambat, berlarut-larut, dan berbelit-belit.

Praktek peradilan perdata yang mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi gugatan kabur dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 136 HIR adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas yaitu pada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB dengan register perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Cms dan Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA yang pada kedua perkara perdata tersebut Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi gugatan kabur setelah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga para pihak dalam perkara tersebut telah menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan untuk pokok perkara, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena

Majelis Hakim menerima dan membenarkan eksepsi gugatan kabur, sehingga dengan demikian putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur belum menunjukan pelaksanaan peradilan yang mendasarkan kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang mengakibatkan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur belum menunjukan peradilan perdata dengan berbasis nilai keadilan.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA

A. Kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Ketika orang hanya memandang pengadilan sebagai ‐mahluk yuridis‖ belaka, maka demikian pula pandangan terhadap para aktor yang ‐bermain‖ di lingkungan pengadilan, seperti hakim, jaksa, dan pengacara. Secara normatif, hakim dan tugas yang dilakoninya senantiasa hanya diukur dengan ukuran aturan-aturan yang berlaku, termasuk ukuran hukum acara yang menjadi pedoman *the rule of the game* sang hakim dalam pekerjaannya. Padahal ketika hakim membuat suatu putusan ternyata putusannya itu bukan sekedar produk yuridis belaka, melainkan juga (bahkan sangat banyak) diwarnai ‐ramuan‖ non hukum yang bersumber baik dari alam sadar sang hakim, maupun alam bawah sadar mereka. Putusan hakim juga diwarnai oleh persepsi-persepsi pribadi hakim yang berbentuk melalui proses sosialisasi yang sangat panjang yang pernah dilaluinya[426].

Secara teoritik keberadaan pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan ‐rumah pengayoman‖ bagi masyarakat pencari keadilan yang mempercayai jalur litigasi serta dianggap sebagai ‐perusahaan keadilan‖ yang mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk

[426] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 2-3

keadilan yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Tugas dan fungsi pengadilan tidak sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat. Sebagai lembaga hukum peradilan juga diharuskan menjadi media dalam menggapai cita hukum. Cita dari hukum adalah untuk menjaga keteraturan dan ketertiban (*social order*) dalam masyarakat, sehingga fungsi hukum lebih ditekankan sebagai pengawasan sosial (*social control*)[427].

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan diambil melalui proses yang panjang, sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakan hukum sesuai dengan Instruksi Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/015/INSTR/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998, diinstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalismenya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel yang berisikan etos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), dan sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman[428]. Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, jangan sampai justeru akan memperuncing

[427] Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 4.
[428] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaaan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 118-119.

masalah, bahkan sampai menimbulkan kontroversial di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Penyebab kontroversi putusan hakim yang kurang menguasai keadaan atau kurangnya penguasaan bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan jaman[429].

Hakim merupakan komponen utama yang melahirkan hukum dalam arti konkret, baik dalam makna sekedar menerapkan hukum abstrak terhadap peristiwa konkret, menafsirkan hukum atau membentuk hukum. Hukum konkret yang lahir dari putusan hakim tidak selalu memuaskan. Bukan saja karena hakim dianggap terlalu terikat pada kaidah-kaidah hukum abstrak maupun karena putusan dianggap menyampingkan rasa keadilan atau tuntutan soiologis. Putusan hakim yang terlalu terikat pada kaidah-kaidah hukum abstrak dapat tidak memuaskan karena hakim dianggap tidak cukup mempertimbangkan kenyataan individual dan sosial. Lebih-lebih apabila hakim hanya memaknai kaidah hukum sebagai sebuah bunyi normatif, bukan pengertian normatif. Dalam bentuk ekstrem pernah dikenal sebutan hakim mulut atau corong undang-undang. Hakim harus senantiasa menyadari, hukum tertulis hanyalah moment opname, dari tuntunan dan kenyataan yang ada pada saat ditetapkan. Masyarakat sebagai tempat hukum tertulis berlaku selalu dalam perubahan (dinamis). Hakim harus menjaga agar hukum yang diterapkan tetap aktual dan harmonis dengan peri kehidupan masyarakat. Begitu pula hukum adat atau hukum kebiasaan. Hakim tidak boleh sekedar mengetahui hukum adat yang didapati dalam buku-buku atau putusan yang

[429] *Ibid*, hlm. 119.

telah ada. Masyarakat dalam hukum adat juga senantiasa berubah. Semata-mata menggunakan hukum adat yang didapati dalam buku-buku *Van Vallenhoven,* Ter Haar, Supomo dan lain-lain, dapat menyesatkan. Ada pula ahli yang mempertanyakan ‑Apakah tradisi itu ada, mengingat segala sesuatu senantiasa berubah ?‖ Tentu saja, hakim tidak boleh tenggelam pada serba berubah. Kepastian, ketertiban, peri kehidupan yang harmonis harus terjaga dengan baik. Putusan pengadilan yang tidak memuaskan dapat juga terjadi ketika hakim terlalu menekankan pada pendekatan rasa keadilan atau pendekatan serba sosiologis. Kebebasan hakim untuk menggunakan pendekatan rasa keadilan atau kenyataan sosiologis akan mendorong subjektifitas hakim. Subjektifitas hakim tanpa ukuran objektif sebagai pengikat yang bersifat normatif maupun non normatif dapat melahirkan putusan hakim yang justeru tidak adil dan sewenang-wenang. Ukuran normatif adalah segala kaidah hukum itu sendiri. Inilah makna hakim memutus menurut hukum. Hakim dilarang memutus di luar hukum, karena memutus di luar hukum merupakan tindakan sewenang-wenang. Ukuran lain yang harus secara serentak digunakan di samping ukuran normatif adalah ukuran rasa keadilan rata-rata dalam masyarakat (*general universal principle of justice*) dan realitas sosial, terutama manfaat sosial putusan tersebut, baik bagi para pihak maupun anggota masyarakat pada umumnya. Manfaat sosial, antara lain menjaga harmoni dan kesejahteraan sosial[430].

[430] H. M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 6-7.

Menurut H. A. Mukti Arto yang mengutip pendapat Purwoto mengatakan bahwa idealnya putusan hakim itu harus memenuhi dua syarat, yaitu : 1) Syarat teoritis, 2) Syarat praktis. Memenuhi syarat teortis, artinya ialah sesuai dengan teori yang telah teruji kebenarannya. Suatu putusan dapat dianggap baik dan benar apabila telah sesuai dengan teorinya. Memenuhi syarat praktis artinya telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan, yakni dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikan. Suatu putusan dapat dianggap tepat apabila telah memenuhi kebutuhan praktik. Syarat teoritis merupakan *das sollen* sedang syarat praktis merupakan *das seinya*. Apabila suatu putusan telah memenuhi *das sollen* dan *das sein-nya*, atau antara teori dan praktiknya telah sesuai maka itulah putusan yang ideal[431].

Adapun secara teoritis, putusan hakim haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- Ilmiah yaitu logis, sistematis, dan metodis.
- Mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila, yaitu :
  1. Nilai Ketuhanan
  2. Nilai Kemanusiaan
  3. Nilai Persatuan Indonesia
  4. Nilai Keadilan Sosial
- Sejalan dengan tujuan hukum nasional, yaitu :
  1. Melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia.
  2. Memajukan kesejahteraan umum

[431] H. A. Mukti Arto, *Op.Cit.*, hlm. 89.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertban dunia.

- Memenuhi syarat yuridis, yaitu :

4. Mempunyai dasar hukum

1. Memulihkan hubungan sosial

2. Memberi perlindungan hukum

- Memenuhi syarat sosiologis, yaitu :

1. Memenuhi rasa keadilan

2. Memenuhi hubungan sosial

3. Memberi kemanfaatan

- Memenuhi syarat psikologis, yaitu :

1. Memberi rasa aman, dan tentram

2. Memberi rasa damai

3. Memberi rasa puas.

- Memenuhi syarat religius, yaitu :

1. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Tidak bertentangan dengan hukum Tuhan.

3. Dapat dipertanggungjawabkan kepadaTuhan.

Sedangkan secara praktik putusan itu haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

(a) Tuntas yakni :

1. Mengadili semua petitum.

2. Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali dalam pertimbangan hakim untuk kesempurnaan putusan itu sendiri.

3. Menyelesaikan semua aspek perkara, yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis.

(b) Final, yakni :

1. Tidak buntu, artinya itu dapat dieksekusi.
2. Tidak berbuntut, artinya tidak menimbulkan sengketa baru dan berhenti (benar-benar telah selesai) sampai disitu.

Menurut Achmad Ali tugas hakim meliputi tiga tahap yaitu sebagai berikut : Tahap Konstatir, disini hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan. Misalnya benarkah si A telah memecahkan jendela rumah si B sehingga si B menderita kerugian ? Disini para pihak (dalam perkara perdata) dan penuntut umum (dalam perkara pidana) wajib untuk membuktikan melalui penggunaan alat-alat bukti. Dalam tahap konstatir ini, kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini. Tahap Kualifikasi, disini hakim mengkualifikasi, termasuk hubungan hukum apakah tindakan si A tadi ? Dalam hal ini dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Tahap Konstituir, disini hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa, hakim menggunakan silogisme yaitu menarik suatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya (dalam contoh hal ini Pasal 1365 BW) dan premis minor berupa tindakan si A memecahkan kaca jendela si B. Proses penemuan hukum oleh hakim dimulai pada tahap kualifikasi dan berakhir pada tahap konstituir.[432]

[432] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence),* Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 173.

Prosedur penemuan hukum oleh hakim merupakan langkah operasional hakim dalam perencanaan hukum. Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks yang pada dasarnya dimulai sejak jawab menjawab sampai dijatuhkannya putusan. Kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah itu pada umumnya terintegrasi, tidak terpisahkan satu sama lain, tetapi sering tidak berurutan. Akan tetapi momentum dimulainya penemuan hukum ialah setelah peristiwa konkretnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah peristiwa konkret yang telah dikonstatasi itu harus dicarikan atau diketemukan hukumnya. Peristiwa konkret itu harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan[433].

Sumber utama dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum undang-undang diprioritaskan dari sumber hukum yang lain. Jikalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicari terlebih dahulu dalam undang-undang karena undang-undang bersifat autentik, berbentuk tertulis, dan lebih menjamin kepastian hukum [434] . Tidak mudah untuk membaca undang-undang, karena tidak hanya sekedar bunyi kata-kata saja, tetapi harus mencari arti, makna, atau tujuannya suatu undang-undang secara keseluruhan mengandung ratusan ribu kalimat, dimana pikiran yang ada di belakang

[433] H. M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.
[434] Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 49.

kalimat-kalimat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang justeru saling bertentangan. Oleh karena itu, membaca undang-undang tidak cukup dengan membaca pasal-pasalnya saja, tetapi harus pula dibaca penjelasan dan juga konsiderannya. Jika hukum dikatakan sebagai suatu sistem, maka untuk memahami suatu pasal undang-undang atau untuk memahami suatu undnag-undang sering harus dibaca pasal-pasal lain dalam suatu perundang-undangan yang lain. Undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan itu sendiri (*contra legem*), lebih-lebih kalau undang-undang itu sudah cukup jelas. Jika ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan atau jawabannya, maka barulah dicari dalam kebiasaan yang merupakan hukum tidak tertulis, yang untuk menemukannya harus bertanya kepada warga atau tokoh masyarakat yang dianggap mengerti. Kebiasaan adalah perilaku yang diulang. Suatu kebiasaan dianggap sebagai hukum apabila kebiasaan itu dianggap mengikat. Dalam hal ini perilaku tersebut harus diulang dalam waktu yang cukup lama, berulang-ulang dan harus menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku yang diulang itu memang patut secara objektif dilakukan. Hukum kebiasaan pada umumnya melengkapi undang-undang dan tidak dapat mengesampingkan undang-undang. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu hukum kebiasaan mengalahkan undang-undang yang bersifat pelengkap saja. Sumber penemuan hukum yang selanjutnya adalah yurisprudensi. Pengertian yurisprudensi dapat diartikan sebagai tiap-tiap putusan hakim. Yurisprudensi dapat pula berarti kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai peradilan kasasi dan yang pada

umumnya diberi anotasi oleh pakar di bidang peradilan. Ada juga yang mengartikan yurisprudensi sebagai pandangan atau pendapat para ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya. Dalam kaitan dengan masalah yurisprudensi tersebut terdapat 2 (dua) asas yang dianut dalam peradilan yaitu asas *precedent* dan asas bebas. Asas *precedent* berarti hakim terikat atau tidak boleh menyimpang dari putusan-putusan yang terlebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau sederajat tingkatannya. Sebaliknya asas bebas adalah hakim tidak terikat pada putusan-putusan hakim yang lebih tinggi maupun yang sederajat tingkatannya. Menurut Bagir Manan sistem peradilan indonesia tidak menganut asas precedent atau ajaran stare decisis. Jadi, hakim-hakim Indonesia bebas mengikuti atau tidak putusan-putusan hakim terdahulu. Walaupun demikian dalam praktik, hakim-hakim menuruti berbagai yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*), terutama yurisprudensi Mahkamah Agung. Sebagai salah satu sumber penemuan hukum, pada hakikatnya dalam dunia peradilan, yurisprudensi mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Menegakan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, dimana undang-undang tidak mengatur atau belum mengaturnya.
2. Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama.
3. Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan (*predictable*) pemecahan hukumnya.

4. Mencegah terjadinya kemungkinan disparitas (perbedaan) dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, maka jangan sampai menimbulkan disparitas, tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasusitik (*case by case*).

Dalam lingkungan peradilan dikenal adanya suatu yurisprudensi tetapi yang merupakan suatu kaidah atau ketentuan dalam suatu putusan yang kemudian diikuti secara tetap oleh hakim. Hakim selanjutnya dan dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum umum. Selanjutnya doktrin juga merupakan sumber penemuan hukum seperti halnya pada definisi mengenai perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang terlalu umum dan tidak jelas, sehingga doktrin membantu memberi batasan tentang perjanjian tersebut[435].

Apabila pengertian hukum secara terbatas sebagai keputusan penguasa dan dalam arti yang lebih terbatas lagi sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hukum dalam menemukan apa yang dapat menjadi hukum, sehingga melalui keputusannya, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Jadi tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan lain perkataan apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil sesuai dengan maksud hukum yaitu

[435] *Ibid*, hlm. 51-52.

mencapai kepastian hukum. Karena itu orang dapat mengatakan pembuat undang-undang. Karena itu, hakim tidak diperkenankan menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat. Karena itu, menurut Polak cara penafsiran ditentukan oleh (a) materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (b) tempat perkara diajukan dan (c) menurut zamannya[436].

Adanya pandangan yang hidup sampai abad ke-19 sebagai akibat pengaruh ajaran pemisahan kekuasaan dimana diajarkan bahwa hakim tidak dapat menciptakan atau menemukan hukum sudah lama ditinggalkan. Dalam pandangan ahli hukum abad ini hakim tidak dapat membuat dan membuka tabir pikiran-pikiran yang terletak dalam undang-undang. Hakim sekedar mempelajari undang-undang, mengadakan analasis untuk menemukan jalan bagi hal-hal yang tegas melalui jalan deduksi yang logis dengan memakai cara silogisme, sehingga cara demikian disebut juga geometri yuridis. Hakim tidak boleh melakukan cara penafsiran lain daripada penafsiran gramatikal, sistematis atau sejarah apabila tidak demikian berarti hakim mengingkari tugasnya yang tidak bersifat ilmiah[437].

Penemuan hukum lazimnya diartikan proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang dalam tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum

[436] Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 8-9.
[437] *Ibid,* hlm. 50-51.

dengan mengingat peristiwa kongkrit. Sementara orang lebih suka menggunakan istilah ‑pembentukan hukum‖ daripada ‑penemuan hukum‖ oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada. Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum, setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain, hubungan mana diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri yaitu kewajiban dan wewenang apakah yang diberikan oleh hukum padanya[438].

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa, ilmuwan hukumpun mengadakan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin ini kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum. Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain[439].

[438] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bekerjasama Dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Bandung, 2013, hlm. 4-5.
[439] *Ibid*, hlm. 5.

Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang. Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan di luar diri hakim. Pembentuk undang-undang membuat peraturan umumnya, sedangkan hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis terpaksa sebagai silogisme. Disini hakim tidak menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hakim hanyalah corong dari undang-undang yang tidak dapat mengubah atau menambah undang-undang. Pandangan klasik yang dipertahankan oleh Montesquieu dan Kant ini didasarkan kepada pikiran dasar Montesquieu bahwa pembentukan undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Demi kepastian hukum, kesatuan hukum dan kebebasan warganya yang terancam oleh tindakan sewenang-wenang dari hakim, maka hakim harus tunduk pada pembentukan undang-undang. Dalam pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah suatu bentuk silogisme undang-undang merupakan premisse mayor, peristiwanya yang kongkrit merupakan premisse minor, sedangkan keputusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulannya. Suatu kesimpulan logis tidak akan meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa kongkrit. Ini merupakan pandangan yang *typis logicitis*[440].

[440] *Ibid*, hlm. 6.

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani yang mengutip pendapat Satjipto Rahardjo bahwa sekarang kita meninggalkan pandangan logis yang hanya memandang hakim sekadar ‑terompet undang-undang‖, maka sejak itu kita tidak lagi memandang hakim sebagai pelaksana hukum, tetapi hakim sudah membuat (*judge made*) yaitu putusannya. Dengan kata lain putusan hakim adalah hukum. Tentu saja ada perbedaan antara hukum yang diproduksi oleh legislatif dalam wujud undang-undang dengan hukum yang dibuat oleh hakim. Hukum dalam wujud undang-undang mengikat secara umum, sedangkan putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak tertentu saja[441].

Harapan untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional saat ini berhadapan dengan berbagai kondisi yang saat ini belum ideal. Ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi hukum yang demikian. Dalam hal substansi hukum misalnya, masih banyak substansi hukum positif yang belum harmonis sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaan dan ketidakpastian hukum. Pembentukan hukum positif yang ada saat ini juga banyak dikeluhkan hanya didasarkan pada pertimbangan sesaat dan kurang menyentuh kepentingan masyarakat luas[442]. Dari aspek substansi hukum, salah satu bahasannya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini banyak ditemukan permasalahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Permasalahan tersebut antara lain peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan

[441] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 151.
[442] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, Jakarta, 2020, hlm. 5.

perkembangan masyarakat sehingga hukum menjadi tertinggal dan peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien[443].

Menurut Eman Suparman mengatakan bahwa Hukum Acara Perdata untuk pengadilan negeri kaidahnya kini sudah sangat tertinggal. Betapa tidak, *het Her Ziene Indonesisch* Reglement (HIR) sebagai perangkat norma hukum formal yang disusun oleh Jhr. Mr. H.L. Wichers, pada tahun 1846 untuk beracara di depan Land Raad, harus tetap dipertahankan untuk mampu menjawab sejumlah persoalan yang semakin kompleks pada abad 21 ini[444] dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Pandu Dewanto terhadap Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa kelemahan substansi adanya peraturan hukum acara dan hukum materil yang substansinya relatif sudah ketinggalan perkembangan dibandingkan kasus yang ada [445] . Menurut Vivi Purnamawati, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB menerangkan bahwa karena hukum acara perdata bersifat mengikat, terhadap para pihak yang terlibat termasuk kepada hakim maka dalam menjatuhkan putusan atas eksepsi dalam suatu perkara akan dipertimbangkan apakah eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi terhadap kompetensi pengadilan atau eksepsi di luar kompetensi pengadilan, apabila eksepsi terhadap kompetensi pengadilan, maka akan dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, akan tetapi apabila eksepsinya

[443] *Ibid*, hlm. 49.
[444] Eman Suparman, *Kerjasama…, Op.Cit*., hlm. 175.
[445] Pandu Dewanto, *Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, hlm. 300.

di luar kompetensi pengadilan termasuk di dalamnya eksepsi terhadap gugatan kabur, maka akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama pemeriksaan terhadap pokok perkara, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, sehingga penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata yang didalamnya terdapat eksepsi gugatan kabur tidak dapat dijalankan karena kelemahan substansi ketentuan Pasal 136 HIR [446] , selanjutnya berdasarkan keterangan dari Dede Halim, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB menerangkan bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya akan berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut :

- Hakim dalam melakukan konstruksi hukum guna menemukan hukum terhadap perkara yang dihadapinya dengan menerapkan ketentuan yuridis yang jelas dan tegas mengatur perkara yang dihadapinya.
- Hakim akan memberikan putusan dengan mendasarkan putusannya kepada dasar hukum yang jelas mengatur persoalan yang diperiksa dan diadilinya, apabila ketentuan hukumnya tidak jelas hakim akan melengkapinya.
- Hakim berkewajiban untuk memahami perkara yang dihadapinya dan apabila permasalahan tersebut terdapat aturan hukumnya yang jelas, maka hakim akan menerapkan ketentuan hukum yang jelas tersebut.
- Hukum Acara Perdata bersifat mengikat sehingga hakim terikat dengan ketentuan yang menentukan hakim wajib segera menjawab eksepsi kompetensi pengadilan, akan tetapi eksepsi selain kompetensi pengadilan

[446] Hasil Wawancara dengan Vivi Purnamawati, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB Pada tanggal 04 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Ciamis.

termasuk eksepi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, hal itu sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 136 HIR[447].

Menurut Drs. Asep Mujtahid, M.H., Ketua Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA menerangkan bahwa untuk melaksanakan peradilan yang menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata yang di dalamnya terdapat ekepsi gugatan kabur tidak dapat terlaksana karena kelemahan substansi hukum ketentuan Pasal 136 HIR[448].

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusannya atas eksepsi gugatan kabur dalam peradilan perdata, maka hakim akan mendasarkan pada substansi hukum yang lemah sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

B. Kelemahan Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Berdasarkan fungsinya, suatu budaya dapat berfungsi sebagai : (1) Identitas dan Citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah, kondisi dan sisi geografis, sistem sosial, politik, dan ekonomi dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. (ii) Pengikat suatu

[447] Hasil Wawancara dengan Dede Halim, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB, Pada tanggal 04 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Ciamis.
[448] Hasil Wawancara dengan Drs. Asep Mujtahid, M.H., Ketua Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA, Pada tanggal 24 Agustus 2022.

masyarakat. Pengikat tersebut membentuk kebersamaan (*sharing*) yang merupakan faktor pengikat yang kuat seluruh anggota masyarakat. (iii) Sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya. Budaya dapat menjadi sumber komoditas ekonomi seperti wisata budaya. (iv) Kekuatan penggerak, karena budaya terbentuk melalui proses belajar mengajar, sehingga budaya itu dinamis dan tidak kaku. (v) Pola perilaku, karena berisi norma tingkah laku dan menggariskan batas-batas toleransi sosial. (vi) Pengganti formalisasi, yakni orang tanpa diperintah melakukan tugasnya. (vii) Mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Dilihat dari sudut ini pembangunan seharusnya merupakan proses budaya. (viii) Proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara sehingga terbentuk nation state[449]. Pelaku budaya adalah setiap orang atau kelompok berbudaya. Budaya setiap orang atau kelompok orang berbeda-beda. Budaya itu tidak dapat disebut baik atau buruk. Kesan baik buruk timbul tatkala seseorang berinteraksi (berkomnikasi) dengan orang lain dengan menggunakan budayanya sendiri (*encoder*) tanpa memperhatikan dan menyesuaikan dirinya dengan budaya orang lain itu (*decoder*)[450].

Budaya hukum yaitu seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai (*values*) yang dianut kelompok orang yang dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan/perilaku yang terkait dengan hukum. Pengetahuan dan nilai-nilai itu merupakan pemandu dan pengarah hidup kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok. Pengetahuan dan nilai-nilai itu juga sangat menentukan sesuatu itu berharga, layak dibutuhkan atau

[449] M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Divisi Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 35-36.
[450] *Ibid*, hlm. 35-36.

dikehendaki, dipuji, dihormati, dijunjung tinggi, pantas dicari, diupayakan dan dicita-citakan perwujudannya. Pilihan nilai-nlai tersebut didasarkan pada besarnya pengaruh dan dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan, harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika ia memilih pengadilan, hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong tersebut[451].

Konsep budaya hukum juga dapat dibedakan menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya menangani perkara hukum. Sementara itu budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, yakni sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap mereka pada umumnya[452].

Dengan mengacu pada elemen-elemen yang terdapat dalam konsep budaya hukum seperti dikemukakan di atas, yang terdiri dari elemen nilai-nilai dan sikap dan juga pembedaan budaya hukum internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan budaya hukum hakim yaitu seperangkat pengetahuan, nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas hakim untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan. Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan diyakini

[451] *Ibid*, hlm. 36.
[452] *Ibid*, hlm. 37.

kebenarannya, yang ada di dalam benak kepala hakim tersebut yang itu pula mempengaruhi sikap dan perilakunya untuk menentukan salah tidaknya seseorang (terdakwa/tergugat) dan menentukan pula sanksi yang layak dijatuhkan jika ia divonis bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari putusan itu dianggap benar, adil dan bermanfaat. Pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keyaknan hakim akan dibuat apakah akan membebaskan atau menjatuhkan sanksi yang ringan atau berat.[453]

Budaya hukum hakim merupakan mesin yang dapat menggerakan hakim untuk bertindak sebagai aktor dalam memutuskan perkara. Menurut Ronald Beiner yang dikutip oleh Warasih menyatakan putusan hakim merupakan -… *Mental activity that is not bound to rules*…‖. Bertolak dari konsep ini, maka hakim yang bekerja memutus perkara dengan paradigma positivisme akan cenderung memutus berdasarkan bunyi teks dan lebih menekankan pada nilai kepastian undang-undang. Disisi lain hakim yang berparadigma non positivisme maka akan memutuskan perkara tidak hanya mendasarkan pada bunyi teks undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etik moral yang melandasi putusan tersebut untuk mencari dan menemukan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang menjadi inti substansi tujuan hukum yang sesungguhya.

Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa hakim Pengadilan kita pada umumnya masih terlalu berpegang teguh pada huruf undang-undang secara legistis, dan menafsirkan undang-undang itu sercara

[453] *Ibid*.

harfiah [454] . M. Syamsudin menyatakan bahwa legal positivisme masih menjadi faham mainstream di kalangan hakim dalam menangani perkara (korupsi). Paradigma ini melahirkan cara berpikir yang bercorak positivistik di kalangan hakim dalam menangani perkara. Pada umumnya hakim masih mengikuti cara berpikir legal positivisme dan jarang sekali ditemukan hakim yang berani menerobos (*rule breaking*) mengikuti cara berpikir nonpositivistik, yaitu menjadikan undang-undang itu acuan dan sumber satu-satunya yang dianggap absah dalam menangani perkara. Posisi hakim kurang mendapatkan tempat untuk melakukan penemuan hukum dan cenderung diposisikan sebatas corong yang menyuarakan undang-undang. Aturan hukum ditempatkan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan kurang memerhatikan dimensi-dimensi lain di luar aturan. Kejujuran dan kearifan dalam menjalankan hukum terkadang menjadi terabaikan. Akibatnya kepekaan, empati serta komunikasi untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran tertinggal jauh di belakang. Kebenaran dan keadilan hanya menjadi persoalan legal-formal belaka. Cara berpikir ini sangat mengutamakan nilai kepastian hukum dibandingkan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan hukum. Ciri yang menonjol dari cara berpikir ini bersifat deduktif dalam menemukan kebenaran dengan mengutamakan logika formal (*silogisme*)[455].

Menurut Pandu Dewanto beberapa kendala yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) para hakim yang kurang mumpuni, kurangnya kontrol dari

[454] C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 128.
[455] M. Syamsudin, *Op.Cit*., hlm. 220-221.

Mahkamah Agung maupun pengawasan dari Komisi Yudisial[456]. Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh kehakiman belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kualitas perekrutan calon hakim, bahwa pada zaman dahulu perekrutannya tidak dilakukan sebagaimana dengan sistem perekrutan calon hakim sekarang ini yaitu diambil dari lulusan-lulusan terbaik Fakultas Hukum, namun mengenai pengalaman, pola pikir maupun pandangan belum tercipta sama sekali. Pada usia 23-25 tahun sudah dijadikan calon hakim sehingga bagaimana ia menyidangkan suatu perkara apalagi dalam membuat suatu putusan pola pikirnya tidak terlalu mengena dengan perkara yang sedang dihadapinya[457]. Selain itu juga dapat dilihat bahwa di dalam struktur sistem hukum Indonesia sendiri memang terdapat beberapa putusan-putusan perdata yang oleh para pihak dinyatakan tidak adil bagi mereka. Sebenarnya untuk menyatakan bahwa putusan tersebut itu adil juga sulit, karena baik itu adil menurut Penggugat belum tentu adil bagi Tergugat, begitupun sebaliknya, sehingga perlu adanya suatu terobosan dari hakim atau majelis hakim itu sendiri ketika membuat putusan[458]. Hakim-hakim khususnya pada saat menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata masih ragu bahwa apa yang nanti akan diputus dalam sengketa mereka adalah putusan yang benar-benar sudah diambil dari nilai-nilai yang ada di masyarakat itu[459].

[456] Pandu Dewanto, *Op.Cit.,* hlm. 310.
[457] *Ibid*.
[458] *Ibid*.
[459] Pandu Dewanto, *Ibid*, hlm. 311.

Sering terjadi bahwa perkara tersebut memang banyak sekali tekanannya, apa yang diputuskan itu dapat diterima oleh pihak Penggugat maupun Tergugat dan menjalankan dengan sukarela eksekusi yang ada dalam putusan tersebut. Hakim yang mayoritas masih belum progresif, sebagai hakim harus debatable sekali dengan ketua majelis ketika temukan hal-hal temuan hukum baru, baik hukum pidana maupun perdata. Apa yang disebut dalam undang-undang itu sendiri tidak pas dengan apa yang disengketakan tetapi kenapa dipaksakan[460]. Namun demikian, Ketua Majelis Hakim dalam hal ini sebagai hakim senior menyatakan bahwa ini sudah dijalankan bertahun-tahun lalu dan menurut pendapat hakim senior ini tidak menimbulkan masalah. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa putusan itu bukan buat Majelis Hakim, akan tetapi putusan itu buat pihak dan masyarakat, sehingga apa yang diputus itu, harus memiliki kemanfaatan bagi para pihak tersebut, tidak hanya menimbulkan masalah atau tidak bagi hakimnya[461].

Berdasarkan keterangan dari Vivi Purnamasari, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Ciamis Kelas IB menyatakan bahwa dalam suatu proses perkara perdata tiap-tiap anggota majelis mempunyai kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dan menyampaikan pendapatnya atas perkara yang bersangkutan, akan tetapi pendapat hakim senior yang berkedudukan Ketua Majelis Hakim pendapatnya akan lebih menentukan terhadap perkara yang bersangkutan[462]. Ketua Majelis dalam hal ini sebagai hakim senior

[460] *Ibid*, hlm. 312.
[461] Pandu Dewanto, *Ibid*, hlm. 311.
[462] Hasil Wawancara dengan Vivi Purnamasari, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB pada tanggal 04 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Ciamis.

menyatakan bahwa ini sudah dijalankan bertahun-tahun lalu dan menurut pendapat hakim senior ini tidak menimbulkan masalah[463].

Berdasarkan hasil wawancara Pandu Dewanto terhadap Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Balitbang diklatkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa kelemahan kultural tergantung kepada kultur hakim dan kultur masyarakat Indonesia bersifat paternalistik[464]. Masyarakat masih menganut prinsip patriakal. Gaji wanita lebih kecil daripada laki-laki. Masyarakat masih menganggap suamilah yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Suami dianggap lebih tahu apa yang baik dan tidak, isteri harus tunduk pada suami[465].

Menurut H. Ahmad Kamil perasaan ewoh pakewoh terhadap atasan menjadikan hakim tidak berani mengambil sikap sendiri dalam mengambil putusan, semuanya diserahkan kepada atasan, sikap seperti ini adalah bagian dari budaya paternalistik yang ternyata masih menjadi bagian kehidupan beberapa hakim[466]. Kultur masyarakat Indonesia dalam penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian, bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama para pihak cenderung berupaya menggunakan berbagai cara untuk mendapatkannya, sekalipun

[463] Pandu Dewanto, *Op.Cit.,* hlm. 312.
[464] *Ibid*, hlm. 339.
[465] Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Pengantar Filsafat Hukum*, C.V. Keni Media, Bandung, 2019, hlm. 132.
[466] Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Malang, 2012, hlm. 251-252.

melalui cara-cara melawan hukum [467] . Akibatnya apabila salah satu pihak memperoleh kemenangan tidak jarang hubungan diantara pihak-pihak yang bersengketa menjadi buruk, bahkan berubah menjadi permusuhan. Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyelesaian yang berorientasi pada kemenangan tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan sedapat mungkin dihindari. Pihak-pihak lebih mendahulukan kompromi dalam setiap penyelesaian sengketa yang muncul diantara mereka dengan harapan melalui kompromi tidak ada pihak yang merasa dikalahkan dirugikan[468].

Berdasarkan keterangan dari Dede Halim, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB menerangkan sebagai berikut :

- Setelah menerima penetapan Majelis Hakim, maka Ketua Majelis memberi kesempatan kepada masing-masing anggota majelis untuk mempelajari berkas perkara.
- Dalam melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara tidak ada ketentuan yang mewajibkan majelis hakim untuk secara bersama-sama untuk mempelajari berkas perkara.
- Tidak dilakukan sejak awal pemeriksaan perkara proses membaca dan mempelajari perkara secara bersama-sama oleh Majelis.
- Eksepsi terhadap kompetensi pengadilan hakim wajib untuk memberikan putusan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.
- Eksepsi selain eksepsi kompetensi pengadilan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama pemeriksaan terhadap pokok perkara.

[467] Pandu Dewanto, *Op.Cit.,* hlm. 340.
[468] *Ibid*, hlm. 340.

- Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi merupakan Judex Factie yang sama-sama berwenang memeriksa dan memutus fakta-fakta hukum, sehingga apabila eksepsi terhadap gugatan kabur diputuskan oleh hakim sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkarea kemudian dilakukan upaya hukum banding khawatir pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, maka putusan tersebut akan dibatalkan.
- Apabila sudah sangat jelas dan nyata antara posita dengan petitum tidak berkesesuaian, maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan dengan tidak mempertimbangkan dan memutuskan bersama-sama dengan pokok perkara, karena perkara akan diputus dalam waktu yang lama dan berlarut-larut.
- Apabila dalam posita didalilkan perbuatan melawan hukum sedangkan pada petitum mohon ditetapkan pembagian harta bersama, maka hal tersebut jelas dan nyata posita dengan petitum tidak berhubungan, maka untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan eksepsi atas hal tersebut diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara.
- Kadang-kadang hakim mencari aman dengan memutuskan eksepsi gugatan kabur bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, karena sesuai ketentuan yang berlaku[469].

Berdasarkan keterangan Drs. Asep Mujtahid, M.H., Ketua Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA menerangkan sebagai berikut :

[469] Hasil Wawancara dengan Dede Halim, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB, Pada tanggal 04 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Ciamis.

- Setelah menerima penetapan majelis hakim, tiap-tiap anggota majelis untuk mempelajari berkas perkara.
- Masing-masing anggota majelis mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, akan tetapi apabila terjadi perbedaan pendapat, maka yang menentukan adalah pendapat Ketua Majelis Hakim.
- Hakim akan lebih memilih untuk mendasarkan putusan kepada ketentuan undang-undang yang tegas mengaturnya.
- Apabila terdapat ketentuan yang menentukan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur akan lebih baik untuk terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Pada rapat-rapat kordinasi suka disampaikan agar hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya mendasarkan ketentuan hukum yang tertulis, akan tetapi hanya bersifat himbauan[470].

Berdasarkan keterangan dari Maman Sutarman, S.H., M.H., Ketua Dewan Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Ciamis, Banjar dan Pangandaran menyatakan bahwa pertimbangan dan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur selama ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 136 HIR mengakibatakan pemeriksaan perkara perdata yang didalamnya terdapat eksepsi gugatan kabur tidak memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan perubahan terhadap ketentuan pertimbangan dan penjatuhan putusan hakim atas eskepsi gugatan kabur dilaksanakan sebelum

[470] Hasil Wawancara dengan Drs. Asep Mujtahid, M.H., Ketua Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA, Pada tanggal 24 Agustus 2022.

pemeriksaan terhadap pokok perkara[471], hal senada diterangkan oleh Doni Cakra Gumilar, S.H., M.H., Sekretaris Dewan Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Ciamis, Banjar dan Pangandaran menyatakan bahwa putusan atas eksepsi gugatan kabur seharusnya diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, karena pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dalam suatu perkara perdata terdapat eksepsi gugatan kabur menjadi tidak ada manfaatnya, sehingga putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur menjadi lambat, berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat pencari keadilan[472].

C. Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Hakim adalah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa dan penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian), sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam suatu pengadilan. Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu, maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu, seperti : akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan. Dalam hubungan dengan tugas sebagai hakim, maka independensi hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap imparsialitas hakim dan profesionalisme dalam bidang hukum[473].

---

[471] Hasil Wawancara dengan Maman Sutarman, S.H., Ketua Dewan Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Ciamis, Banjar dan Pangandaran, Pada tanggal 26 Nopember 2022.
[472] Hasil Wawancara dengan Doni Cakra Gumilar, S.H., M.H., Sekretaris Dewan Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Ciamis, Banjar dan Pangandaran, Pada tanggal 26 Nopember 2022.
[473] Ahmad Kamil, *Op.Cit*., hlm. 167.

Seorang hakim di dalam mengemban tugasnya harus mendapatkan perlindungan sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang berasal dari :

- Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain.
- Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri.
- Pengaruh pihak yang berperkara.
- Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional.
- Pengaruh-pengaruh yang bersifat ‐*trial by the press*‖.

Menurut Ahmad Kamil kebebasan hakim dapat dicatatkan dengan beberapa catatan yaitu sebagai berikut :

- Kebebasan hakim eksistensial adalah kebebasan hakim untuk menentukan dirinya sendiri melalui sikap dan tindakan sebagai buah dari keputusannya.
- Kebebasan eksistensial dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang predikat dan profesinya, demikian halnya dengan profesi hakim.
- Profesi hakim sangat berkaitan dengan kebebasan eksistensial yang dimilikinya di dalam memutuskan sebuah perkara.
- Kebebasan eksistensial hakim seorang hakim adalah kebebasan untuk menentukan sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang diadili, yang mensyaratkan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan objektivitas keputusan dengan tanpa tekanan dari pihak manapun.

- Ketika terjadi penekanan yang dimungkinkan akan mempengaruhi keputusan yang diambil, seorang hakim harus mampu menunjukan kebebasan eksistensialnya dengan objektivitas keputusan yang diambilnya.
- Kebebasan sosial yang dimiliki hakim adalah sebuah kebebasan dimana kemungkinan manusia untuk bertindak dibatasi dengan sengaja oleh orang lain. Pembatasan ini adalah aturan yang mengikat (UU), tekanan-tekanan dari pihak yang berperkara (masyarakat) dan tuntutan penilaian objektif atas kasus yang ditangani. Artinya di dalam menggunakan kebebasan eksistensialnya seorang hakim juga mendapatkan batasan pada kebebasan sosial.
- Arti lebih lanjut bahwa kebebasan seorang hakim di dalam membuat sebuah putusan pengadilan harus juga berpedoman kepada tiga hal, yaitu : Pertama, apakah putusan yang diambil mengandung nilai tanggungjawab, dalam arti putusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif atas tuntutan keadilan yang diharapkan. Kedua, apakah putusan yang diambil benar-benar telah mempertimbangkan moralitas otonom dimana putusan yang dibuat berdasarkan situasi otonom yang tidak di bawah tekanan pihak manapun dan apa pun sehingga benar-benar yang berbicara. Ketiga, apakah putusan yang diambil telah mempertimbangkan suara hati sebagai cermin yang bisa menunjukan perasaan bersalah ketika seorang hakim membuat putusan yang salah atau keliru.
- Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah seorang hakim akan dapat menjalankan kebebasannya secara benar dan memenuhi aspek-aspek keadilan yang sesungguhnya. Kualitas putusan pun akan mencerminkan keadilan yang bersumber pada kebebasan yang bertanggungjawab yang

diputuskan oleh moralitas otonom dan atas tuntutan suara hati yang benar[474].

Menurut Pandu Dewanto mengatakan fakta yang terjadi di lembaga peradilan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa senioritas masih menentukan karier dan kepangkatannya seorang hakim sehingga terkadang seorang hakim yang progresif sedikit terkendala dalam mengeksplorasikan kemampuannya dalam berpikir ketika di persidangan maupun membuat putusan. Seringkali terjadi pikirannya tidak bisa dituangkan dalam putusan karena ketua majelis dalam hal ini seniornya, masih menggunakan pola pikir lama yang biasanya dia buat dalam menyusun putusan, sehingga pemikiran-pemikiran baru yang lebih mendalam dan komprehensif untuk bahan pertimbangan dalam putusan itu tidak terpakai[475]. Menurut Pandu Dewanto berdasarkan keterangan dari Lilik Mulyadi bahwa kelemahan struktur hukum tergantung kepada iklim dan dimensi sistem yang ada dan dari kelembagaan yaitu sebagai berikut :

1. Kelemahan Hakim sebagai Penegak Hukum Dalam Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung.

a. Kelamahan Tahap Penerimaan Calon Hakim

Sehubungan dengan keinginan untuk mempunyai hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas, maka terlebih dahulu tertuju kepada ikhwal rekrutmen hakim. Bagian ini tidak menjelaskan bagaimana prosedur rekrutmen, melainkan lebih mengulas dari sisi bagaimana pengalaman para hakim sewaktu mengikuti rekruitmen,

[474] *Ibid*, hlm. 174-175.
[475] Pandu Dewanto, *Op.Cit.*, hlm. 335.

dengan mendialogkan berbagai peraturan yang mengatur tentang rekruitmen dan status hakim. Dalam tahap ini Mahkamah Agung ketika membuka pendaftaran calon hakim sebagaimana instansi pemerintah membuka lowongan CPNS untuk mengisi kekosongan/kekurangan formasi hakim di satuan kerja (satker) atau pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia. Dalam pendaftaran calon hakim yang diselenggarakan Mahkamah Agung sebagaimana dengan tanpa memberikan syarat-syarat dengan kualitas mutu yang tinggi untuk dapat menjadi seorang calon hakim[476].

Menurut pengakuan sejumlah hakim, proses rekruitmen hakim saat ini tidak lebih baik dibanding pada masa kekuasaan kehakiman dibawah dua atap, terutama aroma nepotisme masih sangat kuat. Sejumlah hakim mengkirit mengenai rekruitmen hakim yang menurutnya memiliki standar rendah dibandingkan dengan rekruitmen penegak hukum lain, seperti Jaksa. Hal itu diukur dari kualitas pertanyaan yang diajukan pada proses seleksi. Dalam persidangan, hakim adalah subjek yang harus menguasai segala persoalan dibanding siapapun di ruang sidang. Oleh karena itu, menurut salah seorang hakim, orang-orang yang mendaftar menjadi hakim adalah orang-orang yang sedari awal merupakan bibit-bibit yang bagus memang niat menjadi hakim[477].

Untuk dapat merekrut calon hakim yang berkualitas haruslah orang tersebut mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hukum

[476] *Ibid*, hlm. 313.
[477] *Ibid*, hlm. 313-314.

yang mempuni, meskipun belum sepenuhnya sempurna, dengan cara/syarat antara lain yaitu telah bekerja di kantor perusahaan/organisasi yang berhubungan dengan peradilan/pengadilan atau minimal di bidang hukum, sehingga setidak-tidaknya calon hakim tersebut telah memiliki dasar-dasar baik dalam pemikiran maupun pengalamannya di bidang hukum/peradilan yang akan sangat membantu proses adaptasinya maupun pekerjaannya kelak ketika sudah menjadi hakim, awalan seperti ini sangat mempengaruhi kualitas putusannya ketika orang tersebut menjadi hakim dalam membuat putusan[478].

Pola rekruitmen seharusnya mengikuti status hakim sebagai pejabat negara, permasalahan status hakim hingga saat ini masih belum jelas, yakni masih adanya dualisme status, disatu pihak telah ditetapkan hakim sebagai pejabat negara, namun pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai PNS. Kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

-Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur Undang-undang‖. Kemudian dalam perkembangannya, status hakim itu juga kembali dipertegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua Muda, dan Hakim Agung pada MA serta Ketua, Wakil

[478] *Ibid*, hlm. 314.

Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan adalah pejabat negara kecuali ad hoc[479].

Tetapi dalam penerjemahannya ketentuan pelaksanaannya masih diatur oleh aturan lama, contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Hakim yang notabene tersistem PNS, masih berlaku. Padahal menurut teori perundang-undangan yang keberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan yang keberadaannya merupakan pelaksana dari aturan undang-undang bergantung pada masa berlakunya undang-undang tersebut. Artinya, jika Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 sudah dicabut keberlakuannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, maka seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Belakangan untuk mengisi kebutuhan hakim, diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 yang ditetapkan Ketua MA pada tanggal 31 Maret 2017 sistem pengadaan hakim masih mengikuti rezim PNS[480]. Implikasi status hakim yang belum jelas, menyebabkan sistem perekrutan calon hakim karier dimulai dari status calon pegawai negeri sipil (CPNS) calon hakim, sehingga ketika seseorang menjalani pendidikan calon hakim statusnya adalah CPNS atau calon hakim[481].

Silang pendapat mengenai perlu tidaknya hakim diangkat sebagai pejabat negara selalu dihubungkan dengan hak tunjangan kehormatan dan berbagai fasilitas sebagai pejabat negara, sehingga

[479] *Ibid*, 315.
[480] *Ibid*, hlm. 316.
[481] *Ibid*, hlm. 316.

lepas dari tujuan penetapan status hakim sebagai pejabat negara ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki keadilan [482] . Selama ini argumentasi perlunya hakim diangkat sebagai pejabat negara masih sumir dan kalaupun ada penjelasan lebih bersifat normatif. Sejak awal dalam naskah akademik seharusnya sudah jelas dasar pemikiran mengapa status hakim perlu mendapat status sebagai pejabat negara[483].

Pemberian status pejabat negara pada jabatan hakim, seharusnya didasari pemikiran untuk menjaga ‐independensi‖ dan ‐akuntabilitas‖ hakim. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, loyalitas korps dan birokrasi yang menuntut ikatan tertentu. Independensi dan akuntabilitas hakim dalam negara hukum adalah mutlak, sesuai dengan prinsip ‐*The International Commision of Jurist*‖ yaitu peradilan bebas dan tidak memihak[484].

Pada prakteknya pejabat negara yang lazim di Indonesia dibatasi masa jabatannya, memiliki kualifikasi khusus, proses rekrutmen yang ketat (melalui pansel) dan mekanisme akuntabilitas kinerja kepada publik. Sebagai konsekuensi status hakim menjadi pejabat negara, maka proses pengangkatan hakim semestinya mengikuti pola seleksi pejabat negara pada umumnya seperti seleksi

[482] *Ibid*.
[483] *Ibid*, hlm. 317.
[484] *Ibid*.

calon hakim agung, komisioner KPK, komisioner KY, Komnas HAM dan Ombudsman, tentu dengan varian dan kebutuhan yang berbeda[485].

Hakim sebagai pejabat negara konsekuensi kepada proses rekrutmennya yang seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga. Pasal 14A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan rumusan serupa Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan Undang-undang Peradilan Agama) dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) mengamanatkan agar proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama dilakukan secara bersama oleh MA dan KY. Namun, pasal-pasal itu kemudian diajukan uji materil oleh IKAHI ke Mahkamah Konstitusi[486].

Dalam putusan MK No. 43/PUU-XII/2015, menyatakan bahwa pasal 14A UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan rumusan serupa UU No. 50 Tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan Agama) dan UU No. 51 Tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara), sepanjang kata ‑bersama‖ dan frasa ‑dan KY‖ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa ―wewenang lain‖ dalam Pasal 24B (1) Undang-undang Dasar Negara Republik

[485] *Ibid*.
[486] *Ibid*. hlm. 317-318.

Indonesia Tahun 1945 tidak dapat memberi dasar bagi pemberian kewenangan ‐lain‖ dalam hal ini seleksi hakim, tidak memiliki dasar yang kuat. Putusan MK 43/PUU-XII/2015 pada halaman 120 menegaskan bahwa sistem satu atap merupakan dasar untuk menyatakan bahwa pengangkatan hakim tingkat pertama adalah kewenangan MA. Tetapi dalam pertimbangannya tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan khususnya tentang satu atap, MK tidak memberikan argumentasi yang mendukung kesimpulan tersebu[487].

b. Kelemahan Tahap Setelah Menjadi Hakim

Setelah menjadi seorang hakim, tentu sangat membutuhkan masukan/*input* pengetahuan yang berkaitan dengan hukum sebagai pengetahuannya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai hakim. Apakah itu diperoleh dari pengalamannya selama persidangan atau yang lebih utama dari pelatihan-pelatihan (diklat) baik dari internal Mahkamah Agung ataupun dari eksternal (kerjasama dengan pihak luar) yang berhubungan dengan Mahkamah Agung. Yang terjadi adalah sangat banyak sekali hakim-hakim, terutama yang di daerah-daerah, minim (bahkan sama sekali belum pernah) sekali mendapatkan kesempatan dipanggil mengikuti diklat/pelatihan baik yang diadakan internal maupun eksternal. Hasil yang diperoleh dari setiap pelatihan/diklat sangat bermanfaat bagi hakim dalam menyidangkan maupun membuat putusan karena paradigma dan pengetahuan seorang hakim akan berkembang ketika dia telah selesai

[487] *Ibid*. hlm. 317-318.

mengikuti suatu pelatihan/diklat, bahkan hasil mengikuti pelatihan/ diklat jelas akan memperkaya khasanah keilmuan seorang hakim dalam setiap meghadapi perkara yang dihadapinya[488].

c. Kelemahan Tahap Selama Berkarir Menjadi Hakim

Jenjang karir seorang hakim masih ditentukan senioritas dan kepangkatannya, sehingga terkadang seorang hakim yang progresif sedikit terkendala dalam mengeksplorasikan kemampuannya dalam berfikir ketika di persidangan maupun membuat putusan. Seringkali terjadi pikirannya tidak bisa dituangkan dalam putusan karena Ketua Majelis, dalam hal ini seniornya, masih menggunakan pola pikir lama yang biasanya dia buat dalam menyusun putusan, sehingga pemikiran-pemikiran baru yang lebih mendalam dan komprehensif untuk bahan pertimbangan dalam putusan itu tidak terpakai. Sering dijumpai di pengadilan bahwa putusan hakim perdata tersebut belum dapat mengakomodir kedua belah pihak meskipun salah satu pihak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi, akan tetapi dalam pemenuhan kerugiannya masih memberatkan pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tidak terima terhadap putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum[489].

Menurut Bagir Manan, bahwa majelis hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain :

[488] *Ibid*, hlm. 318-219.
[489] *Ibid*, hlm. 319-320.

1) Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya Gubernur, Bupati, Menteri dan lain-lain).
2) Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.
3) Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan[490].

Hakim belum dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi Penggugat maupun Tergugat sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, dari pihak yang dikalahkan semakin menjadi kalah karena putusan tersebut pihak yang kalah sering dihukum terlalu tinggi dan memberatkan dengan mengabulkan permintaan pihak yang menang. Ketua Pengadilan Negeri yang bertanggungjawab terhadap eksekusi, wajib memberikan laporan selengkapnya dengan ‑Argumentasi hukum‖ atas kedua sikap : ‑Menunda‖ dan/atau ‑Menjalankan putusan hakim (eksekusi)‖. Selanjutnya, setelah mendalami permasalahannya, maka Mahkamah Agung RI selalu memberikan penegasan bahwa tindakan berupa :

[490] *Ibid*, hlm. 321.

-menunda‖ dan/atau -menjalankan putusan hakim (eksekusi)‖ adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri[491].

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang ber-Ketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis.

Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis. Akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Agung sendiri berkesimpulan bahwa terjadinya kritik dan reaksi negatif tersebut disebabkan karena kurangnya atau lemahnya kontrol ketua pengadilan atau lemahnya manajemen pengawasan pimpinan pengadilan terhadap pelaksanaan tugas para hakim. Kelemahan kontrol tersebut

[491] *Ibid*.

adalah sebagai akibat adanya kerancuan memahami prinsip kebebasan hakim yang diidentikan dengan kebebasan lembaga peradilan. Berkaitan dengan prinsip kebebasan hakim tersebut, sebagian hakim telah memahmi kebebasan hakim yang melekat pada dirinya sebagai kebebasan absolut, sehingga dengan dalil prinsip kebebasan hakim tersebut, sebagian oknum hakim dapat melegalkan segala tindakannya dan pimpinan pengadilan tidak cukup memiliki referensi argumentasi untuk meluruskan pendirian bawahannya yang memaknai kebebasan hakim secara keliru tersebut[492].

Tidak ada suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memerinci hal-hal yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang dapat menunda eksekusi. Hal ini, hanya karena kebutuhan praktek peradilan, dan penemuan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dimaksud, ditemukan berdasarkan penelitian yang bersifat non litigasi yang menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menjalankan putusan (eksekusi) tersebut dengan meneliti apa yang menjadi alasan-alasan perlawanan dan permohonan penundaan yang dimajukan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankan putusan (eksekusi) tersebut. Dalam hal eksekusi dijalankan sementara telah ada perlawanan dan permohonan penundaan eksekusi, tentunya Ketua Pengadilan yang bersangkutan telah mendalami alasan-alasan perlawanan dan permohonan penundaannya tidak berbobot, sehingga diterapkan azas umum bahwa perlawanan (*derden verzet*) tidak menunda eksekusi. Pihak tereksekusi

[492] *Ibid*, hlm. 322-323.

dan/atau pihak pelawan tetap merasa bahwa sikap Ketua Pengadilan Negeri yang berpendirian eksekusi dijalankan disebut tidak adil, dan bagi si pemohon eksekusi sikap Ketua Pengadilan Negeri itu adalah mencerminkan keadilan[493].

Fakta yang terjadi bahwa yang menjadi permasalahan adalah :

1) Apakah Ketua Pengadilan Negeri telah melakukan kewajibannya secara obyektif melakukan penelitian yang bersifat non litigasi, sehingga pada kesimpulan menolak dan/atau menjalankan eksekusi ? Kalau menjalankan putusan (eksekusi) apa argumentasi hukumnya, sebaliknya menunda eksekusi apa pula argumentasi hukumnya ?
2) Ketua Pengadilan Negeri yang tidak dilandasi argumentasi hukum yang obyektif dalam menentukan sikap menunda dan/atau menjalankan eksekusi adalah suatu ‑kesembronoan‖ dalam arti :
   a) Jika menurut faktanya ditemukan hal-hal yang bersifat ‑eksepsional‖ yang seharusnya menunda eksekusi, akan tetapi eksekusi dijalankan, tentunya sudah merugikan pihak pelawan/pemohon penundaan.
   b) Jika tidak ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsional untuk menunda eksekusi, dalam arti yang seharusnya menjalankan putusan (eksekusi), akan tetapi eksekusi ditunda, sudah jelas telah merugikan pihak yang dimenangkan dalam putusan[494].

[493] *Ibid*, hlm. 323-324.
[494] *Ibid*, hlm. 324-325.

Untuk mengetahui ‑salah/tidaknya‖ seorang Ketua Pengadilan Negeri dalam menentukan sikap ‑menunda‖ dan/atau ‑menjalankan putusan (eksekusi)‖, maka semua pihak yang merasa ‑keberatan‖ terhadap produk lembaga peradilan dalam penentuan sikap ‑menunda‖ dan/atau ‑eksekusi‖, keberatan mana jika hendak diekspos ke ‑media masa‖, sangat diperlukan pemahaman terhadap putusan yang akan dijalankan, dan harus mempunyai kemampuan menemukan ‑ada/tidaknya‖ hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat menunda eksekusi‖. Menurut Lilik Mulyadi, bahwa yang menjadi hambatan adalah yang bersifat intern dan eksteren. Intern tergantung kepada kemampuan hakim dalam konteks untuk menerapkan hukum pembuktian, keterampilan dalam melakukan penafsiran hukum dan keterampilan untuk merangkai adanya persesuaian secara yuridis antara fakta hukum, alat bukti dan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Lilik Mulyadi menyatakan, bahwa hambatan ekstern tergantung kepada pribadi hakim dalam menyikapi aspek di luar dirinya baik terhadap independensinya, akuntabilitasnya, serta kredibilitasnya[495].

2. Kelemahan Pengawasan Kehakiman

Mahkamah Agung RI sebagai pemegang ‑Puncak Kekuasaan Kehakiman Tertinggi‖ selalu berperan aktif menyikapi pengaduan-pengaduan yang dimajukan kehadapannya, dan selalu meminta laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi setempat selaku kawal depan Mahkamah

[495] *Ibid*, hlm. 325-326

Agung RI (Provost) dan/atau secara langsung meminta laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini, dilakukan dalam rangka ‑Pengawasan Vertikal‖. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Kemudian, Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selanjutnya, dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, disebutkan bahwa Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim. Jadi, masyarakat dapat melaporkan perilaku hakim tersebut kepada Komisi Yudisial.

3. Kelemahan Struktur di Luar Lembaga Peradilan

Pada akhir-akhir ini, banyak pengaduan-pengaduan pihak tereksekusi ditujukan kepada para petinggi di tingkat pusat dan daerah yang pada intinya merupakan protes terhadap eksekusi yang dihadapinya dengan membentuk ‑opini‖ bahwa putusan yang akan dijalankan itu sebagai ‑cacat hukum‖. Selain dari pada itu, sering dikatakan bahwa obyek yang akan dieksekusi ‑*error in obyecto*‖. Dan sering kali media massa dan media elektronik lainnya pun turut mengambil andil memberitakan kelemahan putusan yang ‑diopinikan‖ oleh pihak pengadu. Para Petinggi di tingkat Pusat dan Daerah (di luar lembaga peradilan dan

Mahkamah Agung RI), dengan semudah itu mempercayai ‐opini‖ yang telah dibentuk, tanpa melakukan suatu ‐analisa‖ kebenaran apa yang diopinikan yang bersifat menyudutkan lembaga peradilan itu sendiri[496].

Berpedoman pada Negara Indonesia yang berlandaskan hukum (*recht staat*) dan bukan kekuasaan (*macht staat*), maka semua pihak terlebih kalangan Advokat/Pengacara, adalah wajib untuk ‐memahami‖ dan ‐menghargai‖ prosedur yang berlaku di Lembaga Peradilan Umum maupun ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya tersebut, dalam arti : Kalaupun pada akhirnya pengadilan negeri berkesimpulan akan menjalankan putusan hakim (eksekusi), maka itulah yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap obyek sengketa yang sudah dieksekusi. Sebaliknya, jika pada kesimpulan menunda eksekusi, itulah yang berlaku, dan pihak Pemohon Eksekusi harus bersabar menunggu proses hukum berikutnya sehubungan dengan perlawanan (*derden verzet*) dalam perkara yang bersangkutan.

Akan tetapi yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang adalah tidak melaksanakan Ketua Pengadilan Negeri menunda eksekusi tanpa ada alasan hukum dan tanpa memberikan penjelasan kepada Pemohon Eksekusi dan sebaiknya penundaan eksekusi dibuatkan dalam suatu Penetapan (tertulis) dengan pertimbangan yang jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh pencari keadilan khususnya pemohon eksekusi.

[496] *Ibid*, hlm. 331-332.

Suatu fenomena bahwa pihak praktisi hukum (Advokat/Pengacara) secara aktif memimpin ‐demo‖ ketika permohonan penundaan eksekusi tidak dikabulkan. Mereka sering mempertahankan ‐pemelintiran‖ yang diajukan oleh pihak kliennya ibarat ‐menegakan benang basah‖. Perlu menjadi perhatian, bahwa keberadaan ‐Advokat/Pengacara‖ adalah untuk meluruskan hukumnya bukan sebagai ‐robot‖ yang seratus persen tunduk kepada keinginan klien. Kalau memang pihak Pengacara/Advokat menemukan kelemahan kliennya. Tugas pengacara bukan menggerakan massa untuk ‐mendemo eksekusi‖, akan tetapi mereka terampil sebagai kuasa pihak mempertahankan kebenaran klien sesuai hukum acara perdata yang berlaku.

Suatu keadaan yang sangat memprihatinkan dalam hal adanya pihak yang intervensi dalam rangka menjalankan putusan hakim (eksekusi). Lembaga legislatif di tingkat Provinsi dan Kabupaten sering mencampuri putusan ‐lembaga peradilan‖, yaitu : Berdasarkan pengaduan pihak tereksekusi yang keberatan terhadap eksekusi, maka pihak ‐lembaga legislatif‖ sering mengagendakan pembahasan putusan yang akan dijalankan (eksekusi) dengan mengundang Pejabat Birokrasi dan Lembaga Peradilan (i.c Ketua Pengadilan Negeri setempat) dalam rangka pembahasan eksekusi yang akan dijalankan tersebut. Suatu hal yang sangat luar biasa, jika Lembaga Legislatif membahas produk Lembaga Peradilan. Sehingga melahirkan suatu pertanyaan : Apakah Lembaga Legislatif mempunyai kewenangan membahas produk Lembaga Peradilan

? Perhatikan SEMA No. 4 Tahun 2002 yang dikutip tersebut di atas, antara lain : -Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan[497].

Dalam praktek yang sering Penulis temukan di lapangan sebagai Jurusita dalam pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi) sering kali pihak pengamanan khususnya pihak kepolisian mencampuri putusan hakim yang seharusnya pihak kepolisian tidak perlu mencampuri urusan tersebut, karena pihak keamanan (pihak Polri) hanyalah sebagai pihak yang memberi bantuan pengamanan (jika diperlukan) dan hal tersebut selalu ditegaskan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam Penetapan Perintah Eksekusi. Adapun alasan pihak kepolisian mencampuri putusan hakim salah satunya dengan meminta semua putusan hakim bahkan foto kopi semua berkas perkara dalam rencana eksekusi dengan dalih untuk dipelajari. Hal ini sepatutnya tidak terjadi, karena undang-undang sudah jelas mengatur batas-batas kewajiban dan kewenangan masing-masing Lembaga Negara. Dan tidak jarang pihak keamanan (Polri) meminta agar pelaksanaan eksekusi ditunda dalam rapat koordinasi dengan alasan adanya pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada pihak aparat keamanan (Polri) dan hal ini sering menimbulkan kesan adanya pengertian dualisme atas satu putusan hakim (pengadilan), dan sering kali tidak memberikan bantuan yang maksimal dalam

[497] *Ibid*, hlm. 332-334.

pengamanan pelaksanaan eksekusi, padahal pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi adalah tanggungjawab dan merupakan kewajiban pihak Polri dan aparat keamanan lainnya dan putusan pengadilan (hakim) bukan untuk dibahas, tapi untuk dipatuhi semua pihak termasuk Lembaga Negara[498].

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

[498] *Ibid*, hlm. 334-335.

BAB V

REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM ATAS EKSEPSI GUGATAN KABUR PADA PERADILAN PERDATA DENGAN BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Sistem Hukum Pancasila Sebagai Prinsip Penjatuhan Putusan Hakim Atas Eksepsi Gugatan Kabur

Fakta menunjukan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku yang mendiami puluhan ribu pulau. Suku-suku tercinta tersebut mempunyai aneka dan beragam akar budaya serta kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur. Kearifan lokal dari akar budaya itu mengandung nilai-nilai luhur. Kearifan lokal dan akar budaya ini mengandung nilai-nilai luhur yang terus dijujung tinggi bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Tidak kalah dengan peradaban asing, nyata bahwa nilai-nilai itu meliputi nilai-nilai agama, filsafat, adat istiadat, kebiasaan, budaya dan nilai-nilai luhur lainnya[499].

Menurut Gunarto dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa hukum suatu bangsa mempunyai dan bertolak dari premis dasar, yaitu pandangan tentang manusia dan masyarakatnya, yang disebut dengan kosmologi hukum dari bangsa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hukum modern yang dipakai di dunia juga memiliki kosmologinya sendiri, maka dari sudut pandang tersebut hukum modern sebenarnya tidak netral. Hukum modern yang selama berabad-abad

[499] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 256.

dikembangkan di Barat atau Eropa memiliki kosmologi yang diseleraskan dengan kondisi sosial politik masyarakat Barat atau Eropa yang bersifat individualistik, dan kapitalis[500], selanjutnya Gunarto mengatakan bahwa pada waktu hukum modern menyebar ke berbagai penjuru dunia, maka hukum modern masuk juga ke bangsa-bangsa di dunia yang memiliki basis kultural yang berbeda dengan Barat. Bangsa Indonesia memiliki basis kultural atau kosmologi sendiri yang berbeda dengan kosmologi negara-negara Barat, yaitu bersifat kolektif (tidak individual), keserasian-keseimbangan (harmoni), musyawarah dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas. Kosmologi Bangsa Indonesia yang demikian terumuskan ke dalam Pancasila yang merupakan moral positif Bangsa Indonesia atau dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan basis kultural atau kosmologi hukum Indonesia yang dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkadung dari kelima sila Pancasila[501].

Bahwa tidak dapat dipungkiri Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai perwujudan filsafat kemanusiaan. Pancasila mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam. Sudah disepakati rumusan Pancasila merupakan pandangan hidup yang diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran yang dijadikan filsafat hidup bangsa. Fakta dan ikrar ini merupakan harga mati. Adapun rumusan Pancasila itu sebagai idealisme bersifat abstrak yang pada akhirnya dijadikan sebagai ideologi nasional, yang

[500] Gunarto, *Rekonstruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat Bagi SerikatPekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, (2010), http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1345, diakses Tanggal 10 Nopember 2022 Pukul 14:10 WIB.

[501] *Ibid.*

harus dihayati, dipertahankan dan diimplementasikan [502] . Sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral bangsa Indonesia Pancasila merupakan inti semangat bersama dari berbagai moral dan nilai yang secara nyata terdapat di Indonesia. Secara filosofis dan historis serta sosiologis disadari bersama bahwa di Indonesia terdapat berbagai ajaran tentang nilai dari moral sesuai kepercayaan, adat istiadat, dan agamanya. Tentu saja moral itu terdapat nilai atau unsur-unsur bersama yang bersifat umum dan mengatasi segala faham golongan dan bersifat nasional. Jadi nyatalah bahwa moral yang menjadi dasar negara. Kelima asas moral tersebut tersirat dan tersurat dalam nilai Pancasila[503].

Telah disepakati oleh bangsa Indonesia dan terpatri dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa Pancasila terdiri atas lima asas moral menjadi dasar negara Republik Indonesia. Menyadari menyepakati bahwa Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa mengharuskan moral Pancasila menjadi moral kehidupan Negara. Mengingat landasan idiil dan konstitusional, maka penyelenggaraan negara menghargai dan memberi prinsip-prinsip moral atau etika politik Pancasila. Sebagai konsekuensinya maka negara beserta perangkatnya harus tunduk kepada moral pancasila dan wajib mengimplementasikannya. Dalam konkretnya moral menjadi norma tindakan dan kebijaksanaan negara[504].

Agar tertib hukum, maka harus dituangkan dalam Undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dan idealnya moral Pancasila memberi semangat, nilai, inspirasi, pendorong, dan menjadi pembimbing antara lain dalam :

[502] *Ibid*, hlm. 256-257.
[503] *Ibid*, hlm. 257
[504] *Ibid*, hlm. 257-258.

1. Pembuatan undang-undang.
2. Perundangan di bawah undang-undang.
3. Menetapkan badan, institusi dan lembaga-lembaga negara beserta tugas dan fungsi masing-masing.
4. Mengatur hubungan harmonisasi kerjasama antar lembaga-lembaga negara.
5. Kebijakan pimpinan lembaga-lembaga negara.
6. Mengatur hak-hak dan kedudukan warga negara.
7. Hubungan warga negara dan negara.[505]

Menurut T. Gayus Lumbuun penempatan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, karena Pancasila berkedudukan sebagai Dasar Negara artinya seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang terkait dengan hal-hal pokok kenegaraan disamping penyelenggaraan negara, semuanya harus diatur berdasarkan Pancasila, diantaranya masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan, dan lain-lain, termasuk juga hubungan antar rakyat, kekuasaan serta penguasa. Demikian pula segenap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia harus sejiwa dan dijiwai oleh Pancasila. Isi maupun materinya tidak boleh menyimpang dari hakikat Pancasila sebagai dasar negara[506].

Dalam perspektif pembangunan hukum, masing-masing sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang perlu diaktualisasikan dalam struktur hukum sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Negara Kesatuan Republik

[505] *Ibid*, hlm. 257-258.
[506] Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 25.

Indonesia (NKRI) meskipun bukan negara agama juga bukan negara sekuler, melainkan adalah negara beragama. Bukan negara agama karena tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum positif. Bukan pula negara sekuler yang memisahkan urusan negara dan urusan agama. Sedangkan sebagai negara agama dimaksud bahwa NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa, terutama dalam bentuk undang-undang yang dihasilkan bersama oleh DPR dan Pemerintah. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menghargai manusia sebagai mahluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau penegak hukum didasarkan atas norma-norma objektif tidak subjektif apalagi sewenang-wenang dan otoriter. Beradab berarti berkebudayaan, bertata kesopanan, berkesusilaan/bermoral. Persatuan Indonesia berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam yang bersifat kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran/rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggungjawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan artinya suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak-kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan. Sila Keadilan

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah Republik Indonesia sebagai warga NKRI maupun WNI yang berada di luar negeri[507].

Nilai penting lain dalam Pancasila adalah sistem moral dan etika bangsa. Moral dan etika sangat berkaitan dengan nilai tatanan ataupun nilai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang menjadi ukuran menilai untuk berbuat dan bertingkah laku. Sikap dan perilaku dalam bidang politik, hukum jelas menggambarkan krisis moral dan etika berbangsa. Nilai moral dan etika dalam arti sistem Pancasila adalah nilai-nilai yang bersumber kepada kehendak atau kemauan manusia untuk berbuat sesuatu, tetapi berlandaskan kepada unsur kemauan positif, disamping adanya unsur pembenar perbuatan yang bersumber kepada rasio atau akal manusia. Selain itu, dalam perbedaan dengan nilai-nilai yang lain, moral dan etika masih berkaitan dengan perasaan estetika, perasaan diri dan sosial, serta perasaan religius dari budaya manusia yang memiliki tingkat maju dan tinggi[508].

Perasaan estetika atau keindahan mengingat keindahan juga melengkapi kehidupan manusia yang serba luas yang bisa diperoleh melalui rasa indah yang akan mendorong atas berhasilnya/ baik buruknya penyelesaian tugas-tugas dalam lingkup kehidupannya manusia (Indonesia) selain sebagai mahluk individu, juga sebagai mahluk sosial dengan perasaan sosialnya, yang tidak terlepas dari lingkungan sosialnya. Berdasarkan perasaan sosial manusia Indonesia, baik buruknya tingkah laku dan moral etikanya lebih banyak

[507] Ibid, hlm. 25-27.
[508] Ibid, hlm. 27

dipengaruhi dan ditentukan lingkungan sosialnya dari pribadinya. Ilustrasi praktik korupsi yang semakin semarak tentunya menggambarkan lunturnya sistem moral dan etika berbangsa. Demikian pula sikap yang menegasikan keberadaan kelompok lain merupakan salah satu bentuk krisis moral dan etika berbangsa[509].

Pada negara hukum, hukum senantiasa diposisikan sebagai pengendali tertinggi kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara. Dioperasionalisasi-kan melalui pengaturan kedudukan, wewenang, tugas, fungsi dan tanggungjawab jabatan yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintahan serta hubungan pemerintahan negara dan rakyat. Konsekwensinya, setiap orang maupun badan hukum wajib tunduk pada hukum, mereka bisa diganti dan dikenakan sanksi hukum bila melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan hukum bersifat tetap sebagai acuan tata kehidupan bernegara[510].

Konsekuensinya, penegakan hukum secara adil menjadi suatu keharusan dalam membangun masyarakat moderen. Masyarakat perlu dibiasakan dengan tata kehidupan yang tertib dan disiplin tanpa menghambat aktualisasi hak dasar dan kreavitasnya sesuai dengan sistem nilai Pancasila. Konsekuensinya berbagai regulasi yang ada harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Pancasila dan konstitusi negara. Pancasila harus lebih banyak dijadikan sebagai media mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dari latar etnis, agama, sosial dan budaya. Nasionalisme dan

[509] *Ibid*.
[510] Hariyono, Ideologi Pancasila Rob Progresif Nasionalisme Indonesia, Instrans Publishing, Malang, 2014, hlm 172.

Pancasila diharapkan dapat menjadi faktor integrasi bangsa sekaligus mindset warga Indonesia[511].

Pancasila memiliki unsur-unsur pokok yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan. Kelima sila dari Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tak dapat dijungkirbalikan tanpa mengubah inti isinya, karena susunan Pancasila itu hierarkis dan bentuknya Piramidal. Hierarkis karena kalau dilihat inti isinya, urut-urutan lima sila itu menunjukan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, piramidal karena tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila yang dimukanya. Dalam susunan yang demikian, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Berkeadilan Sosial, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya[512].

Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan berdasarkan UUD dan hukum perundang-undangan yang berlaku dan ditegakan secara melembaga berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki beberapa karakter yang harus dipahami oleh hakim, sehingga dapat mewujudkan nilai keadialan sosial. Peradilan berfungsi menerapkan hukum, menegakan hukum dan menegakan keadilan berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana setiap putusan pengadilan selalu didahului irah-irah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,

[511] *Ibid*, hlm. 172-173.
[512] Herri Swantoro, Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali, Prenadamedia Group, Divisi Kencana, Depok, 2017, hlm. 18.

serta segala bentuk campur tangan dari luar kekuasaan kehakiman dilarang. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, tidak ada seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan baginya oleh undang-undang[513].

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur selayaknya harus dilakukan perubahan dengan menentukan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, karena ketentuan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia serta selaras dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan guna mewujudkan peradilan perdata yang berbasiskan nilai keadilan.

B. Perbandingan Putusan Hakim Atas Eksepsi Kompetensi Pengadilan

Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan

[513] *Ibid*.

mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.[514]

Permasalahan kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*imperior court*). Faktor ini menimbulkan masalah dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara instansional. Perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah, tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan banding atau kasasi dan sebaliknya. Apa yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi peradilan yang lebih tinggi, tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah [515] , dalam hal tinggi rendahnya peradilan dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia dengan masing-masing kewenangannya yaitu sebagai berikut :

a. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana.
b. Pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding yang juga merupakan pengadilan tingkat kedua. Dinamakan pengadilan tingkat kedua karena cara pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).
c. Mahkamah Agung yang merupakan Pengadilan Tingkat Terakhir dan bukan tingkat ketiga. Mahkamah Agung memeriksa perkara-perkara yang dimintakan kasasi, karena tidak puas dengan putusan banding dari

[514] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 179.
[515] *Ibid*.

Pengadilan Tinggi. Pada tingkat kasasi yang diperiksa adalah penerapan hukumannya saja[516].

Bahwa selain faktor tinggi rendahnya tingkatan peradilan sebagaimana disebutkan di atas, ada juga faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*) [517] yang dapat dilihat dari pokok sengketanya, apabila pokok sengketanya dalam domain, hukum privat, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok sengketanya terletak dalam domain hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (Hakim PTUN)[518].

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus [519] atau kewenangan mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain baik dalam lingkungan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (pengadilan negeri dengan pengadilan agama)[520].

[516] R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 8.
[517] M. Yahya Harahap, *Op.Cit*., hlm. 179.
[518] Zainal Asikin, *Op.Cit*., hlm. 83.
[519] *Ibid*
[520] *Ibid*, hlm. 85.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya mengenai kompetensi absolut/mutlak dapat pula diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan melihat jenis badan peradilan atau sebagai jawaban terhadap pertanyaan menjadi kewenangan badan peradilan manakah perkara yang bersangkuan, misalnya perkara warisan untuk yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut/mutlak lingkungan Badan Peradilan Agama bukan merupakan kewenangan absolut/mutlak lingkungan Badan Peradilan Umum.

Mengenai lingkungan Badan Peradilan di Indonesia adalah sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana ditentukan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Sedangkan mengenai lingkungan badan peradilan dan masing-masing kewenangannya di Indonesia dapat diketahui sebagaimana yang ditentukan pada ketentuan Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
2. Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwasannya selain Mahkamah Agung dan lingkungan badan peradilan di bawahnya sebagaimana disebutkan di atas, penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kompetensi yang ditentukan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk sebagai berikut :

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bahwasannya untuk membedakan kewenangan pengadilan selain perbedaan berdasarkan tinggi rendahnya pengadilan dan berdasarkan, lingkungan peradilan juga ditambah lagi dengan faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan Undang-undang kepada badan *extra judicial*, seperti Arbitrase atau Mahkamah Pelayaran, bahkan masalah yurisdiksi ini, dapat juga timbul dalam satu lingkungan peradilan disebabkan faktor wilayah (*locality*) yang membatasi kewenangan masing-masing pengadilan dalam lingkungan wilayah hukum atau daerah hukum tertentu, yang disebut kewenangan relatif atau distribusi kekuasaan (*distributive jurisdiction*)[521], kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan[522].

[521] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 179-180.
[522] Zainal Asikin, *Op.Cit*., hlm. 88

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya mengenai kewenangan relatif atau nisbi dapat diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan melihat wilayah hukum suatu pengadilan atau sebagai jawaban terhadap pertanyaan menjadi kewenangan relatif/nisbi Pengadilan Negeri manakah perkara yang bersangkutan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB ataukah menjadi kewenangan relatif/nisbi Pengadilan Negeri Banjar Kelas IIB.

Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yung berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wiluyah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Jadi penggugat tidak diperkanan mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Akun tetupi, penggugat dapat mengajukan gugatan pada PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kcdiaman penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui [523] . Agar tidak daput dimanipulasi olch penggugat, tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat itu perlu mendapat surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tempat tinggal tergugat tiduk diketahui, Misalnya, surat keterangan dari kepala desa[524].

Jika objek gugatan mengenai benda tidak bergerak (benda tetap), misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada PN yang daerah hukumnya

[523] *Ibid*, hlm. 89.
[524] *Ibid*.

meliputi benda tidak bergerak itu berada. Jika keberadaan bendu tidak bergerak itu meliputi beberapa wilayah hukum, maka gugatan diajukan ke salah satu PN atas pilihan penggugat[525]. Secara khusus dan terperinci tentang wewenang relatif Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RBg yang mengatur sebagai berikut :

1. Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Ncgcri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya. Asasnya adalah ‑yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat‖. Asas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan ‑Actor Seguitur Forum Rei‖. Pasal 17 BW menyatakan bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya.
2. Apabila tergugat lebih dari satu orang, diajukan di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan penggugat.
3. Jika tidak dikenal tempat tinggal dan kediaman tergugat diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang Penggugat.
4. Jika objeknya benda tetap (benda tidak bergerak) maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu berada, jika benda tetap itu berada di beberapa daerah hukum Pengadilan

[525] *Ibid*.

Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.

5. Jika ditentukan dalam perjanjian (akta) ada tempat tinggal yang dipilih, maka gugatan diajukan di tempat tinggal yang dipilih tersebut, penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut. Apabila tergugat tidak cakap untuk menghadap muka pengadilan, gugat diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orangtua, wali, atau kuratornya (Pasal 21 BW).
6. Menyangkut permohonan permbatalan perkawinan, diajukan kepada PN dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri (Pasal 25 Juncties Pasal 63 (1) b UU No.1 Tahun 1974, Pasal 38 (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975). Gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman penggugat. Apabila tergugat berada di luar negeri dan ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan RI setempat (Pasal 40 Jis Pasal 63 (1) b UU Perkawinan, Pasal 20 (2) dan (3) PP No. 9 Tahun 1975).
7. Menurut Pasal 207 BW gugat perceraian diajukan kepada PN tempat tinggal suami. Namun apabila suami meninggalkan tempat tinggal dengan maksud jahat, gugat diajukan pada PN tempat kediaman si istri yang sebenarnya.

8. Menyangkut pegawai negeri, yang berhak mengadilinya adalah Pengadilan Negeri di daerah mana ia bekerja (Pasal 29 BW) buruh yang menginap di tempat majikannya, maka yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal majikan (Pasal 22 BW).
9. Hal kepailitan, yang berwenang‖yaitu Pengadilan Niaga yang menyatakan tergugat pailit (Pasal 99 (15) RV) jo. Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tentang penjaminan (vrijwaring) yang berwenang adalah PN yang pertama di mana pemeriksaan dilakukan (Pasal 99 ayat 14 RV)[526].

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian, suatu perkara perdata harus diajukan melalui Pengadilan yang mempunyai kewenangan baik kewenangan absolut/mutlak maupun kewenangan relatif/nisbi, karena apabila suatu gugatan diajukan melalui pengadilan yang tidak berwenang baik kewenangan absolut/mutlak maupun kewenangan relatif/nisbi sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hukum acara perdata Tergugat dapat mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap gugatan Penggugat tersebut.

Pengajuan eksepsi atau tangkisan tentang pengadilan negeri tidak berwenang mengadili suatu perkara umumnya disebabkan oleh karena menurut kompetensi relatif perkara yang diajukan oleh Penggugat masuk dalam wewenang pengadilan negeri lain[527], misalnya A sebagai Penggugat

[526] Zainal Asikin, *Ibid*., hlm. 89-90.
[527] Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 168.

menggugat B sebagai Tergugat, sepengetahuan A, tergugat (B) bertemp.at tinggal di Ciamis, maka dalam hal ini A mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ciamis, padahal sebenarnya B bertempat tinggal di Cirebon, (bukti tempat tinggal di Cirebon dapat ditunjukkan), maka dalam hal ini B sebagai Tergugat dapat mengajukan Jawaban yang berupa eksepsi dengan menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara A dan B bukan Pengadilan Negeri Ciamis melainkan Pengadilan Negeri Cirebon karena tempat tinggal resmi B adalah Cirebon atau sebagaimana disebutkan Moh. Taufik Makarao misalnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat atau keliru karena yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan Pengadilan Negeri Bekasi[528].

Tata cara pengajuan eksepsi terhadap kewenangan relatif/nisbi pengadilan dan waktu pertimbangan serta penjatuhan putusan hakim atas eksepsi kewenangan relatif/nisbi pengadilan pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR yang menentukan bahwa akan tetapi jika sitergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri memberi keputusan tentang eksepsi itu, sesudah didengarnya orang yang menggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara itu[529]

[528] Moh. Taofik Makarao, *Op.Cit.*, hlm. 64.
[529] R. Tresna, *Op.Cit*., hlm. 107.

dan ketentuan Pasal 133 HIR yang menentukan bahwa jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pada pasal 118 ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia minta supaya hakim menerangkan, bahwa hakim tiada berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukkan dengan segera pada permulaan persidangan pertama, permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika orang yang digugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain[530].

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR tersebut di atas menentukan bahwa eksepsi terhadap kewenangan atau kompetensi relatif/nisbi harus diajukan pada permulaan sidang dilaksanakan yaitu pada saat sebelum tergugat memberikan jawabannya yang menyangkut pokok perkara, sehingga apabila eksepsi kewenangan relatif/nisbi tidak diajukan sebelum tergugat memberikan jawaban terhadap pokok perkara atau dengan kata lain apabila eksepsi kewenangan relatif/nisbi diajukan setelah Tergugat menjawab mengenai pokok perkara, maka konsekuensi yuridisnya eksepsi tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh hakim dan pemeriksaan pokok perkara yang bersangkutan akan dilanjutkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pengajuan eksepsi atas kompetensi relatif/nisbi dapat diajukan secara tertulis meskipun tergugat sendiri tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah hakim wajib mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi kompetensi relatif/nisbi tersebut setelah mendengar

[530] *Ibid*, hlm. 116.

keterangan dari Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 133 HIR sebagaimana disebutkan di atas menentukan bahwa pengajuan eksepsi oleh tergugat atau kuasa hukumnya tidak ada keharusan menghadiri persidangan, sehingga tidak akan ada sangsi jika pengajuan jawabannya dilakukan oleh kuasa hukumnya melalui surat, hal ini disebabkan oleh pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat. Jika tergugat tidak hadir dalam persidangan dan hanya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat melalui surat, maka hakim setelah menerima pengajuan eksepsi berkewajiban untuk menjawab eksepsi yang diajukan oleh tergugat setelah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan selanjutnya memberikan keputusan atas gugatan dengan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara karena masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri lain[531].

Sedangkan tata cara pengajuan eksepsi terhadap kewenangan atau kompetensi absolut/kompetensi mutlak suatu pengadilan ketentuannya diatur dalam ketentuan Pasal 134 HIR yang menentukan bahwa jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa[532].

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR tersebut, maka dalam suatu proses penyelesaian perkara perdata pihak Tergugat dapat memberikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat dengan memberikan jawaban bahwa

[531] Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 168.
[532] R. Tresna, *Op.Cit.*, hlm. 116.

perkara tersebut bukan merupakan kewenangan atau kompetensi absolut/ mutlak dari lingkungan badan peradilan yang bersangkutan melainkan merupakan kewenangan atau kompetensi absolut/mutlak dari badan peradilan yang lainnya.

Eksepsi terhadap kompetensi absolut/mutlak dapat diajukan sepanjang pemeriksaan perkara dan apabila pihak Tergugat tidak mengajukannya, maka hakim secara ex officio atau karena jabatannya dapat memutuskan perkara tersebut bukan merupakan kompetensi absolut/kompetensi mutlak badan peradilan tersebut, meskipun pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi terhadap kompetensi atau kewenangan absolut, eksepsi terhadap kompetensi absolut/kompetensi mutlak misalnya A seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap B sebagai atasannya sebagai Tergugat melalui Badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat dengan tuntutan agar B sebagai Tergugat mencabut kembali Surat Keputusan yang memberhentikan A, maka dalam hal ini B sebagai Tergugat dapat mengajukan eksepsi bahwa perkara tersebut bukan merupakan kompetensi absolut Badan Peradilan Umum melainkan merupakan kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara atau sebagaimana menurut Moh. Taufik Makarao misalnya perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam bukan wewenang pengadilan negeri melainkan wewenang pengadilan agama, sebaliknya perceraian antara seorang suami yang beragama kristen dengan isteri yang beragama kristen merupakan wewenang pengadilan negeri bukan pengadilan agama[533].

[533] Moh. Taufik Makarao, Ibid, hlm. 64.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku eksepsi atas kewenangan pengadilan dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga karenanya putusan hakim atas eksepsi kewenangan pengadilan tidak harus mengikuti formalitas-formalitas untuk pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan demikian pertimbangan dan putusan hakim atas eksepsi kewenangan pengadilan dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia telah mencerminkan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada gilirannya telah mewujudkan peradilan perdata berbasis nilai keadilan.

C. Perbandingan Putusan Hakim Atas Eksepsi Pada Peradilan Pidana

Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti diatur dalam Undang-undang atau karena wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang timbul itu dapat berupa kerugian material, misalnya kerusakan atas barang atau berupa kerugian imaterial, misalnya kehilangan hak menikmati barang atau pencemaran nama baik. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian[534].

Perkara pidana dapat terjadi karena pelanggaran terhadap perintah atau larangan yang diatur dalam hukum pidana. Perbuatan pidana sifatnya

[534] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*., hlm. 20.

merugikan negara, merugikan kepentingan rakyat, merugikan milik pribadi orang lain, seperti diatur dalam hukum pidana, misalnya melakukan korupsi, melakukan *illegal logging*, mencuri barang orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Perbuatan pidana dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian, dilakukan sendiri atau bersama-sama atau atas perintah pihak lain[535]. Apabila seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya berkas perkara (BAP) diserahkan kepada jaksa/penuntut umum status orang tersebut masih sebagai ‑tersangka‖. Sedangkan apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, dituntut, dan diadili, berubahlah status ‑tersangka‖ itu menjadi ‑terdakwa‖[536].

Apabila telah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa segera mempelajari dan melitinya dalam tenggang waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu lengkap atau belum. Adapun pengertian ‑meneliti‖ menurut ketentuan Pasal 138 Ayat (1) KUHAP adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Menurut ketentuan Pasal 138 ayat(2) KUHAP, apabila menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai

[535] *Ibid*.
[536] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 41.

petunjuk dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus segera menyampaikan kembali berkas itu kepada penuntut umum [537] setelah penuntut umum beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. Jika penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP)[538].

Bahwa Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan ini pemeriksaan persidangan dilakukan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 321K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984[539].

Mengingat pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan itu benar-benar telah terjadi dan hakim yakin bahwa terdakwa yang salah, maka surat dakwaan perlu dibuat dengan bentuk tertentu, dengan tujuan jangan terjadi sesuatu yang merupakan tindak pidana dan sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban

[537] *Ibid*, hlm. 49.
[538] *Ibid*, hlm. 58.
[539] *Ibid*.

hukum dalam masyarakat bebas dari tuntutan [540] . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta persidangan akan menentukan terbukti tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari penuntut umum[541].

Ketentuan Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
    a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
    b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

[540] Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan Banten, 2015, hlm. 65.
[541] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana ..., Op.Cit*., hlm. 58.

(4) Turunan surat-surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Selanjutnya ketentuan Pasal 144 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

(1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut di atas menurut pandangan doktrin ilmu hukum acara pidana syarat-syaratnya tersebut dibagi menjadi :

1. Syarat formil dan
2. Syarat materil.[542]

Pada syarat formal identitas terdakwa dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya

[542] *Ibid*, hlm. 60.

dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai terdakwa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya (*error in persona*)[543].

Pada syarat materil maksud dari uraian secara cermat adalah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dalam hal ini dituntut sikap yang jeli terhadap keseluruhan materi dakwaan. Sedangkan uraian jelas adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapat gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematik dan kronologis dengan bahasa yang sederhana dan yang dimaksud dengan uraian lengkap adalah uraian yang bulat dan utuh menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Juga dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/plager*), sebagai pelaku peserta (*mede dader/pleger*) atau sebagai penggerak (*uitloker*) atau sebagai penyuruh (*doen pleger*), atau

[543] Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*., hlm. 3.22.

hanya sebagai pembantu (*medeplichtige*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian, atau penadahan dan sebagainya. Dengan perumusan unsur-unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscur libel*). Dalam menyusun surat dakwaan Penuntut Umum harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang tertinggal/tercecer tidak tercantum dalalm surat dakwaan, misalnya dalam tindak pidana pencurian unsur ‑melawan hukum‖ (*wedderr echtelijk*) tidak tercantum atau dalam dalam tindak pidana penggelapan unsur-unsur ―yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan‖ tercecer/tidak tercantum sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan menjadi tidak lengkap[544]. Selain daripada syarat-syarat tersebut, perlu disebutkan hal-hal dan keadaan-keadaan tidak disebut dalam dakwaan tidak menjadikan batalnya dakwaan, berlainan jika waktu dan tempat terjadinya delik serta delik yang didakwakan tidak disebut yang menjadikan dakwaan batal[545].

Menurut Andi Sopyan dan H. Abd. Asis mengatakan bahwa syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mencakup :

1. Diberi tanggal
2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi :

[544] *Ibid*., hlm. 3.22 - 3.23.
[545] *Ibid*, hlm. 3.23.

a. Nama lengkap;

b. Tempat lahir, umur/tanggal lahir;

c. Jenis kelamin;

d. Kebangsaan;

e. Tempat tinggal;

f. Agama; dan

g. Pekerjaan.

3. Ditandatangani oleh penuntut umum

Jadi hakim dapat membatalkan dakwaan penuntut umum, karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of subyektum*)[546]. Menurut Lilik Mulyadi ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang dipersidangan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan menghadapkan terdakwa di depan persidangan[547].

Kemudian, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modus operandi kejahatan menjadi variatif dan karenanya tidak diharapkan seseorang mempermainkan hukum sedemikian rupa, seperti

[546] Andi Sofyan dan H. Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 172-173.
[547] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana ... Op.Cit*., hlm. 60.

membayar orang lain untuk menjadi terdakwa atau lebih tegas lagi secara universitas untuk menghindarkan agar jangan sampai orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak sampai diadili di depan persidangan (*error in persona*). Kekurangan syarat formil surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*von rechtswege nietig atau null and void*). Akan tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41K/Kr/1973 tertanggal 25 Januari 1975[548].

Adapun syarat materil menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempos delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*)[549]. Yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas, dan lengkap, adalah sebagai berikut :

1. Cermat, jadi surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan. Ketidakcermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat mengakibatkan -batalnya atau tidak dapat diterima/dibuktikan surat dakwaan‖, antara lain karena :
   - Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan ?
   - Apakah penerapan hukum/ ketentuan pidananya sudah tepat ?

[548] *Ibid*.
[549] Andi Sofyan dan H. Abdul Asis, *Op.Cit*., hlm. 173.

- Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut ?
- Apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kedaluwarsa ?
- Apakah tindak yang dilakukan itu tidak ‑Nebis in Idem‖ ?

2. Jelas, berarti bahwa penuntut umum harus mampu untuk :
   - Merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan.
   - Uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. Dalalm hal ini harus diingat, bahwa tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau antara uraian dakwaan yang hanya menunjukan pada uraian dakwaan sebelumnya; sedangkan unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjukan pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.
   - Misalnya : tidak boleh menggabungkan unsur-unsur :
     - Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana.
     - Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP.
     - Pasal 362 dan Pasal 480 KUHP.
     - Pasal 359 dan Undang-undang Lalu Lintas.
     - Dan sebagainya, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) yang diancam dengan kebatalan.
3. Lengkap, berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam

uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.[550]

Untuk lebih jelasnya mengenai syarat materiel ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama

a. Rumusan dari tindak pidana / perbuatan-perbuatan yang dilakukan, tindak pidana yang didakwakan, harus dirumuskan secara tegas.
b. Perumusan unsur objektif, yaitu :
    1. Bentuk atau macam tindak pidana;
    2. Cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
c. Perumusan unsur subjektif, yaitu mengenai pertanggungjawaban seseorang menurut hukum. Misalnya apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, dan sebagainya.

Kedua

Uraian mengenai :

a. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*), yaitu dalam hubungannya dengan :
    1. Kompetensi relatif dari pengadilan seperti dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 jo Pasal 84 KUH Pidana.

[550] *Ibid*, hlm. 173-174.

2. Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUH Pidana).
3. Berkaitan dengan unsur-unsur yang disyaratkan oleh delik yang bersangkutan, seperti -di muka umum-, misalnya Pasal 160, 154, 156 dan 156a dan 160 KUH Pidana.

b. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*), yaitu untuk menentukan :
1. Berlakunya pasal 1 ayat (1), (2) KUH Pidana (asas legalitas);
2. Penentuan tentang residivis (Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUH Pidana);
3. Penentuan tentang kedaluwarsa (Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 KUH Pidana);
4. Menentukan kepastian umur terdakwa (Pasal 45 KUH Pidana);
5. Menentukan keadaan yang bersifat memberatkan, seperti Pasal 363 KUH Pidana atau disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dihukumnya terdakwa (Pasal 123 KUH Pidana)[551].

Jadi apabila surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan formil, maka menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP, bahwa -Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum [552] . Terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum terdakwa atau penasihat hukum dapat melakukan eksepsi atau tangkisan yang tidak

[551] *Ibid*, hlm. 174-175.
[552] *Ibid*, hlm. 173-175.

mengenai pokok perkara yang merupakan suatu jawaban atau tanggapan terhadap dakwaan penuntut umum[553].

Menurut Lilik Mulyadi eksepsi disebut keberatan. Keberatan tersebut merupakan upaya hukum yang bersifat insidentil berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi pokok perkara dengan tujuan utama guna menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan dari pokok perkaranya. Jadi, dapat disebutkan bahwa acara pemeriksaan dalam keberatan pada dasarnya merupakan pemeriksaan persiapan untuk menentukan apakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putusan akhir[554], dapat disebutkan bahwa batasan ‐keberatan‖ itu mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Merupakan aspek dalam hukum acara pidana yang berisikan tangkisan atau pembelaan terhadap materi surat dakwaan atau dakwaan tidak menyinggung pokok perkara.
2. Ruang lingkup dan luas dari keberatan itu mencakup pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.
3. Pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah terdakwa atau penasihat hukumnya.
4. Keputusan diambil oleh hakim setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya[555].

[553] *Ibid*, hlm. 325.
[554] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana…, Op.Cit.,* hlm. 94-95.
[555] *Ibid*, hlm. 95.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

(1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

(2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

(3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.

(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

(5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan

tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.

b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.

(6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan lain, maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.

(7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia, masih menganut konsep bahwa perkara pidana adalah merupakan ―sengketa‖ antara individu dengan masyarakat. Sekalipun HIR telah digantikan oleh KUHAP tetapi konsep itu tetap belum berubah. Sengketa itu, berhubungan dengan salah satu, atau beberapa substansi dari pasal-pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman, dalam hukum pidana materil yang saat ini ditentukan dalam KUHP

dan di luar KUHP. Individu yang terlibat dalam sengketa itu yakni sebagai subjek hukum disebut ‑tersangka‖ atau ‑terdakwa‖. Status sebagai tersangka menurut hukum acara pidana ditetapkan penyidik setelah ditemukan ‑bukti perbuatan yang cukup‖ untuk menduga bahwa perbuatan individu itu, telah memenuhi unsur delik dari satu atau beberapa pasal dalam hukum pidana, sehingga ditetapkan oleh penyidik sebagai ‑tersangka‖. Sementara aparatur pemerintah yang berwenang mewakili publik dalam menyelesaikan perkara pidana ini, ialah penyidik dan penuntut umum serta kemudian oleh hakim. Dalam penyelesaian ‑sengketa‖ dianut suatu konsep, bahwa negara akan selalu berbuat bagi bagi warga negaranya termasuk para pencari keadilan dalam perkara pidana[556].

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka baik peradilan pidana maupun peradilan perdata merupakan sengketa, akan tetapi perbedaan subjek dan objek persengketaannya dalam perkara pidana terjadi sengketa dalam hukum publik sedangkan sengketa perdata terletak dalam hukum privat untuk menyelesaikan sengketa pidana jaksa penuntut umum harus menyusun dakwaan dengan mencantumkan syarat formil dan syarat materil begitu pula suatu gugatan harus mencantumkan syarat formil dan syarat materil, sehingga dengan demikian dakwaan dan gugatan mempunyai persyaratan yang sama, sehingga seharusnya putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara seperti yang berlaku pada peradilan pidana yang menetapkan eksepsi

[556] Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, P.T. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 15-16.

atas dakwaan kabur dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam perkara pidana dapat diketahui ketentuan putusan hakim atas eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya baik terhadap eksepsi kompetensi pengadilan maupun terhadap eksepsi dakwaan telah disusun dengan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga dakwaan tersebut *obscuur libel* surat dakwaan harus dibatalkan ketentuannya dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara.

D. Perbandingan Putusan Hakim Atas Eksepsi Pada Peradilan Negara Lain

Hukum Acara Perdata Belanda disebut juga dengan *Burgerlijke Recht Spleging* (Pengadilan Perdata) dan *Burgerlijke Rechtvordering* (gugatan perdata). Sebagian besar hukum acara perdata Belanda didasarkan pada Wetboek Van Burgerlijk Rechtsvordering/Rv (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata), selanjutnya disebut Rv dan Wet op de Rechterlijk Organisatis/ RO), yang keduanya dibentuk pada tahun 1838 dan telah berulangkali dilakukan perubahan (amandemen) terhadapnya sejak saat itu[557].

Rv sebagian besar diambil dari The Reench Code de Procedure Civile (hukum acara perdata Perancis) yang telah diberlakukan di Belanda dari tahun 1811. Pembuat Undang-undang menambahkan aturan-aturan untuk beberapa bagian dari proses beracara di luar Rv dan RO, serta tetap memasukan

[557] Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 107.

beberapa aturan beracara ini ke dalam peraturan perundang-undangan yang utama seperti *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disebut BWI.[558]

Di Belanda terdapat dua macam proses beracara secara perdata, yaitu prosedur pengajuan melalui gugatan dan prosedur pengajuan melalui permohonan. Prosedur pengajuan gugatan digunakan dalam pengadilan *contentius* (*Contentius Proceeding*), sedangkan permohonan digunakan baik dalam pengadilan *contentius* maupun pengadilan volunter (*voluntary proceeding*). Saat ini hampir setengahnya dari seluruh perkara/sengketa perdata di Belanda diajukan melalui permohonan[559].

Pengadilan *Contentius* adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan (memeriksa dan memutus) perkara diantara para pihak yang bersengketa (dinamakan gugatan), sedangkan pengadilan volunter adalah pengadilan yang berwenang menyelesaikan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Dalam pengadilan contensius, hakim memeriksa/mengadili dan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat, keputusannya berbentuk Putusan Hakim, sedangkan dalam pengadilan volunter, hakim hanya bertugas menetapkan hubungan hukum yang dimohonkan oleh pemohon saja tanpa mengadili, sehingga hakim hanya bertindak sebagai tenaga administrasi saja, putusannya berbentuk Penetapan Hakim[560].

Prosedur untuk memulai pengajuan surat gugatan ke pengadilan pada tingkat pertama, dapat digolongkan sebagai prosedur semi formal (dengan

[558] Efa Laela Fakhriah, *Ibid*, hlm. 107.
[559] Efa Laela Fakhriah, *Ibid*, hlm. 107.
[560] Efa Laela Fakhriah, *Ibid*, hlm. 108.

mengesampingkan aturan dalam pembuktian) yang sebagian besar dilakukan secara tertulis, meskipun kehadiran para pihak secara personal setelah pembelaan menjadi persoalan yang masih dibicarakan. Prosedur untuk memulai pengajuan surat gugatan dapat sedikit mengurangi waktu jika setelah meninggalkan pengadilan waktu untuk gugatan dikurangi[561].

E. Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Gugatan Kabur Pada Peradilan Perdata Berbasis Nilai Keadilan

1. Rekonstruksi Nilai

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan[562].

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasar pada Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur

[561] Efa Laela Fakhriah, *Ibid*, hlm. 108.
[562] Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia[563].

Kewajiban menghormati dan menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka, semakin memiliki urgensi prinsipal sejalan dengan perkembangan demokrasi yang menerapkan negara dijalankan berdasarkan atas prinsip hukum dan negara berpaham pada negara konstitusi yang mengamanatkan penghormatan tertinggi atas pembatasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penegakan atas kebebasan hakim sebagai prasyarat negara berdasarkan atas hukum dan konstitusionalisme[564].

Hakim itu adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan sebahagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemudian untuk kepentingan hukum dan keadilan dalam mengaplikasi tugas dan peran hakim, sehingga wajar apabila undang-undang mensyaratkan bahwa setiap hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini dimaksudkan agar hakim

[563] Herri Swantoro, *Op.Cit.*, hlm. 35-36.
[564] Ahmad Kamil, *Op.Cit.*, hlm. 3.

senantiasa menjaga kemandirian peradilan, karena peradilan itu sendiri merupakan salah satu karakteristik dari negara hukum (*rechtstaat*)[565].

Pemenuhan keseluruhan syarat seorang hakim tersebut, akan tampak dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pejabat negara (aparat pengadilan) yang berkompetensi melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman. Hakim selaku aparat pengadilan telah diikat oleh suatu norma hukum, dimana pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk maksud tersebut, setiap hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat[566]. Kewajiban hakim selaku aparat pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang nyata-nyata hukumnya tidak ada atau kurang jelas, merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena setiap hakim berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan tetap berpegang pada asas *ius cuvia novit*[567].

Ketentuan beracara perdata di Indonesia masih menggunakan ketentuan peninggalan kolonial Belanda yaitu HIR dan RBg, sehingga tidak sesuai lagi dengan falsafah bangsa yang mengedepankan masalah kemerdekaan dan kemandirian. Cita-cita untuk memiliki Hukum Acara Perdata yang didasarkan pada kebutuhan hukum nasional dan sesuai

[565] Margono, *Op.Cit.*, hlm. 66-67.
[566] *Ibid*, hlm. 67
[567] *Ibid*, hlm. 67-68.

dengan nilai-nilai luhur bangsa, sesungguhnya sudah ada sejak lama dan usaha ke arah realisasi cita-cita tersebut sudah berulangkali dilakukan melalui berbagai kegiatan, bahkan RUU Hukum Acara Perdata yang baru telah disusun Pemerintah untuk menggantikan Hukum Acara Perdata warisan kolonial tersebut[568].

Penyelesaian perkara yang cepat merupakan syarat mutlak bagi suatu peradilan yang baik [569] terwujudnya proses penyelesaian perkara yang cepat dalam sistem peradilan perdata ataupun pidana di Indonesia tidak hanya merupakan harapan para pencari keadilan (*justiciabel*), artinya tidak sekedar para pihak dalam perkara perdata serta terdakwa dalam perkara pidana saja yang berkepentingan terhadap berlangsungnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi seluruh masyarakat bahkan negara pun sesungguhnya memiliki kepentingan agar proses peradilan dilakukan dengan cepat [570] . Lebih dari itu, bahkan lembaga pengadilan serta hakim yang memimpin sidang pun memiliki kepentingan yang sama, yaitu menghendaki penyelesaian perkara secara cepat[571].

Penyelenggaraan peradilan ditujukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan para pencari keadilan dalam negara hukum berdasarkan kesadaran dan cita-cita hukum masyarakat. Cita-cita hukum masyarakat itu

[568] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Perdata, 2015, Jakarta, hlm. 68.
[569] Eman Suparman, *Verplichte Procureur Stelling Untuk Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2019, hlm. 1
[570] *Ibid*.
[571] *Ibid*, hlm. 2.

adalah antara lain biaya bagi para pencari keadilan seringan mungkin, penyelesaian perkara lebih sederhana dan cepat, serta diselesaikan sepenuhnya melalui saluran hukum [572] . Menurut **Nia Sari Sihotang** menyatakan adanya prosedur yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Sederhana juga dapat dimaksud sebagai suatu proses yang tidak rumit, jelas lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, kongkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan, maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan[573].

Penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusian keadilan terbukti menjumpai sangat banyak hambatan. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah karena peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi, serta metodologi yang ketat. Oleh karena itu, keadilan yang didistribusikan melalui lembaga lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional, maka tidak

[572] *Ibid*.

[573] Nia Sari Sihotang, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jom Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2 Oktober 2016, hlm. 3.

heran jika keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis[574].

Penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti banyak menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas. Ketidakpuasan masyarakat dilontarkan dalam bentuk pandangan sinis, mencemooh, dan menghujat terhadap kinerja pengadilan karena dianggap tidak memanusiakan pihak-pihak bersengketa, menjauhkan pihak-pihak bersengketa dari keadilan, tempat terjadinya perdagangan putusan hakim, dan lain-lain hujatan yang ditujukan kepada lembaga peradilan [575] atau menurut Pramono Sukolegowo bahwa dalam pelaksanaannya, lembaga peradilan justeru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak, hal ini disebabkan adanya berbagai masalah kompleks yang membelit dunia peradilan di Indonesia antara lain proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkarea, sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah, serta terjadi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan[576].

Kenyataannya, masyarakat/para pencari keadilan sering mengeluhkan berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan proses

[574] Eman Suparman, *Pendistribusian Keadilan Oleh Pengadilan Serta Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume I Nomor 3 Nopember 2012, hlm. 400.
[575] *Ibid*.
[576] Pramono Sukolegowo, *Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm. 29.

beracara di pengadilan (khususnya proses beracara perdata) yang cenderung lama dan berbelit-belit, sehingga sangat merugikan para pencari keadilan, baik ditinjau dari sisi waktu, biaya, pelayanan pihak pengadilan, maupun dari sisi putusan pengadilan itu sendiri. Berkaitan dengan putusan pengadilan, berdasarkan kenyataan objektif, bahwa putusan pengadilan tidak mampu memberi penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. Disamping itu putusan pengadilan juga tidak mampu memberi kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara dan keadaan kalah menang dalam berperkara tidak membawa kedamaian, tetapi menimbulkan bibit duka dan permusuhan serta kebencian. Putusan pengadilan sering tidak memberikan kepastian hukum, pada hal secara filosofis dan doktrin, dalam kehidupan Negara Hukum dan masyarakat demokrasi mesti diberi kepastian penegakan hukum, karena hal itu merupakan jaminan atas penegakan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) dan *equal before the law* sama kedudukan dan penerapan hukum yang dilakukan semua orang[577].

Tidaklah mengherankan sampai hari ini rasa puas masyarakat akan kepastian hukum, termasuk juga rasa keadilan, masih jauh panggang dari apinya. Itu karena peradilan di Indonesia setelah mendapatkan kemerdekaan strukturalnya, masih saja terdominasi oleh pengaruh positivisme, sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan oleh badan peradilan masih kering dalam menangkap intensi etis yang personal dan

[577] Eman Suparman*, Verplichte…*, *Op.Cit.,* hlm. 70.

kesadaran kolektif yang ada dalam masyarakat. Badan peradilan hanya bisa mempertanggungjawabkan secara positif dalam arti putusan itu sudah memenuhi metode ilmiah dalam pengambilan putusan. Padahal bekal metode yang positivisme tersebut ternyata bukanlah bekal memadai dalam menjawab dahaga masyarakat akan keadilan, karena apa yang tercantum dalam hukum (undang-undang) itu ditafsirkan tanpa merefleksikan realitas yang ada dalam diri seseorang dan masyarakat[578].

Friedman menekankan pentingnya budaya hukum, karena berbicara tentang budaya hukum berarti berbicara tentang berfungsinya hukum. Artinya, hukum tidak saja berhenti pada ada tidaknya struktur dan substansi tetapi apakah substansi dan struktur tersebut diakui dan digunakan sebagai norma untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan perselisihan antara warga masyarakat (*dispute settlement*). Budaya hukum pada dasarnya ditentukan pula budaya masyarakat setempat, sehingga suatu kelompok masyarakat dengan budaya tertentu melahirkan budaya hukum tersendiri, bahkan melahirkan suatu sistem hukum. Oleh karena itu, dalam satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya terdapat beberapa budaya hukum bahkan sistem hukum. Keadaan ini menggambarkan apa yang disebut dengan pluralisme satu sistem hukum tersendiri, disebabkan oleh pluralisme budaya, politik dan sosial ekonomi[579].

[578] E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 174.
[579] *Ibid*, hlm. 37.

Pentingnya budaya yang mencerminkan budaya masyarakat setempat menggambarkan pula bahwa hukum sebagai kaidah haruslah mengakar atau menyatu bahkan berasal dari nilai (*values*) yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Bahkan hukum seharusnya cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*). Selanjutnya dikatakan bahwa nilai-nilai tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu[580].

Pentingnya nilai (*values*) sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sejalan pula dengan konsep hukum yang dikemukakan Carls Von Savigny bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Kebiasaan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diadopsi ke dalam hukum positif yang bersifat modern dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting yaitu kejujuran, sifat hemat, rasional dalam pikiran dan mengambil putusan, kemampuan untuk menangguhkan konsumsi (adanya perspektif) masa depan[581].

Beberapa nilai budaya hukum Pancasila yang penting diperkuat adalah semangat musyawarah untuk mufakat yang dikemas dalam bahasa modern penyelesaian sengketa secara damai, menghargai hak-hak dan kewajiban serta pentingnya contoh pemimpin terhadap ketaatan dan

[580] *Ibid*.
[581] *Ibid*, hlm. 37-38.

kepatuhan hukum. Budaya masyarakat Indonesia yang bersifat konkret dan paternialisme memberikan porsi yang kuat bagi contoh dan keteladanan sebagai bentuk pendidikan hukum yang efektif. Masyarakat melihat contoh bukan pada apa yang terdapat dalam teks[582].

Pancasila sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataa, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila pada hakekatnya juga memiliki arti sebagai perwujudan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sepanjang sejarah, dan merupakan penggabungan antara unsur-unsur budaya luar yang sesuai dengan budaya Indonesia sehingga keseluruhannya terpadu menjadi sebuah ideologi yang bernama Pancasila[583].

Kalau selama ini kultur liberal masih sangat mendominasi jalannya sistem peradilan (*justice system*), maka untuk menunjang hukum progresif, kultur tersebut perlu diubah. Pengubahan tersebut dilakukan dengan menciptakan kultur baru penegakan hukum yang lebih kolektif sifatnya, berbeda dengan prinsip check and balances. Kolektif yang dimaksud bukan menjadi sarang bagi komponen penegak hukum untuk membuat kompromi-kompromi, tetapi semata-mata untuk penegakan hukum agar

[582] *Ibid*, hlm. 38.
[583] Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 273.

berpihak kepada satu kepentingan besar yaitu mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justise in the people*)[584].

2. Rekonstruksi Norma Hukum

Rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan adalah sebagai berikut :

No	Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
1	Ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan sebagai berikut : eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara	- Kelemahan Substansi Hukum (*legal substance*) Ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini adalah karena ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Berdasarkan ketentuan tersebut putusan hakim atas eksepsi selain eksepsi terhadap kompetensi	Semua eksepsi yang diajukan Tergugat harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara kecuali eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan dan eksepsi gugatan kabur.

[584] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresip*…, *Op.Cit*., hlm. 35.

		pengadilan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Substansi Pasal 136 HIR tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perasaan hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada prinsipnya hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata dalam menjatuhkan putusannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dan penentuan hukum oleh hakim atas suatu peristiwa hukum yang dihadapinya dengan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan hal yang baik untuk menjamin kepastian hukum, akan tetapi selain	

		kepastian hukum yang diperhatikan oleh hakim, unsur keadilan dan kemanfaatan juga merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara perdata yang dihadapinya. - Kelemahan Kultur Hukum (*Legal Culture*) Kelemahan kultur hukum putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini adalah bahwa legal positivisme masih menjadi faham mainstream di kalangan hakim dalam menangani perkara. Paradigma ini melahirkan cara berpikir yang bercorak positivistik di kalangan hakim dalam menangani perkara. Pada umumnya hakim masih mengikuti cara berpikir legal positivisme dan jarang sekali ditemukan hakim yang berani menerobos (*rule breaking*) mengikuti cara berpikir non positivistik	

		yaitu menjadikan undang-undang sebagai acuan dan sumber satu-satunya yang dianggap absah dalam menangani perkara. Hakim kurang untuk melakukan penemuan hukum dan cenderung memposisikan sebagai corong undang-undang yang menyuarakan undang-undang. Aturan hukum ditempatkan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan kurang memperhatikan dimensi-dimensi lain di luar aturan, Senioritas dan kedudukan Ketua Majelis Hakim bersifat menentukan dalam mengambil putusan, Majelis Hakim tidak sejak awal membaca dan mempelajari perkara secara bersama-sama, karena ketua Majelis hanya memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota untuk mempelajari berkas perkara, Perasaan ewuh pakewuh terhadap atasan menjadikan hakim tidak berani mengambil sikap	

		sendiri dalam mengambil putusan, semuanya diserahkan kepada atasan, sikap ini merupakan bagian dari budaya paternalistik yang ternyata masih menjadi bagian kehidupan beberapa hakim, Beban perkara yang harus diperiksa dan diadili banyak, maka yang meneliti terhadap berkas perkara hanya ketua majelis hakim perkara yang bersangkutan sehingga anggota yang lain hanya menyetujuinya. - Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*), Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*) putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata yang berlaku sekarang ini adalah Kelemahan hakim sebagai penegak hukum dalam Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung, yang meliputi kelemahan tahap penerimaan calon hakim, kekuasaan tahap setelah menjadi hakim, kelemahan tahap selama	

		berkarier menjadi hakim, Kelemahan pengawasan hakim, Kelemahan struktur di luar pengadilan.	

3. Temuan Gagasan Baru Peradilan Perdata Yang Berkeadilan dan Bermartabat

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa penyelesaian persengketaan keperdataan diutamakan melalui musyawarah perdamaian akan tetapi apabila musyawarah perdamaian tidak tercapai, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan hak berupa gugatan melalui pengadilan yang mempunyai kewenangan baik absolut maupun relatif/nisbi.

Bahwasannya putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berbasis nilai keadilan, hal itu disebabkan karena seharusnya proses peradilan perdata dilaksanakan secara cepat, tepat dan murah atau peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Proses peradilan perdata seharusnya bersifat sederhana, tidak rumit, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif, acaranya yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik, sebaliknya terlalu banyak formalitas yang diwajibkan merupakan hambatan bagi jalannya peradilan cepat dan tepat sehingga putusan pengadilan dapat diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Murah atau biaya ringan adalah biaya yang serendah mungkin

sehingga dapat terpikul rakyat tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini ditentukan dalam ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Oleh karena ketentuan putusan hakim atas eksepsi selain eksepsi kompetensi pengadilan ketentuannya sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, maka karena eksepsi gugatan kabur tidak termasuk kualifikasi eksepsi kompetensi pengadilan, maka putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim setelah dilakukan jawaban, repliek, dupliek, pembuktian baik pembuktian dari Penggugat, maupun pembuktian dari tergugat, kesimpulan baik dari Penggugat maupun dari tergugat. Oleh karena penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka putusannya harus mengikuti formalitas-formalitas dalam proses jawab menjawab, para pihak harus mengajukan pembuktian untuk pokok perkara, akan tetapi peristiwa hukum yang disampaikan dalam jawab menjawab tidak dikonstatir, alat bukti yang diajukan para pihak tidak dipertimbangkan untuk memutuskan pokok perkara, karena yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim adalah eksepsi terhadap gugatan kabur dengan putusan gugatan dinyatakan

tidak dapat diterima, sehingga pembuktian dari para pihak menjadi tidak ada manfaatnya, para pihak harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk pemeriksaan terhadap pokok perkara, waktunya menjadi lambat, berlarut-larut, dan berbelit-belit sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada gilirannya belum mewujudkan nilai keadilan dalam proses peradilan perdata.

Menurut Teguh Prasetyo sistem hukum nasional Indonesia yang dibentuk dan diberlakukan seyogyanya adalah sistem hukum sendiri yaitu suatu sistem yang dibangun dari proses penemuan, seperti yang dilakukan melalui penelitian ini pengembangan, adaptasi bahkan kompromi dari berbagai sistem, dalam hal ini sistem hukum Indonesia, setidak-tidaknya harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri. Fraseologi bumi Indonesia yang dipergunakan dalam teori keadilan bermartabat dimaksud sejatinya merupakan analogi dari pikiran orang Indonesia sendiri[585].

Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dan kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Itu sebabnya keadilan bermartabat sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila[586]. Secara garis besar, sistem dalam teori keadilan bermartabat merupakan satu dari postulat penting teori dimaksud. Sistem yang diacu dalam teori ini menunjuk kepada wujudnya yang abstrak dan konseptual dan oleh sebab

[585] *Ibid*, hlm. 377.
[586] *Ibid*.

itu disebut dengan deskriptif. Deskripsi mengenai sistem itu susunan dasarnya dimulai dari Pancasila dan selanjutnya diikuti dengan norma fundamental berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengamandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli[587].

Bahwasannya sehubungan dengan ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang tidak dapat memberikan keadilan pada proses peradilan perdata, maka Satjipto Rahardjo mengajukan suatu gagasan untuk memilih cara yang menolak keadaan status quo, melainkan secara progresif melakukan pembebasan dan hal tersebut dirumuskan ke dalam gagasan dan tipe hukum progresif melalui gagasan tersebut ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna (significan), bermakna berarti pengubahan secara lebih cepat, melakukan pembebasan, terobosan dan lain-lain.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukan ke dalam skema hukum[588].

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk

[587] *Ibid*.
[588] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif…*, *Op.Cit*., hlm. 32.

mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan tersebut bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat ‑hukum yang selalu dalam proses‖ (*law a proces, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia[589].

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, kiranya agar peradilan perdata dapat mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan agar memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, maka harus dilakukan perubahan terhadap ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang semula dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadadap pokok perkara dirubah menjadi eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga dengan ketentuan tersebut dapat mewujudkan peradilan perdata yang berkeadilan bermartabat.

[589] Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 32-33.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya kiranya dapat dikemukakan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwasannya putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata belum berbasis nilai keadilan, hal itu disebabkan karena seharusnya proses peradilan perdata dilaksanakan secara cepat, tepat dan murah atau peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Proses peradilan perdata seharusnya bersifat sederhana, tidak rumit, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif, acaranya yang jelas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik, sebaliknya terlalu banyak formalitas yang diwajibkan merupakan hambatan bagi jalannya peradilan cepat dan tepat sehingga putusan pengadilan dapat diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Murah atau biaya ringan adalah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul rakyat tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

   Ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini ditentukan dalam ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh

orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Oleh karena ketentuan putusan hakim atas eksepsi selain eksepsi kompetensi pengadilan ketentuannya sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, maka karena eksepsi gugatan kabur tidak termasuk kualifikasi eksepsi kompetensi pengadilan, maka putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim setelah dilakukan jawaban, repliek, dupliek, pembuktian baik pembuktian dari Penggugat, maupun pembuktian dari tergugat, kesimpulan baik dari Penggugat maupun dari tergugat. Oleh karena penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka putusannya harus mengikuti formalitas-formalitas dalam proses jawab menjawab, para pihak harus mengajukan pembuktian untuk pokok perkara, akan tetapi peristiwa hukum yang disampaikan dalam jawab menjawab tidak dikonstatir, alat bukti yang diajukan para pihak tidak dipertimbangkan untuk memutuskan pokok perkara, karena yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim adalah eksepsi terhadap gugatan kabur dengan putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pembuktian dari para pihak menjadi tidak ada manfaatnya, para pihak harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk pemeriksaan terhadap pokok perkara, waktunya menjadi lambat, berlarut-

larut, dan berbelit-belit sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada gilirannya belum mewujudkan nilai keadilan dalam proses peradilan perdata.

2. Bahwasannya kelemahan-kelemahan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini berdasarkan sistem hukum yaitu sebagai berikut :

   a. Kelemahan Substansi Hukum (*legal substance*)

      Ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini adalah karena ketentuan Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Berdasarkan ketentuan tersebut putusan hakim atas eksepsi selain eksepsi terhadap kompetensi pengadilan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Substansi Pasal 136 HIR tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perasaan hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada prinsipnya hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata dalam menjatuhkan putusannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dan penentuan hukum oleh hakim

atas suatu peristiwa hukum yang dihadapinya dengan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan hal yang baik untuk menjamin kepastian hukum, akan tetapi selain kepastian hukum yang diperhatikan oleh hakim, unsur keadilan dan kemanfaatan juga merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara perdata yang dihadapinya.

b. Kelemahan Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kelemahan kultur hukum putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur yang berlaku sekarang ini adalah sebagai berikut :

1. bahwa legal positivisme masih menjadi faham mainstream di kalangan hakim dalam menangani perkara. Paradigma ini melahirkan cara berpikir yang bercorak positivistik di kalangan hakim dalam menangani perkara. Pada umumnya hakim masih mengikuti cara berpikir legal positivisme dan jarang sekali ditemukan hakim yang berani menerobos (*rule breaking*) mengikuti cara berpikir non positivistik yaitu menjadikan undang-undang sebagai acuan dan sumber satu-satunya yang dianggap absah dalam menangani perkara. Hakim kurang untuk melakukan penemuan hukum dan cenderung memposisikan sebagai corong undang-undang yang menyuarakan undang-undang. Aturan hukum ditempatkan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan kurang memperhatikan dimensi-dimensi lain di luar aturan.

2. Senioritas dan kedudukan Ketua Majelis Hakim bersifat menentukan dalam mengambil putusan.
3. Majelis Hakim tidak sejak awal membaca dan mempelajari perkara secara bersama-sama, karena ketua Majelis hanya memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota untuk mempelajari berkas perkara.
4. Perasaan ewuh pakewuh terhadap atasan menjadikan hakim tidak berani mengambil sikap sendiri dalam mengambil putusan, semuanya diserahkan kepada atasan, sikap ini merupakan bagian dari budaya paternalistik yang ternyata masih menjadi bagian kehidupan beberapa hakim.
5. Beban perkara yang harus diperiksa dan diadili banyak, maka yang meneliti terhadap berkas perkara hanya ketua majelis hakim perkara yang bersangkutan sehingga anggota yang lain hanya menyetujuinya.

c. Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*),

Kelemahan struktur hukum (*legal structure*) putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata yang berlaku sekarang ini adalah sebagai berikut :

1) Kelemahan hakim sebagai penegak hukum dalam Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung, yang meliputi kelemahan tahap penerimaan calon hakim, kekuasaan tahap setelah menjadi hakim, kelemahan tahap selama berkarier menjadi hakim.

2) Kelemahan pengawasan hakim.

3) Kelemahan struktur di luar pengadilan.

3. Rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi ketentuan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur berbasis nilai keadilan adalah eksepsi atas gugatan kabur harus dipertimbangkan dan diputuskan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara.

B. Saran-saran

1. Harusnya pembentuk Undang-undang dalam hal ini Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pembaharuan terhadap ketentuan pasal 136 H.I.R.
2. Diharapkan kepada masyarakat yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain dan akan mengajukan gugatan agar dalam menyusun gugatannya dilakukan secara cermat dan teliti sehingga gugatannya tidak kabur, karena apabila gugatan kabur dapat dieksepsi oleh pihak tergugat.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Impilikasi Teoritis

   a. Bahwasannya secara teoritis hasil dari penelitian ini yang merupakan penemuan baru mengenai rekonstruksi putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan dapat menjadi bahan referensi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang berupa perkuliahan, diskusi dan seminar yang dilaksanakan pada forum-forum akademik.

b. Bahwasannya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai putusan hakim pada umumnya, khususnya putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan.

2. Implikasi Praktis

a. Bahwasannya diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran bagi para pemangku kepentingan terutama pembentuk undang-undang agar dalam melakukan pembaharuan terhadap hukum acara perdata peninggalan kolonial Belanda dalam hal ketentuan penjatuhan putusan hakim atas eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan sebagai hukum acara perdata produk hukum nasional.

b. Bahwasannya hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber dalam melakukan penemuan hukum dalam melaksanakan tugas kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perdata dapat menjatuhkan putusan eksepsi gugatan kabur pada peradilan perdata berbasis nilai keadilan.

c. Bahwasannya hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pemikiran agar dalam meneirma, memeriksa dan mengadili perkara perdata dapat menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Bahwasannya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara perdata dalam hal ini Penggugat, Tergugat merekam akan mendapatkan putusan hakim yang tepat sesuai dengan seharusnya putusan hakim tersebut dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al Qur‘an Nurkarim, Terjemahan Indonesia Inggris, Penerbit Al-Qur‘an Qomari, Solo, 2008.

Al-Hadits, Bukhori Muslim, Penerbit Pustaka Ilmu, B

A. Mukhtie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer, Setara Press (Kelompok Penerbit Instrans)*, Malang, 2016.

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubahan Hukum*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2018.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2013.

_____, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan,* Kencana Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2014.

_____, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta 2015.

_____, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Divisi Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017

_____, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2017.

Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, C.V. Yrama Widya, Bandung, 2006.

Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktek,* Intrans Publishing, Malang, 2019.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Cetakan ke-4*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2014.

Ahmad Gamam Ghamarat, *Atsar sur’ati al-fashli fi al-Khusumah fi tahqiqi al-amni al-qodho`i fi al-syari’ati al-islamiyyah,* Majallah Buhuts wa al-dirasah, Vol. 17, Nomor 11, 2014.

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim,* Prenada Media Group Divisi Kencana, Malang, 2012.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Ahmad Sanusi, *Rangkaian Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi IV, Tarsito, Bandung, 1991.

Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1996.

Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Divisi Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Andi Sofyan dan H. Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Perdana Media Group Divisi Kencana, Jakarta. 2007.

Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris, Pondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2015.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2015.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2020, Cetakan Pertama, Jakarta, 2020.

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Pranada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2015.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

_____, *Penegakan Hukum di Indonesia,* P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bangunan Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Dedi Mulyadi, *Internalisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2017.

E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2017.

E. Utrecht/Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, P.T. Ihtiar Baru, Jakarta, 1989

Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Banten, 2015.

Efa Laela Fakhriah, *Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia*, Cetakan ke-2, C.V. Keni Media, Bandung, 2016.

_____, *Kapitia Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2019.

Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, *Hukum Acara Perdata, Pengertian Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jaminan, dan Pembaharuan Acara Perdata*, P.T. Refika Aditama, Jakarta, 2020.

Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.

_____, *Hukum Perselisihan (Conflictenrecht) Pertautan Sistem Hukum dan Konflik Kompetensi Dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi*, Prenamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2018.

Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep dan Praktik di Peradilan Agama,* Setara Press, Malang, 2014.

Gunarto, *Rekonstruksi Konsep Hak Kebebasan Berserikat Bagi Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan*, Semarang,

H. A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Prenamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2019.

H. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015.

H. M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Hariyono, *Ideologi Pancasila Rob Progresif Nasionalisme Indonesia*, Instrans Publishing, Malang, 2014.

Herowati Poesoko, *Dinamika Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2019.

Herri Swantoro, Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali, Prenadamedia Group, Divisi Kencana, Depok, 2017.

Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV Keni Media, Bandung, 2019.

I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum Dimensitematis dan Historis, Setara Press, Malang, 2013.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.

I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Sistematika Filsafat Hukum, Perspektif Persoalan-persoalan Pokok,* Setara Press, Malang, 2019.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2017.

Ibn Qutaibah, *al–Ma'àrif, Dar al–Ma'arif al–Islamiyah*, Mesir, 1934.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, P.T. Prenhalindo, Jakarta, 2001.

J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap, Diterjemahkan oleh Moch. O. Masduki menjadi Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, An English-Indonesian Dictionary, Gramedia, Cetakan ke-XXVI, Jakarta, 2005.

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, Divisi Kencana, Depok, 2018.

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya,* CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014.

K.N. Sofyan Hasan, *Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum Islam*, Setara Press, Malang, 2018.

K.N. Sofyan Hasan, *Sebuah Pengantar Komprehensif Tentang Ilmu Hukum Islam*, Setara Press, Malang, 2018.

Krisna Harahap. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, P.T. Grafitri Budi Utami, Bandung, 1986.

L. J. , *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Rechts Diterjemahkan Oleh Oetarid Sadino Menjadi Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah Di Indonesia*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2013.

M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Divisi Kencana, Jakarta, 2015.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Mahfud Fahrazi dan A. Hasyim Nawawie, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2018.

Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,* P.T. Sinar Grafika, 2019.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, P.T. Alumni, Bandung, 2009.

Moh Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, 2009.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Muhammad Syukri, Albani Nasution, Zul Fahmi Idris, Iwan dan Ahmad Faury, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Prenadamedia Group, Divisi Kencana, Jakarta, 2017.

Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

_____, *Konsep Hukum Perdata*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Pandu Dewanto, *Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019.

Perum Penertbitan dan Percetakan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta, 1995.

Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial; Observasi Kritis Terhadap Para Filsuf Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenana Media Group, Divisi Kencana, Jakarta, 2017.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2019.

R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, P.T. Intermasa, Cetakan XXIV, Jakarta, 2001.

R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

R. Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Pratek),* P.T. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1982.

Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

S. Nasution, *Metode Reasearch*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Salim H.S., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis,* P.T. Rajawali Press, 2016.

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktis,* P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.

_____, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

_____, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta, 2014.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, P.T. Alumni Bandung, 2008.

Shidarta, *Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Pengadilan Progresif Pada Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1997.

Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Bandung, 1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986.

Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Teknik Menangani Perkara Di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

_____, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Kedua, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012.

Sri Warjiyanti, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2018.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Utama Pustaka, Yogyakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bekerjasama Dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Bandung, 2013.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.

Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, P.T. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.

Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Intrans Publishing, Malang, 2017.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Pembaharuan Hukum*, Intrans Publishing, Malang, 2017.

Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Wahbah Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islamy, juz 1, Cet. 1*, Dar Fikr, Damskus, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1982.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000

Zahir Rusyad, *Materi PKPA Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat,* Setara Press Kelompok,Intrans Publishing, Malang, 2019.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Persfektif Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2016.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia,* P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia.

Het Herziene Indonesische Reglement (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui Staatsblaad Tahun 1944 Nomor : 44).

Undang-undang Republik Indonsia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal dan Majalah

Eman Suparman, *Verplichte Procureurstelling Untuk Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, Jurnal Dinamika Hukum *Vol*. 8 *No*. *1* Januari 2008.

_____, *Kerjasama Bidang Peradilan Antar Negara Dalam Rangka Upaya Penyeragaman Pranata Hukum Antar Bangsa*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012.

_____, *Pendistribusian Keadilan Oleh Pengadilan Serta Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume I Nomor 3 Nopember 2012.

Gunarto, *Rekonstruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat Bagi Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, (2010), http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1345, diakses Tanggal 10 Nopember 2022 Pukul 14:10 WIB.

Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri dan Linda Rahmainy, *Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata, ADHAPER, Vol. 4 No. 2, Juli – Desember 2018.

Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industri Berbasis Nilai Cepat, Adil Dan Murah*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 1 (2016), Https://jurnal.unissula.ac.id), diakses Tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13:30 WIB.

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2 Mei 2008 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id. Diunggah Pada Hari Rabu, 11 Maret 2020 Pukul 23.50.

Mosgan Situmorang, *Laporan Penelitian Hukum Tentang Penyederhanaan Proses Peradilan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum*, Badan penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM, Indonesia,

https://adoc.pub), diakses Tanggal 04 April 2022 Pukul 10:30 WIB.

Ni Putu Riyanti, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jurnal Yustitia Vol. 13 No. 1 (2019), https://www.ojs.unr.ac.id), diakses Tanggal 20 Juli 2022 Pukul 14:00 WIB.

Nia Sari Sihotang, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Online Mahasiswa FH UNRI Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

Siti Muflichah, Trusto Subekti dan Haedah Faradz, *Eksepsi Plurium Litis Consotium (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt./2002/PT.Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 41/Pdt.G/2000/PN.Pwt)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2 (2008), http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id), diakses Tanggal 07 April 2022 Pukul 13:00 WIB.

Ning Adiasih, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan*, Jurnal Hukum Acara Adhaper Vol. 4 No. 1. Januari – Juni, 2004.

Pramono Sukolegowo, *Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008.

Pandu Dewanto, *Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019.

Syahrul Sajidin, *Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang Pada Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 4. No. 2., Juli Desember 2018.

Yosi Budi Santoso dan Umar Ma'rup, *Kebijakan Pembuktian dan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1868.

Website :

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5_oapg-X1AhURSWwGHS6-CqgQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2F9ja2t%2Fdownload&usg=AOvVaw3h9SUpOozMbCFIc8oZFuyn. Diakses pada tanggal 02-02-2022 Pukul 11.58

https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html